



Katalog: 4103008
ISSN 2086-1028

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2025

Volume 23, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK



<https://www.bps.go.id>



Katalog: 4103008
ISSN 2086-1028

STATISTIK PEMUDA INDONESIA

2025

Volume 23, 2025

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2025

Volume 23, 2025

Katalog : 4103008
ISSN : 2086-1028
Nomor Publikasi : 04200.25028

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xlvii+329 halaman

Penyusun Naskah : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Penyunting : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Pembuat Kover : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
(modifikasi dari www.canva.com)
Penerbit : ©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi : www.freepik.com, www.storyset.com, dan www.canva.com

” Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

“

TIM PENYUSUN

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2025

Volume 23, 2025

Pengarah:

Ateng Hartono

Penanggung Jawab:

Ahmad Avenzora

Penyunting:

Budi Santoso

Penulis Naskah:

Andry Poltak Lasriado Girsang

Nindya Riana Sari

Freshy Windy Rosmala Dewi

Kurniawan Tri Yulianto

Pengolah Data

Dwi Trisnani

Elfrida Zoraya

Ari Purbowati

Putri Sakinah

Failasofa Amalia

Kurniawan Tri Yulianto

Penata Letak:

Kurniawan Tri Yulianto



<https://www.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Data dan informasi yang akurat dan aktual dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia. Salah satu agenda strategis pembangunan kepemudaan yakni menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Terlebih lagi adanya peluang bonus demografi menuntut pemuda untuk cerdas dalam mengambil peran dan peluang.

Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2025 berisikan data dan informasi kepemudaan dalam berbagai aspek meliputi: demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, kesehatan reproduksi, dan program kepemudaan. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020, dan dilengkapi data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait.

Publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan dan strategi pembangunan di bidang kepemudaan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang kepemudaan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan kepemudaan di Indonesia.



Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti



<https://www.bps.go.id>



RINGKASAN

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16–30 tahun. Sejarah menunjukkan bahwa pemuda selalu menjadi kekuatan utama dalam revolusi dan pembangunan bangsa Indonesia, baik fisik maupun nonfisik. Mereka berperan dalam pendidikan, teknologi, dan inovasi, serta membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemuda juga memiliki posisi strategis di era globalisasi, dengan tuntutan untuk lebih kreatif, inovatif, dan produktif guna memaksimalkan peluang bonus demografi.

Namun, pemuda Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti pendidikan yang belum merata, angka pengangguran, masalah kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif, dengan pengaruh negatif lebih banyak menyerang pemuda. Oleh karena itu, diperlukan keteladanan dan kebijaksanaan seluruh elemen bangsa, termasuk pemuda, untuk menghadapi tantangan ini dengan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 66,83 juta jiwa pemuda atau 23,50 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Komposisi pemuda laki-laki dan perempuan memiliki selisih yang cukup kecil, hanya sebesar 2,77 persen poin, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,70. Rasio jenis kelamin tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang pemuda perempuan terdapat sekitar 106 orang pemuda laki-laki.

Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari separuh (53,80 persen) pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jika ditinjau dari status perkawinan, sekitar 71,04 persen pemuda belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 27,92 persen, dan sisanya sekitar 1,04 persen adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati. Selanjutnya, 6,91 persen pemuda telah menjadi kepala rumah tangga, sementara itu 76,75 persen pemuda tinggal bersama keluarga.



Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa semakin tua umur pemuda semakin kecil persentase pemuda tinggal bersama keluarga.

Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Pada tahun 2025, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. Sekitar 28,44 persen pemuda tercatat sedang bersekolah, dengan angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok umur 16–18 tahun sebesar 77,86 persen, diikuti kelompok umur 19–23 tahun sebesar 29,13 persen, dan kelompok umur 24–30 tahun sebesar 4,96 persen. Secara umum, APS pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan dan terdapat keterkaitan status ekonomi rumah tangga terhadap APS pemuda.

Pada tahun 2025, tingkat pendidikan pemuda Indonesia didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat (43,75 persen). Hanya 12,04 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga pendidikan tinggi dan masih terdapat 2,30 persen pemuda yang tidak/belum pernah bersekolah/tidak tamat SD sederajat. Distribusi status ekonomi rumah tangga 20 persen teratas memiliki persentase pemuda yang menamatkan pendidikan hingga SMA/SMK sederajat ke atas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Selanjutnya, tingkat pendidikan pemuda juga tercermin melalui rata-rata lama sekolah, yaitu sebesar 11,21 tahun atau setara dengan kelas XI pada jenjang SMA/SMK sederajat. Rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan (11,66 tahun berbanding 10,49 tahun). Rata-rata lama sekolah pemuda penyandang disabilitas masih tertinggal jauh dibandingkan pemuda bukan penyandang disabilitas. Secara rata-rata pemuda penyandang disabilitas dapat menamatkan pendidikan hanya sampai kelas VI SD sederajat, sementara pemuda bukan penyandang disabilitas dapat menamatkan sampai kelas XI pada jenjang SMA/SMK sederajat. Data Susenas Maret 2025 juga menunjukkan pola bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga pemuda, semakin tinggi pula capaian rata-rata lama sekolahnya.

Terdapat 97,41 persen pemuda menggunakan telepon seluler selama tiga bulan terakhir. Selain itu, terdapat pula sekitar 25,27 persen pemuda yang menggunakan komputer (baik dalam bentuk *PC/desktop*, *laptop/note book*,



maupun tablet) dan 96,69 persen pemuda menggunakan internet selama tiga bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa (perkotaan/perdesaan), akses terhadap teknologi pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan akses teknologi tersebut juga terlihat dari status disabilitas pemuda, yaitu pemuda penyandang disabilitas cenderung memiliki akses terhadap telepon seluler, komputer, dan internet yang lebih kecil dibandingkan bukan penyandang disabilitas.

Pada tahun 2025, jika dilihat berdasarkan status kesehatan terdapat sekitar 19,00 persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dengan angka kesakitan sebesar 7,35 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kedua indikator kesehatan ini mengalami kenaikan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, pemuda laki-laki cenderung mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan yang lebih rendah dibandingkan pemuda perempuan. Jika dilihat menurut klasifikasi desa, pemuda di wilayah perdesaan cenderung memiliki keluhan kesehatan dan angka kesakitan yang lebih tinggi dibandingkan pemuda di perkotaan.

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan pada tubuhnya, secara alamiah akan mencari cara agar keluhan kesehatan tersebut hilang. Hasil Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa di antara pemuda yang mengalami keluhan kesehatan, sekitar 65,73 persen di antaranya hanya melakukan pengobatan sendiri, 13,51 persen hanya rawat jalan, 16,47 persen melakukan pengobatan sendiri sekaligus rawat jalan, dan 4,28 persen lainnya tidak melakukan pengobatan. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, pemuda yang tinggal di perkotaan lebih cenderung mengobati penyakitnya dengan mengobati sendiri dan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan dibandingkan pemuda di perdesaan.

Apabila dilihat dari alasan utama tidak melakukan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan, 67,26 persen pemuda mengaku tidak melakukan rawat jalan karena lebih memilih mengobati sendiri. Sementara itu 30,76 persen di antaranya mengaku karena merasa tidak perlu melakukan rawat jalan, dan sekitar 1,98 persen pemuda memiliki alasan lainnya seperti tidak memiliki biaya



berobat, tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, dsb. Berdasarkan lokasi rawat jalan pemuda, praktik dokter/bidan/perawat dan Puskesmas/Pustu/Pusling masih mendominasi (sekitar 36,61 persen dan 31,91 persen).

Pada tahun 2025, terdapat sekitar 4,27 persen pemuda yang rawat inap. Menurut jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang melakukan rawat inap selama setahun terakhir lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan kelompok umur, semakin tinggi kelompok umur pemuda, kecenderungan pemuda melakukan rawat inap semakin tinggi. Jika dilihat lebih dalam, rata-rata lama rawat inap pemuda pada tahun 2025 sekitar 3,90 hari. Selain itu, sekitar 11,59 persen pemuda yang menghabiskan waktu untuk rawat inap lebih dari enam hari dalam setahun terakhir.

Data Susenas Maret 2025 menunjukkan sekitar 81,14 persen pemuda yang memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar di antaranya memiliki BPJS PBI (62,77 persen) yang iurannya ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin serta tidak mampu. Jika melihat pemanfaatannya, jaminan kesehatan lebih banyak digunakan untuk rawat inap dibandingkan rawat jalan. Sementara itu, masih ada pemuda yang tidak menggunakan jaminan kesehatan yaitu sekitar 44,50 persen untuk rawat jalan dan 14,13 persen untuk rawat inap.

Sekitar 25,86 persen pemuda di Indonesia memiliki kebiasaan merokok, dengan rincian 24,28 persen merokok tembakau saja, 0,78 persen merokok elektrik saja, dan 0,79 persen merokok tembakau dan elektrik. Pemuda yang memiliki kebiasaan merokok mayoritas merokok setiap hari (23,48 persen), baik yang merokok tembakau saja, merokok elektrik saja, maupun keduanya. Jika ditinjau dari jenis kelamin, pemuda laki-laki memiliki kecenderungan merokok yang lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan. Hal ini juga berlaku pada pemuda di wilayah perdesaan memiliki kecenderungan merokok yang lebih tinggi dibandingkan pemuda di wilayah perkotaan.

Kelompok usia pemuda menempatkan pemuda pada kelompok usia sekolah dan kerja. Data ketenagakerjaan melalui Sakernas Agustus 2025, menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (57,86 persen),





sementara 7,73 persen menganggur. Indikator NEET (*Not in Education, Employment, and Training*) menunjukkan 22,90 persen pemuda usia 16–30 tahun tidak bersekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan. Persentase NEET perempuan (32,33 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki (13,97 persen). Kelompok umur 19–24 tahun memiliki persentase NEET tertinggi (25,26 persen) dibandingkan kelompok umur lainnya. Selain NEET, ada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu indikator yang mengukur besarnya angkatan kerja yang menjadi pengangguran pemuda. Pada 2025, TPT pemuda adalah 11,78 persen, lebih tinggi dari TPT nasional. TPT pemuda tertinggi terjadi pada tamatan SMA/SMK sederajat (13,70 persen), diikuti tamatan pendidikan tinggi (12,19 persen), dan tamatan SMP sederajat (7,79 persen).

Angkatan kerja pemuda, yaitu penduduk berusia 16–30 tahun, berperan penting dalam perekonomian. Semakin besar angkatan kerja maka diharapkan akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda pada tahun 2025 adalah 65,59 persen. Terdapat kesenjangan gender yang signifikan terkait TPAK, di mana TPAK pemuda laki-laki mencapai 77,27 persen, sementara perempuan 53,26 persen. Pemuda bekerja didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat (56,59 persen). Lebih dari separuh pemuda bekerja di sektor jasa (64,57 persen), dengan sektor pertanian masih dominan di perdesaan (36,57 persen). Sebagian besar pemuda bekerja di sektor formal (55,92 persen), dengan perbedaan antara perkotaan (65,37 persen) dan perdesaan (41,85 persen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jam kerja maksimal 40 jam per minggu, dengan dua sistem yakni 7 jam per hari untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja. Data Sakernas 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda, bekerja dengan jam kerja lebih dari 40 jam per minggu. Sementara itu, sekitar 23,66 persen pemuda bekerja dengan jam kerja berlebih (*Employment in Excessive Working Time/EEWT*). Jam kerja berlebih didefinisikan sebagai lebih dari 48 jam yaitu jam kerja lebih dari 48 jam per minggu. Di sisi lain, sebanyak 31,11 persen



pemuda bekerja kurang dari 35 jam per minggu, capaian tersebut lebih banyak terjadi di perdesaan dan pada pemuda perempuan.

Kualitas hidup pemuda antara lain dapat dilihat dari distribusi pengeluaran rumah tangga pemuda. Pada tahun 2025 sebagian besar pemuda berada pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40 persen menengah. Sebagian besar pemuda baik laki-laki, perempuan, tinggal di perkotaan, maupun perdesaan berada pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran rumah tangga 40 persen menengah. Dilihat menurut kepemilikan rekening tabungan, sebesar 52,57 persen pemuda memiliki rekening tabungan. Selanjutnya, pada tahun 2025 mayoritas pemuda tinggal di rumah milik sendiri, yaitu sebesar 85,64 persen. Sementara itu, sebesar 67,13 persen pemuda tinggal di rumah layak huni.

Pada tahun 2025 sebesar 30,25 persen pemuda bepergian keluar kabupaten/kota bukan secara rutin dan minimal enam jam di tempat tujuan serta tidak untuk sekolah atau bekerja. Maksud utama bepergian didominasi untuk tujuan mengunjungi teman/keluarga (37,24 persen) dan berlibur/rekreasi (36,05 persen). Dilihat dari sisi kejahatan atau kriminalitas, selama periode 1 Januari–31 Desember 2024 sekitar 0,65 persen pemuda pernah mengalami korban kejahatan, dengan mayoritas merupakan korban pencurian (81,16 persen).

Kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang penting bagi pemuda. Pada tahun 2025 sebesar 19,50 persen pemuda Indonesia melangsungkan perkawinan pertamanya pada umur kurang dari 19 tahun. Lebih lanjut, sebesar 28,33 persen pemuda perempuan pernah melahirkan pertama kali di saat umur kurang dari 20 tahun. Untuk kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), sekitar 13,68 persen pemuda perempuan pernah melahirkan dengan BBLR. Dalam hal proses persalinan, sebesar 97,83 persen pemuda perempuan ditolong oleh tenaga kesehatan dan 94,37 persen melahirkan di fasilitas kesehatan.

Pemuda memiliki peran penting sebagai ujung tombak generasi penerus dalam membawa Indonesia menuju kesejahteraan. Peran ini perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2022. Beberapa program kepemudaan yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2025 meliputi: *Young Progressive*



Academy (YPA); Percepatan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok; Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025; Pemuda Pelopor Desa 2025; Kelas Antikorupsi 2025; *Good Game* 2025; Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia 2025; Kemah Bhakti Pemuda 2025; serta Program Magang Nasional. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, kualitas kesehatan, daya saing, dan kepemimpinan pemuda, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global dan memaksimalkan peluang bonus demografi.

<https://www.bps.go.id>



<https://www.bps.go.id>



DAFTAR ISI
STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2025
Volume 23, 2025

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
METODOLOGI DAN PENJELASAN TEKNIS.....	xxxix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Pemuda dan Perannya dalam Pembangunan	3
1.2 Tantangan Pembangunan Kepemudaan.....	5
1.3 Data Kepemudaan untuk Pembangunan	7
BAB 2. DEMOGRAFI.....	9
2.1 Jumlah Pemuda Indonesia	11
2.2 Komposisi Pemuda	14
2.3 Pemuda dalam Rumah Tangga.....	17
BAB 3. PENDIDIKAN.....	49
3.1 Kemampuan Baca Tulis Pemuda	51
3.2 Partisipasi Sekolah Pemuda.....	53
3.3 Tingkat Pendidikan Pemuda	56
3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda	58
3.5 Pemuda dan Teknologi	61

BAB 4. KESEHATAN.....	83
4.1 Kondisi Kesehatan Pemuda	85
4.2 Perilaku Berobat Pemuda.....	88
4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Pemuda.....	93
4.4 Pemuda yang Merokok.....	96
BAB 5. KETENAGAKERJAAN	131
5.1 Aktivitas Pemuda	133
5.2 Pemuda dalam Pasar Kerja	137
5.3 Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha	143
5.4 Jam Kerja Pemuda.....	145
BAB 6. SOSIAL EKONOMI	175
6.1 Status Ekonomi Pemuda.....	177
6.2 Kondisi Rumah Tempat Tinggal Pemuda.....	180
6.3 Kehidupan Sosial Pemuda	182
BAB 7. KESEHATAN REPRODUKSI	225
7.1 Usia Kawin Pertama Pemuda	227
7.2 Persalinan Pemuda	232
BAB 8. PROGRAM KEPEMUDAAN	253
DAFTAR PUSTAKA	261
LAMPIRAN	267

DAFTAR TABEL

BAB 2. DEMOGRAFI

HALAMAN

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025	20
Tabel 2.2	Distribusi Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	21
Tabel 2.3	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2025	22
Tabel 2.4	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Kedudukan dalam Rumah Tangga, 2025	23
Tabel 2.5	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025	24
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	25
Tabel 2.7	Persentase Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	26
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	27
Tabel 2.9	Rasio Jenis Kelamin Pemuda Menurut Provinsi, 2025	28
Tabel 2.10	Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	29
Tabel 2.11	Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	30
Tabel 2.12	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	31
Tabel 2.13	Persentase Pemuda Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	32
Tabel 2.14	Persentase Pemuda Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	33
Tabel 2.15	Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	34
Tabel 2.16	Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	35
Tabel 2.17	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025	36
Tabel 2.18	Persentase Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	37

Tabel 2.19	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025	38
Tabel 2.20	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025	39
Tabel 2.21	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025	40
Tabel 2.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	41
Tabel 2.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	43
Tabel 2.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	45
Tabel 2.25	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda dengan Status Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	47
Tabel 2.26	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda dengan Status Tinggal Lainnya Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025	48

BAB 3. PENDIDIKAN

Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Pemuda Menurut Karakteristik, 2025	66
Tabel 3.2	Persentase Pemuda Menurut Partisipasi Sekolah Menurut Karakteristik, 2025	67
Tabel 3.3	Persentase Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Karakteristik, 2025	68
Tabel 3.4	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik, 2025	69
Tabel 3.5	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2025	70
Tabel 3.6	Persentase Pemuda Yang Menggunakan Internet Menurut Karakteristik dan Tujuan Penggunaannya, 2025	71
Tabel 3.7	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	73
Tabel 3.8	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2025	74
Tabel 3.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025	75
Tabel 3.10	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	76

Tabel 3.11	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	77
Tabel 3.12	Persentase Pemuda yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2025.....	78
Tabel 3.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2025.....	79
Tabel 3.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	80

BAB 4. KESEHATAN

Tabel 4.1	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda Dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025	99
Tabel 4.2	Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2025	100
Tabel 4.3	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Tempat Berobat, 2025.....	101
Tabel 4.4	Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025	103
Tabel 4.5	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025	104
Tabel 4.6	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Menurut Karakteristik dan Lama Dirawat, 2025	105
Tabel 4.7	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2025.....	106
Tabel 4.8	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025	107
Tabel 4.9	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	108
Tabel 4.10	Persentase Pemuda yang Rawat Inap Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	109
Tabel 4.11	Persentase Pemuda yang Merokok menurut Frekuensi Merokok dan Karakteristik, 2025.....	110
Tabel 4.12	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	111
Tabel 4.13	Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	112

Tabel 4.14	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Upaya Pengobatan, 2025	113
Tabel 4.15	Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan (Sebulan Terakhir) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	114
Tabel 4.16	Persentase Pemuda yang Melakukan Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan (Sebulan Terakhir) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	115
Tabel 4.17	Persentase Pemuda yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	116
Tabel 4.18	Persentase Pemuda yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	117
Tabel 4.19	Persentase Pemuda yang Merokok Menurut Provinsi, 2025.....	118
Tabel 4.20	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	119
Tabel 4.21	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	121
Tabel 4.22	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Upaya Pengobatan, 2025.....	123
Tabel 4.23	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	125
Tabel 4.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	127
Tabel 4.25	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	129

BAB 5. KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1	Persentase Pemuda <i>Not in Education, Employment, and Training</i> (NEET) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025	148
Tabel 5.2	Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/ <i>Training</i> dan Memperoleh Sertifikat Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025.....	149

Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025.....	150
Tabel 5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025.....	151
Tabel 5.5	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025.....	152
Tabel 5.6	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025.....	153
Tabel 5.7	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2025.....	154
Tabel 5.8	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Sektor Pekerjaan Utama, 2025.....	156
Tabel 5.9	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025.....	157
Tabel 5.10	Persentase Pemuda <i>Not in Education, Employment, and Training</i> (NEET) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	158
Tabel 5.11	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kursus/Pelatihan/ <i>Training</i> dan Memperoleh Sertifikat Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	159
Tabel 5.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	160
Tabel 5.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	161
Tabel 5.14	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025.....	162
Tabel 5.15	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2025.....	163
Tabel 5.16	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama, 2025.....	164
Tabel 5.17	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2025.....	165
Tabel 5.18	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda <i>Not in Education, Employment, and Training</i> (NEET) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	166
Tabel 5.19	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/ <i>Training</i> dan Memperoleh Sertifikat Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025.....	168

Tabel 5.20	<i>Sampling Error</i> Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	170
Tabel 5.21	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	172

BAB 6. SOSIAL EKONOMI

Tabel 6.1	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025.....	186
Tabel 6.2	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	187
Tabel 6.3	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025	188
Tabel 6.4	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	189
Tabel 6.5	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025.....	190
Tabel 6.6	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2025.....	191
Tabel 6.7	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025	192
Tabel 6.8	Persentase Pemuda yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2025	193
Tabel 6.9	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025..	194
Tabel 6.10	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025	195
Tabel 6.11	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025	196
Tabel 6.12	Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025.....	197
Tabel 6.13	Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025.....	198
Tabel 6.14	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025.....	199
Tabel 6.15	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	200

Tabel 6.16	Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	201
Tabel 6.17	Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	202
Tabel 6.18	Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	203
Tabel 6.19	Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	204
Tabel 6.20	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	205
Tabel 6.21	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	206
Tabel 6.22	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	207
Tabel 6.23	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025	208
Tabel 6.24	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2025	209
Tabel 6.25	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	210
Tabel 6.26	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	212
Tabel 6.27	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	214
Tabel 6.28	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	216
Tabel 6.29	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	218
Tabel 6.30	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025	220
Tabel 6.31	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	222
Tabel 6.32	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025	224

BAB 7. KESEHATAN REPRODUKSI

Tabel 7.1	Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Umur Kawin Pertama, 2025.....	237
Tabel 7.2	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama dan Karakteristik, 2025.....	238
Tabel 7.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025.....	239
Tabel 7.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2025.....	240
Tabel 7.5	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Karakteristik dan Tempat Persalinan, 2025.....	241
Tabel 7.6	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025	242
Tabel 7.7	Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2025	243
Tabel 7.8	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Umur saat Melahirkan Pertama, 2025	244
Tabel 7.9	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025.....	245
Tabel 7.10	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2025.....	246
Tabel 7.11	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2025.....	247
Tabel 7.12	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2025	248
Tabel 7.13	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025	250
Tabel 7.14	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2025.....	251
Tabel 7.15	<i>Sampling Error</i> Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2025.....	252

DAFTAR GAMBAR

BAB 2. DEMOGRAFI

HALAMAN

Gambar 2.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025.....	12
Gambar 2.2	Persentase Pemuda Indonesia, 2020–2025.....	13
Gambar 2.3	Persentase Pemuda Indonesia Menurut Provinsi, 2025.....	14
Gambar 2.4	Distribusi Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2025.....	15
Gambar 2.5	Distribusi Pemuda Menurut Pulau di Indonesia, 2025.....	15
Gambar 2.6	Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Perkawinan, 2025.....	16
Gambar 2.7	Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Karakteristik, 2025.....	17
Gambar 2.8	Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Karakteristik, 2025.....	18
Gambar 2.9	Persentase Pemuda Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025.....	19

BAB 3. PENDIDIKAN

Gambar 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	52
Gambar 3.2	Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Provinsi, 2025.....	53
Gambar 3.3	Partisipasi Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	55
Gambar 3.4	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda, 2020–2025.....	57
Gambar 3.5	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	58
Gambar 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda, 2020–2025.....	59
Gambar 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	60
Gambar 3.8	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda Menurut Provinsi, 2025.....	61
Gambar 3.9	Persentase Pemuda Menurut Akses Teknologi dan Informasi, 2020–2025.....	62
Gambar 3.10	Persentase Penggunaan HP, Penggunaan Komputer, dan Akses Internet pada Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	64
Gambar 3.11	Persentase Pemuda yang Menggunakan Internet Menurut Tujuan Penggunaannya, 2025.....	65

BAB 4. KESEHATAN

Gambar 4.1	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda, 2016–2025.....	86
Gambar 4.2	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda Menurut Karakteristik, 2025.....	87
Gambar 4.3	Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Upaya Pengobatan, 2025	88
Gambar 4.4	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Upaya Pengobatan dan Karakteristik, 2025.....	89
Gambar 4.5	Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Rawat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025	90
Gambar 4.6	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan Menurut Tempat Rawat Jalan, 2025.....	91
Gambar 4.7	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2025.....	92
Gambar 4.8	Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Menurut Lama Dirawat, 2025.....	93
Gambar 4.9	Persentase Pemuda Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025	94
Gambar 4.10	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan, 2025.....	95
Gambar 4.11	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025	96
Gambar 4.12	Persentase Pemuda Menurut Kebiasaan Merokok, 2025	97
Gambar 4.13	Persentase Pemuda Menurut Kebiasaan Merokok dan Klasifikasi Desa, 2025.....	98

BAB 5. KETENAGAKERJAAN

Gambar 5.1	Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2025.....	134
Gambar 5.2	Perkembangan Persentase Pemuda Bekerja dan TPT Pemuda, 2020–2025	135
Gambar 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025	136
Gambar 5.4	Persentase Pemuda <i>Not in Education, Employment, and Training</i> (NEET) Menurut Karakteristik, 2025.....	137
Gambar 5.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, 2017–2025	138

Gambar 5.6	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025.....	139
Gambar 5.7	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan dan Karakteristik, 2025.....	140
Gambar 5.8	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Karakteristik, 2025.....	141
Gambar 5.9	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025.....	142
Gambar 5.10	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Karakteristik, 2025.....	143
Gambar 5.11	Persentase Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha Menurut Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan, 2025.....	144
Gambar 5.12	Persentase Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha Menurut Karakteristik, 2025.....	145
Gambar 5.13	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dan Karakteristik, 2025.....	146

BAB 6. SOSIAL EKONOMI

Gambar 6.1	Persentase Pemuda Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025.....	177
Gambar 6.2	Persentase Pemuda Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga dan Karakteristik, 2025.....	178
Gambar 6.3	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Karakteristik, 2025.....	179
Gambar 6.4	Persentase Pemuda Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Karakteristik, 2025.....	180
Gambar 6.5	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik, 2025.....	181
Gambar 6.6	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Klasifikasi Desa Tempat Tinggal dan Karakteristik, 2025.....	182
Gambar 6.7	Persentase Pemuda yang Bepergian Menurut Karakteristik, 2025.....	183
Gambar 6.8	Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Maksud Utama Bepergian, 2025.....	184
Gambar 6.9	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2021–2025.....	185

Gambar 6.10	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2025	185
-------------	--	-----

BAB 7. KESEHATAN REPRODUKSI

Gambar 7.1	Perkembangan Usia Kawin Pertama Pemuda, 2021–2025	228
Gambar 7.2	Usia Kawin Pertama Pemuda Menurut Tingkat Pendidikan dan Klasifikasi Desa, 2025.....	229
Gambar 7.3	Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur saat Melangsungkan Kawin Pertama, 2025	230
Gambar 7.4	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama, 2025	231
Gambar 7.5	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama, Tingkat Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025.....	232
Gambar 7.6	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2,5 kg) Menurut Karakteristik, 2025.....	233
Gambar 7.7	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025	234
Gambar 7.8	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025	235



DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1	Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025	269
Lampiran 2	Kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.....	295
Lampiran 3	Metadata Indikator	322

<https://www.bps.go.id>



<https://www.bps.go.id>



METODOLOGI DAN PENJELASAN TEKNIS

METODOLOGI

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang meliputi aspek sosial dan ekonomi penduduk. Sejak tahun 2015, pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Data Susenas yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil Susenas besar di bulan Maret 2025 dengan jumlah sampel mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. BPS telah melaksanakan Sakernas sejak tahun 1976, namun baru dilakukan secara periodik sejak tahun 1986. Sakernas 2025 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Data Sakernas yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil Sakernas besar di bulan Agustus 2025 dengan jumlah sampel sebanyak 300.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Proyeksi Penduduk

memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk yang digunakan pada publikasi ini adalah proyeksi penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) untuk informasi jumlah dan struktur umur penduduk serta *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) untuk parameter demografi. Proyeksi penduduk menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik.

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2025 dan Sakernas Agustus 2025 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *nonsampling error* dan *sampling error*. *Nonsampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses baik pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas Maret 2025 dan Sakernas Agustus 2025 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (SE) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25$ persen tetapi ≤ 50 persen perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50$ persen dianggap



sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. Tidak semua tabel RSE ditampilkan. Tabel RSE yang ditampilkan hanya untuk nilai estimasi dengan $RSE > 25$ persen.

Dalam publikasi ini, seluruh data/nilai estimasi yang dihasilkan akan disediakan informasi nilai RSE-nya. Namun demikian, tabel-tabel yang keseluruhan nilai RSE dari nilai estimasinya aman (nilai $RSE < 25$), tidak ditampilkan.

PENJELASAN TEKNIS

Anak Lahir Hidup (ALH)

merupakan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok perempuan pada saat mulai memasuki reproduksi hingga pada saat pengumpulan data dilakukan.

Anggota Rumah Tangga (ART)

adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pendataan sedang berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah. Orang yang telah 1 tahun atau lebih, tinggal di rumah tangga yang sedang didata atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang didata tersebut. Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih).

Angka Partisipasi Sekolah

adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA/SMK).

Angkatan Kerja Pemuda

adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang kegiatan utamanya bekerja, atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, atau pemuda yang posisinya sedang menganggur (mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha).

Bekerja

adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pendataan. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Bepergian

adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin.



Berobat Jalan

adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Bukan Angkatan Kerja Pemuda

adalah penduduk berumur 16–30 tahun yang selama seminggu sebelum pendataan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Buta Aksara

adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang difabel yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Cerai Hidup

adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai Mati

adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Dapat Membaca dan Menulis

adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

a. Rumah sakit

meliputi semua rumah sakit, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, BUMN, BUMD, maupun swasta.

b. Klinik

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisistik.

c. Praktik dokter/bidan/perawat

Praktik dokter adalah praktik dokter pribadi/perorangan, baik dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis, termasuk juga praktik mantri/perawat.

Praktik perawat adalah praktik pribadi/perorangan, yang dilakukan oleh bidan, untuk melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun.

Praktik perawat adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.

d. Puskesmas/Pustu/Pusling

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian wilayah kerja puskesmas.

Puskesmas Keliling (Pusling) adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

e. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya balita, batita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, PUS/WUS, dan remaja seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Obat Desa (POD), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Taman Obat Keluarga (TOGA), balai pengobatan, dan lain-lain.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Pelayanan poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang tempat dan lokasinya berada di desa. Polindes hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut.

Balai Pengobatan adalah balai/rumah tempat berobat.



Fertilitas

adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita (fekunditas). Dalam perkembangan ilmu demografi, fertilitas lebih diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atau sekelompok wanita.

Jenis Pekerjaan

adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

Jumlah Jam Kerja

adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja selama seminggu.

Kawin

adalah mempunyai istri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pendataan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Kegiatan Rutin

adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja (memperoleh upah/gaji sesuai tugas pokoknya di tempat yang dituju), yang dilakukan secara rutin (reguler), baik frekuensinya, lokasinya, maupun kegiatannya.

Keluhan Kesehatan

adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dan lain-lain.

Kepala Rumah Tangga (KRT)

adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Klasifikasi Desa/Kelurahan

menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan indikator komposit (indikator gabungan) yang skornya didasarkan nilai tiga buah variabel antara lain kepadatan penduduk, persentase keluarga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan (Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020).

Korban Kejahatan

adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Lahir Hidup (*Live Birth*)

adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan (bayi bernafas, ada denyut jantung, ada denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot).

Lapangan Usaha

adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Maksud Utama Bepergian

adalah motif atau yang menjadi sebab utama terjadinya perjalanan/bepergian ke tempat/tujuan utama.

Masih Bersekolah

adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain, maupun instansi swasta.

Mempersiapkan Suatu Usaha

adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya.

Mencari Pekerjaan

adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah



bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mengobati sendiri

adalah upaya seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/pengobatan tradisional.

Partisipasi Sekolah

adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (program kesetaraan Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, Kemenag, maupun instansi lainnya. Dikatakan aktif mengikuti program kesetaraan apabila dalam sebulan terakhir pernah mengikuti proses belajar di kegiatan paket A/B/C.

Pemuda

adalah penduduk berumur 16–30 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

a. Tidak Pernah Bersekolah/Tidak Tamat SD

adalah tidak pernah bersekolah sama sekali atau pernah/sedang bersekolah di SD dan yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

b. SD Sederajat

meliputi tamat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat.

c. SMP Sederajat

meliputi tamat jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan, dan yang sederajat.

d. SMA/SMK Sederajat

meliputi tamat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.

e. Pendidikan Tinggi

termasuk menamatkan pendidikan program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana.

Penduduk Usia Kerja

adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Khusus untuk publikasi ini umur penduduk usia kerja dibatasi 16–30 tahun mengikuti batas umur pemuda.

Pengangguran

adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rasio Jenis Kelamin

adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda

adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk umur 16–30 tahun untuk menempuh semua tingkat pendidikan yang pernah dijalani.

Rumah Layak Huni

adalah rumah yang memenuhi 4 kriteria yaitu ketahanan bangunan (atap: beton, genteng, seng, kayu/sirap; dinding: tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, batang kayu; lantai: marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah), luas lantai per kapita (lebih dari sama dengan 7,2m²); akses air minum layak, dan akses sanitasi layak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024b).

Rumah Tangga

adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Sakit

adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

Status Kepemilikan Rumah

adalah status kepemilikan rumah yang dihuni rumah tangga pada waktu pendataan.

a. Milik Sendiri

adalah status kepemilikan tempat tinggal pada waktu pendataan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

b. Kontrak/Sewa

Kontrak adalah status kepemilikan tempat tinggal disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

c. Bebas Sewa

Status kepemilikan tempat tinggal diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

d. Dinas

Status kepemilikan tempat tinggal dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

e. Lainnya

Misalnya rumah adat.

Status Pekerjaan

adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh/karyawan, berusaha dibantu keluarga/pekerja tidak dibayar, sebagai buruh/karyawan/pegawai, sebagai pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun nonpertanian.

Tidak Bersekolah Lagi

adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pendataan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

adalah persentase angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, terhadap penduduk angkatan kerja.

Umur Perkawinan Pertama

adalah umur perempuan pernah kawin ketika pertama kali melakukan perkawinan, yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan.



Wanita Usia Subur

merupakan wanita yang berusia 15–49 tahun dan wanita pada usia ini masih berpotensi untuk mempunyai keturunan.

<https://www.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

<http://www.bps.go.id>





<https://www.bps.go.id>



Dalam proses pembangunan, pemuda memegang peranan penting sebagai tulang punggung dan penentu masa depan bangsa. Sejarah juga mencatat bahwa pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa. Di era modern seperti sekarang ini, pemuda diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaruan. Dengan peran-peran tersebut, pemuda tidak hanya menjadi harapan masa depan, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa inovasi dan dinamika baru dalam berbagai aspek kehidupan. Penting bagi pemuda untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa.

1.1 Pemuda dan Perannya dalam Pembangunan

Dalam setiap era dan perubahan zaman, pemuda selalu menjadi sosok yang mampu menginspirasi dan mendampingi proses transisi. Pemuda adalah individu yang tangguh dan ulet, yang kehadirannya tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang membawa bangsa menuju transformasi yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16–30 tahun.

Dengan segala potensi yang dimiliki, pemuda memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pemuda diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa ada di tangan pemuda. Bung Karno



pernah berkata, “seribu orang tua bisa bermimpi, tetapi satu orang pemuda bisa mengubah dunia”. Ini sejalan dengan peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepemudaan Bab V Pasal 16. Potensi pemuda sebagai motor penggerak pembangunan semakin berarti jika didukung oleh kuantitas dan kualitas yang memadai. Dengan kualitas yang baik, pemuda Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

Sejarah bangsa Indonesia juga membuktikan bahwa pemuda adalah kekuatan utama dalam revolusi besar bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus mengetahui sejarah perjuangan pemuda Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa pada tahun 1966 yang menumbangkan Orde Lama dan mendirikan Orde Baru, pergerakan mahasiswa tahun 1974 yang mengkritisi pemerintahan Orde Baru, hingga pergerakan mahasiswa tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru dan membawa Indonesia ke era reformasi.

Fakta historis ini membuktikan bahwa pemuda selalu berperan aktif sebagai pionir dalam perjuangan yang membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pemuda juga berperan dalam pembangunan bangsa baik fisik maupun nonfisik, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai agen perubahan, pemuda membawa semangat baru dalam mengadopsi dan menyebarkan teknologi dan inovasi baru serta membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam sektor pendidikan, pemuda berkontribusi sebagai pelajar dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka juga harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai prestasi yang membanggakan bangsa dan terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.



Pemuda yang mengisi hampir seperempat dari total penduduk Indonesia memiliki posisi strategis di era globalisasi saat ini. Dalam era teknologi saat ini, pemuda Indonesia harus mampu bersaing di kancah internasional dengan meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan serta berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional. Tidak dapat dipungkiri, peran serta pemuda dalam pembangunan nasional menentukan daya saing bangsa. Adanya pergeseran struktur umur penduduk membuat peran pemuda bahkan semakin penting. Adanya fase bonus demografi menuntut pemuda untuk lebih kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih agar berdaya saing baik dalam negeri maupun di kancah internasional. Sebagai penduduk usia produktif dengan jumlah lebih banyak, pemuda dituntut untuk mampu membawa Indonesia memaksimalkan peluang bonus demografi.

1.2 Tantangan Pembangunan Kepemudaan

Tujuh puluh sembilan tahun sejak Indonesia merdeka, tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin berat. Persatuan dan kesatuan menjadi tantangan terbesar, mengingat pada masa awal pergerakan pemuda, sifat primordialisme dan etnosentrisme masih kuat. Namun, sejak Sumpah Pemuda 1928, fanatisme kedaerahan mulai luntur dan digantikan oleh nasionalisme yang tinggi, membawa bangsa ini ke era kemerdekaan.

Namun, apakah kita yakin bahwa Indonesia saat ini sudah bebas dari penjajahan? Semakin maju suatu bangsa, semakin kompleks tantangan yang dihadapi. Globalisasi, yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, arus informasi, dan komunikasi lintas batas negara, membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Pemuda di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan baik terkait pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kehidupan sosial, dsb. Terkait pendidikan, kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah,



terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menjadi isu utama. Banyak pemuda di daerah ini kekurangan akses pendidikan yang memadai. Pada aspek ketenagakerjaan, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan kaum muda 15–24 tahun, yang mencapai 16,16 persen pada Februari 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025, hal. 70), disebabkan oleh terhambatnya transisi dari pendidikan ke dunia kerja serta keterbatasan pengalaman kerja. Masalah kesehatan seperti perilaku merokok, penyakit menular seksual, dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi tantangan besar, diperparah oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan akses kesehatan yang terbatas. Terkait kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi juga masih menjadi kendala, dengan akses terhadap perumahan, air bersih, dan sanitasi yang layak masih terbatas. Terakhir, rendahnya indeks partisipasi pendidikan, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kurangnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan ekonomi juga menjadi perhatian utama.

Selanjutnya, globalisasi di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menimbulkan keresahan dengan munculnya perilaku sosial baru yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia, seperti konsumerisme, materialisme, sadisme, agresivitas, individualisme, dan hedonisme. Pengaruh negatif globalisasi lebih banyak menyerang pemuda Indonesia. Pemuda masa kini adalah aktor utama dalam proses globalisasi. Seperempat dari struktur demografis penduduk Indonesia diisi oleh generasi Y atau milenial (lahir 1981–1996) dan generasi Z (lahir 1997–2012). Kedua generasi ini adalah generasi emas dengan potensi unggul yang akrab dengan teknologi canggih, termasuk internet.

Menghadapi tantangan di era globalisasi, dibutuhkan keteladanan dan kebijaksanaan seluruh elemen bangsa, termasuk pemuda, untuk menentukan sikap, apakah memilih optimis, skeptis, atau kompromi kritis. Selain itu, Pancasila



sebagai ideologi bangsa harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar ancaman disintegrasi bangsa dapat dieliminasi melalui semangat gotong royong dan asas kekeluargaan menuju persatuan dan kesatuan bangsa.

1.3 Data Kepemudaan untuk Pembangunan

Peran dan tantangan pemuda semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Isu-isu kepemudaan yang harus dicermati dalam beberapa tahun ke depan antara lain berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan agar mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar pemuda Indonesia dapat memanfaatkan peluang dengan baik. Antisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembangunan pemuda secara intensif dengan pengukuran capaian pembangunan pemuda setiap tahunnya. Pemantauan perkembangan pembangunan pemuda hanya dapat dilakukan jika data kepemudaan untuk pembangunan tersedia secara komprehensif. Optimalisasi pembangunan kepemudaan dapat dilakukan pada dasarnya dengan memastikan data dan informasi yang riil dan mencerminkan dinamika kinerja pembangunan pemuda tersedia.

Untuk memetakan situasi dan kondisi terkini, serta mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan dan program kepemudaan, diperlukan data dan informasi terkait pemuda di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, BPS menyusun data dan informasi terkait pemuda dan mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi "Statistik Pemuda Indonesia 2025". Publikasi ini memuat informasi pemuda yang dilihat dari berbagai aspek, seperti demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan kesehatan reproduksi serta program-program untuk pemuda Indonesia yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang pemuda



yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kepemudaan.

Publikasi “Statistik Pemuda Indonesia 2025” juga disusun untuk mendukung strategi yang tepat bagi pembangunan di bidang kepemudaan dan secara simultan dapat menjawab kebutuhan dengan memberikan informasi seputar indikator capaian pembangunan di bidang kepemudaan. Data-data pada publikasi ini bersumber dari hasil Susenas 2025, Sakernas 2025, dan Proyeksi Penduduk. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara kolektif dan komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kepemudaan di Indonesia dari segala tingkatan, baik tingkat nasional maupun regional.

Publikasi “Statistik Pemuda Indonesia 2025” ini secara struktur disajikan dalam delapan bagian. Bab I menggambarkan peran dan tantangan pemuda khususnya dalam pembangunan. Selanjutnya, Bab II menggambarkan kondisi pemuda Indonesia dilihat dari sudut pandang demografi, diikuti Bab III yang memberikan profil pendidikan pemuda, dan Bab IV tentang kesehatan pemuda sebagai refleksi kualitas hidup sehat masyarakat. Dalam Bab V dijelaskan mengenai ketenagakerjaan pemuda, selanjutnya Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII berturut turut menggambarkan kondisi sosial ekonomi pemuda, kesehatan reproduksi pemuda, dan program kepemudaan yang pelaksanaannya memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.



BAB II

DEMOGRAFI

<http://www.bri.go.id>





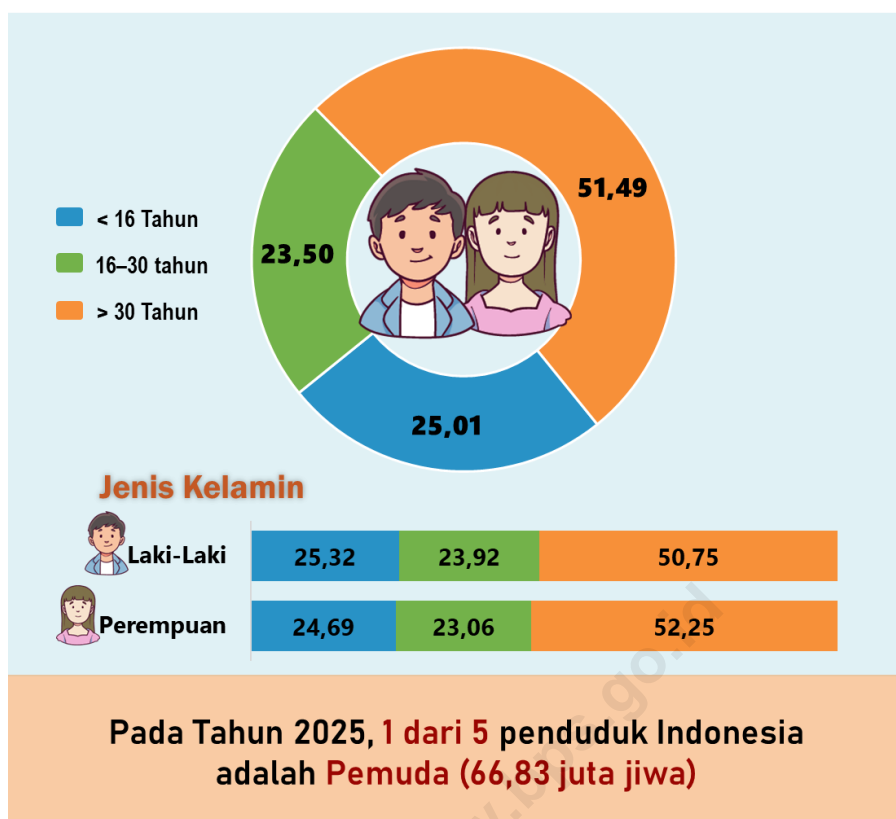
<https://www.bps.go.id>



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemuda adalah Warga Negara Indonesia berusia 16–30 tahun. Dengan demikian, mereka yang lahir pada rentang tahun 1994–2008 atau yang dikenal sebagai Generasi Z termasuk dalam kategori pemuda pada tahun 2025 ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai karakteristik pemuda di Indonesia. Secara demografis, pemuda mencerminkan dinamika penduduk usia produktif yang berperan penting sebagai penggerak inovasi, ekonomi, dan kemajuan sosial. Informasi mengenai jumlah pemuda di Indonesia, komposisi menurut karakteristik demografi, serta peran mereka dalam rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia suatu negara. Perhatian terhadap demografi pemuda semakin meningkat seiring dengan upaya pemerintah memanfaatkan bonus demografi. Oleh karena itu, memahami kondisi demografi pemuda menjadi hal yang krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1 Jumlah Pemuda Indonesia

Berdasarkan data Susenas 2025, diperkirakan terdapat sekitar 66,83 juta pemuda di Indonesia, atau sekitar seperlima dari total penduduk. Meskipun tidak menjadi kelompok mayoritas, jumlah tersebut tetap menunjukkan besarnya potensi pemuda sebagai modal pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peningkatan kualitas pemuda merupakan isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Salah satu dari delapan Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 adalah penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender. Prioritas ini juga mencakup penguatan peran perempuan, pemuda (termasuk Generasi Milenial dan Generasi Z), serta penyandang disabilitas.

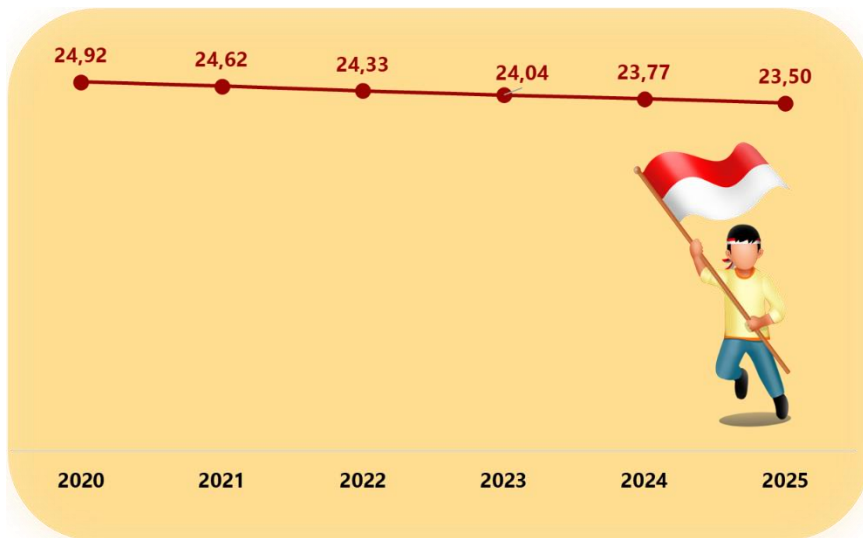


Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025

Ditinjau dari jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase pemuda laki-laki dan perempuan. Persentase pemuda laki-laki sebesar 23,92 persen dari total penduduk laki-laki dan persentase pemuda perempuan sebesar 23,06 persen dari total penduduk perempuan.

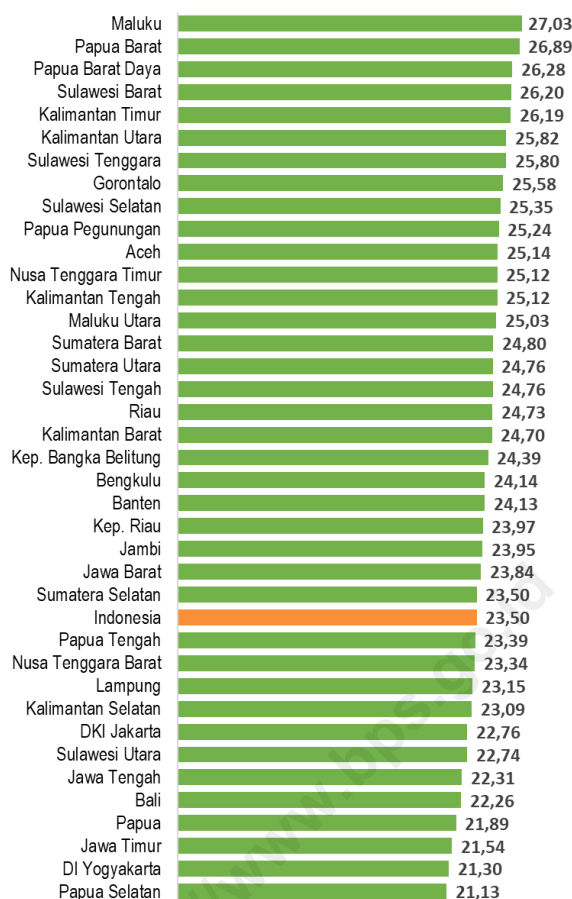
Selanjutnya pada Gambar 2.2 terlihat bahwa persentase pemuda di Indonesia menunjukkan tren yang relatif menurun dalam enam tahun terakhir. Terdapat penurunan sekitar 1,42 persen poin dari tahun 2020 hingga 2025. Penurunan persentase pemuda ini sejalan dengan angka kelahiran total yang relatif turun sesuai dengan data Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* SP2020 BPS (Badan Pusat Statistik, 2023a).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.2 Persentase Pemuda Indonesia, 2020–2025

Ditinjau dari sebaran masing-masing provinsi yang terlihat pada Gambar 2.3, persentase pemuda tertinggi berada di wilayah Indonesia bagian timur yaitu Provinsi Maluku (27,03 persen) dan Papua Barat (26,89 persen). Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Papua Barat Daya (26,28 persen), Sulawesi Barat (26,20 persen), dan Kalimantan Timur (26,19 persen). Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki persentase pemuda di atas angka nasional (>23,50 persen). Jika diamati lebih dalam, terdapat 12 provinsi dengan persentase pemuda di bawah angka nasional. Persentase pemuda terendah yaitu Provinsi Papua Selatan (21,13 persen) dan DI Yogyakarta (21,30 persen). Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (21,54 persen), Papua (21,89 persen), dan Bali (22,26 persen).



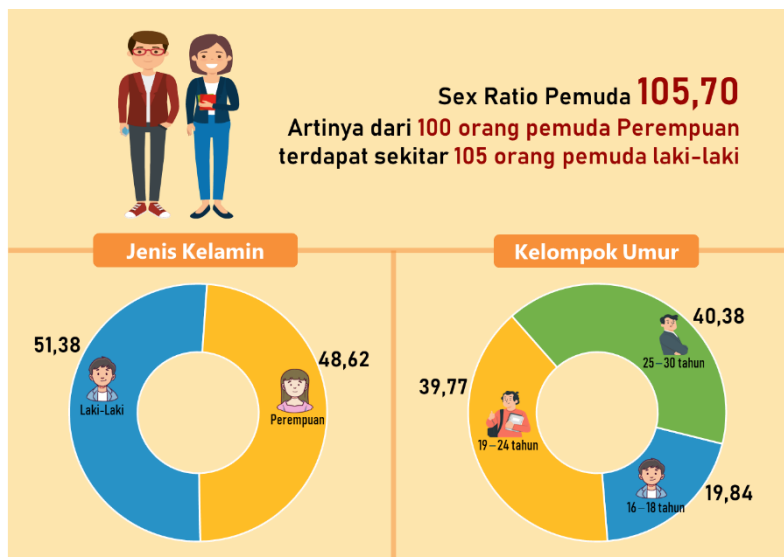
Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.3 Persentase Pemuda Indonesia Menurut Provinsi, 2025

2.2 Komposisi Pemuda

Pada tahun 2025, komposisi pemuda laki-laki dan perempuan memiliki selisih sebesar 2,77 persen poin. Hal tersebut juga terlihat dari angka rasio jenis kelamin sebesar 105,77 yang menunjukkan bahwa dari 100 orang pemuda perempuan terdapat sekitar 105 orang pemuda laki-laki.

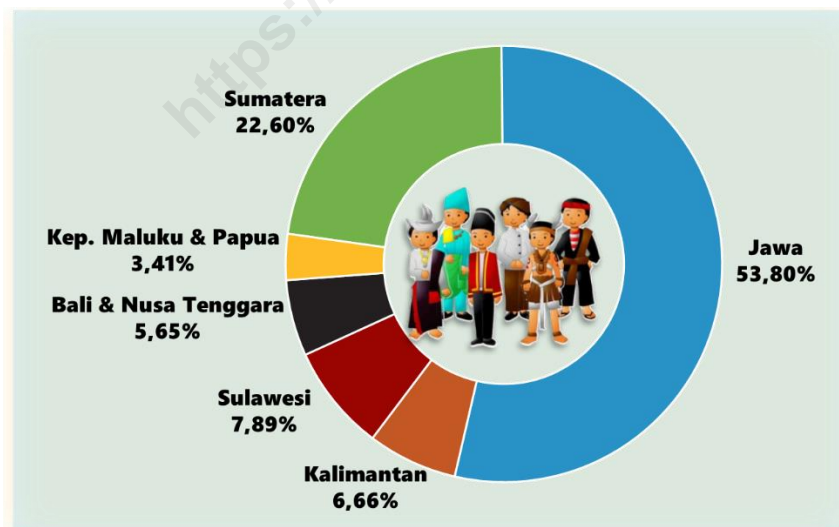
Berdasarkan kelompok umur, pemuda Indonesia paling banyak berada pada kelompok umur 19-24 tahun (39,77 persen). Rentang kelompok umur tersebut merupakan masa pemuda menjalani pendidikan tinggi atau bahkan ada yang sudah bersiap untuk masuk dalam dunia kerja dan perkawinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.4 Distribusi Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2025

Dilihat dari distribusi pemuda menurut pulau (Gambar 2.5), pada tahun 2025, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan persentase pemuda paling tinggi di Indonesia. Lebih dari separuh (53,80 persen) pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Sumatera menjadi pulau dengan distribusi pemuda terbanyak kedua dengan persentase sebesar 22,60 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.5 Distribusi Pemuda Menurut Pulau di Indonesia, 2025

Gambar 2.6 menunjukkan mayoritas pemuda di Indonesia berstatus belum kawin (71,04 persen). Sementara itu, terdapat sekitar 1 dari 4 pemuda yang berstatus kawin pada tahun 2025. Dalam periode waktu enam tahun terakhir, perkembangan persentase pemuda yang berstatus kawin dan belum kawin bertolak belakang. Persentase pemuda yang berstatus kawin semakin menurun, sedangkan pemuda yang belum kawin semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran usia perkawinan pemuda. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat menjadi penyebab turunnya jumlah pemuda berstatus kawin. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti meluasnya kesempatan untuk sekolah dan bekerja serta berkurangnya tekanan dari lingkungan sosial yang memengaruhi keputusan generasi muda untuk menunda pernikahan (Riska & Khasanah, 2023, hal. 51).

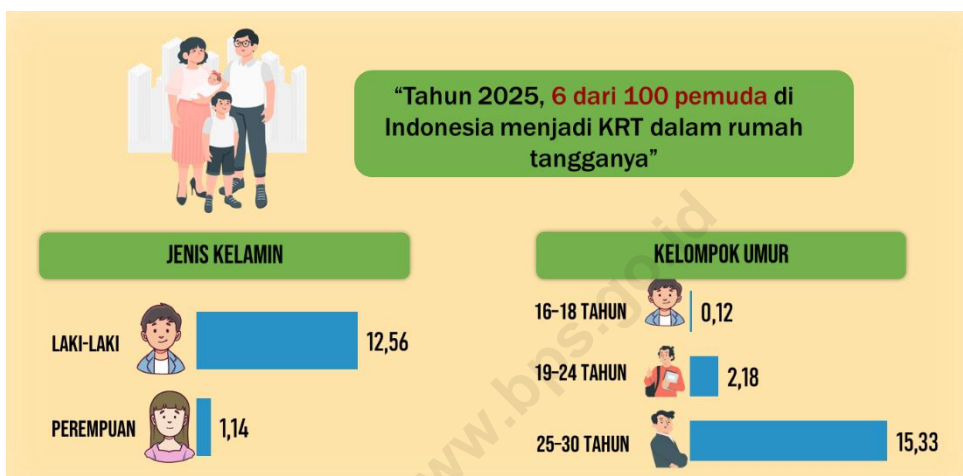


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.6 Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Perkawinan, 2025

2.3 Pemuda dalam Rumah Tangga

Kepala Rumah Tangga (KRT) merupakan seseorang dari sekelompok Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT (Badan Pusat Statistik, 2024c). Data hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 6,91 persen pemuda di Indonesia berperan sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT).



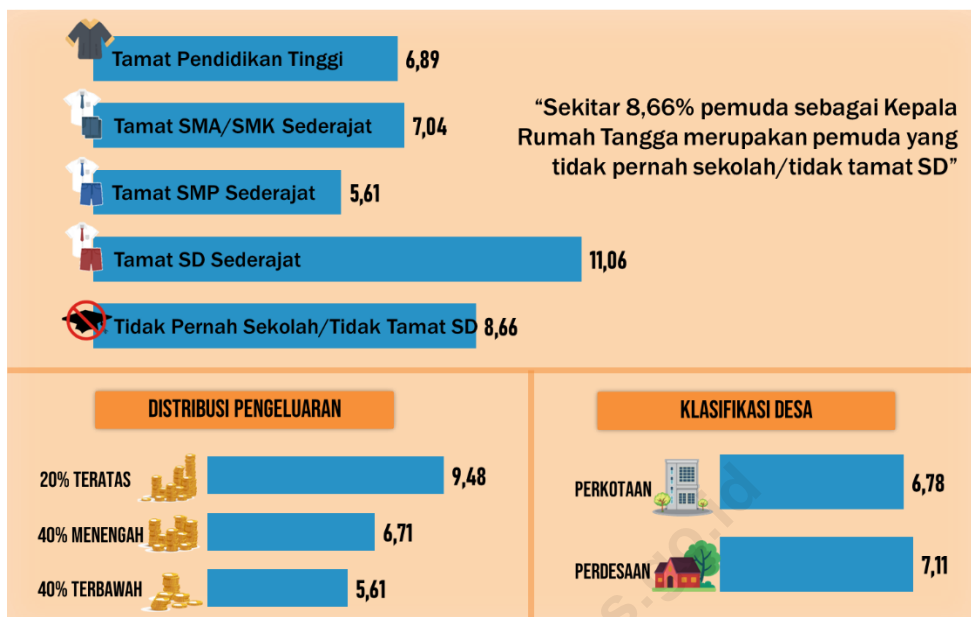
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.7 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Karakteristik, 2025

Pada Gambar 2.7 terlihat dominasi pemuda laki-laki yang berstatus sebagai KRT (12,56 persen) dibandingkan pemuda perempuan (1,14 persen). Hal tersebut menandakan masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia, dimana laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah keluarga sementara untuk pekerjaan rumah tangga sehari-hari seperti memasak, mencuci, setrika atau mengasuh anak dianggap sebagai tugas perempuan. Namun demikian, masih terdapat sekitar 1 dari 100 pemuda perempuan yang berstatus sebagai KRT.

Ditinjau dari kelompok umur, semakin tua umur pemuda semakin banyak yang berperan sebagai KRT. Pada kelompok umur 25–30 tahun, sekitar sebanyak 15,33 persen pemuda berperan sebagai KRT. Umumnya pemuda pada kelompok umur tersebut sudah memiliki pekerjaan atau bahkan sudah menikah sehingga banyak yang berperan sebagai KRT. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar

0,12 persen pemuda pada usia 16–18 tahun dan sekitar 2,18 persen pemuda pada usia 19–24 tahun yang sudah berstatus sebagai KRT.

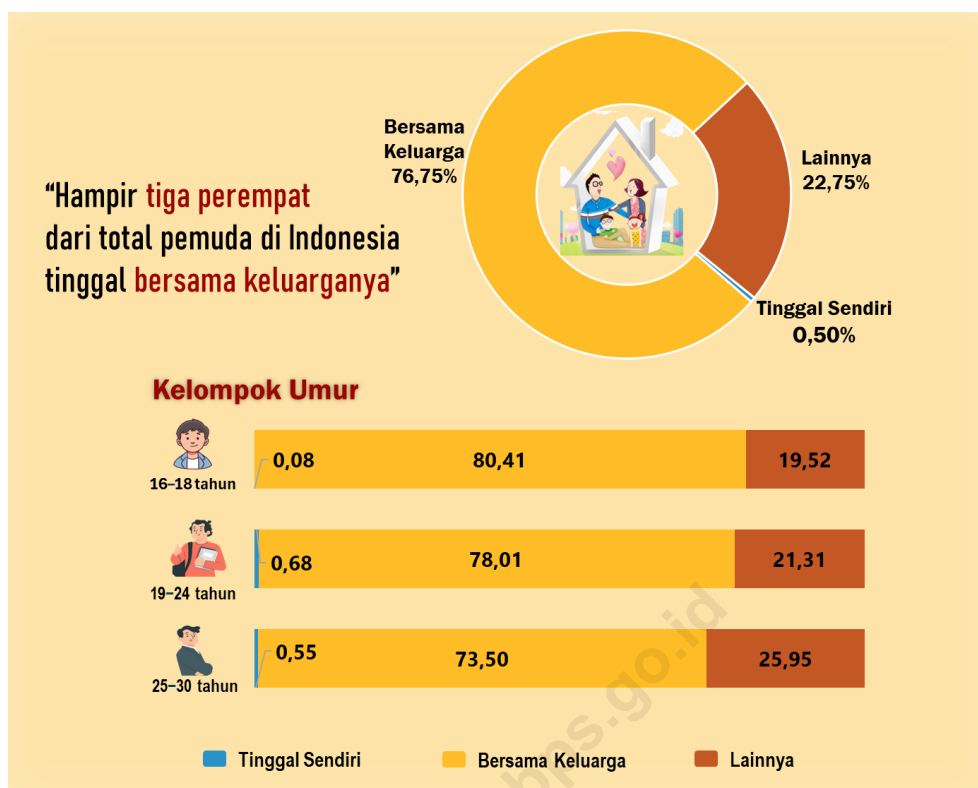


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.8 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga (KRT) Menurut Karakteristik, 2025

Dilihat dari karakteristik jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pemuda yang berstatus sebagai KRT pada pemuda yang tamatan SD ke bawah lebih besar komposisinya dibandingkan tamatan SMP ke atas. Selanjutnya, komposisi pemuda berstatus sebagai KRT paling banyak berada pada kondisi kesejahteraan yang baik, yaitu dari kelompok rumah tangga 20 persen teratas.

Konsep klasifikasi status tempat tinggal bersama dalam Susenas dibedakan menjadi tinggal sendiri, bersama keluarga, dan lainnya. Pemuda dikatakan tinggal bersama keluarga jika tinggal bersama anak atau orang tua saja, baik didampingi pasangan maupun tidak. Selanjutnya, dikatakan lainnya jika pemuda tinggal bersama tiga generasi atau famili lain. Sementara itu, pemuda yang tinggal sendiri adalah pemuda yang tinggal seorang diri dalam rumah tangganya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2.9 Persentase Pemuda Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025

Pada tahun 2025 hampir tiga perempat pemuda tinggal bersama keluarga (76,75 persen) dan hanya sekitar 0,50 persen pemuda yang tinggal sendiri. Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa semakin tua umur pemuda semakin kecil persentase mereka tinggal bersama keluarga.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0–15 Tahun	16–30 Tahun	≥ 31 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	25,01	23,50	51,49	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	25,32	23,92	50,75	100,00
Perempuan	24,69	23,06	52,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.2 Distribusi Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Persentase Pemuda
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	51,38
Perempuan	48,62
Kelompok Umur	
16–18 Tahun	19,84
19–24 Tahun	39,77
25–30 Tahun	40,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.3 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2025

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	71,04	27,92	1,04	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	80,09	19,26	0,65	100,00
Perempuan	61,82	36,75	1,43	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	98,70	1,17	0,12	100,00
19–24 Tahun	85,21	14,10	0,68	100,00
25–30 Tahun	41,81	56,29	1,89	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	69,02	30,45	0,54	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	72,33	26,76	0,91	100,00
Tamat SMP Sederajat	73,42	25,48	1,10	100,00
Tamat SD Sederajat	57,61	40,37	2,02	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	70,49	27,77	1,74	100,00
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	74,72	24,63	0,65	100,00
40% Menengah	72,06	26,99	0,95	100,00
40% Terbawah	67,69	30,94	1,37	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	74,87	24,22	0,91	100,00
Perdesaan	64,84	33,92	1,24	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.4 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Kedudukan dalam Rumah Tangga, 2025

Karakteristik	Kedudukan dalam Rumah Tangga		Jumlah
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Anggota Rumah Tangga (ART)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,91	93,09	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	12,56	87,44	100,00
Perempuan	1,14	98,86	100,00
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	0,12	99,88	100,00
19–24 Tahun	2,18	97,82	100,00
25–30 Tahun	15,33	84,67	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	6,89	93,11	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	7,04	92,96	100,00
Tamat SMP Sederajat	5,61	94,39	100,00
Tamat SD Sederajat	11,06	88,94	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	8,66	91,34	100,00
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	9,48	90,52	100,00
40% Menengah	6,71	93,29	100,00
40% Terbawah	5,61	94,39	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	6,78	93,22	100,00
Perdesaan	7,11	92,89	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.5 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025

Karakteristik	Status Tinggal dalam Rumah Tangga			Jumlah
	Tinggal Sendiri	Bersama Keluarga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	0,50	76,75	22,75	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	0,56	78,24	21,20	100,00
Perempuan	0,44	75,23	24,33	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	0,08	80,41	19,52	100,00
19–24 Tahun	0,68	78,01	21,31	100,00
25–30 Tahun	0,55	73,50	25,95	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	0,84	78,39	20,78	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	0,70	77,33	21,97	100,00
Tamat SMP Sederajat	0,19	75,90	23,90	100,00
Tamat SD Sederajat	0,25	74,61	25,14	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	0,29	77,18	22,53	100,00
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	2,09	84,41	13,50	100,00
40% Menengah	0,11	80,52	19,37	100,00
40% Terbawah	~0	67,89	32,11	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,69	78,72	20,59	100,00
Perdesaan	0,19	73,56	26,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0–15 Tahun	16–30 Tahun	≥ 31 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,54	25,64	45,82	100,00
Sumatera Utara	28,57	25,36	46,07	100,00
Sumatera Barat	26,42	25,44	48,14	100,00
Riau	28,04	24,83	47,13	100,00
Jambi	26,84	24,06	49,10	100,00
Sumatera Selatan	27,17	23,76	49,08	100,00
Bengkulu	26,58	24,33	49,09	100,00
Lampung	26,27	23,29	50,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,30	24,42	50,28	100,00
Kepulauan Riau	27,58	23,95	48,48	100,00
DKI Jakarta	23,37	23,08	53,56	100,00
Jawa Barat	24,88	24,22	50,90	100,00
Jawa Tengah	23,45	22,86	53,68	100,00
DI Yogyakarta	21,51	21,95	56,54	100,00
Jawa Timur	22,54	22,14	55,32	100,00
Banten	26,05	24,40	49,55	100,00
Bali	22,49	22,78	54,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,85	23,80	47,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,28	25,66	43,06	100,00
Kalimantan Barat	26,42	24,80	48,77	100,00
Kalimantan Tengah	25,70	25,08	49,22	100,00
Kalimantan Selatan	27,82	23,49	48,69	100,00
Kalimantan Timur	24,57	26,03	49,40	100,00
Kalimantan Utara	25,23	25,71	49,06	100,00
Sulawesi Utara	23,78	23,10	53,12	100,00
Sulawesi Tengah	27,23	25,03	47,74	100,00
Sulawesi Selatan	25,70	26,06	48,23	100,00
Sulawesi Tenggara	29,05	26,16	44,80	100,00
Gorontalo	25,87	25,91	48,23	100,00
Sulawesi Barat	29,24	26,64	44,12	100,00
Maluku	27,25	27,61	45,14	100,00
Maluku Utara	27,38	25,03	47,59	100,00
Papua Barat	27,19	26,84	45,96	100,00
Papua Barat Daya	26,52	26,35	47,13	100,00
Papua	33,20	22,03	44,78	100,00
Papua Selatan	39,92	21,66	38,42	100,00
Papua Tengah	26,43	24,01	49,56	100,00
Papua Pegunungan	22,14	25,84	52,02	100,00
Indonesia	25,32	23,92	50,75	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.7 Persentase Penduduk Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0–15 Tahun	16–30 Tahun	≥ 31 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	27,53	24,62	47,85	100,00
Sumatera Utara	27,54	24,16	48,31	100,00
Sumatera Barat	25,64	24,16	50,20	100,00
Riau	27,90	24,62	47,47	100,00
Jambi	26,62	23,84	49,54	100,00
Sumatera Selatan	26,88	23,24	49,87	100,00
Bengkulu	26,52	23,94	49,54	100,00
Lampung	26,16	23,01	50,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,40	24,36	50,24	100,00
Kepulauan Riau	27,09	23,99	48,92	100,00
DKI Jakarta	22,49	22,44	55,06	100,00
Jawa Barat	24,36	23,44	52,19	100,00
Jawa Tengah	22,61	21,75	55,64	100,00
DI Yogyakarta	20,18	20,66	59,16	100,00
Jawa Timur	21,45	20,94	57,62	100,00
Banten	25,71	23,85	50,44	100,00
Bali	21,54	21,73	56,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,94	22,89	49,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,16	24,57	45,27	100,00
Kalimantan Barat	26,59	24,58	48,83	100,00
Kalimantan Tengah	26,15	25,15	48,70	100,00
Kalimantan Selatan	27,22	22,69	50,09	100,00
Kalimantan Timur	25,07	26,35	48,58	100,00
Kalimantan Utara	26,59	25,94	47,48	100,00
Sulawesi Utara	23,68	22,36	53,95	100,00
Sulawesi Tengah	27,43	24,47	48,10	100,00
Sulawesi Selatan	24,28	24,64	51,07	100,00
Sulawesi Tenggara	29,00	25,43	45,57	100,00
Gorontalo	25,36	25,25	49,39	100,00
Sulawesi Barat	29,23	25,76	45,01	100,00
Maluku	26,69	26,45	46,86	100,00
Maluku Utara	28,85	25,02	46,13	100,00
Papua Barat	28,82	26,95	44,23	100,00
Papua Barat Daya	27,59	26,22	46,19	100,00
Papua	34,99	21,74	43,27	100,00
Papua Selatan	41,75	20,55	37,70	100,00
Papua Tengah	28,39	22,68	48,94	100,00
Papua Pegunungan	23,75	24,56	51,69	100,00
Indonesia	24,69	23,06	52,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.8 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	0–15 Tahun	16–30 Tahun	≥ 31 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	28,04	25,14	46,83	100,00
Sumatera Utara	28,06	24,76	47,19	100,00
Sumatera Barat	26,03	24,80	49,16	100,00
Riau	27,98	24,73	47,30	100,00
Jambi	26,73	23,95	49,32	100,00
Sumatera Selatan	27,03	23,50	49,47	100,00
Bengkulu	26,55	24,14	49,31	100,00
Lampung	26,21	23,15	50,63	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,35	24,39	50,26	100,00
Kepulauan Riau	27,34	23,97	48,69	100,00
DKI Jakarta	22,93	22,76	54,31	100,00
Jawa Barat	24,63	23,84	51,54	100,00
Jawa Tengah	23,03	22,31	54,66	100,00
DI Yogyakarta	20,84	21,30	57,86	100,00
Jawa Timur	21,99	21,54	56,47	100,00
Banten	25,88	24,13	49,99	100,00
Bali	22,02	22,26	55,72	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,39	23,34	48,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,72	25,12	44,17	100,00
Kalimantan Barat	26,50	24,70	48,80	100,00
Kalimantan Tengah	25,92	25,12	48,97	100,00
Kalimantan Selatan	27,52	23,09	49,38	100,00
Kalimantan Timur	24,81	26,19	49,00	100,00
Kalimantan Utara	25,87	25,82	48,31	100,00
Sulawesi Utara	23,73	22,74	53,53	100,00
Sulawesi Tengah	27,33	24,76	47,91	100,00
Sulawesi Selatan	24,99	25,35	49,66	100,00
Sulawesi Tenggara	29,02	25,80	45,18	100,00
Gorontalo	25,62	25,58	48,80	100,00
Sulawesi Barat	29,24	26,20	44,56	100,00
Maluku	26,98	27,03	45,99	100,00
Maluku Utara	28,09	25,03	46,88	100,00
Papua Barat	27,97	26,89	45,14	100,00
Papua Barat Daya	27,04	26,28	46,68	100,00
Papua	34,05	21,89	44,06	100,00
Papua Selatan	40,80	21,13	38,07	100,00
Papua Tengah	27,34	23,39	49,27	100,00
Papua Pegunungan	22,89	25,24	51,87	100,00
Indonesia	25,01	23,50	51,49	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)
Aceh	105,08
Sumatera Utara	105,76
Sumatera Barat	106,93
Riau	105,15
Jambi	104,20
Sumatera Selatan	105,85
Bengkulu	105,96
Lampung	105,39
Kep. Bangka Belitung	105,49
Kepulauan Riau	102,93
DKI Jakarta	103,66
Jawa Barat	105,80
Jawa Tengah	106,05
DI Yogyakarta	103,94
Jawa Timur	105,09
Banten	105,64
Bali	105,21
Nusa Tenggara Barat	104,93
Nusa Tenggara Timur	104,41
Kalimantan Barat	106,22
Kalimantan Tengah	106,19
Kalimantan Selatan	105,78
Kalimantan Timur	105,54
Kalimantan Utara	109,39
Sulawesi Utara	107,55
Sulawesi Tengah	107,50
Sulawesi Selatan	104,44
Sulawesi Tenggara	105,51
Gorontalo	104,26
Sulawesi Barat	106,15
Maluku	106,73
Maluku Utara	105,15
Papua Barat	110,03
Papua Barat Daya	109,04
Papua	110,88
Papua Selatan	113,53
Papua Tengah	120,23
Papua Pegunungan	119,96
Indonesia	105,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.10 Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,62	40,33	39,05	100,00
Sumatera Utara	20,38	39,98	39,64	100,00
Sumatera Barat	20,28	40,23	39,49	100,00
Riau	20,44	40,02	39,53	100,00
Jambi	20,26	40,02	39,72	100,00
Sumatera Selatan	20,14	39,70	40,16	100,00
Bengkulu	20,04	39,84	40,11	100,00
Lampung	19,93	39,64	40,43	100,00
Kep. Bangka Belitung	20,10	40,23	39,67	100,00
Kepulauan Riau	19,62	39,74	40,64	100,00
DKI Jakarta	20,04	40,17	39,79	100,00
Jawa Barat	20,01	39,94	40,05	100,00
Jawa Tengah	19,63	39,69	40,68	100,00
DI Yogyakarta	19,58	40,26	40,15	100,00
Jawa Timur	19,57	39,68	40,75	100,00
Banten	19,73	39,45	40,82	100,00
Bali	19,96	40,21	39,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,00	39,39	40,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,51	39,59	39,90	100,00
Kalimantan Barat	19,90	39,83	40,27	100,00
Kalimantan Tengah	19,64	39,86	40,50	100,00
Kalimantan Selatan	20,18	39,70	40,13	100,00
Kalimantan Timur	18,89	40,20	40,92	100,00
Kalimantan Utara	19,96	40,23	39,81	100,00
Sulawesi Utara	19,62	39,55	40,83	100,00
Sulawesi Tengah	20,07	39,71	40,22	100,00
Sulawesi Selatan	20,35	40,51	39,13	100,00
Sulawesi Tenggara	20,52	40,18	39,30	100,00
Gorontalo	20,04	40,19	39,78	100,00
Sulawesi Barat	20,72	40,33	38,95	100,00
Maluku	20,34	40,43	39,23	100,00
Maluku Utara	20,63	40,81	38,56	100,00
Papua Barat	19,42	39,38	41,20	100,00
Papua Barat Daya	19,25	39,75	41,00	100,00
Papua	21,15	35,05	43,80	100,00
Papua Selatan	23,06	38,30	38,64	100,00
Papua Tengah	17,80	38,29	43,90	100,00
Papua Pegunungan	15,33	38,58	46,09	100,00
Indonesia	19,92	39,84	40,24	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.11 Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,38	40,14	39,48	100,00
Sumatera Utara	20,26	39,84	39,90	100,00
Sumatera Barat	20,23	40,22	39,55	100,00
Riau	20,14	39,78	40,09	100,00
Jambi	19,88	39,67	40,45	100,00
Sumatera Selatan	20,02	39,57	40,41	100,00
Bengkulu	19,83	39,65	40,51	100,00
Lampung	19,74	39,46	40,80	100,00
Kep. Bangka Belitung	19,91	40,05	40,03	100,00
Kepulauan Riau	19,06	39,32	41,62	100,00
DKI Jakarta	19,73	40,02	40,25	100,00
Jawa Barat	19,88	39,81	40,31	100,00
Jawa Tengah	19,57	39,69	40,74	100,00
DI Yogyakarta	19,31	40,08	40,62	100,00
Jawa Timur	19,40	39,57	41,04	100,00
Banten	19,59	39,33	41,08	100,00
Bali	19,61	39,97	40,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	19,78	39,20	41,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,18	39,35	40,47	100,00
Kalimantan Barat	19,88	39,77	40,35	100,00
Kalimantan Tengah	19,42	39,75	40,83	100,00
Kalimantan Selatan	19,98	39,47	40,55	100,00
Kalimantan Timur	18,31	39,52	42,17	100,00
Kalimantan Utara	20,16	40,31	39,53	100,00
Sulawesi Utara	19,61	39,50	40,89	100,00
Sulawesi Tengah	20,11	39,67	40,22	100,00
Sulawesi Selatan	20,00	40,23	39,76	100,00
Sulawesi Tenggara	20,32	39,97	39,71	100,00
Gorontalo	19,95	40,14	39,91	100,00
Sulawesi Barat	20,52	40,10	39,38	100,00
Maluku	20,09	40,18	39,73	100,00
Maluku Utara	22,23	42,14	35,62	100,00
Papua Barat	19,49	39,61	40,89	100,00
Papua Barat Daya	19,41	39,38	41,21	100,00
Papua	21,21	34,49	44,30	100,00
Papua Selatan	23,51	37,10	39,39	100,00
Papua Tengah	17,82	37,85	44,32	100,00
Papua Pegunungan	14,98	38,91	46,12	100,00
Indonesia	19,76	39,71	40,53	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.12 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			Jumlah
	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,50	40,24	39,26	100,00
Sumatera Utara	20,32	39,91	39,76	100,00
Sumatera Barat	20,25	40,23	39,52	100,00
Riau	20,29	39,90	39,80	100,00
Jambi	20,07	39,85	40,08	100,00
Sumatera Selatan	20,08	39,64	40,28	100,00
Bengkulu	19,94	39,75	40,31	100,00
Lampung	19,83	39,55	40,61	100,00
Kep. Bangka Belitung	20,01	40,14	39,85	100,00
Kepulauan Riau	19,34	39,53	41,13	100,00
DKI Jakarta	19,89	40,10	40,02	100,00
Jawa Barat	19,95	39,88	40,17	100,00
Jawa Tengah	19,60	39,69	40,71	100,00
DI Yogyakarta	19,45	40,17	40,38	100,00
Jawa Timur	19,48	39,63	40,89	100,00
Banten	19,66	39,39	40,94	100,00
Bali	19,79	40,09	40,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	19,90	39,30	40,81	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,35	39,47	40,18	100,00
Kalimantan Barat	19,89	39,80	40,31	100,00
Kalimantan Tengah	19,53	39,81	40,66	100,00
Kalimantan Selatan	20,08	39,59	40,33	100,00
Kalimantan Timur	18,61	39,87	41,53	100,00
Kalimantan Utara	20,05	40,27	39,68	100,00
Sulawesi Utara	19,62	39,53	40,86	100,00
Sulawesi Tengah	20,08	39,69	40,22	100,00
Sulawesi Selatan	20,18	40,37	39,44	100,00
Sulawesi Tenggara	20,43	40,08	39,50	100,00
Gorontalo	19,99	40,16	39,84	100,00
Sulawesi Barat	20,62	40,22	39,16	100,00
Maluku	20,22	40,31	39,47	100,00
Maluku Utara	21,41	41,46	37,13	100,00
Papua Barat	19,45	39,49	41,05	100,00
Papua Barat Daya	19,33	39,57	41,10	100,00
Papua	21,18	34,78	44,04	100,00
Papua Selatan	23,27	37,74	38,99	100,00
Papua Tengah	17,81	38,09	44,09	100,00
Papua Pegunungan	15,17	38,73	46,10	100,00
Indonesia	19,84	39,77	40,38	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.13 Persentase Pemuda Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	81,38	18,33	0,29 ¹	100,00
Sumatera Utara	80,22	19,14	0,64	100,00
Sumatera Barat	77,04	22,45	0,51 ¹	100,00
Riau	78,60	20,93	0,47 ¹	100,00
Jambi	75,86	23,18	0,96 ¹	100,00
Sumatera Selatan	75,14	24,36	0,50 ¹	100,00
Bengkulu	78,90	19,97	1,13 ¹	100,00
Lampung	75,89	22,99	1,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	69,28	29,27	1,45 ¹	100,00
Kepulauan Riau	70,90	27,41	1,69 ¹	100,00
DKI Jakarta	83,27	16,23	0,51 ¹	100,00
Jawa Barat	73,90	25,05	1,06	100,00
Jawa Tengah	72,68	26,60	0,71	100,00
DI Yogyakarta	72,94	26,46	0,60 ¹	100,00
Jawa Timur	68,64	30,21	1,14	100,00
Banten	79,58	19,56	0,86	100,00
Bali	71,50	28,07	0,43 ¹	100,00
Nusa Tenggara Barat	68,29	30,04	1,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	80,76	18,22	1,02 ¹	100,00
Kalimantan Barat	73,34	25,90	0,76 ¹	100,00
Kalimantan Tengah	73,55	25,47	0,99 ¹	100,00
Kalimantan Selatan	72,51	26,37	1,12	100,00
Kalimantan Timur	78,15	20,95	0,89 ¹	100,00
Kalimantan Utara	75,76	22,29	1,95	100,00
Sulawesi Utara	74,33	24,58	1,08	100,00
Sulawesi Tengah	74,86	23,61	1,54 ¹	100,00
Sulawesi Selatan	75,84	23,13	1,03	100,00
Sulawesi Tenggara	76,24	22,75	1,00 ¹	100,00
Gorontalo	75,92	23,06	1,03 ¹	100,00
Sulawesi Barat	73,71	24,90	1,39 ¹	100,00
Maluku	78,96	19,52	1,53 ¹	100,00
Maluku Utara	76,63	22,37	1,00 ¹	100,00
Papua Barat	77,54	22,02	0,44 ¹	100,00
Papua Barat Daya	80,71	18,87	NA	100,00
Papua	84,57	15,01	0,42 ¹	100,00
Papua Selatan	77,50	21,84	NA	100,00
Papua Tengah	77,74	22,12	NA	100,00
Papua Pegunungan	85,10	14,55 ¹	NA	100,00
Indonesia	74,87	24,22	0,91	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.14 Persentase Pemuda Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	76,40	23,26	0,34	100,00
Sumatera Utara	72,50	26,95	0,56	100,00
Sumatera Barat	66,77	32,42	0,81	100,00
Riau	72,20	26,92	0,89	100,00
Jambi	61,59	37,31	1,11	100,00
Sumatera Selatan	61,16	37,52	1,32	100,00
Bengkulu	60,00	38,51	1,49	100,00
Lampung	62,08	37,04	0,89	100,00
Kep. Bangka Belitung	66,36	32,54	1,10 ¹	100,00
Kepulauan Riau	74,18	24,80	NA	100,00
DKI Jakarta	–	–	–	–
Jawa Barat	64,00	34,52	1,48	100,00
Jawa Tengah	61,86	36,90	1,25	100,00
DI Yogyakarta	61,68	36,49	NA	100,00
Jawa Timur	59,34	39,16	1,51	100,00
Banten	70,36	28,67	0,97 ¹	100,00
Bali	66,21	33,28	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	58,45	39,34	2,21	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,57	31,17	1,26	100,00
Kalimantan Barat	64,28	34,49	1,23	100,00
Kalimantan Tengah	62,25	36,65	1,10	100,00
Kalimantan Selatan	66,74	31,27	1,99	100,00
Kalimantan Timur	69,52	29,25	1,23 ¹	100,00
Kalimantan Utara	68,90	29,19	1,92 ¹	100,00
Sulawesi Utara	63,17	35,31	1,53 ¹	100,00
Sulawesi Tengah	64,39	34,27	1,34	100,00
Sulawesi Selatan	64,16	33,78	2,05	100,00
Sulawesi Tenggara	64,99	33,53	1,48	100,00
Gorontalo	61,97	36,10	1,93	100,00
Sulawesi Barat	64,19	34,61	1,20	100,00
Maluku	69,06	29,76	1,18	100,00
Maluku Utara	67,74	30,18	2,08	100,00
Papua Barat	65,31	33,72	0,97 ¹	100,00
Papua Barat Daya	67,81	30,67	1,52 ¹	100,00
Papua	82,93	16,52	0,55 ¹	100,00
Papua Selatan	68,97	30,74	0,29 ¹	100,00
Papua Tengah	77,57	21,67	0,76	100,00
Papua Pegunungan	76,10	23,48	0,43 ¹	100,00
Indonesia	64,84	33,92	1,24	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.15 Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	87,64	12,06	0,31 ¹	100,00
Sumatera Utara	83,63	15,96	0,41 ¹	100,00
Sumatera Barat	80,49	19,25	0,26 ¹	100,00
Riau	83,30	16,09	0,61 ¹	100,00
Jambi	76,06	23,34	0,60 ¹	100,00
Sumatera Selatan	75,95	23,26	0,79	100,00
Bengkulu	76,47	22,83	0,71 ¹	100,00
Lampung	77,02	22,48	0,50 ¹	100,00
Kep. Bangka Belitung	76,26	22,81	0,93 ¹	100,00
Kepulauan Riau	78,24	20,28	NA	100,00
DKI Jakarta	88,27	11,61	NA	100,00
Jawa Barat	81,75	17,55	0,70	100,00
Jawa Tengah	78,60	20,70	0,70	100,00
DI Yogyakarta	79,70	20,06	NA	100,00
Jawa Timur	75,83	23,52	0,65	100,00
Banten	85,26	14,09	0,66 ¹	100,00
Bali	78,26	21,34	0,40 ¹	100,00
Nusa Tenggara Barat	74,95	23,48	1,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	79,75	20,01	0,24 ¹	100,00
Kalimantan Barat	77,04	22,32	0,64 ¹	100,00
Kalimantan Tengah	77,58	21,69	0,73 ¹	100,00
Kalimantan Selatan	79,58	19,36	1,06 ¹	100,00
Kalimantan Timur	83,31	15,93	0,76 ¹	100,00
Kalimantan Utara	81,37	17,35	1,29 ¹	100,00
Sulawesi Utara	78,79	20,48	0,74 ¹	100,00
Sulawesi Tengah	77,68	21,44	0,88 ¹	100,00
Sulawesi Selatan	78,59	20,36	1,05	100,00
Sulawesi Tenggara	78,47	20,50	1,03	100,00
Gorontalo	75,08	23,88	1,04 ¹	100,00
Sulawesi Barat	74,16	24,57	1,27 ¹	100,00
Maluku	80,43	19,29	0,28 ¹	100,00
Maluku Utara	78,33	20,88	0,79 ¹	100,00
Papua Barat	77,00	22,41	0,59 ¹	100,00
Papua Barat Daya	83,58	16,11	0,31 ¹	100,00
Papua	89,46	10,42	0,13 ¹	100,00
Papua Selatan	80,63	19,04	NA	100,00
Papua Tengah	83,71	15,73	0,56 ¹	100,00
Papua Pegunungan	84,29	15,41	0,30 ¹	100,00
Indonesia	80,09	19,26	0,65	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.16 Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	68,86	30,80	0,34	100,00
Sumatera Utara	70,24	28,95	0,81	100,00
Sumatera Barat	64,11	34,84	1,04	100,00
Riau	66,04	33,14	0,82	100,00
Jambi	56,75	41,73	1,52	100,00
Sumatera Selatan	57,15	41,64	1,21	100,00
Bengkulu	56,86	41,11	2,03	100,00
Lampung	57,05	41,50	1,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	59,43	38,87	1,70 ¹	100,00
Kepulauan Riau	64,02	34,15	1,83 ¹	100,00
DKI Jakarta	78,57	20,56	0,87 ¹	100,00
Jawa Barat	62,54	35,90	1,56	100,00
Jawa Tengah	57,10	41,70	1,20	100,00
DI Yogyakarta	62,45	36,17	1,38 ¹	100,00
Jawa Timur	53,88	44,19	1,93	100,00
Banten	70,81	28,08	1,10	100,00
Bali	62,01	37,50	0,49 ¹	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,96	44,79	2,25	100,00
Nusa Tenggara Timur	63,38	34,47	2,15	100,00
Kalimantan Barat	58,58	39,96	1,45	100,00
Kalimantan Tengah	56,88	41,74	1,38	100,00
Kalimantan Selatan	59,65	38,33	2,02	100,00
Kalimantan Timur	67,65	31,12	1,23	100,00
Kalimantan Utara	65,13	32,25	2,62	100,00
Sulawesi Utara	60,26	37,92	1,82	100,00
Sulawesi Tengah	58,81	39,25	1,95	100,00
Sulawesi Selatan	61,99	36,02	1,99	100,00
Sulawesi Tenggara	61,27	37,22	1,51	100,00
Gorontalo	62,20	35,85	1,95 ¹	100,00
Sulawesi Barat	57,82	40,98	1,20 ¹	100,00
Maluku	67,37	30,20	2,43	100,00
Maluku Utara	62,59	34,70	2,71	100,00
Papua Barat	60,80	38,17	1,02 ¹	100,00
Papua Barat Daya	66,27	32,23	1,50 ¹	100,00
Papua	77,47	21,66	0,87 ¹	100,00
Papua Selatan	62,74	36,74	0,52 ¹	100,00
Papua Tengah	70,31	28,99	0,71 ¹	100,00
Papua Pegunungan	68,72	30,73	0,55 ¹	100,00
Indonesia	61,82	36,75	1,43	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.17 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025

Provinsi	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup/ Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	78,24	21,44	0,32	100,00
Sumatera Utara	77,12	22,27	0,61	100,00
Sumatera Barat	72,45	26,90	0,64	100,00
Riau	74,90	24,39	0,71	100,00
Jambi	66,46	32,49	1,06	100,00
Sumatera Selatan	66,69	32,32	1,00	100,00
Bengkulu	66,79	31,85	1,36	100,00
Lampung	67,13	31,90	0,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	68,08	30,62	1,31	100,00
Kepulauan Riau	71,08	27,27	1,65 ¹	100,00
DKI Jakarta	83,27	16,23	0,51 ¹	100,00
Jawa Barat	72,28	26,60	1,12	100,00
Jawa Tengah	67,93	31,12	0,95	100,00
DI Yogyakarta	70,86	28,31	0,83 ¹	100,00
Jawa Timur	64,91	33,80	1,29	100,00
Banten	78,13	21,00	0,88	100,00
Bali	70,31	29,24	0,45 ¹	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,87	34,22	1,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,62	27,19	1,19	100,00
Kalimantan Barat	67,87	31,09	1,05	100,00
Kalimantan Tengah	67,41	31,54	1,05	100,00
Kalimantan Selatan	69,76	28,70	1,54	100,00
Kalimantan Timur	75,66	23,35	0,99	100,00
Kalimantan Utara	73,44	24,62	1,94	100,00
Sulawesi Utara	69,80	28,94	1,26	100,00
Sulawesi Tengah	68,22	30,36	1,41	100,00
Sulawesi Selatan	70,23	28,25	1,52	100,00
Sulawesi Tenggara	69,81	28,92	1,27	100,00
Gorontalo	68,79	29,72	1,49	100,00
Sulawesi Barat	66,05	32,71	1,24	100,00
Maluku	73,93	24,72	1,35	100,00
Maluku Utara	70,57	27,69	1,73	100,00
Papua Barat	69,24	29,96	0,80	100,00
Papua Barat Daya	75,46	23,67	0,87	100,00
Papua	83,96	15,57	0,47 ¹	100,00
Papua Selatan	72,02	27,56	0,42 ¹	100,00
Papua Tengah	77,61	21,76	0,63	100,00
Papua Pegunungan	76,69	22,89	0,42 ¹	100,00
Indonesia	71,04	27,92	1,04	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.18 Persentase Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,77	4,79	9,15	1,17	5,15
Sumatera Utara	5,84	8,04	12,53	0,58 ¹	6,73
Sumatera Barat	6,69	6,65	11,93	1,22	6,67
Riau	5,99	6,44	11,79	0,42	6,25
Jambi	4,59	8,08	13,41	0,30 ¹	6,89
Sumatera Selatan	5,54	9,03	14,61	0,47	7,65
Bengkulu	6,59	6,59	12,32	0,71 ¹	6,59
Lampung	5,67	8,61	14,43	0,49	7,53
Kep. Bangka Belitung	8,51	7,26	15,03	0,56 ¹	7,99
Kepulauan Riau	14,48	4,66	20,70	7,29	13,95
DKI Jakarta	5,40	–	10,35	0,75 ¹	5,40
Jawa Barat	7,28	8,72	14,13	0,72	7,51
Jawa Tengah	5,70	6,75	11,13	1,11	6,16
DI Yogyakarta	15,94	7,16	20,87	8,08	14,31
Jawa Timur	6,42	6,87	11,75	1,40	6,60
Banten	5,19	4,32	8,91	1,09	5,05
Bali	12,48	6,79	18,36	3,71	11,20
Nusa Tenggara Barat	10,59	11,91	20,17	2,34	11,18
Nusa Tenggara Timur	7,53	5,83	10,96	1,68	6,35
Kalimantan Barat	5,78	7,01	12,11	0,86	6,53
Kalimantan Tengah	9,19	9,00	16,87	1,04	9,09
Kalimantan Selatan	8,94	8,37	16,14	0,97	8,67
Kalimantan Timur	5,25	5,52	10,19	0,25 ¹	5,33
Kalimantan Utara	5,13	4,53	8,99	0,67 ¹	4,93
Sulawesi Utara	5,64	6,17	10,72	0,69	5,86
Sulawesi Tengah	5,47	5,33	9,86	0,92	5,38
Sulawesi Selatan	3,90	4,71	8,09	0,53	4,29
Sulawesi Tenggara	7,41	5,29	11,59	0,88	6,20
Gorontalo	4,32	6,43	10,18	0,39 ¹	5,40
Sulawesi Barat	5,36	5,57	10,70	0,27 ¹	5,53
Maluku	4,30	4,21	7,70	0,78	4,25
Maluku Utara	5,41	3,72	7,96	0,45 ¹	4,26
Papua Barat	6,50	9,52	16,00	0,45 ¹	8,55
Papua Barat Daya	4,82	6,35	9,59	NA	5,44
Papua	3,78	3,90	6,72	0,41 ¹	3,82
Papua Selatan	8,12	10,12	17,15	1,06 ¹	9,41
Papua Tengah	7,54	10,36	16,82	1,32	9,76
Papua Pegunungan	11,96 ¹	8,64	16,01	1,35 ¹	8,85
Indonesia	6,78	7,11	12,56	1,14	6,91

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.19 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Status Tinggal Bersama		
	Tinggal Sendiri	Bersama Keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,92	84,48	14,60
Sumatera Utara	0,07 ¹	85,05	14,88
Sumatera Barat	0,91	73,54	25,54
Riau	0,54	83,80	15,65
Jambi	0,04 ¹	74,21	25,75
Sumatera Selatan	0,03 ¹	78,06	21,91
Bengkulu	1,05	77,43	21,52
Lampung	0,08 ¹	76,87	23,05
Kep. Bangka Belitung	0,18 ¹	85,07	14,75
Kepulauan Riau	4,89	79,33	15,78
DKI Jakarta	0,27	89,61	10,12
Jawa Barat	0,23	85,15	14,62
Jawa Tengah	0,31	71,14	28,55
DI Yogyakarta	9,61	69,52	20,87
Jawa Timur	0,37	66,77	32,85
Banten	0,18 ¹	86,34	13,48
Bali	4,82	65,91	29,27
Nusa Tenggara Barat	1,06	83,94	15,00
Nusa Tenggara Timur	3,21	68,32	28,47
Kalimantan Barat	0,07	70,59	29,34
Kalimantan Tengah	0,65	87,79	11,56
Kalimantan Selatan	0,47	84,46	15,07
Kalimantan Timur	0,16	80,76	19,08
Kalimantan Utara	NA	72,46	27,36
Sulawesi Utara	0,31 ¹	71,57	28,12
Sulawesi Tengah	0,99	71,41	27,60
Sulawesi Selatan	0,20 ¹	67,84	31,96
Sulawesi Tenggara	0,83 ¹	77,97	21,20
Gorontalo	0,12	73,54	26,34
Sulawesi Barat	0,33 ¹	70,13	29,54
Maluku	0,66	64,37	34,96
Maluku Utara	0,86 ¹	77,53	21,61
Papua Barat	0,49 ¹	80,00	19,51
Papua Barat Daya	0,30 ¹	74,05	25,65
Papua	0,41	75,29	24,31
Papua Selatan	0,72 ¹	79,90	19,37
Papua Tengah	NA	91,56	8,22
Papua Pegunungan	6,50 ¹	86,39	NA
Indonesia	0,69	78,72	20,59

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.20 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Status Tinggal Bersama		
	Tinggal Sendiri	Bersama Keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,10 ¹	84,73	15,17
Sumatera Utara	0,05	86,31	13,64
Sumatera Barat	0,09 ¹	73,35	26,56
Riau	0,06 ¹	84,92	15,03
Jambi	NA	78,62	21,34
Sumatera Selatan	0,14 ¹	79,35	20,52
Bengkulu	0,05 ¹	74,04	25,91
Lampung	0,12 ¹	75,71	24,17
Kep. Bangka Belitung	0,07 ¹	82,70	17,23
Kepulauan Riau	NA	74,53	25,22
DKI Jakarta	—	—	—
Jawa Barat	0,14 ¹	81,31	18,55
Jawa Tengah	0,46	67,02	32,52
DI Yogyakarta	NA	58,27	41,24
Jawa Timur	0,24	62,74	37,02
Banten	NA	73,59	26,39
Bali	NA	63,26	36,72
Nusa Tenggara Barat	0,16 ¹	83,46	16,37
Nusa Tenggara Timur	0,10 ¹	63,06	36,84
Kalimantan Barat	0,09 ¹	72,59	27,33
Kalimantan Tengah	0,27 ¹	82,25	17,48
Kalimantan Selatan	0,10 ¹	84,82	15,08
Kalimantan Timur	NA	75,89	23,77
Kalimantan Utara	0,16 ¹	67,16	32,68
Sulawesi Utara	0,07 ¹	65,39	34,54
Sulawesi Tengah	0,07 ¹	71,42	28,51
Sulawesi Selatan	0,05 ¹	60,90	39,04
Sulawesi Tenggara	0,06 ¹	69,65	30,28
Gorontalo	NA	63,55	36,40
Sulawesi Barat	NA	70,92	29,02
Maluku	0,03 ¹	63,47	36,50
Maluku Utara	0,07	63,58	36,35
Papua Barat	0,68 ¹	78,12	21,20
Papua Barat Daya	0,55	68,51	30,94
Papua	0,46	79,57	19,97
Papua Selatan	0,20 ¹	91,58	8,23
Papua Tengah	1,04	94,20	4,76
Papua Pegunungan	0,49	96,82	2,68
Indonesia	0,19	73,56	26,26

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.21 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Status Tinggal Bersama		
	Tinggal Sendiri	Bersama Keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,41	84,64	14,96
Sumatera Utara	0,06	85,56	14,38
Sumatera Barat	0,54	73,46	26,00
Riau	0,26	84,45	15,29
Jambi	0,04 ¹	77,12	22,84
Sumatera Selatan	0,09 ¹	78,84	21,07
Bengkulu	0,41	75,26	24,33
Lampung	0,10 ¹	76,14	23,76
Kep. Bangka Belitung	0,13 ¹	84,09	15,77
Kepulauan Riau	4,64	79,06	16,30
DKI Jakarta	0,27	89,61	10,12
Jawa Barat	0,21	84,52	15,26
Jawa Tengah	0,38	69,33	30,29
DI Yogyakarta	7,93	67,44	24,63
Jawa Timur	0,32	65,16	34,53
Banten	0,16 ¹	84,32	15,52
Bali	3,74	65,32	30,94
Nusa Tenggara Barat	0,66	83,72	15,62
Nusa Tenggara Timur	1,05	64,67	34,27
Kalimantan Barat	0,08 ¹	71,80	28,12
Kalimantan Tengah	0,44	84,79	14,77
Kalimantan Selatan	0,29	84,63	15,07
Kalimantan Timur	0,22 ¹	79,35	20,44
Kalimantan Utara	NA	70,67	29,16
Sulawesi Utara	0,21 ¹	69,06	30,73
Sulawesi Tengah	0,41	71,42	28,18
Sulawesi Selatan	0,13	64,51	35,36
Sulawesi Tenggara	0,39 ¹	73,22	26,39
Gorontalo	0,08	68,44	31,48
Sulawesi Barat	0,12 ¹	70,76	29,12
Maluku	0,34	63,92	35,74
Maluku Utara	0,32	68,02	31,66
Papua Barat	0,62	78,73	20,66
Papua Barat Daya	0,40	71,80	27,80
Papua	0,43	76,88	22,69
Papua Selatan	0,38	87,41	12,21
Papua Tengah	0,87	93,64	5,49
Papua Pegunungan	0,89	96,14	2,97
Indonesia	0,50	76,75	22,75

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.22 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Berstatus Kawin Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18,33	16,30	20,36	5,66	23,26	21,62	24,91	3,61
Sumatera Utara	19,14	17,33	20,96	4,84	26,95	25,09	28,81	3,52
Sumatera Barat	22,45	20,22	24,68	5,07	32,42	30,16	34,67	3,54
Riau	20,93	18,36	23,50	6,26	26,92	24,64	29,20	4,32
Jambi	23,18	19,80	26,56	7,44	37,31	34,65	39,96	3,63
Sumatera Selatan	24,36	21,28	27,44	6,46	37,52	35,37	39,67	2,93
Bengkulu	19,97	16,47	23,48	8,96	38,51	35,73	41,29	3,68
Lampung	22,99	20,37	25,62	5,82	37,04	34,57	39,50	3,40
Kep. Bangka Belitung	29,27	25,64	32,90	6,33	32,54	28,69	36,38	6,03
Kepulauan Riau	27,41	22,88	31,94	8,43	24,80	20,23	29,37	9,41
DKI Jakarta	16,23	14,11	18,34	6,65	–	–	–	–
Jawa Barat	25,05	23,72	26,38	2,71	34,52	31,72	37,33	4,14
Jawa Tengah	26,60	25,37	27,84	2,36	36,90	35,08	38,71	2,51
DI Yogyakarta	26,46	23,20	29,72	6,29	36,49	29,80	43,19	9,36
Jawa Timur	30,21	28,82	31,61	2,35	39,16	37,34	40,97	2,37
Banten	19,56	17,20	21,91	6,14	28,67	24,05	33,29	8,22
Bali	28,07	25,18	30,95	5,24	33,28	29,28	37,28	6,13
Nusa Tenggara Barat	30,04	27,36	32,72	4,55	39,34	35,63	43,04	4,80
Nusa Tenggara Timur	18,22	15,33	21,11	8,09	31,17	29,50	32,83	2,72
Kalimantan Barat	25,90	22,92	28,87	5,87	34,49	32,17	36,80	3,42
Kalimantan Tengah	25,47	22,49	28,45	5,97	36,65	33,76	39,54	4,03
Kalimantan Selatan	26,37	23,78	28,96	5,01	31,27	28,61	33,93	4,34
Kalimantan Timur	20,95	18,49	23,41	5,99	29,25	25,39	33,10	6,72
Kalimantan Utara	22,29	18,24	26,34	9,27	29,19	23,88	34,49	9,28
Sulawesi Utara	24,58	21,76	27,41	5,86	35,31	32,51	38,10	4,04
Sulawesi Tengah	23,61	20,43	26,79	6,88	34,27	31,83	36,71	3,63
Sulawesi Selatan	23,13	20,80	25,47	5,16	33,78	31,96	35,61	2,75
Sulawesi Tenggara	22,75	19,43	26,08	7,46	33,53	31,34	35,73	3,33
Gorontalo	23,06	19,23	26,88	8,46	36,10	32,29	39,91	5,39
Sulawesi Barat	24,90	19,59	30,21	10,88	34,61	31,36	37,87	4,80
Maluku	19,52	15,65	23,39	10,11	29,76	27,12	32,40	4,52
Maluku Utara	22,37	18,03	26,71	9,90	30,18	27,23	33,14	4,99
Papua Barat	22,02	17,70	26,34	10,02	33,72	29,51	37,93	6,37
Papua Barat Daya	18,87	14,25	23,49	12,49	30,67	27,18	34,16	5,81
Papua	15,01	11,71	18,31	11,21	16,52	13,56	19,48	9,14
Papua Selatan	21,84	15,06	28,61	15,83	30,74	26,41	35,06	7,18
Papua Tengah	22,12	16,38	27,87	13,25	21,67	19,19	24,14	5,82
Papua Pegunungan	14,55	0,76	28,34	48,35	23,48	20,98	25,97	5,42
Indonesia	24,22	23,70	24,73	1,08	33,92	33,38	34,46	0,82

Lanjutan Tabel 2.22

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	12,06	10,89	13,22	4,93	30,80	29,10	32,51	2,83	21,44	20,16	22,72	3,05
Sumatera Utara	15,96	14,66	17,27	4,18	28,95	27,25	30,64	2,98	22,27	20,93	23,60	3,06
Sumatera Barat	19,25	17,63	20,88	4,31	34,84	32,77	36,91	3,04	26,90	25,28	28,52	3,07
Riau	16,09	14,47	17,72	5,16	33,14	30,92	35,35	3,42	24,39	22,68	26,10	3,58
Jambi	23,34	21,14	25,55	4,82	41,73	39,13	44,33	3,18	32,49	30,37	34,60	3,33
Sumatera Selatan	23,26	21,44	25,09	4,01	41,64	39,47	43,82	2,67	32,32	30,53	34,10	2,82
Bengkulu	22,83	20,52	25,13	5,14	41,11	38,28	43,93	3,50	31,85	29,60	34,10	3,60
Lampung	22,48	20,56	24,40	4,36	41,50	39,21	43,79	2,82	31,90	30,04	33,75	2,97
Kep. Bangka Belitung	22,81	20,05	25,56	6,16	38,87	35,59	42,14	4,30	30,62	27,97	33,27	4,42
Kepulauan Riau	20,28	15,79	24,78	11,30	34,15	29,04	39,26	7,64	27,27	22,98	31,56	8,03
DKI Jakarta	11,61	9,51	13,72	9,25	20,56	17,93	23,19	6,53	16,23	14,11	18,34	6,65
Jawa Barat	17,55	16,36	18,74	3,46	35,90	34,38	37,41	2,15	26,60	25,40	27,80	2,31
Jawa Tengah	20,70	19,60	21,80	2,72	41,70	40,38	43,02	1,61	31,12	30,06	32,19	1,74
DI Yogyakarta	20,06	17,01	23,10	7,74	36,17	32,61	39,73	5,02	28,31	25,39	31,24	5,28
Jawa Timur	23,52	22,35	24,70	2,55	44,19	42,82	45,56	1,58	33,80	32,69	34,92	1,68
Banten	14,09	12,06	16,12	7,35	28,08	25,45	30,71	4,78	21,00	18,89	23,11	5,13
Bali	21,34	18,90	23,78	5,83	37,50	34,52	40,47	4,05	29,24	26,83	31,65	4,20
Nusa Tenggara Barat	23,48	21,20	25,77	4,97	44,79	42,04	47,55	3,14	34,22	32,00	36,44	3,31
Nusa Tenggara Timur	20,01	18,51	21,51	3,83	34,47	32,68	36,25	2,64	27,19	25,72	28,67	2,77
Kalimantan Barat	22,32	20,42	24,22	4,34	39,96	37,70	42,22	2,88	31,09	29,26	32,92	3,00
Kalimantan Tengah	21,69	19,54	23,83	5,04	41,74	39,15	44,33	3,17	31,54	29,45	33,63	3,39
Kalimantan Selatan	19,36	17,50	21,22	4,91	38,33	36,01	40,66	3,09	28,70	26,85	30,56	3,30
Kalimantan Timur	15,93	13,91	17,94	6,45	31,12	28,42	33,81	4,42	23,35	21,26	25,44	4,57
Kalimantan Utara	17,35	14,01	20,68	9,82	32,25	28,38	36,11	6,12	24,62	21,37	27,88	6,75
Sulawesi Utara	20,48	18,42	22,54	5,14	37,92	35,31	40,52	3,50	28,94	26,91	30,97	3,59
Sulawesi Tengah	21,44	19,42	23,46	4,80	39,25	36,82	41,67	3,16	30,36	28,41	32,32	3,28
Sulawesi Selatan	20,36	18,80	21,92	3,91	36,02	34,16	37,89	2,64	28,25	26,73	29,77	2,74
Sulawesi Tenggara	20,50	18,57	22,42	4,80	37,22	34,86	39,59	3,24	28,92	27,01	30,82	3,37
Gorontalo	23,88	21,06	26,70	6,04	35,85	32,52	39,18	4,74	29,72	26,98	32,46	4,71
Sulawesi Barat	24,57	21,60	27,55	6,18	40,98	37,59	44,36	4,22	32,71	29,90	35,53	4,39
Maluku	19,29	16,84	21,74	6,49	30,20	27,43	32,97	4,69	24,72	22,38	27,06	4,83
Maluku Utara	20,88	18,38	23,39	6,12	34,70	31,77	37,63	4,31	27,69	25,23	30,16	4,55
Papua Barat	22,41	19,07	25,74	7,60	38,17	34,26	42,09	5,23	29,96	26,78	33,14	5,41
Papua Barat Daya	16,11	13,04	19,18	9,72	32,23	28,20	36,26	6,38	23,67	20,51	26,83	6,81
Papua	10,42	8,23	12,60	10,69	21,66	18,56	24,75	7,30	15,57	13,23	17,92	7,67
Papua Selatan	19,04	15,44	22,63	9,63	36,74	32,25	41,23	6,24	27,56	23,86	31,25	6,84
Papua Tengah	15,73	13,60	17,86	6,90	28,99	26,02	31,95	5,22	21,76	19,47	24,06	5,39
Papua Pegunungan	15,41	13,00	17,82	7,98	30,73	27,53	33,94	5,32	22,89	20,38	25,40	5,59
Indonesia	19,26	18,88	19,64	1,01	36,75	36,27	37,22	0,66	27,92	27,54	28,30	0,70

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.23 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Berstatus Cerai Hidup/Cerai Mati Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	0,29	0,10	0,48	33,58	0,34	0,19	0,49	22,66
Sumatera Utara	0,64	0,36	0,92	22,12	0,56	0,33	0,78	20,79
Sumatera Barat	0,51	0,14	0,88	37,10	0,81	0,50	1,12	19,80
Riau	0,47	0,18	0,76	31,71	0,89	0,50	1,27	22,18
Jambi	0,96	0,34	1,58	33,03	1,11	0,62	1,59	22,36
Sumatera Selatan	0,50	0,19	0,81	31,45	1,32	0,94	1,70	14,82
Bengkulu	1,13	0,32	1,95	36,56	1,49	0,92	2,06	19,61
Lampung	1,12	0,60	1,63	23,46	0,89	0,49	1,28	22,62
Kep. Bangka Belitung	1,45	0,57	2,33	30,80	1,10	0,43	1,77	31,00
Kepulauan Riau	1,69	0,64	2,75	31,84	NA	NA	NA	50,44
DKI Jakarta	0,51	0,21	0,80	29,46	–	–	–	–
Jawa Barat	1,06	0,82	1,29	11,23	1,48	0,91	2,05	19,70
Jawa Tengah	0,71	0,55	0,87	11,58	1,25	0,91	1,58	13,69
DI Yogyakarta	0,60	0,24	0,96	30,91	NA	NA	NA	55,81
Jawa Timur	1,14	0,89	1,40	11,33	1,51	1,06	1,95	15,10
Banten	0,86	0,51	1,22	21,06	0,97	0,07	1,86	47,21
Bali	0,43	0,12	0,74	37,06	NA	NA	NA	52,46
Nusa Tenggara Barat	1,67	1,06	2,27	18,65	2,21	1,22	3,20	22,93
Nusa Tenggara Timur	1,02	0,38	1,66	32,11	1,26	0,94	1,59	12,97
Kalimantan Barat	0,76	0,37	1,16	26,23	1,23	0,80	1,66	17,87
Kalimantan Tengah	0,99	0,39	1,58	30,69	1,10	0,64	1,56	21,24
Kalimantan Selatan	1,12	0,64	1,60	21,86	1,99	1,28	2,70	18,25
Kalimantan Timur	0,89	0,44	1,35	26,18	1,23	0,41	2,06	34,21
Kalimantan Utara	1,95	1,00	2,90	24,89	1,92	0,64	3,20	34,07
Sulawesi Utara	1,08	0,63	1,54	21,25	1,53	0,75	2,30	25,86
Sulawesi Tengah	1,54	0,65	2,42	29,36	1,34	0,87	1,82	18,05
Sulawesi Selatan	1,03	0,66	1,39	18,25	2,05	1,56	2,54	12,20
Sulawesi Tenggara	1,00	0,50	1,50	25,34	1,48	1,01	1,94	16,10
Gorontalo	1,03	0,18	1,87	41,92	1,93	1,04	2,82	23,41
Sulawesi Barat	1,39	0,37	2,41	37,46	1,20	0,62	1,78	24,54
Maluku	1,53	0,63	2,42	29,94	1,18	0,70	1,65	20,58
Maluku Utara	1,00	0,21	1,79	40,37	2,08	1,34	2,82	18,11
Papua Barat	0,44	0,07	0,80	42,88	0,97	0,43	1,51	28,20
Papua Barat Daya	NA	NA	NA	51,08	1,52	0,76	2,28	25,61
Papua	0,42	0,05	0,79	45,22	0,55	0,13	0,97	38,72
Papua Selatan	NA	NA	NA	53,68	0,29	0,08	0,50	37,54
Papua Tengah	NA	NA	NA	87,48	0,76	0,40	1,12	24,10
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	103,43	0,43	0,18	0,67	29,04
Indonesia	0,91	0,83	1,00	4,78	1,24	1,13	1,35	4,51

Lanjutan Tabel 2.23

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	0,31	0,14	0,48	28,44	0,34	0,17	0,50	24,92	0,32	0,20	0,44	18,80
Sumatera Utara	0,41	0,18	0,63	27,97	0,81	0,51	1,12	19,37	0,61	0,42	0,79	15,94
Sumatera Barat	0,26	0,05	0,46	40,38	1,04	0,58	1,50	22,48	0,64	0,40	0,89	19,70
Riau	0,61	0,27	0,95	28,31	0,82	0,43	1,20	23,97	0,71	0,46	0,97	18,29
Jambi	0,60	0,23	0,97	31,54	1,52	0,85	2,19	22,63	1,06	0,67	1,44	18,52
Sumatera Selatan	0,79	0,44	1,14	22,83	1,21	0,82	1,60	16,39	1,00	0,73	1,26	13,44
Bengkulu	0,71	0,33	1,08	26,98	2,03	1,18	2,88	21,29	1,36	0,89	1,83	17,56
Lampung	0,50	0,22	0,78	28,21	1,45	0,89	2,01	19,79	0,97	0,66	1,28	16,40
Kep. Bangka Belitung	0,93	0,30	1,55	34,30	1,70	0,70	2,71	30,08	1,31	0,72	1,89	22,81
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	53,65	1,83	0,56	3,09	35,32	1,65	0,65	2,65	30,83
DKI Jakarta	NA	NA	NA	67,03	0,87	0,33	1,41	31,85	0,51	0,21	0,80	29,46
Jawa Barat	0,70	0,46	0,94	17,34	1,56	1,20	1,92	11,82	1,12	0,91	1,34	9,78
Jawa Tengah	0,70	0,48	0,92	16,12	1,20	0,93	1,46	11,35	0,95	0,78	1,12	9,30
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	53,33	1,38	0,49	2,27	32,96	0,83	0,35	1,30	29,26
Jawa Timur	0,65	0,43	0,88	17,59	1,93	1,55	2,32	10,17	1,29	1,05	1,52	9,30
Banten	0,66	0,20	1,12	35,55	1,10	0,62	1,58	22,16	0,88	0,55	1,21	19,25
Bali	0,40	0,05	0,75	44,12	0,49	0,08	0,90	42,58	0,45	0,18	0,72	30,70
Nusa Tenggara Barat	1,57	0,80	2,33	24,80	2,25	1,47	3,03	17,73	1,91	1,35	2,47	14,91
Nusa Tenggara Timur	0,24	0,09	0,40	32,81	2,15	1,57	2,73	13,71	1,19	0,89	1,49	12,75
Kalimantan Barat	0,64	0,30	0,99	27,31	1,45	0,95	1,96	17,66	1,05	0,74	1,35	14,81
Kalimantan Tengah	0,73	0,26	1,21	33,11	1,38	0,81	1,95	20,98	1,05	0,68	1,42	17,91
Kalimantan Selatan	1,06	0,54	1,59	25,20	2,02	1,35	2,69	16,87	1,54	1,11	1,96	14,06
Kalimantan Timur	0,76	0,19	1,34	38,59	1,23	0,66	1,80	23,60	0,99	0,59	1,40	20,82
Kalimantan Utara	1,29	0,32	2,26	38,45	2,62	1,43	3,81	23,15	1,94	1,17	2,70	20,11
Sulawesi Utara	0,74	0,33	1,14	27,81	1,82	1,17	2,47	18,21	1,26	0,85	1,68	16,70
Sulawesi Tengah	0,88	0,36	1,39	29,89	1,95	1,22	2,68	19,10	1,41	0,97	1,86	15,97
Sulawesi Selatan	1,05	0,65	1,44	19,13	1,99	1,54	2,43	11,48	1,52	1,21	1,82	10,24
Sulawesi Tenggara	1,03	0,57	1,49	22,67	1,51	1,00	2,02	17,08	1,27	0,93	1,62	13,69
Gorontalo	1,04	0,32	1,77	35,56	1,95	0,96	2,95	26,08	1,49	0,88	2,10	20,98
Sulawesi Barat	1,27	0,46	2,08	32,39	1,20	0,58	1,82	26,37	1,24	0,73	1,74	20,83
Maluku	0,28	0,08	0,48	37,18	2,43	1,44	3,42	20,72	1,35	0,85	1,85	19,01
Maluku Utara	0,79	0,33	1,24	29,54	2,71	1,68	3,74	19,34	1,73	1,17	2,30	16,58
Papua Barat	0,59	0,13	1,06	39,97	1,02	0,41	1,64	30,79	0,80	0,42	1,18	24,47
Papua Barat Daya	0,31	0,07	0,55	39,52	1,50	0,69	2,31	27,51	0,87	0,46	1,27	23,69
Papua	0,13	0,03	0,22	37,64	0,87	0,28	1,47	34,79	0,47	0,19	0,75	30,58
Papua Selatan	NA	NA	NA	60,54	0,52	0,12	0,92	39,71	0,42	0,14	0,71	34,22
Papua Tengah	0,56	0,21	0,90	31,44	0,71	0,23	1,18	34,31	0,63	0,34	0,91	23,36
Papua Pegunungan	0,30	0,03	0,57	45,70	0,55	0,17	0,93	35,39	0,42	0,19	0,65	28,03
Indonesia	0,65	0,58	0,73	5,95	1,43	1,32	1,54	3,92	1,04	0,97	1,11	3,32

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.24 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	5,77	4,86	6,69	8,09	4,79	4,23	5,36	6,03
Sumatera Utara	5,84	5,08	6,61	6,68	8,04	7,24	8,85	5,11
Sumatera Barat	6,69	5,65	7,73	7,90	6,65	5,81	7,49	6,43
Riau	5,99	4,94	7,04	8,96	6,44	5,53	7,36	7,26
Jambi	4,59	3,36	5,82	13,68	8,08	7,00	9,17	6,85
Sumatera Selatan	5,54	4,46	6,61	9,94	9,03	8,11	9,94	5,17
Bengkulu	6,59	5,06	8,11	11,82	6,59	5,62	7,56	7,50
Lampung	5,67	4,59	6,75	9,71	8,61	7,57	9,64	6,13
Kep. Bangka Belitung	8,51	6,86	10,16	9,89	7,26	5,82	8,70	10,09
Kepulauan Riau	14,48	11,62	17,34	10,07	4,66	2,95	6,37	18,74
DKI Jakarta	5,40	4,45	6,35	8,98	–	–	–	–
Jawa Barat	7,28	6,69	7,86	4,10	8,72	7,53	9,92	7,00
Jawa Tengah	5,70	5,21	6,18	4,36	6,75	6,00	7,50	5,67
DI Yogyakarta	15,94	13,84	18,03	6,70	7,16	3,94	10,38	22,93
Jawa Timur	6,42	5,85	6,99	4,53	6,87	6,13	7,61	5,50
Banten	5,19	4,32	6,06	8,58	4,32	2,77	5,86	18,24
Bali	12,48	10,75	14,20	7,04	6,79	5,18	8,39	12,09
Nusa Tenggara Barat	10,59	9,29	11,89	6,28	11,91	10,24	13,58	7,14
Nusa Tenggara Timur	7,53	6,07	8,99	9,89	5,83	5,24	6,42	5,17
Kalimantan Barat	5,78	4,62	6,94	10,26	7,01	6,10	7,92	6,62
Kalimantan Tengah	9,19	7,77	10,62	7,90	9,00	7,81	10,19	6,76
Kalimantan Selatan	8,94	7,72	10,16	6,96	8,37	7,20	9,54	7,11
Kalimantan Timur	5,25	4,35	6,16	8,77	5,52	4,08	6,97	13,37
Kalimantan Utara	5,13	3,80	6,46	13,22	4,53	3,23	5,83	14,68
Sulawesi Utara	5,64	4,55	6,73	9,84	6,17	5,16	7,18	8,35
Sulawesi Tengah	5,47	4,30	6,64	10,91	5,33	4,52	6,13	7,73
Sulawesi Selatan	3,90	3,15	4,66	9,87	4,71	4,15	5,26	6,04
Sulawesi Tenggara	7,41	5,82	9,01	10,98	5,29	4,57	6,02	6,97
Gorontalo	4,32	3,26	5,38	12,56	6,43	5,19	7,68	9,85
Sulawesi Barat	5,36	3,40	7,32	18,63	5,57	4,60	6,53	8,86
Maluku	4,30	3,15	5,45	13,68	4,21	3,44	4,98	9,34
Maluku Utara	5,41	3,80	7,03	15,23	3,72	2,97	4,46	10,23
Papua Barat	6,50	4,74	8,25	13,79	9,52	7,71	11,33	9,70
Papua Barat Daya	4,82	3,02	6,62	19,09	6,35	5,09	7,62	10,15
Papua	3,78	2,54	5,02	16,77	3,90	2,89	4,91	13,18
Papua Selatan	8,12	4,84	11,41	20,65	10,12	8,38	11,86	8,79
Papua Tengah	7,54	4,79	10,29	18,61	10,36	9,12	11,60	6,11
Papua Pegunungan	11,96	3,38	20,54	36,62	8,64	7,48	9,79	6,81
Indonesia	6,78	6,56	7,00	1,68	7,11	6,89	7,33	1,58

Lanjutan Tabel 2.24

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	9,15	8,19	10,11	5,35	1,17	0,82	1,52	15,20	5,15	4,66	5,65	4,87
Sumatera Utara	12,53	11,43	13,63	4,50	0,58	0,28	0,89	26,82	6,73	6,16	7,29	4,29
Sumatera Barat	11,93	10,62	13,23	5,59	1,22	0,74	1,70	20,08	6,67	5,99	7,36	5,24
Riau	11,79	10,41	13,16	5,95	0,42	0,22	0,61	23,99	6,25	5,56	6,94	5,64
Jambi	13,41	11,72	15,09	6,42	0,30	0,13	0,48	28,89	6,89	6,06	7,72	6,15
Sumatera Selatan	14,61	13,20	16,03	4,94	0,47	0,28	0,65	20,34	7,65	6,94	8,35	4,69
Bengkulu	12,32	10,67	13,98	6,85	0,71	0,35	1,07	25,69	6,59	5,76	7,42	6,41
Lampung	14,43	12,89	15,98	5,46	0,49	0,25	0,73	24,89	7,53	6,76	8,30	5,19
Kep. Bangka Belitung	15,03	12,78	17,27	7,62	0,56	0,18	0,94	34,32	7,99	6,86	9,13	7,26
Kepulauan Riau	20,70	16,00	25,41	11,59	7,29	4,12	10,45	22,18	13,95	11,24	16,65	9,89
DKI Jakarta	10,35	8,39	12,32	9,68	0,75	0,38	1,12	25,33	5,40	4,45	6,35	8,98
Jawa Barat	14,13	13,06	15,19	3,83	0,72	0,51	0,93	14,90	7,51	6,99	8,04	3,58
Jawa Tengah	11,13	10,30	11,96	3,81	1,11	0,86	1,36	11,39	6,16	5,73	6,59	3,55
DI Yogyakarta	20,87	17,73	24,01	7,67	8,08	6,12	10,04	12,36	14,31	12,52	16,11	6,41
Jawa Timur	11,75	10,87	12,62	3,79	1,40	1,09	1,71	11,25	6,60	6,15	7,05	3,50
Banten	8,91	7,42	10,40	8,53	1,09	0,63	1,55	21,37	5,05	4,28	5,83	7,82
Bali	18,36	15,86	20,85	6,94	3,71	2,35	5,08	18,77	11,20	9,81	12,59	6,33
Nusa Tenggara Barat	20,17	18,05	22,30	5,38	2,34	1,77	2,90	12,40	11,18	10,15	12,22	4,73
Nusa Tenggara Timur	10,96	9,82	12,10	5,30	1,68	1,23	2,13	13,58	6,35	5,74	6,95	4,86
Kalimantan Barat	12,11	10,71	13,52	5,94	0,86	0,46	1,27	24,06	6,53	5,81	7,24	5,61
Kalimantan Tengah	16,87	15,02	18,72	5,58	1,04	0,59	1,49	22,24	9,09	8,17	10,01	5,15
Kalimantan Selatan	16,14	14,43	17,84	5,39	0,97	0,56	1,38	21,58	8,67	7,82	9,51	4,98
Kalimantan Timur	10,19	8,66	11,71	7,64	0,25	0,13	0,38	25,26	5,33	4,56	6,10	7,34
Kalimantan Utara	8,99	7,06	10,92	10,94	0,67	0,13	1,21	40,84	4,93	3,94	5,91	10,18
Sulawesi Utara	10,72	9,23	12,22	7,13	0,69	0,40	0,99	21,82	5,86	5,09	6,62	6,67
Sulawesi Tengah	9,86	8,55	11,17	6,79	0,92	0,52	1,32	22,27	5,38	4,71	6,05	6,33
Sulawesi Selatan	8,09	7,13	9,05	6,05	0,53	0,34	0,73	18,64	4,29	3,81	4,76	5,66
Sulawesi Tenggara	11,59	10,02	13,17	6,95	0,88	0,46	1,30	24,39	6,20	5,40	7,00	6,60
Gorontalo	10,18	8,56	11,80	8,13	0,39	0,03	0,74	46,54	5,40	4,58	6,22	7,78
Sulawesi Barat	10,70	8,95	12,45	8,33	0,27	0,09	0,46	34,55	5,53	4,66	6,39	8,00
Maluku	7,70	6,34	9,06	9,00	0,78	0,43	1,12	22,65	4,25	3,56	4,94	8,26
Maluku Utara	7,96	6,54	9,37	9,08	0,45	0,15	0,75	33,83	4,26	3,53	4,98	8,66
Papua Barat	16,00	13,32	18,68	8,55	0,45	0,19	0,71	29,16	8,55	7,20	9,90	8,07
Papua Barat Daya	9,59	7,35	11,82	11,89	NA	NA	NA	50,16	5,44	4,25	6,64	11,23
Papua	6,72	5,10	8,34	12,28	0,41	0,19	0,62	26,60	3,82	2,96	4,69	11,54
Papua Selatan	17,15	13,95	20,35	9,53	1,06	0,24	1,87	39,51	9,41	7,78	11,03	8,83
Papua Tengah	16,82	14,67	18,97	6,53	1,32	0,75	1,88	21,87	9,76	8,63	10,90	5,95
Papua Pegunungan	16,01	13,64	18,37	7,54	1,35	0,57	2,13	29,44	8,85	7,65	10,06	6,95
Indonesia	12,56	12,25	12,88	1,29	1,14	1,05	1,24	4,15	6,91	6,75	7,07	1,19

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.25 Sampling Error Persentase Pemuda dengan Status Tinggal Sendiri Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,92	0,64	1,20	15,57	0,10	0,03	0,18	34,26	0,41	0,29	0,52	14,03
Sumatera Utara	0,07	0,03	0,10	27,99	0,05	0,03	0,07	22,01	0,06	0,04	0,08	19,81
Sumatera Barat	0,91	0,50	1,33	23,13	0,09	0,02	0,15	38,91	0,54	0,31	0,78	21,58
Riau	0,54	0,31	0,77	21,82	0,06	~0	0,11	49,03	0,26	0,16	0,36	19,83
Jambi	0,04	0,02	0,06	27,34	NA	NA	NA	65,84	0,04	~0	0,08	45,33
Sumatera Selatan	0,03	0,01	0,05	29,11	0,14	0,06	0,22	29,80	0,09	0,05	0,14	26,22
Bengkulu	1,05	0,59	1,52	22,56	0,05	0,01	0,08	38,27	0,41	0,24	0,57	20,63
Lampung	0,08	~0	0,15	48,11	0,12	0,02	0,21	40,65	0,10	0,04	0,17	32,27
Kep. Bangka Belitung	0,18	0,02	0,34	46,13	0,07	0,03	0,11	30,65	0,13	0,04	0,23	36,64
Kepulauan Riau	4,89	2,91	6,88	20,69	NA	NA	NA	71,65	4,64	2,77	6,51	20,60
DKI Jakarta	0,27	0,16	0,37	19,91	-	-	-	-	0,27	0,16	0,37	19,91
Jawa Barat	0,23	0,14	0,31	18,97	0,14	0,01	0,27	47,60	0,21	0,14	0,29	17,69
Jawa Tengah	0,31	0,24	0,39	12,04	0,46	0,24	0,68	24,30	0,38	0,27	0,48	14,14
DI Yogyakarta	9,61	7,89	11,33	9,13	NA	NA	NA	75,09	7,93	6,53	9,32	8,98
Jawa Timur	0,37	0,24	0,51	18,43	0,24	0,13	0,35	24,10	0,32	0,23	0,41	14,79
Banten	0,18	0,06	0,30	33,70	NA	NA	NA	53,32	0,16	0,06	0,26	32,94
Bali	4,82	3,55	6,09	13,45	NA	NA	NA	77,69	3,74	2,76	4,72	13,39
Nusa Tenggara Barat	1,06	0,66	1,47	19,33	0,16	0,05	0,27	34,22	0,66	0,43	0,89	17,54
Nusa Tenggara Timur	3,21	2,31	4,12	14,37	0,10	0,04	0,16	29,51	1,05	0,78	1,33	13,18
Kalimantan Barat	0,07	0,04	0,10	19,60	0,09	0,01	0,17	47,78	0,08	0,03	0,13	32,11
Kalimantan Tengah	0,65	0,44	0,86	16,64	0,27	0,11	0,43	29,49	0,44	0,31	0,57	14,74
Kalimantan Selatan	0,47	0,30	0,64	17,99	0,10	0,03	0,17	37,25	0,29	0,20	0,39	16,18
Kalimantan Timur	0,16	0,10	0,23	20,83	NA	NA	NA	57,14	0,22	0,09	0,34	28,71
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	74,11	0,16	0,04	0,27	37,74	NA	NA	NA	52,44
Sulawesi Utara	0,31	0,09	0,52	35,84	0,07	~0	0,14	49,40	0,21	0,08	0,34	31,61
Sulawesi Tengah	0,99	0,63	1,35	18,63	0,07	0,03	0,11	31,03	0,41	0,27	0,54	16,56
Sulawesi Selatan	0,20	0,09	0,32	28,73	0,05	0,01	0,10	44,48	0,13	0,07	0,19	24,66
Sulawesi Tenggara	0,83	0,31	1,35	32,09	0,06	0,02	0,10	31,71	0,39	0,17	0,62	29,15
Gorontalo	0,12	0,07	0,16	20,14	NA	NA	NA	52,93	0,08	0,05	0,11	21,08
Sulawesi Barat	0,33	0,01	0,65	49,86	NA	NA	NA	68,46	0,12	0,02	0,21	41,12
Maluku	0,66	0,38	0,94	21,60	0,03	0,01	0,06	34,91	0,34	0,21	0,48	20,11
Maluku Utara	0,86	0,42	1,29	25,99	0,07	0,04	0,10	23,07	0,32	0,18	0,46	21,95
Papua Barat	0,49	0,14	0,84	36,23	0,68	0,34	1,01	25,13	0,62	0,36	0,87	20,86
Papua Barat Daya	0,30	0,03	0,56	45,26	0,55	0,30	0,81	23,59	0,40	0,21	0,59	24,06
Papua	0,41	0,21	0,60	24,13	0,46	0,33	0,60	15,09	0,43	0,30	0,56	15,65
Papua Selatan	0,72	0,23	1,21	34,76	0,20	0,08	0,31	28,89	0,38	0,20	0,57	24,69
Papua Tengah	NA	NA	NA	50,95	1,04	0,80	1,28	11,94	0,87	0,67	1,06	11,58
Papua Pegunungan	6,50	0,71	12,28	45,43	0,49	0,35	0,64	15,27	0,89	0,53	1,25	20,81
Indonesia	0,69	0,63	0,75	4,70	0,19	0,15	0,22	10,14	0,50	0,46	0,54	4,28

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 2.26 *Sampling Error* Persentase Pemuda dengan Status Tinggal Lainnya Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	14,60	12,21	16,99	8,35	15,17	13,17	17,17	6,74	14,96	13,42	16,50	5,26
Sumatera Utara	14,88	12,61	17,15	7,79	13,64	11,90	15,38	6,50	14,38	12,85	15,92	5,43
Sumatera Barat	25,54	22,43	28,65	6,21	26,56	23,93	29,19	5,05	26,00	23,92	28,08	4,09
Riau	15,65	12,60	18,71	9,95	15,03	12,63	17,42	8,14	15,29	13,40	17,18	6,32
Jambi	25,75	21,39	30,10	8,63	21,34	18,66	24,01	6,40	22,84	20,53	25,15	5,16
Sumatera Selatan	21,91	18,05	25,76	8,97	20,52	18,30	22,74	5,52	21,07	19,03	23,10	4,92
Bengkulu	21,52	17,16	25,89	10,35	25,91	22,99	28,83	5,75	24,33	21,89	26,78	5,13
Lampung	23,05	19,82	26,28	7,14	24,17	21,59	26,75	5,45	23,76	21,74	25,78	4,34
Kep. Bangka Belitung	14,75	11,73	17,77	10,44	17,23	13,43	21,03	11,25	15,77	13,40	18,14	7,67
Kepulauan Riau	15,78	11,44	20,13	14,05	25,22	18,00	32,45	14,62	16,30	12,17	20,42	12,92
DKI Jakarta	10,12	8,19	12,05	9,73	–	–	–	–	10,12	8,19	12,05	9,73
Jawa Barat	14,62	13,36	15,88	4,40	18,55	15,71	21,40	7,83	15,26	14,11	16,42	3,85
Jawa Tengah	28,55	27,11	29,99	2,57	32,52	30,56	34,49	3,08	30,29	29,11	31,48	1,99
DI Yogyakarta	20,87	17,37	24,38	8,57	41,24	34,25	48,23	8,65	24,63	21,53	27,73	6,42
Jawa Timur	32,85	31,25	34,45	2,49	37,02	35,07	38,97	2,69	34,53	33,29	35,76	1,83
Banten	13,48	11,34	15,62	8,09	26,39	20,65	32,13	11,10	15,52	13,49	17,55	6,68
Bali	29,27	26,25	32,28	5,26	36,72	32,32	41,12	6,12	30,94	28,40	33,48	4,19
Nusa Tenggara Barat	15,00	12,63	17,37	8,06	16,37	13,45	19,29	9,10	15,62	13,77	17,47	6,04
Nusa Tenggara Timur	28,47	24,58	32,35	6,97	36,84	34,73	38,96	2,93	34,27	32,37	36,18	2,84
Kalimantan Barat	29,34	25,46	33,22	6,75	27,33	24,72	29,93	4,86	28,12	25,92	30,32	4,00
Kalimantan Tengah	11,56	9,12	14,00	10,76	17,48	14,67	20,28	8,20	14,77	12,87	16,67	6,57
Kalimantan Selatan	15,07	12,22	17,91	9,62	15,08	12,56	17,60	8,52	15,07	13,16	16,98	6,47
Kalimantan Timur	19,08	16,00	22,16	8,23	23,77	18,90	28,64	10,45	20,44	17,83	23,04	6,50
Kalimantan Utara	27,36	21,46	33,25	10,99	32,68	25,54	39,83	11,15	29,16	24,57	33,75	8,03
Sulawesi Utara	28,12	24,66	31,58	6,28	34,54	31,04	38,04	5,17	30,73	28,23	33,23	4,15
Sulawesi Tengah	27,60	22,94	32,25	8,60	28,51	25,57	31,45	5,26	28,18	25,65	30,70	4,57
Sulawesi Selatan	31,96	28,88	35,04	4,92	39,04	36,78	41,31	2,96	35,36	33,42	37,30	2,80
Sulawesi Tenggara	21,20	17,60	24,80	8,67	30,28	27,54	33,03	4,62	26,39	24,18	28,60	4,27
Gorontalo	26,34	21,29	31,39	9,79	36,40	31,73	41,08	6,55	31,48	28,02	34,95	5,62
Sulawesi Barat	29,54	22,99	36,09	11,32	29,02	24,86	33,17	7,31	29,12	25,54	32,70	6,27
Maluku	34,96	29,58	40,34	7,85	36,50	33,02	39,97	4,86	35,74	32,56	38,92	4,54
Maluku Utara	21,61	17,04	26,19	10,80	36,35	32,53	40,18	5,36	31,66	28,59	34,72	4,95
Papua Barat	19,51	13,97	25,05	14,49	21,20	17,07	25,33	9,93	20,66	17,34	23,97	8,19
Papua Barat Daya	25,65	17,59	33,72	16,04	30,94	26,61	35,27	7,15	27,80	22,74	32,86	9,29
Papua	24,31	18,73	29,89	11,72	19,97	15,76	24,18	10,76	22,69	18,83	26,55	8,68
Papua Selatan	19,37	11,52	27,23	20,69	8,23	4,73	11,72	21,66	12,21	8,59	15,83	15,12
Papua Tengah	8,22	4,33	12,10	24,12	4,76	3,46	6,06	13,96	5,49	4,17	6,82	12,31
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	50,10	2,68	1,73	3,64	18,08	2,97	1,96	3,98	17,33
Indonesia	20,59	20,05	21,12	1,32	26,26	25,68	26,84	1,13	22,75	22,35	23,15	0,89

Catatan: Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB III

PENDIDIKAN

<http://www.buku.go.id>





<https://www.bps.go.id>



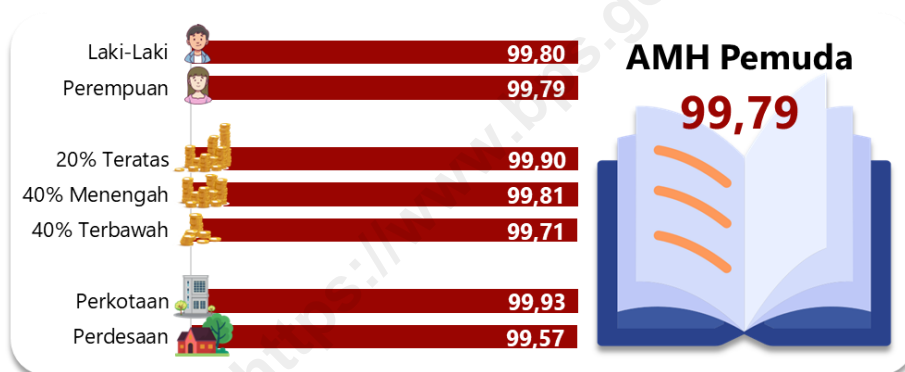
Investasi pada modal manusia sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Cobb & Douglas, 1928). Modal manusia adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (Mankiw, 2019). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, maka semakin tinggi pula produktivitas negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara berupaya agar semua individu mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya sehingga memiliki modal manusia yang berkualitas.

Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki peran strategis dalam memanfaatkan pendidikan untuk pembangunan bangsa. Hal ini karena usia pemuda beririsan dengan usia sekolah, dan proporsi pemuda yang cukup besar terhadap total penduduk sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini, akan disajikan berbagai indikator pendidikan pemuda di Indonesia yang meliputi kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi, kemajuan, serta tantangan yang dihadapi pemuda Indonesia dalam bidang pendidikan.

3.1 Kemampuan Baca Tulis Pemuda

Literasi merupakan komponen penting dari hak atas pendidikan dan menjadi syarat dasar untuk mengakses berbagai hak asasi manusia lainnya. Literasi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan memperluas kemampuan seseorang. Ketidakmampuan membaca dan menulis

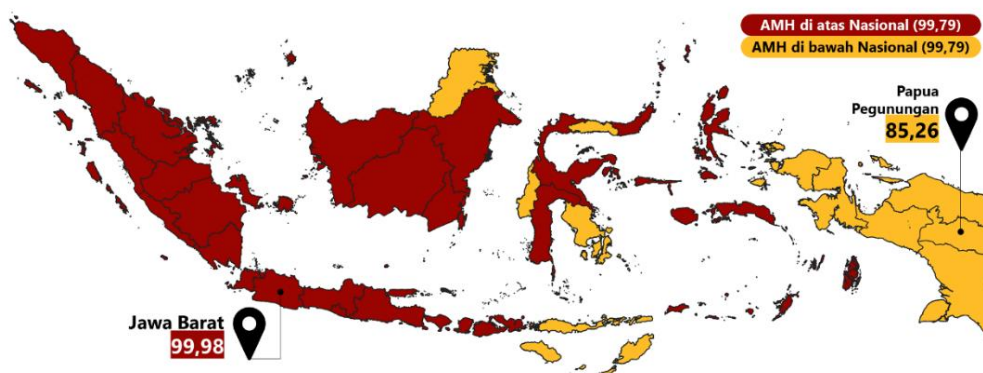
pada tingkat dasar, serta ketidakmampuan berpartisipasi aktif di dunia yang semakin melek huruf dan digital, dapat membuat seseorang terpinggirkan dan sulit untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*, 2019). Tingkat kemampuan baca tulis tercermin melalui indikator Angka Melek Huruf (AMH), yang juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tepatnya Target 4.6 dimana pada tahun 2030, semua remaja dan sebagian kelompok dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Pada tahun 2025, AMH pemuda mencapai 99,79 persen, yang artinya sekitar 99 dari 100 pemuda di Indonesia dapat membaca dan menulis. Jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang nyata antara AMH pemuda laki-laki dan perempuan, yaitu 99,80 persen berbanding 99,79 persen. Hal yang sama juga terjadi jika dilihat menurut distribusi pengeluaran maupun klasifikasi desa, yang mana AMH pemuda sudah berada di kisaran 99 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.2 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Provinsi, 2025

Meskipun secara nasional tidak terdapat perbedaan berarti menurut beberapa karakteristik pemuda, capaian AMH pemuda masih menunjukkan ketimpangan apabila dilihat antarprovinsi. Persebaran AMH pemuda di setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.2, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 11 (sebelas) provinsi dengan capaian di bawah rata-rata nasional. Lebih lanjut, kesenjangan kemampuan baca tulis antarprovinsi tampak dari perbedaan capaian AMH pemuda, di mana Jawa Barat mencatat angka tertinggi sebesar 99,98 persen, sedangkan Papua Pegunungan hanya mencapai 85,26 persen. Artinya, ketika hampir seluruh pemuda di Jawa Barat sudah dapat membaca dan menulis, masih terdapat sekitar 15 dari setiap 100 pemuda di Papua Pegunungan yang belum memiliki kemampuan tersebut.

3.2 Partisipasi Sekolah Pemuda

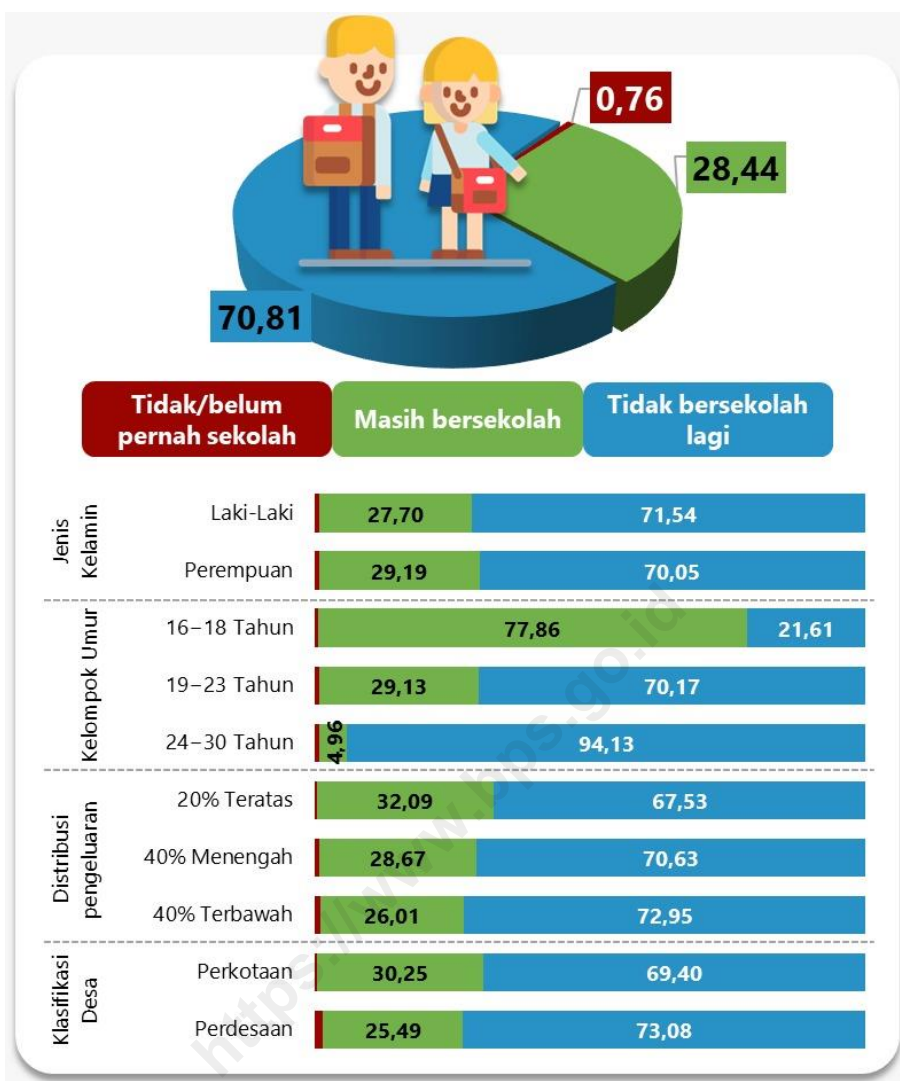
Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), Tujuan 4.3 menekankan pentingnya menjamin akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi serta pelatihan kejuruan yang terjangkau dan berkualitas. Partisipasi sekolah pada kelompok pemuda menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi telah merata di Indonesia. Melalui tingkat partisipasi sekolah, dapat diidentifikasi keberhasilan



upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi pemuda, sekaligus mencerminkan kemajuan menuju pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs.

Berdasarkan data Susenas tahun 2025, secara umum sebesar 70,81 persen pemuda tidak bersekolah lagi, 28,44 persen masih bersekolah, dan sekitar 0,76 persen tidak atau belum pernah bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemuda pernah mengenyam bangku pendidikan, baik formal maupun nonformal, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum pernah merasakan hal tersebut. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda perempuan yang masih bersekolah sedikit lebih tinggi (29,19 persen) dibanding pemuda laki-laki (27,70 persen). Namun, persentase pemuda laki-laki yang sudah tidak bersekolah lagi juga sedikit lebih tinggi (71,54 persen) dibanding pemuda perempuan (70,05 perempuan). Hal ini menunjukkan tidak terlalu tampak kesenjangan dalam partisipasi bersekolah antara pemuda laki-laki dan perempuan.

Persentase pemuda yang masih bersekolah (disebut juga Angka Partisipasi Sekolah/APS pemuda) semakin menurun seiring semakin tingginya kelompok umur. Partisipasi sekolah pemuda paling tinggi terdapat pada kelompok umur 16–18 tahun, yang merupakan kelompok usia sekolah pada jenjang menengah atas, di mana 77,86 persen di antaranya masih bersekolah. Sementara itu, pada kelompok umur 19–23 tahun, yakni usia sekolah pada jenjang pendidikan tinggi, hanya 29,13 persen pemuda yang masih bersekolah, dan sebagian besar (70,17 persen) sudah tidak bersekolah lagi. Sebaliknya, pada kelompok umur 24–30 tahun, hanya 4,96 persen pemuda yang masih bersekolah, dan 94,13 persen pemuda sudah tidak bersekolah lagi, sejalan dengan transisi dari bersekolah ke dunia kerja atau kehidupan berumah tangga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.3 Partisipasi Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

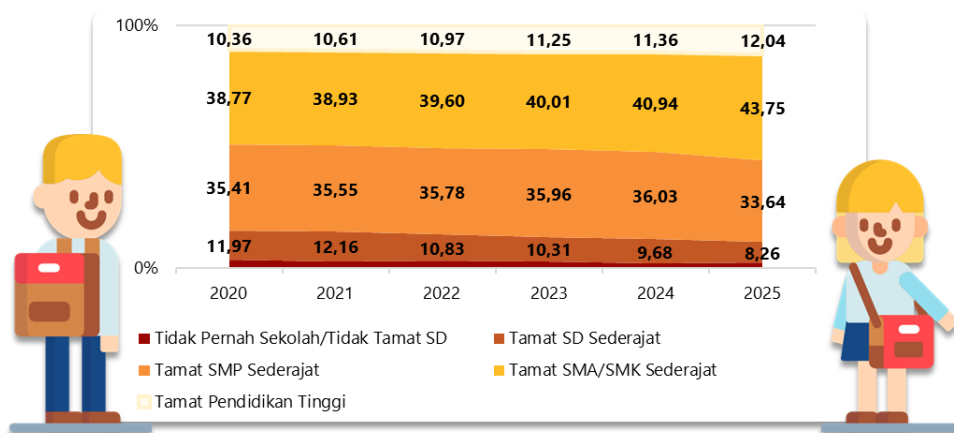
Terdapat pola antara status ekonomi rumah tangga (yang digambarkan dengan distribusi pengeluaran rumah tangga) dengan APS pemuda. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga pemuda, semakin tinggi partisipasi sekolahnya. Nilai APS pemuda pada golongan 20 persen teratas lebih besar (32,09 persen) dibandingkan APS pemuda pada golongan 40 persen menengah (28,67 persen) dan 40 persen terbawah (26,01 persen). Apabila dilihat partisipasi sekolah pemuda menurut klasifikasi wilayah tempat tinggalnya, persentase pemuda yang tinggal di perkotaan yang masih



bersekolah lebih tinggi (30,25 persen) dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan (25,49 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga dan wilayah tempat tinggal pemuda masih menjadi faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan pemuda, di mana pemuda dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi atau yang tinggal di perkotaan memiliki peluang lebih besar untuk tetap bersekolah.

3.3 Tingkat Pendidikan Pemuda

Analisis mengenai tingkat pendidikan pemuda dapat memperkaya analisis partisipasi sekolah pemuda pada subbab sebelumnya. Tingkat pendidikan pemuda dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yang ditandai dengan kepemilikan ijazah/STTB. Gambar 3.4 memperlihatkan perkembangan persentase pemuda berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama periode 2020 hingga 2025. Secara umum, terdapat peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pemuda dari tahun ke tahun. Persentase pemuda yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat menunjukkan tren meningkat cukup signifikan, dari 38,77 persen pada tahun 2020 menjadi 43,75 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin banyak pemuda yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas. Di samping itu, persentase pemuda yang telah menamatkan pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan dari 10,36 persen pada tahun 2020 menjadi 12,04 persen pada tahun 2025. Walaupun peningkatannya tidak sebesar pada jenjang SMA/SMK sederajat, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam pencapaian pendidikan tinggi di kalangan pemuda.

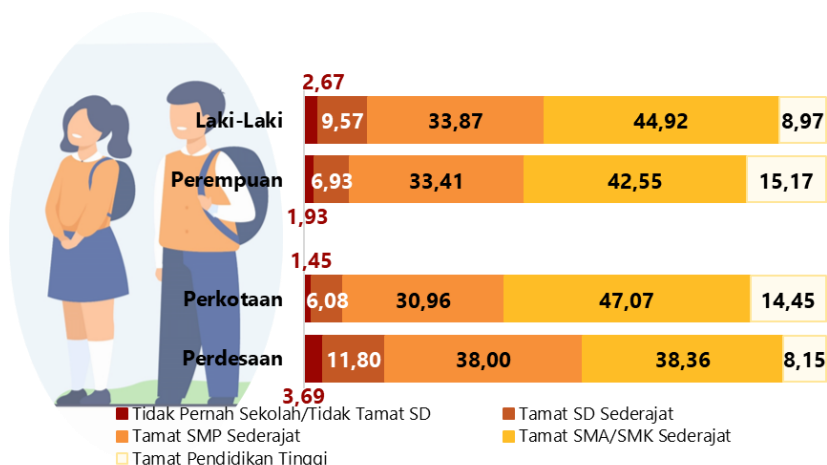


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025

Gambar 3.4 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda, 2020–2025

Sebaliknya, persentase pemuda yang tamat SMP sederajat cenderung menurun, dari 35,41 persen pada tahun 2020 menjadi 33,64 persen pada tahun 2025. Penurunan yang lebih besar juga terjadi pada pemuda yang tamat SD sederajat, dari 11,97 persen di tahun 2020 menjadi 8,26 persen di tahun 2025. Selain itu, persentase pemuda yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD juga menunjukkan tren yang terus menurun selama periode tersebut. Perubahan ini semakin menguatkan adanya pergeseran menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan perbaikan dalam akses dan penyelesaian pendidikan dasar di kalangan pemuda.

Pada tahun 2025, pemuda perempuan cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pemuda laki-laki jika dibedakan menurut jenis kelaminnya. Hal ini terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda perempuan yang berpendidikan rendah (SD sederajat ke bawah) dibandingkan laki-laki. Selain itu, terlihat pula persentase pemuda perempuan yang menamatkan pendidikan tinggi yang mencapai 15,17 persen, hampir dua kali lebih besar dari pemuda laki-laki (8,97 persen). Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antarjenis kelamin semakin mengarah pada lebih unggulnya pemuda perempuan dalam pencapaian pendidikan dibandingkan pemuda laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

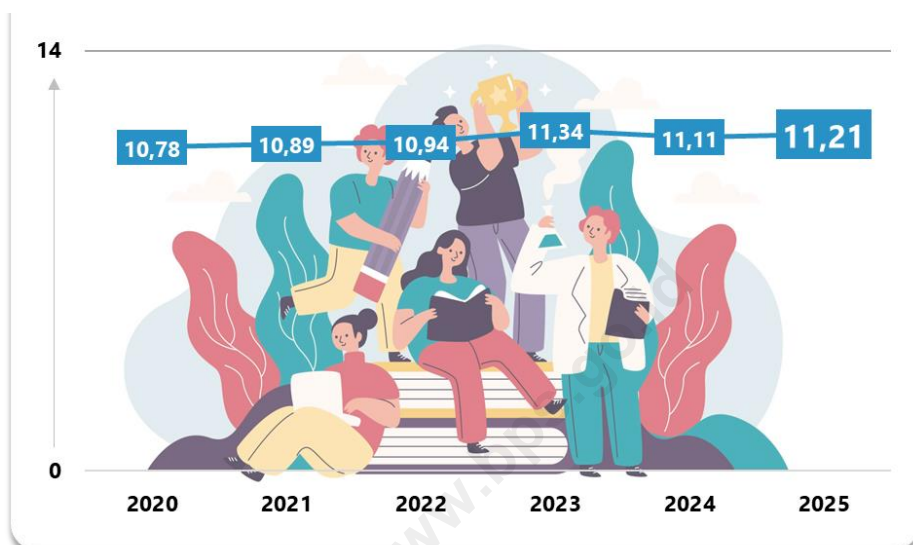
Gambar 3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Jika dilihat dari wilayah tempat tinggalnya, pemuda di perkotaan memiliki capaian pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pemuda di perdesaan. Hal ini tercermin dari tingginya persentase pemuda perkotaan yang menamatkan pendidikan tinggi (14,45 persen) dibandingkan pemuda perdesaan (8,15 persen). Di samping itu, persentase pemuda perdesaan yang berpendidikan rendah (SD sederajat ke bawah) mencapai 15,49 persen, hampir dua kali lebih besar dari perkotaan (7,53 persen). Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan pendidikan di kalangan pemuda berdasarkan wilayah tempat tinggalnya.

3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah (de Pleijt, 2018). Lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang berhasil ditempuh individu dalam menjalani pendidikan, yang dikonversi dari jenjang, kelas, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan individu tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023c). Secara umum, tingkat pendidikan pemuda di Indonesia menunjukkan peningkatan, yang tercermin dari naiknya rata-rata lama sekolah pemuda Indonesia dari 10,78 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,21 tahun pada tahun 2025 (Gambar 3.6).

Angka tersebut dapat diartikan bahwa kini, secara rata-rata pemuda Indonesia telah menempuh pendidikan sampai kelas 2 pada jenjang SMA/SMK sederajat. Meski menunjukkan tren yang cenderung naik, tingkat pendidikan pada kalangan pemuda masih perlu terus didorong, minimal hingga tamat SMA/SMK sederajat.

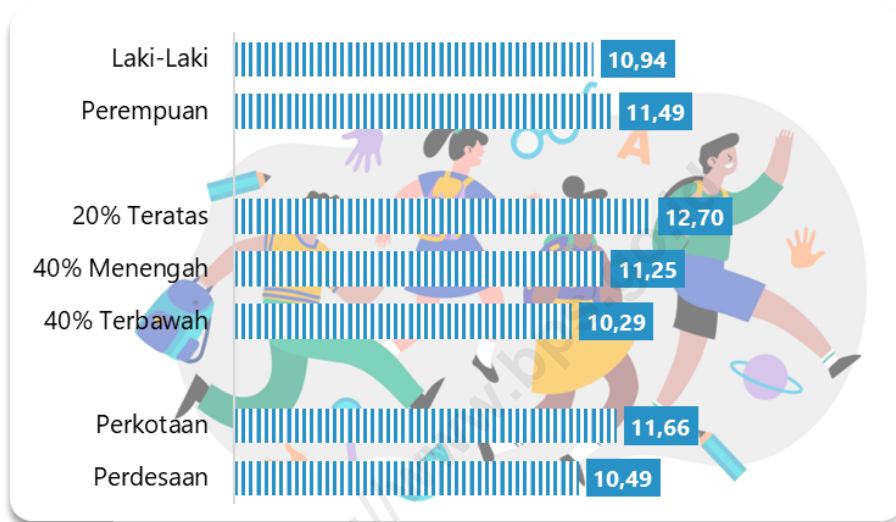


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda, 2020–2025

Data Susenas 2025 juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam capaian rata-rata lama sekolah pemuda berdasarkan beberapa karakteristik (Gambar 3.7). Jika menurut jenis kelamin pemuda, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah pemuda perempuan lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki (11,49 tahun berbanding 10,94 tahun). Selain itu, terlihat pola bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga pemuda, semakin tinggi pula capaian rata-rata lama sekolahnya. Pemuda pada kelompok 20 persen teratas mengenyam pendidikan di bangku sekolah paling lama dibandingkan kelompok lainnya, yaitu 12,70 tahun atau setara tamat SMA/SMK sederajat. Sementara itu, pemuda yang berada pada kelompok 40 persen terbawah hanya menempuh pendidikan selama 10,29 tahun atau setara kelas 1 pada jenjang SMA/SMK sederajat.

Kesenjangan juga terlihat jika dibandingkan menurut wilayah tempat tinggal pemuda. Pemuda di perkotaan memiliki rata-rata lama sekolah satu tahun lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (11,66 tahun berbanding 10,49 tahun). Secara keseluruhan, Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pemuda laki-laki, pemuda yang berada pada status ekonomi rumah tangga bawah, atau pemuda yang tinggal di perdesaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Kesenjangan capaian pendidikan pemuda juga masih terlihat antarprovinsi, sebagaimana tersaji pada Gambar 3.8. Dari peta terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia bagian timur masih memiliki rata-rata lama sekolah di bawah angka nasional. Provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah terendah adalah Papua Pegunungan (5,88 tahun), diikuti Papua Tengah (7,39 tahun) dan Papua Selatan (9,32 tahun). Sebaliknya, wilayah dengan capaian rata-rata lama sekolah tertinggi adalah DI Yogyakarta (12,47 tahun). Artinya, ketika pemuda di Papua Pegunungan secara rata-rata hanya mampu menempuh pendidikan setara kelas 5–6 SD sederajat (tidak sampai tamat SD sederajat), rata-rata pemuda di DI Yogyakarta telah menyelesaikan pendidikan jenjang

menengah atas bahkan sebagian telah menempuh pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan masih adanya kesenjangan pendidikan antardaerah di Indonesia dan rendahnya akses terhadap pendidikan di wilayah timur Indonesia, terutama kawasan Papua.



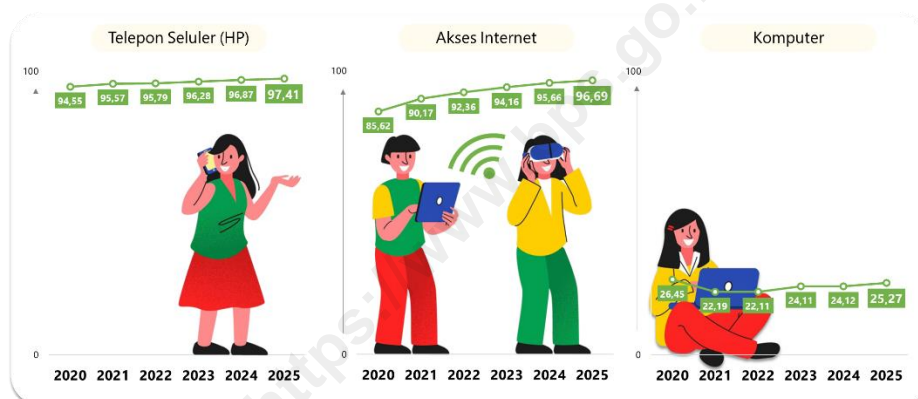
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pemuda Menurut Provinsi, 2025

3.5 Pemuda dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern. Bagi kelompok pemuda, penguasaan terhadap teknologi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Hal ini sejalan dengan Target 4.4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu meningkatkan proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memperluas akses informasi dan peluang belajar, tetapi juga membuka ruang inovasi serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru berbasis ekonomi digital (*World Bank*, 2016). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan keterampilan TIK di kalangan pemuda menjadi sangat penting untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam proses transformasi digital yang terus berlangsung.

Informasi terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dikumpulkan pada Susenas 2025 didekati dengan indikator penggunaan telepon seluler (HP), penggunaan komputer, dan akses internet. Gambar 3.9 menunjukkan perkembangan penggunaan telepon seluler (HP), akses internet, dan penggunaan komputer oleh pemuda Indonesia selama periode 2020–2025. Persentase pemuda yang menggunakan telepon seluler (HP) terus meningkat dari 94,55 persen pada tahun 2020 menjadi 97,41 persen pada tahun 2025. Akses internet juga mengalami peningkatan signifikan, dari 85,62 persen pada tahun 2020 menjadi 96,69 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia semakin terhubung secara digital, dengan hampir seluruhnya menggunakan telepon seluler (HP) dan memiliki akses internet.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025

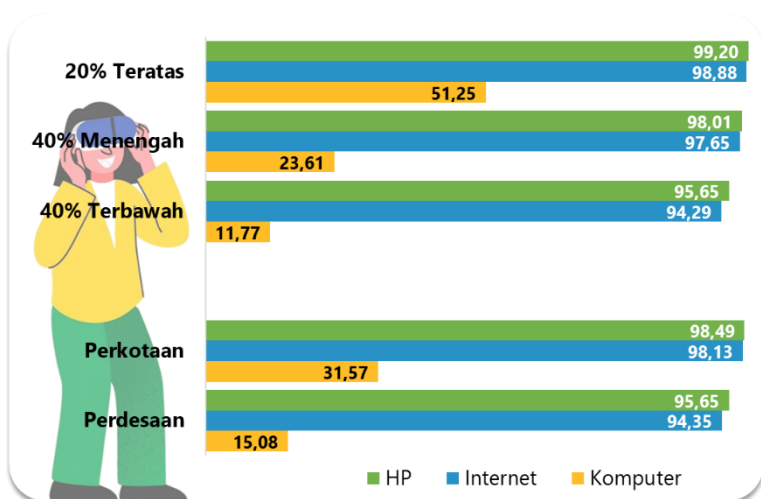
Gambar 3.9 Persentase Pemuda Menurut Akses Teknologi dan Informasi, 2020–2025

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, penggunaan komputer relatif stagnan dengan tren kenaikan yang lambat, yakni dari 26,45 persen pada tahun 2020 menjadi 25,27 persen pada tahun 2025. Artinya hanya sekitar 1 dari 4 pemuda di Indonesia yang menggunakan komputer. Hal ini menunjukkan bahwa komputer bukan lagi perangkat utama bagi pemuda untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi, kemungkinan karena fungsi-fungsi komputasi kini juga dapat dilakukan oleh perangkat seluler seperti *smartphone* yang lebih *portable*.



Gambar 3.10 menunjukkan persentase penggunaan telepon seluler (HP), akses internet, dan penggunaan komputer di kalangan pemuda Indonesia pada tahun 2025, jika dilihat berdasarkan kelompok ekonomi rumah tangga dan wilayah tempat tinggal. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara pemuda pada kelompok ekonomi atas dan bawah dalam hal akses terhadap TIK. Kelompok 20 persen teratas memiliki tingkat kepemilikan HP hampir menyeluruh (99,20 persen) dan akses internet yang sangat tinggi (98,88 persen). Selain itu, persentase pemuda pada kelompok tersebut yang menggunakan komputer juga paling tinggi (51,25 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ekonomi atas memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai jenis perangkat digital. Sebaliknya, kelompok 40 persen terbawah memiliki angka terendah di semua kategori, baik penggunaan telepon seluler (HP), akses internet, maupun penggunaan komputer. Data ini menegaskan adanya kesenjangan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antar kelompok ekonomi, khususnya dalam penggunaan perangkat komputer yang cenderung mahal dan membutuhkan infrastruktur pendukung.

Pemuda di perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih tinggi dibandingkan pemuda perdesaan di seluruh jenis perangkat. Dapat dilihat pada Gambar 3.10 bahwa penggunaan telepon seluler (HP) mencapai 98,49 persen, akses internet sebesar 98,13 persen, dan penggunaan komputer sebesar 31,57 persen. Sebaliknya, pemuda di perdesaan tertinggal dalam semua indikator, dengan penggunaan telepon seluler (HP) sebesar 95,65 persen, akses internet sebesar 94,35 persen, dan penggunaan komputer yang hanya 15,08 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor geografis masih berpengaruh terhadap kesetaraan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama karena ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah perdesaan yang relatif terbatas.



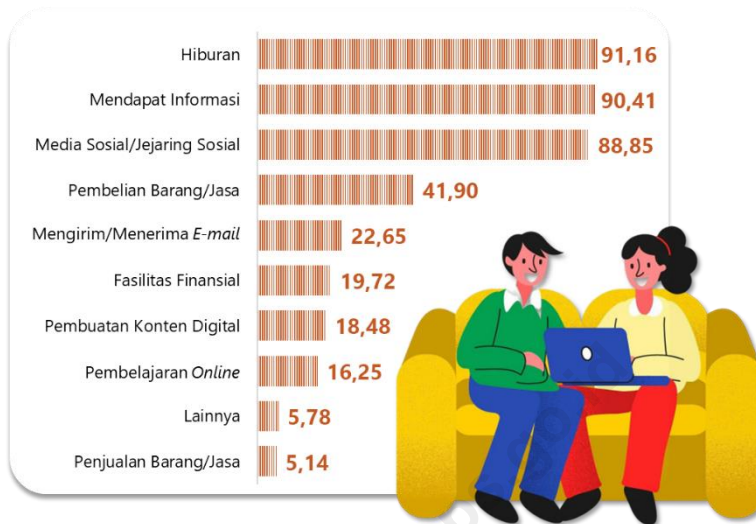
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.10 Persentase Penggunaan HP, Penggunaan Komputer, dan Akses Internet pada Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Selanjutnya, Gambar 3.11 menampilkan distribusi tujuan penggunaan internet oleh pemuda Indonesia tahun 2025, yang mencerminkan bagaimana teknologi digital dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas pemuda menggunakan internet untuk hiburan (91,16 persen), mendapatkan informasi (90,41 persen), dan media sosial atau jejaring sosial (88,85 persen). Angka yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa internet menjadi sarana utama bagi pemuda dalam memenuhi kebutuhan rekreasi, bersosialisasi, sekaligus akses terhadap berita dan pengetahuan.

Meskipun tren digitalisasi meningkat, pemanfaatan internet untuk aktivitas ekonomi digital oleh pemuda seperti pembelian barang/jasa (41,90 persen) dan penjualan barang/jasa (5,14 persen) masih jauh di bawah aktivitas hiburan dan sosial. Selain itu, pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif seperti mengirim/menerima *e-mail* (22,65 persen), mengakses fasilitas finansial (19,72 persen), pembuatan konten digital (18,48 persen), dan pembelajaran *online* (16,25 persen) masih tergolong rendah. Dengan demikian, pola penggunaan internet oleh pemuda Indonesia tahun 2025 didominasi oleh aktivitas hiburan dan sosial, sementara pemanfaatannya untuk tujuan ekonomi,

pendidikan, dan produktivitas masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital dan penguatan keterampilan TIK, agar pemuda tidak hanya menjadi konsumen digital tetapi juga produsen dan inovator dalam ekosistem digital.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3.11 Persentase Pemuda yang Menggunakan Internet Menurut Tujuan Penggunaannya, 2025

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Angka Melek Huruf
(1)	(2)
Total	99,79
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	99,80
Perempuan	99,79
Kelompok Umur	
16–18 Tahun	99,84
19–23 Tahun	99,82
24–30 Tahun	99,75
Status Disabilitas	
Nondisabilitas	99,86
Disabilitas	93,04
Distribusi Pengeluaran	
20% Teratas	99,90
40% Menengah	99,81
40% Terbawah	99,71
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	99,93
Perdesaan	99,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.2 Persentase Pemuda Menurut Partisipasi Sekolah Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	0,76	28,44	70,81	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	0,76	27,70	71,54	100,00
Perempuan	0,76	29,19	70,05	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	0,53	77,86	21,61	100,00
19–23 Tahun	0,70	29,13	70,17	100,00
24–30 Tahun	0,91	4,96	94,13	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	0,49	28,57	70,94	100,00
Disabilitas	27,98	14,57	57,45	100,00
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	0,38	32,09	67,53	100,00
40% Menengah	0,70	28,67	70,63	100,00
40% Terbawah	1,04	26,01	72,95	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,34	30,25	69,40	100,00
Perdesaan	1,43	25,49	73,08	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.3 Persentase Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Karakteristik, 2025

Karakteristik	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	2,30	8,26	33,64	43,75	12,04	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	2,67	9,57	33,87	44,92	8,97	100,00
Perempuan	1,93	6,93	33,41	42,55	15,17	100,00
Kelompok Umur						
16–18 Tahun	2,22	8,52	76,76	12,50	0,01	100,00
19–23 Tahun	1,87	6,34	18,47	66,55	6,77	100,00
24–30 Tahun	2,65	9,50	24,29	42,21	21,35	100,00
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	1,93	8,19	33,77	43,99	12,12	100,00
Disabilitas	40,90	15,53	20,48	19,30	3,78	100,00
Distribusi Pengeluaran						
20% Teratas	0,91	3,32	23,98	45,71	26,08	100,00
40% Menengah	2,00	7,23	33,26	46,65	10,86	100,00
40% Terbawah	3,48	12,38	39,82	39,25	5,07	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,45	6,08	30,96	47,07	14,45	100,00
Perdesaan	3,69	11,80	38,00	38,36	8,15	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Rata-Rata Lama Sekolah
(1)	(2)
Total	11,21
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	10,94
Perempuan	11,49
Kelompok Umur	
16–18 Tahun	9,91
19–23 Tahun	11,61
24–30 Tahun	11,54
Status Disabilitas	
Nondisabilitas	11,26
Disabilitas	6,12
Distribusi Pengeluaran	
20% Teratas	12,70
40% Menengah	11,25
40% Terbawah	10,29
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	11,66
Perdesaan	10,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.5 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2025

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	97,41	25,27	96,69
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	97,30	21,70	96,55
Perempuan	97,52	28,91	96,83
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	96,78	30,84	96,28
19–23 Tahun	97,82	26,85	97,23
24–30 Tahun	97,41	21,57	96,49
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	97,82	25,45	97,11
Disabilitas	55,61	7,20	53,83
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	99,20	51,25	98,88
40% Menengah	98,01	23,61	97,65
40% Terbawah	95,65	11,77	94,29
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	98,49	31,57	98,13
Perdesaan	95,65	15,08	94,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.6 Persentase Pemuda Yang Menggunakan Internet Menurut Karakteristik dan Tujuan Penggunaannya, 2025

Karakteristik	Mendapat Informasi	Mengirim/ Menerima <i>E-mail</i>	Media Sosial/ Jejaring Sosial	Pembelian Barang/ Jasa	Penjualan Barang/ Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	90,41	22,65	88,85	41,90	5,14
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	90,57	21,26	88,40	34,45	4,99
Perempuan	90,25	24,06	89,31	49,48	5,29
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	89,07	19,37	87,38	33,67	1,58
19–23 Tahun	90,62	24,62	89,26	44,71	4,57
24–30 Tahun	90,89	22,77	89,24	43,73	7,21
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	90,55	22,71	88,96	42,02	5,16
Disabilitas	65,57	10,96	68,58	21,23	2,24
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	94,24	41,23	91,74	59,67	8,16
40% Menengah	90,91	21,34	89,28	42,51	5,07
40% Terbawah	87,44	12,65	86,54	30,12	3,35
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	91,41	27,84	90,16	47,03	5,92
Perdesaan	88,74	13,90	86,65	33,26	3,83

Lanjutan Tabel 3.6

Karakteristik	Fasilitas Finansial	Pembelajaran Online	Hiburan	Pembuatan Konten Digital	Lainnya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total	19,72	16,25	91,16	18,48	5,78
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	18,78	14,25	91,63	17,67	6,12
Perempuan	20,67	18,29	90,69	19,30	5,42
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	4,83	37,22	91,03	18,59	5,85
19–23 Tahun	21,12	15,25	91,59	18,96	5,78
24–30 Tahun	25,63	7,23	90,92	18,09	5,73
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	19,78	16,31	91,18	18,53	5,79
Disabilitas	7,49	6,35	89,21	10,35	3,77
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	42,65	22,85	92,40	22,96	6,84
40% Menengah	17,88	15,89	91,49	18,04	5,87
40% Terbawah	7,62	12,59	90,01	16,22	5,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	25,29	18,35	91,35	19,71	5,63
Perdesaan	10,33	12,72	90,86	16,42	6,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.7 Angka Melek Huruf (AMH) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,91	99,95	99,94	99,94	99,94
Sumatera Utara	99,90	99,96	99,93	99,92	99,92
Sumatera Barat	99,92	99,87	99,85	99,94	99,90
Riau	99,93	99,94	99,95	99,92	99,94
Jambi	99,80	99,85	99,84	99,82	99,83
Sumatera Selatan	99,91	99,95	99,89	99,98	99,93
Bengkulu	99,98	99,82	99,84	99,91	99,88
Lampung	99,74	99,85	99,82	99,80	99,81
Kep. Bangka Belitung	99,97	99,80	99,98	99,81	99,90
Kepulauan Riau	99,95	99,82	99,97	99,91	99,94
DKI Jakarta	99,89	–	99,93	99,85	99,89
Jawa Barat	99,98	99,95	99,97	99,98	99,98
Jawa Tengah	99,95	99,94	99,90	99,99	99,94
DI Yogyakarta	99,93	99,70	99,83	99,94	99,89
Jawa Timur	99,97	99,90	99,95	99,93	99,94
Banten	99,96	99,79	100,00	99,86	99,93
Bali	99,92	99,62	99,95	99,75	99,85
Nusa Tenggara Barat	99,78	99,87	99,82	99,83	99,82
Nusa Tenggara Timur	99,94	99,10	99,26	99,46	99,36
Kalimantan Barat	99,95	99,79	99,89	99,82	99,86
Kalimantan Tengah	99,77	99,81	99,64	99,94	99,79
Kalimantan Selatan	99,96	99,88	99,95	99,89	99,92
Kalimantan Timur	99,92	100,00	99,89	100,00	99,94
Kalimantan Utara	99,74	99,64	99,71	99,70	99,70
Sulawesi Utara	99,89	99,94	99,92	99,91	99,91
Sulawesi Tengah	99,66	99,88	99,86	99,74	99,80
Sulawesi Selatan	99,95	99,70	99,86	99,80	99,83
Sulawesi Tenggara	99,72	99,77	99,68	99,82	99,75
Gorontalo	99,48	99,90	99,44	99,96	99,70
Sulawesi Barat	99,76	99,68	99,81	99,58	99,69
Maluku	99,88	99,89	99,93	99,83	99,88
Maluku Utara	99,76	99,84	99,85	99,76	99,81
Papua Barat	99,79	99,46	99,74	99,37	99,56
Papua Barat Daya	99,27	99,38	99,10	99,56	99,32
Papua	100,00	99,18	99,68	99,72	99,70
Papua Selatan	99,89	96,71	98,66	96,98	97,85
Papua Tengah	99,57	89,05	91,01	91,60	91,28
Papua Pegunungan	100,00	84,23	87,68	82,72	85,26
Indonesia	99,93	99,57	99,80	99,79	99,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.8 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2025

Provinsi	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,35	34,23	65,43	100,00
Sumatera Utara	0,48	31,08	68,43	100,00
Sumatera Barat	0,38	34,32	65,29	100,00
Riau	0,60	32,10	67,30	100,00
Jambi	0,58 ¹	28,85	70,57	100,00
Sumatera Selatan	0,51	24,80	74,70	100,00
Bengkulu	0,61 ¹	30,67	68,72	100,00
Lampung	0,53	25,21	74,26	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,42 ¹	24,09	75,49	100,00
Kepulauan Riau	0,23 ¹	25,48	74,29	100,00
DKI Jakarta	0,31 ¹	31,00	68,69	100,00
Jawa Barat	0,32	26,48	73,20	100,00
Jawa Tengah	0,54	27,23	72,23	100,00
DI Yogyakarta	0,27 ¹	40,84	58,88	100,00
Jawa Timur	0,47	27,43	72,10	100,00
Banten	0,39 ¹	27,46	72,15	100,00
Bali	0,41 ¹	30,15	69,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,44 ¹	29,61	69,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,08	30,52	68,40	100,00
Kalimantan Barat	0,91	25,04	74,06	100,00
Kalimantan Tengah	0,35 ¹	26,20	73,45	100,00
Kalimantan Selatan	0,37 ¹	28,05	71,58	100,00
Kalimantan Timur	0,43 ¹	33,85	65,72	100,00
Kalimantan Utara	0,75 ¹	28,31	70,94	100,00
Sulawesi Utara	0,37 ¹	27,23	72,40	100,00
Sulawesi Tengah	1,03	30,28	68,70	100,00
Sulawesi Selatan	0,69	31,07	68,24	100,00
Sulawesi Tenggara	0,85	30,83	68,32	100,00
Gorontalo	NA	29,27	70,46	100,00
Sulawesi Barat	0,90 ¹	25,92	73,18	100,00
Maluku	0,94	32,16	66,91	100,00
Maluku Utara	0,79 ¹	31,72	67,49	100,00
Papua Barat	2,46	28,94	68,59	100,00
Papua Barat Daya	1,49 ¹	31,56	66,95	100,00
Papua	2,21	33,53	64,26	100,00
Papua Selatan	3,06	29,84	67,10	100,00
Papua Tengah	23,47	14,70	61,83	100,00
Papua Pegunungan	35,58	19,30	45,12	100,00
Indonesia	0,76	28,44	70,81	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pemuda Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025

Provinsi	Kelompok Umur			16–30 Tahun
	16–18 Tahun	19–23 Tahun	24–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	80,94	34,95	10,02	34,23
Sumatera Utara	77,51	30,48	6,44	31,08
Sumatera Barat	85,04	38,84	5,69	34,32
Riau	77,42	33,03	5,71	32,10
Jambi	74,39	25,23	9,64	28,85
Sumatera Selatan	73,78	21,24	4,33	24,80
Bengkulu	80,48	34,18	6,01	30,67
Lampung	75,35	20,68	4,00	25,21
Kep. Bangka Belitung	76,03	21,13	2,61	24,09
Kepulauan Riau	88,24	26,61	2,73	25,48
DKI Jakarta	88,22	34,21	5,22	31,00
Jawa Barat	75,80	27,98	3,45	26,48
Jawa Tengah	77,97	27,44	3,47	27,23
DI Yogyakarta	93,03	54,72	12,51	40,84
Jawa Timur	80,96	28,90	3,12	27,43
Banten	73,84	24,45	7,46	27,46
Bali	90,68	34,32	2,43	30,15
Nusa Tenggara Barat	79,21	28,88	6,66	29,61
Nusa Tenggara Timur	76,65	31,41	6,94	30,52
Kalimantan Barat	70,95	26,84	2,89	25,04
Kalimantan Tengah	70,76	24,91	5,48	26,20
Kalimantan Selatan	75,16	30,91	2,69	28,05
Kalimantan Timur	84,15	33,15	9,91	33,85
Kalimantan Utara	81,93	29,25	3,34	28,31
Sulawesi Utara	71,45	25,57	7,06	27,23
Sulawesi Tengah	75,36	26,50	11,40	30,28
Sulawesi Selatan	75,94	33,80	6,40	31,07
Sulawesi Tenggara	79,58	33,67	4,35	30,83
Gorontalo	72,00	35,02	5,77	29,27
Sulawesi Barat	73,22	23,55	4,70	25,92
Maluku	77,28	29,66	11,79	32,16
Maluku Utara	79,62	25,38	12,41	31,72
Papua Barat	77,53	34,53	4,14	28,94
Papua Barat Daya	81,70	35,19	7,26	31,56
Papua	81,78	38,16	5,92	33,53
Papua Selatan	66,97	27,57	11,19	29,84
Papua Tengah	44,61	15,48	2,56	14,70
Papua Pegunungan	50,79	12,48	6,67	19,30
Indonesia	77,86	29,13	4,96	28,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.10 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,00	4,84	31,40	49,65	13,10
Sumatera Utara	1,95	5,44	30,34	50,67	11,61
Sumatera Barat	1,59	8,57	32,29	41,97	15,58
Riau	1,78	10,03	31,72	44,22	12,25
Jambi	2,07	9,18	31,65	43,80	13,29
Sumatera Selatan	2,59	10,58	30,92	44,18	11,72
Bengkulu	2,39	7,65	32,07	41,36	16,52
Lampung	1,98	8,78	37,45	42,79	8,99
Kep. Bangka Belitung	4,49	11,80	27,03	43,73	12,95
Kepulauan Riau	1,16 ¹	4,62	28,23	50,82	15,16
DKI Jakarta	0,89 ¹	3,41	23,35	54,28	18,07
Jawa Barat	1,49	8,56	35,24	44,73	9,98
Jawa Tengah	2,00	8,91	38,38	40,75	9,97
DI Yogyakarta	0,61 ¹	3,16	23,36	54,41	18,47
Jawa Timur	1,45	7,77	35,66	43,22	11,91
Banten	1,33	7,66	36,24	43,42	11,34
Bali	1,48	3,54	31,16	43,70	20,11
Nusa Tenggara Barat	2,25	7,35	35,40	42,06	12,94
Nusa Tenggara Timur	5,04	11,84	36,41	32,03	14,68
Kalimantan Barat	5,14	13,71	33,53	37,44	10,19
Kalimantan Tengah	2,94	12,10	32,66	40,60	11,70
Kalimantan Selatan	3,28	11,85	31,05	41,35	12,46
Kalimantan Timur	1,32	6,31	32,39	45,49	14,49
Kalimantan Utara	3,22	8,49	31,22	42,64	14,42
Sulawesi Utara	2,71	6,75	30,21	47,28	13,05
Sulawesi Tengah	2,70	12,21	35,84	38,03	11,22
Sulawesi Selatan	3,42	9,28	30,94	41,82	14,53
Sulawesi Tenggara	2,79	7,23	32,58	41,99	15,41
Gorontalo	7,73	11,92	31,26	36,31	12,78
Sulawesi Barat	4,03	14,44	33,38	35,10	13,05
Maluku	2,08	5,49	27,82	48,68	15,93
Maluku Utara	3,05	7,44	33,12	43,87	12,51
Papua Barat	6,16	11,68	34,53	37,23	10,39
Papua Barat Daya	3,75	8,34	30,53	42,03	15,35
Papua	5,63	6,68	28,90	45,49	13,31
Papua Selatan	13,35	19,18	32,89	27,71	6,87
Papua Tengah	25,06	20,52	26,99	22,92	4,51
Papua Pegunungan	40,55	12,09	28,52	17,13	1,70
Indonesia	2,30	8,26	33,64	43,75	12,04

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.11 Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda (Tahun) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,37	11,35	11,36	12,09	11,73
Sumatera Utara	11,84	11,11	11,24	11,87	11,55
Sumatera Barat	11,94	11,06	10,91	12,21	11,55
Riau	12,00	10,76	10,96	11,62	11,28
Jambi	12,17	10,88	10,91	11,74	11,32
Sumatera Selatan	11,99	10,48	10,72	11,43	11,07
Bengkulu	12,40	11,11	11,08	12,09	11,58
Lampung	11,64	10,52	10,73	11,13	10,93
Kep. Bangka Belitung	11,56	10,31	10,58	11,53	11,04
Kepulauan Riau	11,87	10,75	11,65	11,97	11,81
DKI Jakarta	12,27	–	12,06	12,46	12,27
Jawa Barat	11,31	10,14	10,97	11,26	11,11
Jawa Tengah	11,38	10,38	10,65	11,24	10,94
DI Yogyakarta	12,67	11,58	12,20	12,72	12,47
Jawa Timur	11,60	10,67	10,98	11,48	11,23
Banten	11,53	9,68	10,97	11,52	11,24
Bali	12,21	10,97	11,82	12,04	11,93
Nusa Tenggara Barat	11,66	11,00	11,29	11,43	11,36
Nusa Tenggara Timur	12,21	10,31	10,50	11,29	10,89
Kalimantan Barat	11,42	9,92	10,15	10,88	10,51
Kalimantan Tengah	11,72	10,24	10,62	11,21	10,91
Kalimantan Selatan	11,48	10,46	10,77	11,23	10,99
Kalimantan Timur	12,01	10,80	11,41	11,92	11,66
Kalimantan Utara	11,57	10,88	10,92	11,77	11,34
Sulawesi Utara	11,79	11,00	11,05	11,92	11,47
Sulawesi Tengah	11,67	10,40	10,47	11,25	10,86
Sulawesi Selatan	11,81	10,74	10,86	11,73	11,30
Sulawesi Tenggara	12,02	11,07	10,96	11,99	11,48
Gorontalo	11,29	9,99	9,93	11,35	10,62
Sulawesi Barat	11,28	10,64	10,37	11,16	10,76
Maluku	12,47	11,17	11,45	12,17	11,81
Maluku Utara	12,14	10,93	10,94	11,70	11,31
Papua Barat	11,38	10,09	10,21	10,82	10,50
Papua Barat Daya	11,85	10,68	11,09	11,70	11,37
Papua	12,00	10,10	11,09	11,53	11,29
Papua Selatan	11,70	7,99	9,29	9,34	9,32
Papua Tengah	11,67	6,24	7,38	7,40	7,39
Papua Pegunungan	8,41	5,70	6,41	5,32	5,88
Indonesia	11,66	10,49	10,94	11,49	11,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.12 Persentase Pemuda yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas, 2025

Provinsi	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,61	17,38	95,37
Sumatera Utara	97,64	19,71	96,61
Sumatera Barat	98,19	27,98	97,28
Riau	98,49	20,59	97,80
Jambi	98,45	20,82	97,73
Sumatera Selatan	97,98	20,87	96,93
Bengkulu	98,20	25,61	97,86
Lampung	98,29	20,82	97,81
Kep. Bangka Belitung	98,83	25,06	98,46
Kepulauan Riau	99,40	32,39	98,92
DKI Jakarta	98,90	42,76	98,77
Jawa Barat	98,48	27,59	98,08
Jawa Tengah	98,59	24,52	98,59
DI Yogyakarta	99,29	44,86	99,48
Jawa Timur	98,19	25,38	97,79
Banten	98,29	28,53	98,29
Bali	99,27	34,00	99,09
Nusa Tenggara Barat	98,48	21,43	97,47
Nusa Tenggara Timur	93,71	19,37	88,07
Kalimantan Barat	96,80	17,66	95,77
Kalimantan Tengah	97,58	21,47	97,50
Kalimantan Selatan	98,65	24,84	98,10
Kalimantan Timur	99,02	32,63	98,51
Kalimantan Utara	97,91	23,90	97,32
Sulawesi Utara	96,46	19,52	95,89
Sulawesi Tengah	95,80	17,94	94,53
Sulawesi Selatan	98,25	27,48	97,80
Sulawesi Tenggara	98,90	22,96	97,42
Gorontalo	98,08	21,98	97,43
Sulawesi Barat	97,74	17,81	96,16
Maluku	94,37	18,64	90,82
Maluku Utara	94,19	13,76	90,43
Papua Barat	88,34	12,52	86,46
Papua Barat Daya	87,85	17,09	85,99
Papua	84,27	20,52	81,95
Papua Selatan	66,36	15,38	59,86
Papua Tengah	43,46	6,25	37,10
Papua Pegunungan	27,27	1,66	17,62
Indonesia	97,41	25,27	96,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.13 Sampling Error Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2025

Provinsi	Tidak/Belum Pernah Bersekolah				Masih Bersekolah				Tidak Sekolah Lagi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,35	0,20	0,50	22,20	34,23	32,97	35,48	1,87	65,43	64,17	66,68	0,98
Sumatera Utara	0,48	0,32	0,65	17,57	31,08	29,83	32,34	2,06	68,43	67,17	69,69	0,94
Sumatera Barat	0,38	0,23	0,54	20,55	34,32	32,79	35,86	2,28	65,29	63,76	66,83	1,20
Riau	0,60	0,34	0,86	22,01	32,10	30,55	33,66	2,47	67,30	65,73	68,87	1,19
Jambi	0,58	0,25	0,90	28,75	28,85	27,26	30,45	2,82	70,57	68,96	72,18	1,17
Sumatera Selatan	0,51	0,28	0,73	22,38	24,80	23,52	26,08	2,63	74,70	73,40	75,99	0,89
Bengkulu	0,61	0,29	0,92	26,63	30,67	28,80	32,55	3,12	68,72	66,82	70,62	1,41
Lampung	0,53	0,31	0,75	21,23	25,21	23,85	26,57	2,75	74,26	72,89	75,62	0,94
Kep. Bangka Belitung	0,42	0,14	0,69	33,77	24,09	22,06	26,13	4,31	75,49	73,44	77,54	1,38
Kepulauan Riau	0,23	0,07	0,40	35,22	25,48	22,54	28,41	5,87	74,29	71,35	77,23	2,02
DKI Jakarta	0,31	0,03	0,58	46,00	31,00	29,10	32,90	3,13	68,69	66,78	70,61	1,42
Jawa Barat	0,32	0,18	0,46	22,46	26,48	25,53	27,43	1,83	73,20	72,24	74,15	0,67
Jawa Tengah	0,54	0,39	0,69	14,42	27,23	26,40	28,06	1,56	72,23	71,39	73,07	0,59
DI Yogyakarta	0,27	0,04	0,51	44,11	40,84	38,44	43,24	3,00	58,88	56,48	61,29	2,08
Jawa Timur	0,47	0,32	0,62	16,16	27,43	26,57	28,28	1,59	72,10	71,24	72,97	0,61
Banten	0,39	0,16	0,62	30,11	27,46	25,77	29,14	3,13	72,15	70,46	73,84	1,20
Bali	0,41	0,20	0,61	25,64	30,15	28,16	32,13	3,36	69,45	67,45	71,44	1,47
Nusa Tenggara Barat	0,44	0,14	0,75	35,26	29,61	27,82	31,39	3,08	69,95	68,15	71,75	1,31
Nusa Tenggara Timur	1,08	0,83	1,33	11,72	30,52	29,27	31,76	2,09	68,40	67,15	69,66	0,94
Kalimantan Barat	0,91	0,55	1,26	20,04	25,04	23,61	26,46	2,90	74,06	72,61	75,51	1,00
Kalimantan Tengah	0,35	0,16	0,53	27,41	26,20	24,56	27,84	3,20	73,45	71,81	75,10	1,14
Kalimantan Selatan	0,37	0,17	0,56	26,99	28,05	26,56	29,53	2,70	71,58	70,10	73,07	1,06
Kalimantan Timur	0,43	0,10	0,77	39,05	33,85	31,98	35,72	2,82	65,72	63,84	67,60	1,46
Kalimantan Utara	0,75	0,32	1,18	29,00	28,31	25,59	31,03	4,90	70,94	68,17	73,70	1,99
Sulawesi Utara	0,37	0,11	0,63	35,50	27,23	25,57	28,88	3,11	72,40	70,74	74,07	1,17
Sulawesi Tengah	1,03	0,68	1,38	17,45	30,28	28,66	31,89	2,73	68,70	67,05	70,34	1,22
Sulawesi Selatan	0,69	0,47	0,91	16,56	31,07	29,82	32,32	2,05	68,24	66,97	69,50	0,95
Sulawesi Tenggara	0,85	0,54	1,16	18,76	30,83	29,25	32,41	2,62	68,32	66,72	69,93	1,20
Gorontalo	NA	NA	NA	60,85	29,27	26,97	31,57	4,00	70,46	68,16	72,77	1,67
Sulawesi Barat	0,90	0,44	1,36	25,92	25,92	23,87	27,98	4,05	73,18	71,10	75,25	1,45
Maluku	0,94	0,60	1,27	18,25	32,16	30,32	34,00	2,92	66,91	65,05	68,76	1,41
Maluku Utara	0,79	0,33	1,24	29,34	31,72	29,72	33,72	3,21	67,49	65,49	69,49	1,51
Papua Barat	2,46	1,71	3,22	15,69	28,94	26,33	31,56	4,60	68,59	65,95	71,24	1,97
Papua Barat Daya	1,49	0,73	2,25	25,97	31,56	28,55	34,57	4,87	66,95	63,89	70,02	2,34
Papua	2,21	1,55	2,87	15,20	33,53	31,03	36,04	3,81	64,26	61,72	66,80	2,02
Papua Selatan	3,06	1,92	4,20	19,06	29,84	26,48	33,20	5,75	67,10	63,61	70,59	2,65
Papua Tengah	23,47	21,50	25,45	4,30	14,70	13,08	16,31	5,60	61,83	59,56	64,10	1,87
Papua Pegunungan	35,58	32,98	38,18	3,73	19,30	17,27	21,34	5,38	45,12	42,57	47,67	2,88
Indonesia	0,76	0,71	0,81	3,40	28,44	28,13	28,74	0,55	70,81	70,50	71,11	0,22

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 3.14 *Sampling Error* Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD				Tamat SD Sederajat				Tamat SMP Sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	1,00	0,77	1,23	11,66	4,84	4,25	5,43	6,21	31,40	30,12	32,68	2,08
Sumatera Utara	1,95	1,62	2,27	8,46	5,44	4,86	6,02	5,46	30,34	29,13	31,54	2,03
Sumatera Barat	1,59	1,25	1,93	10,95	8,57	7,79	9,36	4,65	32,29	30,89	33,68	2,21
Riau	1,78	1,31	2,25	13,43	10,03	9,00	11,06	5,25	31,72	30,21	33,23	2,43
Jambi	2,07	1,49	2,66	14,46	9,18	8,03	10,34	6,40	31,65	29,99	33,31	2,68
Sumatera Selatan	2,59	2,15	3,04	8,75	10,58	9,58	11,59	4,84	30,92	29,56	32,28	2,24
Bengkulu	2,39	1,79	3,00	12,86	7,65	6,54	8,77	7,45	32,07	30,22	33,92	2,95
Lampung	1,98	1,55	2,41	11,04	8,78	7,84	9,73	5,48	37,45	35,89	39,02	2,13
Kep. Bangka Belitung	4,49	3,56	5,42	10,58	11,80	10,34	13,27	6,34	27,03	25,03	29,02	3,76
Kepulauan Riau	1,16	0,59	1,74	25,37	4,62	3,26	5,99	15,05	28,23	25,18	31,27	5,51
DKI Jakarta	0,89	0,44	1,34	26,00	3,41	2,66	4,16	11,20	23,35	21,52	25,19	4,02
Jawa Barat	1,49	1,22	1,77	9,50	8,56	7,92	9,21	3,84	35,24	34,20	36,27	1,50
Jawa Tengah	2,00	1,72	2,27	7,05	8,91	8,32	9,49	3,34	38,38	37,45	39,31	1,24
DI Yogyakarta	0,61	0,22	1,00	32,79	3,16	1,81	4,51	21,85	23,36	21,31	25,41	4,48
Jawa Timur	1,45	1,20	1,70	8,80	7,77	7,23	8,31	3,53	35,66	34,71	36,60	1,35
Banten	1,33	0,87	1,79	17,62	7,66	6,47	8,86	7,95	36,24	34,41	38,07	2,58
Bali	1,48	1,03	1,93	15,55	3,54	2,84	4,25	10,09	31,16	29,25	33,08	3,13
Nusa Tenggara Barat	2,25	1,60	2,89	14,70	7,35	6,34	8,37	7,04	35,40	33,55	37,24	2,66
Nusa Tenggara Timur	5,04	4,51	5,57	5,40	11,84	10,96	12,72	3,79	36,41	35,10	37,71	1,83
Kalimantan Barat	5,14	4,29	5,98	8,42	13,71	12,58	14,84	4,22	33,53	32,02	35,04	2,29
Kalimantan Tengah	2,94	2,27	3,62	11,76	12,10	10,78	13,41	5,54	32,66	30,93	34,39	2,71
Kalimantan Selatan	3,28	2,62	3,94	10,26	11,85	10,71	13,00	4,92	31,05	29,52	32,58	2,51
Kalimantan Timur	1,32	0,87	1,78	17,55	6,31	5,29	7,32	8,18	32,39	30,52	34,26	2,95
Kalimantan Utara	3,22	2,15	4,28	16,90	8,49	6,68	10,31	10,91	31,22	28,60	33,85	4,29
Sulawesi Utara	2,71	2,16	3,27	10,47	6,75	5,71	7,79	7,84	30,21	28,49	31,94	2,92
Sulawesi Tengah	2,70	2,11	3,29	11,16	12,21	10,99	13,42	5,08	35,84	34,21	37,47	2,32
Sulawesi Selatan	3,42	2,94	3,90	7,15	9,28	8,47	10,09	4,45	30,94	29,77	32,11	1,93
Sulawesi Tenggara	2,79	2,26	3,33	9,77	7,23	6,35	8,11	6,20	32,58	30,98	34,18	2,50
Gorontalo	7,73	6,18	9,27	10,19	11,92	10,33	13,52	6,83	31,26	29,08	33,44	3,56
Sulawesi Barat	4,03	3,01	5,05	12,88	14,44	12,67	16,21	6,27	33,38	31,15	35,61	3,41
Maluku	2,08	1,62	2,55	11,43	5,49	4,57	6,40	8,49	27,82	25,94	29,70	3,45
Maluku Utara	3,05	2,34	3,76	11,85	7,44	6,36	8,52	7,43	33,12	31,18	35,07	2,99
Papua Barat	6,16	4,87	7,45	10,67	11,68	9,65	13,70	8,84	34,53	32,03	37,04	3,70
Papua Barat Daya	3,75	2,58	4,92	15,94	8,34	6,65	10,04	10,37	30,53	27,64	33,41	4,82
Papua	5,63	4,55	6,71	9,78	6,68	5,47	7,89	9,22	28,90	26,45	31,34	4,31
Papua Selatan	13,35	10,85	15,84	9,55	19,18	16,38	21,98	7,45	32,89	29,67	36,12	5,00
Papua Tengah	25,06	23,06	27,06	4,08	20,52	18,46	22,59	5,14	26,99	25,00	28,97	3,75
Papua Pegunungan	40,55	37,79	43,32	3,47	12,09	10,51	13,67	6,65	28,52	26,29	30,75	3,99
Indonesia	2,30	2,21	2,40	2,06	8,26	8,07	8,46	1,21	33,64	33,32	33,97	0,49

Lanjutan Tabel 3.14

Provinsi	Tamat SMA/SMK Sederajat				Tamat Pendidikan Tinggi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	49,65	48,23	51,08	1,46	13,10	12,12	14,08	3,83
Sumatera Utara	50,67	49,32	52,02	1,36	11,61	10,67	12,56	4,16
Sumatera Barat	41,97	40,40	43,55	1,91	15,58	14,25	16,91	4,36
Riau	44,22	42,51	45,93	1,97	12,25	10,92	13,59	5,54
Jambi	43,80	41,95	45,65	2,16	13,29	11,91	14,66	5,28
Sumatera Selatan	44,18	42,58	45,79	1,85	11,72	10,41	13,03	5,72
Bengkulu	41,36	39,29	43,43	2,55	16,52	14,82	18,22	5,25
Lampung	42,79	41,17	44,41	1,93	8,99	7,94	10,04	5,96
Kep. Bangka Belitung	43,73	41,28	46,17	2,85	12,95	11,04	14,86	7,54
Kepulauan Riau	50,82	46,85	54,79	3,99	15,16	11,92	18,41	10,92
DKI Jakarta	54,28	51,91	56,65	2,23	18,07	15,97	20,17	5,93
Jawa Barat	44,73	43,59	45,86	1,29	9,98	9,24	10,73	3,80
Jawa Tengah	40,75	39,78	41,71	1,21	9,97	9,33	10,61	3,27
DI Yogyakarta	54,41	51,88	56,94	2,37	18,47	16,38	20,56	5,77
Jawa Timur	43,22	42,21	44,22	1,19	11,91	11,19	12,63	3,07
Banten	43,42	41,40	45,45	2,38	11,34	9,89	12,80	6,54
Bali	43,70	41,65	45,76	2,40	20,11	18,31	21,91	4,56
Nusa Tenggara Barat	42,06	40,13	43,99	2,34	12,94	11,61	14,28	5,26
Nusa Tenggara Timur	32,03	30,60	33,47	2,29	14,68	13,57	15,80	3,87
Kalimantan Barat	37,44	35,78	39,10	2,26	10,19	9,08	11,30	5,56
Kalimantan Tengah	40,60	38,60	42,59	2,51	11,70	10,32	13,09	6,04
Kalimantan Selatan	41,35	39,61	43,09	2,15	12,46	11,13	13,79	5,44
Kalimantan Timur	45,49	43,36	47,63	2,40	14,49	12,85	16,13	5,78
Kalimantan Utara	42,64	39,73	45,56	3,49	14,42	12,20	16,65	7,86
Sulawesi Utara	47,28	45,30	49,25	2,13	13,05	11,57	14,53	5,78
Sulawesi Tengah	38,03	36,35	39,71	2,26	11,22	10,02	12,43	5,47
Sulawesi Selatan	41,82	40,45	43,20	1,68	14,53	13,42	15,64	3,89
Sulawesi Tenggara	41,99	40,27	43,70	2,09	15,41	14,02	16,81	4,62
Gorontalo	36,31	33,87	38,76	3,44	12,78	10,91	14,65	7,47
Sulawesi Barat	35,10	32,82	37,38	3,31	13,05	11,28	14,81	6,89
Maluku	48,68	46,48	50,88	2,31	15,93	13,97	17,89	6,28
Maluku Utara	43,87	41,79	45,95	2,42	12,51	11,03	13,99	6,03
Papua Barat	37,23	34,44	40,02	3,82	10,39	8,73	12,06	8,17
Papua Barat Daya	42,03	38,58	45,47	4,18	15,35	12,25	18,45	10,31
Papua	45,49	42,72	48,26	3,11	13,31	11,23	15,39	7,98
Papua Selatan	27,71	24,30	31,12	6,28	6,87	4,59	9,16	16,96
Papua Tengah	22,92	20,86	24,98	4,59	4,51	3,39	5,62	12,63
Papua Pegunungan	17,13	14,90	19,36	6,63	1,70	0,94	2,47	22,92
Indonesia	43,75	43,39	44,10	0,42	12,04	11,79	12,30	1,08

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



<https://www.bps.go.id>





BAB IV

KESEHATAN

<http://www.buku.go.id>





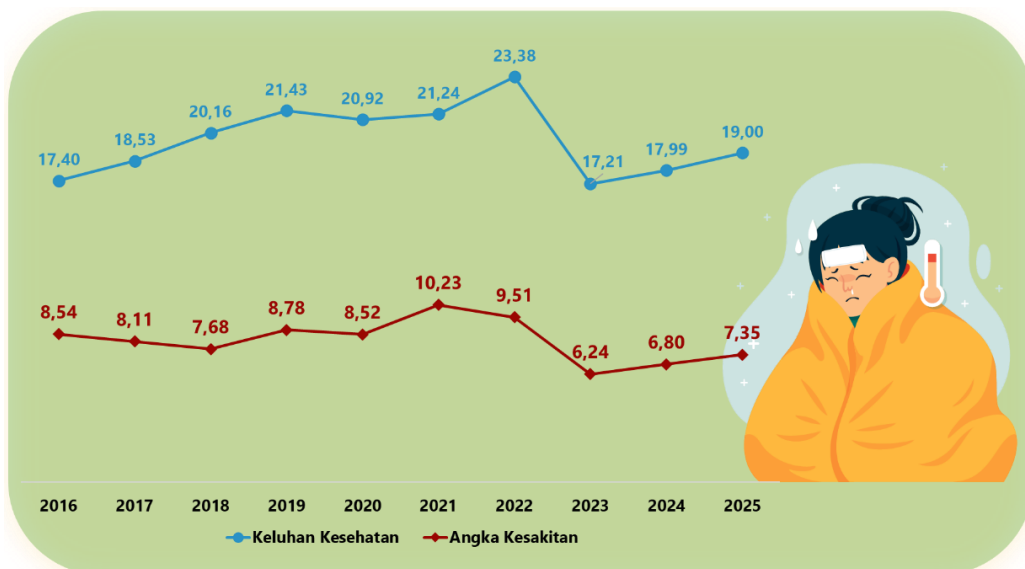
<https://www.bps.go.id>



Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan. Pentingnya kesehatan tercermin dalam RPJPN 2025–2045, dengan salah satu arah pembangunan yaitu kesehatan untuk semua. Kesehatan dipandang sebagai elemen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri serta keluarganya (*United Nations General Assembly*, 1948). Artinya, setiap individu tanpa terkecuali berhak untuk hidup dalam kondisi sehat. Dalam konteks pembangunan nasional, pemuda memegang peranan strategis sebagai agen perubahan dan penerus pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemuda perlu berada dalam kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab 4 publikasi ini akan menguraikan kondisi kesehatan pemuda di Indonesia, mencakup aspek kondisi kesehatan, perilaku berobat, pemanfaatan jaminan kesehatan, serta kebiasaan merokok di kalangan pemuda.

4.1 Kondisi Kesehatan Pemuda

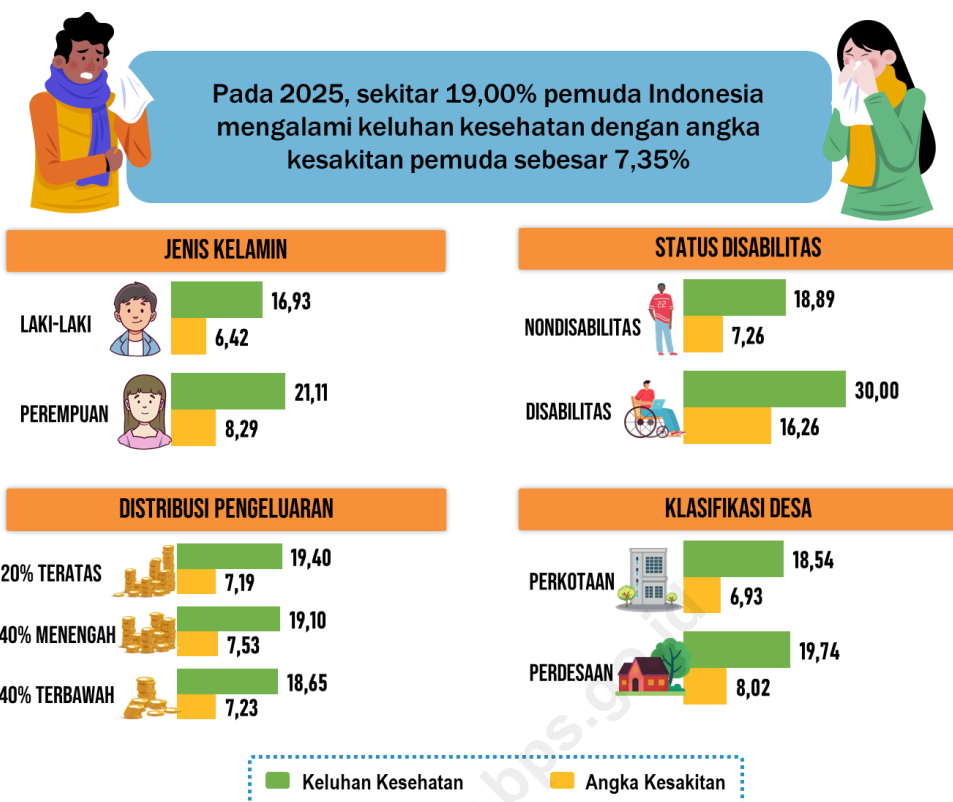
Kondisi kesehatan pemuda merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Publikasi ini menyajikan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi kesehatan pemuda, di antaranya persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan pemuda. Pemuda yang mengalami keluhan kesehatan yaitu mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik keluhan fisik maupun psikis. Sementara itu, angka kesakitan pemuda yang dimaksud dalam publikasi ini adalah persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016–2025

Gambar 4.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda, 2016–2025

Gambar 4.1 memperlihatkan tren keluhan kesehatan pemuda yang cenderung meningkat hingga tahun 2022, lalu menurun cukup tajam di tahun 2023, namun meningkat kembali pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 19 persen di tahun 2025. Sementara itu, tren angka kesakitan terlihat lebih fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 (saat puncak kasus varian Delta Covid-19 di Indonesia) yaitu sebesar 10,23 persen. Seiring waktu angka kesakitan juga menunjukkan penurunan di tahun 2023. Namun, sejalan dengan keluhan kesehatan yang dirasakan pemuda, angka kesakitan pemuda juga menunjukkan pola yang meningkat menjadi 7,35 persen di tahun 2025. Hal ini berarti sekitar 7,35 persen penduduk dalam sebulan terakhir mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Tingginya angka kesakitan di kalangan pemuda dapat berdampak pada penurunan produktivitas, kualitas hidup, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemantauan terhadap keluhan kesehatan dan angka kesakitan pada pemuda menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan yang responsif dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

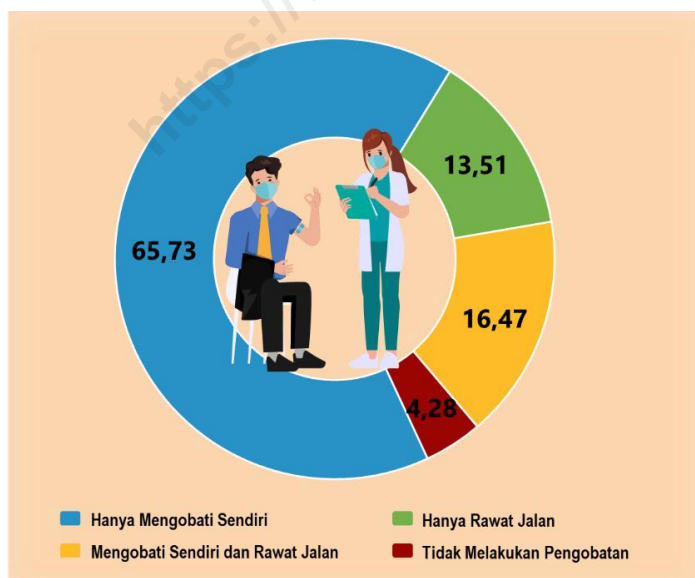
Gambar 4.2 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda Menurut Karakteristik, 2025

Berdasarkan jenis kelamin, kondisi kesehatan pemuda laki-laki relatif lebih baik dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari persentase pemuda laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan pemuda laki-laki yang lebih rendah daripada perempuan. Sementara itu, berdasarkan status disabilitas, pemuda penyandang disabilitas terlihat memiliki status kesehatan yang jauh lebih buruk dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Temuan ini terlihat dari keluhan kesehatan pemuda disabilitas persentasenya lebih tinggi dibandingkan bukan penyandang disabilitas (30,00 persen berbanding 18,89 persen). Bahkan, angka kesakitan pada kelompok pemuda disabilitas melampaui dua kali angka kesakitan pemuda bukan disabilitas (16,26 persen berbanding 7,26 persen). Selain itu, dilihat dari distribusi pengeluaran, pemuda pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran lebih tinggi cenderung memiliki angka keluhan kesehatan yang relatif sama dan angka kesakitan yang lebih besar

dibandingkan pemuda pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran yang lebih rendah. Jika dilihat menurut klasifikasi desa, pemuda di daerah perdesaan cenderung memiliki keluhan kesehatan dan angka kesakitan yang lebih tinggi dibandingkan pemuda di perkotaan.

4.2 Perilaku Berobat Pemuda

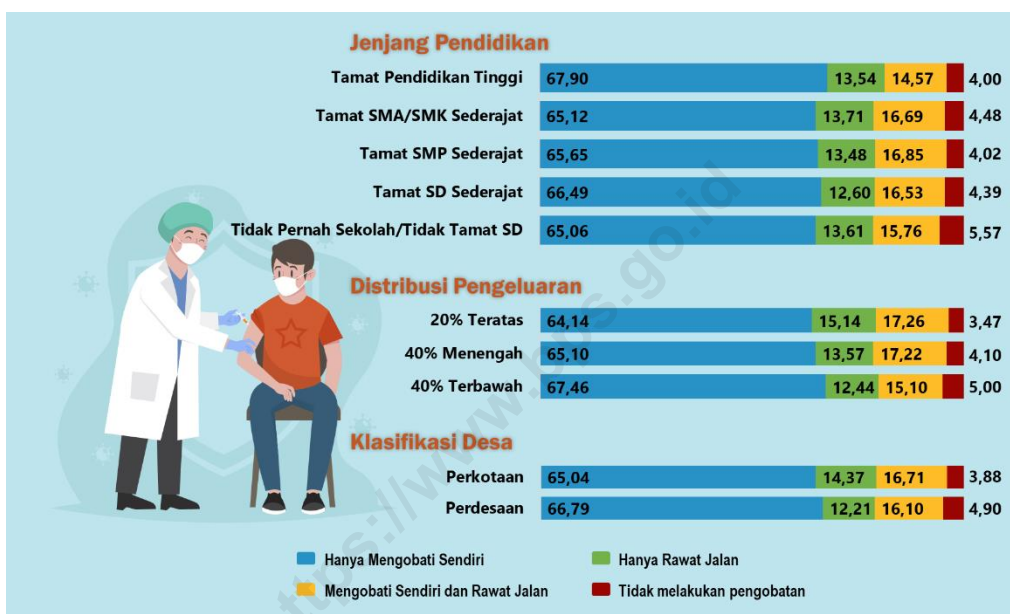
Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan pada tubuhnya secara alamiah akan berupaya mencari cara untuk menghilangkan keluhan tersebut. Salah satu upaya yang umum dilakukan adalah pengobatan sebagai bentuk penanganan terhadap gangguan kesehatan yang dirasakan. Pengobatan dapat dilakukan sendiri, tanpa menggunakan resep/saran dari tenaga kesehatan. Pengobatan sendiri termasuk juga jika membeli obat tanpa resep di warung/apotek, melakukan pijat/kerokan sendiri, serta mengonsumsi obat pemberian orang lain. Selain itu, orang yang mengalami keluhan kesehatan dapat juga melakukan rawat jalan dengan memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dari pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk juga mendatangkan petugas kesehatan ke rumah (*home care*), konsultasi melalui aplikasi secara daring maupun konsultasi melalui telepon.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.3 Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Upaya Pengobatan, 2025

Susenas Maret 2025 menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh pemuda ketika mengalami keluhan kesehatan masih didominasi oleh yang mengobati sendiri (65,73 persen). Meskipun demikian terdapat 13,51 persen pemuda yang melakukan pengobatan rawat jalan ketika sakit dan 16,47 persen lainnya melakukan rawat jalan sekaligus mengobati sendiri. Akan tetapi, Gambar 4.3 menunjukkan masih ada sebesar 4,28 persen pemuda yang tidak melakukan pengobatan (baik mengobati sendiri maupun berobat jalan) ketika mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.



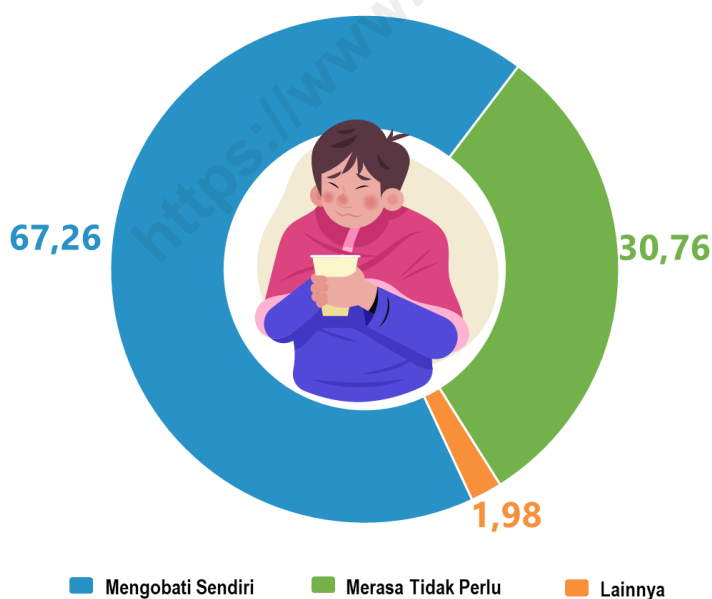
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.4 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Upaya Pengobatan dan Karakteristik, 2025

Apabila dilihat menurut beberapa karakteristik pemuda seperti jenjang pendidikan, distribusi pengeluaran, dan klasifikasi desa, terlihat suatu pola yang mengarah kepada kecenderungan yang sama. Pemuda yang tinggal di perkotaan lebih cenderung mengobati penyakitnya dengan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan dibandingkan pemuda di perdesaan. Sementara itu, pemuda di perdesaan lebih cenderung mengobati sendiri ketika mengalami keluhan kesehatan dibandingkan pemuda yang tinggal di perkotaan.

Hal ini juga sejalan jika dilihat menurut distribusi pengeluaran rumah tangga. Pada kelompok pemuda dengan kategori distribusi pengeluaran lebih tinggi, kecenderungan untuk hanya mengobati sendiri saat mengalami keluhan kesehatan semakin kecil. Sementara itu, kecenderungan untuk melakukan pengobatan rawat jalan lebih tinggi persentasenya dibandingkan kelompok pemuda pada rumah tangga dengan distribusi pengeluaran menengah dan bawah.

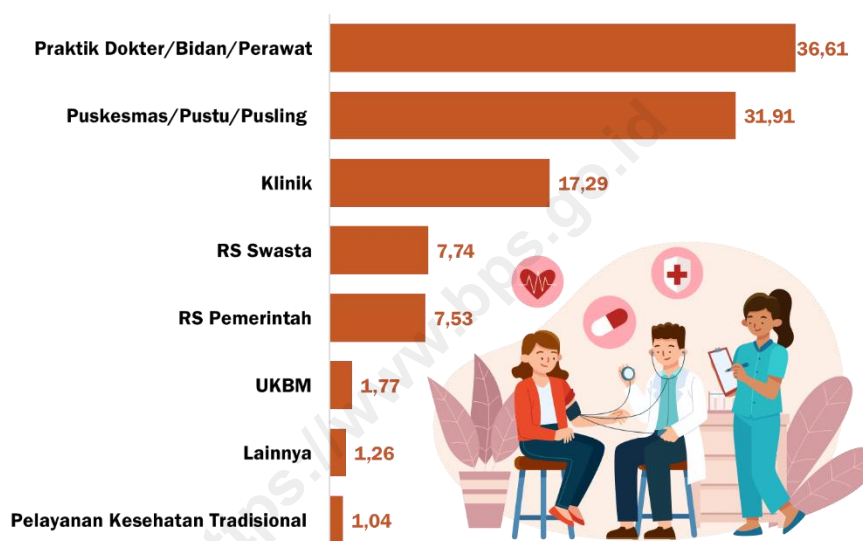
Pada jenjang pendidikan pemuda terlihat bahwa sebaran pada pemuda yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, persentase pemuda yang tidak melakukan pengobatan (rawat jalan dan/atau mengobati sendiri) cenderung lebih rendah jika dibandingkan pemuda pada pendidikan yang lebih rendah. Pada Gambar 4.4 juga terlihat bahwa terdapat 4,00 persen pemuda lulusan pendidikan tinggi yang tidak melakukan pengobatan, sementara sebesar 5,57 persen pemuda yang tidak memiliki ijazah yang tidak melakukan pengobatan ketika mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.5 Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan yang Tidak Rawat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

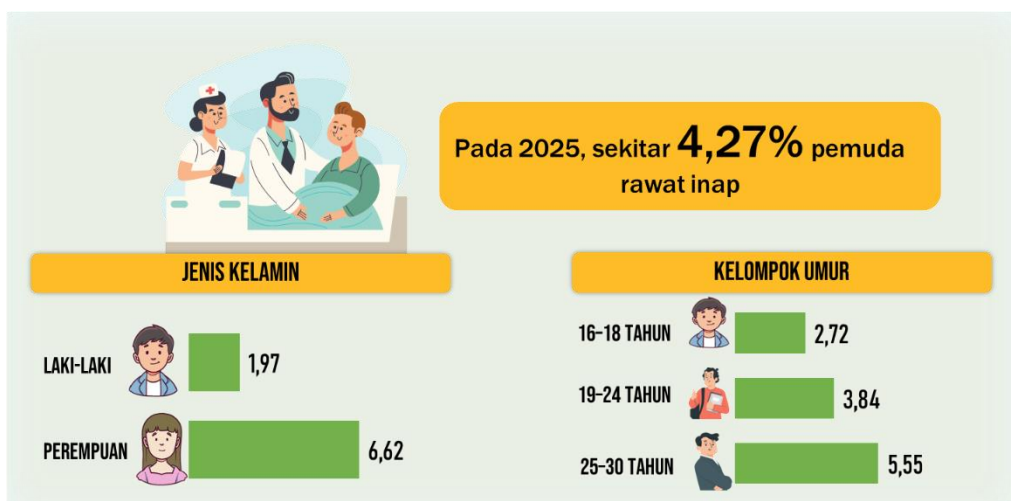
Pada Susenas Maret 2025, ditanyakan pula alasan utama mengapa pemuda yang mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan. Gambar 4.5 menunjukkan bahwa lebih dari separuh (sebesar 67,26 persen) pemuda mengaku tidak rawat jalan karena telah mengobati sendiri. Sementara itu, terdapat 30,76 persen pemuda yang beralasan merasa tidak perlu melakukan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan. Sebesar 1,98 persen pemuda saja yang memiliki alasan lainnya untuk tidak rawat jalan, termasuk juga yang tidak memiliki biaya berobat, tidak ada biaya transport, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, tidak ada yang mendampingi, dan lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.6 Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan Menurut Tempat Rawat Jalan, 2025

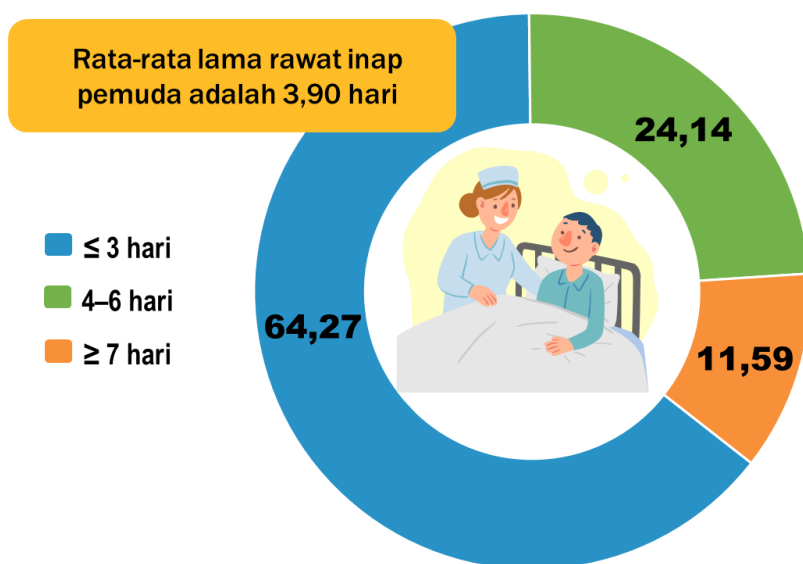
Jika melihat lebih dalam mengenai lokasi yang dipilih pemuda untuk rawat jalan, sebesar 36,61 persen pemuda memilih rawat jalan ke praktik dokter/bidan/perawat, 31,91 persen ke puskesmas/pustu/pusling, dan 17,29 persen ke klinik. Pada Gambar 4.6 juga terlihat bahwa kurang dari 8 persen pemuda yang memilih berobat jalan ke rumah sakit, baik RS pemerintah (7,53 persen) maupun RS swasta (7,74 persen). Hal menarik juga terlihat bahwa ternyata sebesar 1,04 persen pemuda pada tahun 2025 masih memilih berobat jalan di pelayanan kesehatan tradisional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.7 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Rawat inap merupakan alternatif pengobatan bagi penyakit yang cenderung lebih parah dan tidak tertangani dengan rawat jalan. Pada tahun 2025, terdapat 4,27 persen pemuda Indonesia pernah rawat inap. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sejalan dengan kondisi kesehatan perempuan yang cenderung lebih buruk (dilihat dari keluhan kesehatan dan angka kesakitan), persentase pemuda perempuan yang rawat inap juga jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Bahkan persentase pemuda perempuan yang rawat inap tersebut sebesar 3,4 kali persentase pemuda laki-laki. Jika dilihat lebih dalam pada Gambar 4.7 berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa persentase pemuda yang rawat inap terlihat semakin besar seiring semakin tua kelompok umur.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenاس) Maret 2025

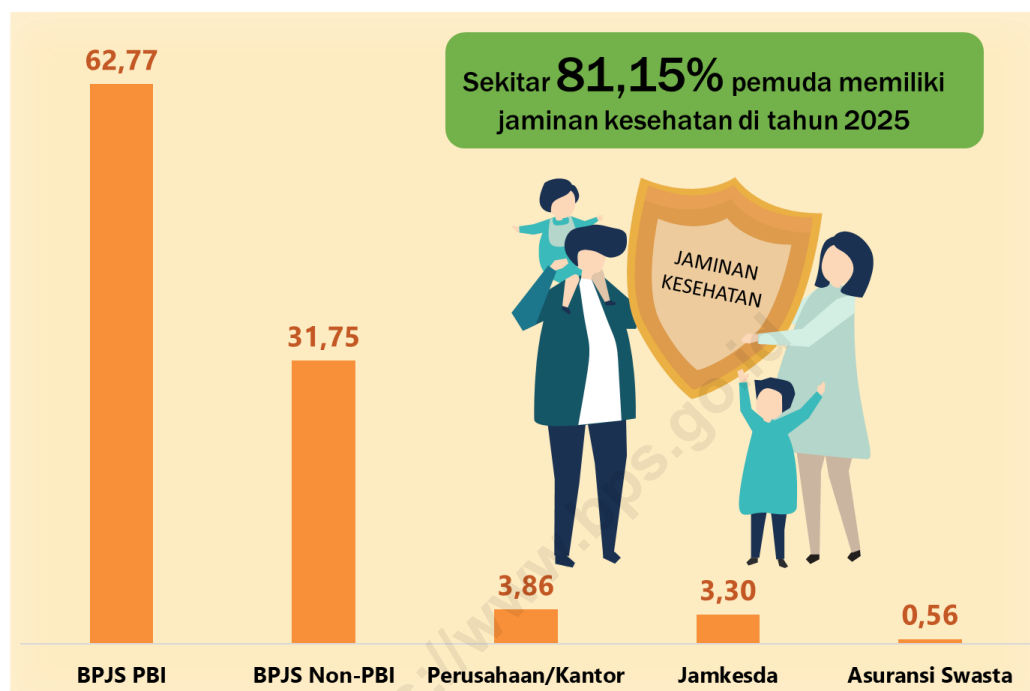
Gambar 4.8 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Menurut Lama Dirawat, 2025

Pada tahun 2025, rata-rata lama rawat inap pemuda di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional yaitu sekitar 3,90 hari. Jika dilihat lebih dalam berdasarkan kategori lama hari rawat inap, sebesar 64,27 persen pemuda menghabiskan lama rawat inap sekitar 1–3 hari. Sebesar 24,14 persen pemuda rawat inap sekitar 4–6 hari. Bahkan, pada Gambar 4.8 terlihat bahwa sebesar 11,59 persen pemuda yang rawat inap sekitar 7 hari atau lebih pada tahun 2025.

4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Pemuda

Sebagai upaya meningkatkan status kesehatan pemuda, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, tenaga, serta sarana pendukung kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup pemuda. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyediaan jaminan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap. Secara global, pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) juga menjadi salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu target 3.8. Cakupan UHC dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap berbagai layanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan, kapan pun dan di mana pun, tanpa

mengalami kesulitan finansial (World Health Organization, 2023b). Namun demikian, UHC baru akan dapat tercapai jika pemerintah menjalin komitmen bersama dalam mencapai UHC dan memastikan semua masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, salah satunya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



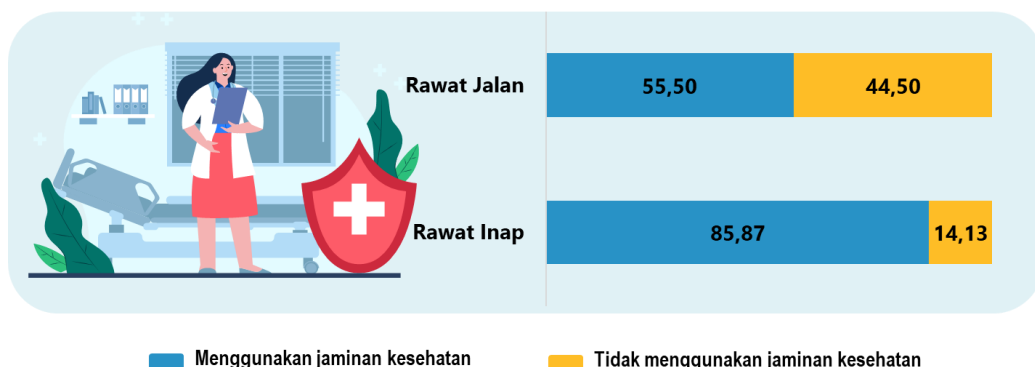
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.9 Persentase Pemuda Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025

Jaminan kesehatan sangat diperlukan masyarakat sebagai bentuk perlindungan kesehatan. Masyarakat dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan melalui jaminan kesehatan yang dimiliki. Terdapat lima jaminan dasar yang dicakup dalam Susenas Maret 2025 yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), BPJS Bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI), perusahaan/kantor, Jamkesda, dan asuransi swasta.

Data Susenas Maret 2025 menunjukkan sebesar 81,15 persen pemuda yang memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar diantaranya memiliki BPJS PBI (62,77 persen) yang iurannya ditanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi

masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu, sebesar 31,75 persen pemuda memiliki BPJS non-PBI (untuk masyarakat yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu).

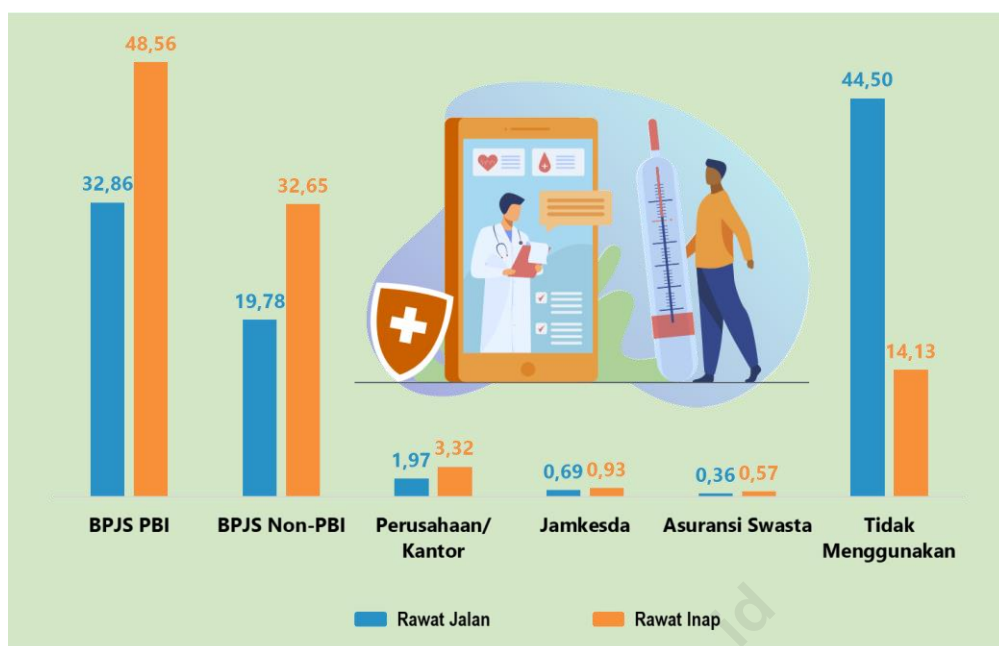


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.10 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan, 2025

Jika dilihat dari pemanfaatan jaminan kesehatan, penggunaan jaminan kesehatan lebih banyak digunakan untuk pengobatan rawat inap dibandingkan untuk rawat jalan. Sekitar 85 dari 100 orang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap. Sementara itu, hanya 55 dari 100 orang yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan. Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa pemuda cenderung lebih banyak yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan dibandingkan untuk rawat inap.

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa terdapat pola yang berbeda pada penggunaan jaminan kesehatan pada rawat jalan dan rawat inap. Persentase pemuda yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan sebesar 3,15 kali dibandingkan pemuda yang rawat inap. Sehingga dapat dikatakan, jaminan kesehatan yang dimiliki pemuda lebih banyak digunakan dalam pengobatan rawat inap dibandingkan rawat jalan. Berdasarkan kategori jaminan kesehatan, BPJS PBI dan BPJS non-PBI menjadi jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan untuk pengobatan (baik rawat jalan maupun rawat inap). Sementara itu, hanya 0,36 persen pemuda yang menggunakan asuransi swasta untuk rawat jalan dan 0,57 persen untuk rawat inap.



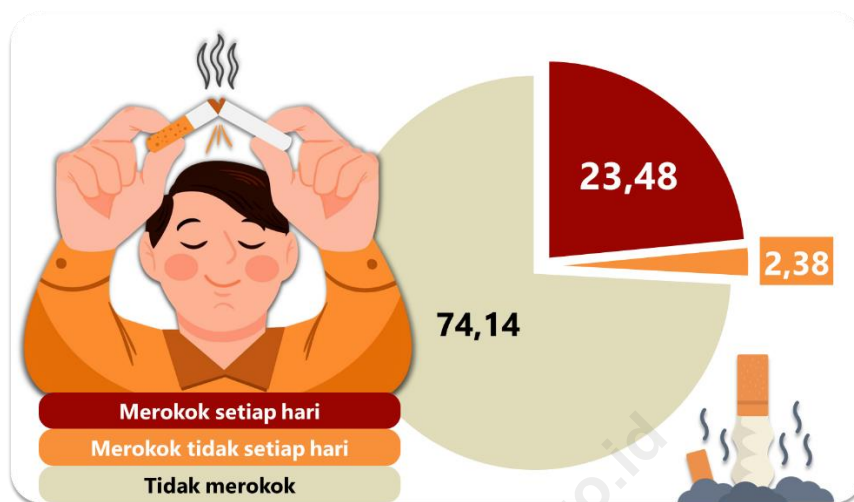
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.11 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

4.4 Pemuda yang Merokok

World Health Organization (2025c) menyebutkan bahwa tembakau ‘membunuh’ lebih dari 7 juta orang atau setengah dari penggunaanya (1,3 miliar orang) setiap tahun. Sebesar 80 persen pengguna tembakau di dunia berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan merokok merupakan bentuk konsumsi tembakau yang paling umum di seluruh dunia. Seiring dengan berkembangnya jaman, kini merokok tidak hanya dalam bentuk tembakau, tetapi juga dalam bentuk elektrik. Rokok elektrik diklaim lebih aman karena aerosol yang dihasilkan berbeda dari asap tembakau konvensional, dengan kandungan puluhan zat kimia yang tidak terdapat dalam asap rokok biasa (Seiler-Ramadas, Sandner, Haider, Grabovac, & Dorner, 2021; Tsai, Byun, Shin, & Alexander, 2020). Namun, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaannya dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi tubuh. Paparan rokok elektrik dapat menimbulkan berbagai reaksi stres dan peradangan pada sistem pernapasan, termasuk sesak napas, batuk, mengi, iritasi pada bronkus dan paru-paru, serta penurunan fungsi paru (Seiler-Ramadas, Sandner, Haider, Grabovac,

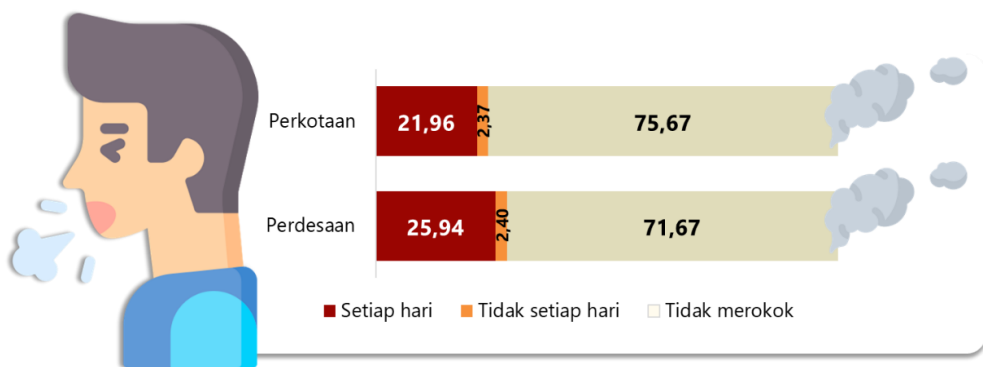
& Dorner, 2021). Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan rokok elektrik perlu dilakukan dengan serius, sebagaimana halnya pada rokok tembakau.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.12 Persentase Pemuda Menurut Kebiasaan Merokok, 2025

Pada tahun 2025, sebesar 25,86 persen pemuda memiliki kebiasaan merokok. Jika dilihat berdasarkan frekuensi merokoknya, sebesar 23,48 persen pemuda memiliki kebiasaan merokok setiap hari dan 2,38 persen pemuda memiliki kebiasaan merokok, tetapi tidak setiap hari. Berkaca dari data tersebut, sungguh sangat disayangkan 1 dari 4 pemuda Indonesia masih terjebak pada kebiasaan merokok. Padahal, dampak ekonomi dari merokok (baik elektrik maupun tembakau) sangat besar, mencakup tingginya biaya perawatan kesehatan untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh tembakau, serta hilangnya potensi sumber daya manusia akibat kesakitan dan kematian yang disebabkan (WHO, 2025). Hal ini tentu perlu menjadi perhatian mengingat pemuda berada pada usia produktif, yaitu masa di mana kemampuan fisik, mental, dan intelektual berada pada puncaknya serta berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Jika pada tahap ini mereka terpapar kebiasaan merokok, maka potensi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia dapat menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4.13 Persentase Pemuda Menurut Kebiasaan Merokok dan Klasifikasi Desa, 2025

Apabila dilihat lebih dalam menurut wilayah tempat tinggalnya, persentase pemuda yang merokok lebih tinggi pada mereka yang tinggal di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan, khususnya untuk pemuda yang merokok setiap hari. Pola ini menunjukkan bahwa pemuda di perdesaan cenderung memiliki frekuensi merokok yang lebih intens, sejalan dengan pola di negara lain seperti Amerika Serikat (Doogan, *et al.*, 2017). Berdasarkan fakta tersebut, kehidupan di perdesaan tampaknya merupakan faktor risiko penting terhadap perilaku merokok pemuda, sehingga perlu menjadi perhatian lebih bagi pemangku kebijakan.

Tabel 4.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Pemuda Dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2025

Karakteristik	Mengalami Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan Pemuda
(1)	(2)	(3)
Total	19,00	7,35
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	16,93	6,42
Perempuan	21,11	8,29
Kelompok Umur		
16–18 Tahun	19,51	8,41
19–24 Tahun	18,28	6,97
25–30 Tahun	19,44	7,15
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	18,89	7,26
Disabilitas	30,00	16,26
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tamat Pendidikan Tinggi	18,07	5,76
Tamat SMA/SMK Sederajat	18,65	7,07
Tamat SMP Sederajat	19,71	8,24
Tamat SD Sederajat	19,24	7,28
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	19,24	8,12
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	19,40	7,19
40% Menengah	19,10	7,53
40% Terbawah	18,65	7,23
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	18,54	6,93
Perdesaan	19,74	8,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.2 Persentase Pemuda dengan Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Upaya Pengobatan, 2025

Karakteristik	Hanya Mengobati Sendiri	Hanya Rawat Jalan	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Pengobatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	65,73	13,51	16,47	4,28	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	68,94	12,18	14,66	4,22	100,00
Perempuan	63,11	14,60	17,95	4,34	100,00
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	65,14	14,84	16,04	3,98	100,00
19–24 Tahun	66,55	13,28	15,74	4,43	100,00
25–30 Tahun	65,30	13,00	17,39	4,31	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	65,93	13,44	16,40	4,23	100,00
Disabilitas	53,10	18,44	21,02	7,44	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	67,90	13,54	14,57	4,00	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	65,12	13,71	16,69	4,48	100,00
Tamat SMP Sederajat	65,65	13,48	16,85	4,02	100,00
Tamat SD Sederajat	66,49	12,60	16,53	4,39	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	65,06	13,61	15,76	5,57	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	64,14	15,14	17,26	3,47	100,00
40% Menengah	65,10	13,57	17,22	4,10	100,00
40% Terbawah	67,46	12,44	15,10	5,00	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	65,04	14,37	16,71	3,88	100,00
Perdesaan	66,79	12,21	16,10	4,90	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.3 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Tempat Berobat, 2025

Karakteristik	Pemuda yang Rawat Jalan	Tempat Rawat Jalan		
		RS Pemerintah	RS Swasta	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	1,27	7,53	7,74	17,29
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	1,28	8,35	6,39	17,25
Perempuan	1,26	6,98	8,66	17,33
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	1,21	6,78	5,81	13,01
19–24 Tahun	1,25	7,57	8,04	17,44
25–30 Tahun	1,30	7,92	8,54	19,54
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	1,28	8,12	13,87	29,17
40% Menengah	1,27	7,08	7,31	16,89
40% Terbawah	1,25	7,70	3,86	9,20
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	1,24	7,86	9,63	22,20
Perdesaan	1,30	6,99	4,60	9,10

Lanjutan Tabel 4.3

Karakteristik	Tempat Rawat Jalan				
	Praktik Dokter/Bidan/Perawat	Puskesmas/ Pustu/ Pusling	UKBM	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	36,61	31,91	1,77	1,04	1,26
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	37,08	31,44	1,43	1,35	1,79
Perempuan	36,30	32,23	2,00	0,83	0,90
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	36,77	37,95	1,79	0,73	1,06
19–24 Tahun	36,89	31,24	1,89	1,09	1,16
25–30 Tahun	36,28	29,16	1,65	1,17	1,46
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	29,62	20,29	0,92	1,24	1,43
40% Menengah	37,29	33,05	1,35	0,92	1,19
40% Terbawah	40,80	38,85	2,94	1,06	1,23
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	28,45	33,36	0,89	0,92	1,17
Perdesaan	50,25	29,50	3,23	1,24	1,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.4 Persentase Pemuda yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2025

Karakteristik	Alasan Utama Tidak Rawat Jalan			Jumlah
	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	67,26	30,76	1,98	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	67,02	31,03	1,95	100,00
Perempuan	67,47	30,52	2,01	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	69,09	28,72	2,19	100,00
19–24 Tahun	66,34	31,93	1,74	100,00
25–30 Tahun	67,14	30,75	2,11	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	67,40	30,70	1,90	100,00
Disabilitas	56,93	34,85	8,22	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	68,48	30,31	1,21	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	66,85	31,51	1,64	100,00
Tamat SMP Sederajat	68,15	29,48	2,38	100,00
Tamat SD Sederajat	67,46	30,69	1,85	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	54,68	38,49	6,83	100,00
Distribusi Pengeluaran				
20% Teratas	67,59	30,93	1,48	100,00
40% Menengah	66,93	31,28	1,79	100,00
40% Terbawah	67,43	30,08	2,49	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	68,05	29,87	2,08	100,00
Perdesaan	66,10	32,05	1,85	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.5 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun Terakhir, 2025

Karakteristik	Pernah Rawat Inap	Tidak Pernah Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Total	4,27	95,73
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	1,97	98,03
Perempuan	6,62	93,38
Kelompok Umur		
16–18 Tahun	2,72	97,28
19–24 Tahun	3,84	96,16
25–30 Tahun	5,55	94,45
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	4,27	95,73
Disabilitas	4,06	95,94
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tamat Pendidikan Tinggi	5,74	94,26
Tamat SMA/SMK Sederajat	4,48	95,52
Tamat SMP Sederajat	3,75	96,25
Tamat SD Sederajat	3,42	96,58
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	3,34	96,66
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	5,21	94,79
40% Menengah	4,28	95,72
40% Terbawah	3,71	96,29
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	4,39	95,61
Perdesaan	4,09	95,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.6 Persentase Pemuda yang Pernah Dirawat Inap Menurut Karakteristik dan Lama Dirawat, 2025

Karakteristik	Rata-Rata Lama Rawat Inap	Lama Rawat Inap			Jumlah
		≤3 Hari	4–6 Hari	≥7 Hari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	3,90	64,27	24,14	11,59	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	5,14	51,29	30,42	18,28	100,00
Perempuan	3,53	68,21	22,23	9,56	100,00
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	4,64	49,99	28,64	21,37	100,00
19–24 Tahun	3,82	63,32	24,99	11,69	100,00
25–30 Tahun	3,77	68,74	22,35	8,91	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	3,76	64,51	24,24	11,25	100,00
Disabilitas	18,98	38,32	13,12	48,56	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	3,52	71,61	20,59	7,80	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	3,83	63,22	25,78	11,00	100,00
Tamat SMP Sederajat	3,93	62,71	23,33	13,95	100,00
Tamat SD Sederajat	5,09	62,37	24,06	13,57	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	4,53	57,42	27,83	14,75	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	4,25	58,47	27,42	14,11	100,00
40% Menengah	3,88	64,71	22,99	12,30	100,00
40% Terbawah	3,65	68,51	22,92	8,57	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	3,95	63,48	24,69	11,84	100,00
Perdesaan	3,82	65,64	23,19	11,17	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.7 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2025

Karakteristik	Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	Memiliki Jaminan Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	18,86	81,14	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	19,83	80,17	100,00
Perempuan	17,86	82,14	100,00
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	20,35	79,65	100,00
19–24 Tahun	18,68	81,32	100,00
25–30 Tahun	18,23	81,77	100,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	18,85	81,15	100,00
Disabilitas	19,42	80,58	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	10,71	89,29	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	17,31	82,69	100,00
Tamat SMP Sederajat	21,50	78,50	100,00
Tamat SD Sederajat	26,76	73,24	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	23,91	76,09	100,00
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	11,50	88,50	100,00
40% Menengah	18,25	81,75	100,00
40% Terbawah	23,93	76,07	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	15,92	84,08	100,00
Perdesaan	23,62	76,38	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.8 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2025

Karakteristik	Kepemilikan Jaminan Kesehatan				
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	62,77	31,75	3,30	0,56	3,86
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	64,24	30,38	3,34	0,54	3,69
Perempuan	61,30	33,12	3,26	0,58	4,03
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	68,28	27,00	3,49	0,49	2,91
19–24 Tahun	64,42	30,44	3,28	0,50	3,52
25–30 Tahun	58,20	35,58	3,23	0,65	4,69
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	62,63	31,86	3,30	0,56	3,88
Disabilitas	76,31	21,21	3,00	0,18	1,10
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	33,49	59,67	2,17	1,81	6,08
Tamat SMA/SMK Sederajat	61,10	33,30	2,91	0,41	4,45
Tamat SMP Sederajat	71,02	24,34	3,43	0,36	2,88
Tamat SD Sederajat	83,94	11,71	4,48	0,24	1,42
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	79,36	9,50	12,50	0,10	1,08
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	32,86	59,11	2,39	1,91	7,18
40% Menengah	63,48	31,12	3,66	0,18	3,68
40% Terbawah	82,53	13,65	3,49	0,09	1,77
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	55,95	38,61	2,29	0,77	4,62
Perdesaan	74,92	19,52	5,11	0,17	2,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.9 Persentase Pemuda yang Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan					Tidak Menggunakan
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	32,86	19,78	0,69	0,36	1,97	44,50
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	32,41	18,13	0,66	0,24	2,06	46,65
Perempuan	33,17	20,89	0,72	0,45	1,91	43,05
Kelompok Umur						
16–18 Tahun	37,78	16,73	0,78	0,38	1,38	43,10
19–24 Tahun	33,34	18,14	0,62	0,10	1,67	46,20
25–30 Tahun	29,70	22,94	0,71	0,59	2,56	43,75
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	32,60	19,87	0,71	0,36	2,00	44,63
Disabilitas	45,56	15,42	–	0,49	0,28	38,26
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tamat Pendidikan Tinggi	17,71	39,45	0,50	2,35	4,72	35,33
Tamat SMA/SMK Sederajat	32,90	21,87	0,40	0,04	2,08	42,95
Tamat SMP Sederajat	35,72	14,80	0,94	0,27	1,38	47,02
Tamat SD Sederajat	36,15	7,36	1,00	–	0,35	55,17
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	47,36	8,54	2,23	–	1,74	40,14
Distribusi Pengeluaran						
20% Teratas	18,26	36,87	0,38	1,13	4,21	39,47
40% Menengah	34,25	18,41	0,69	0,21	1,69	44,90
40% Terbawah	41,63	9,17	0,92	0,01	0,71	47,62
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	33,28	26,08	0,49	0,54	2,57	37,20
Perdesaan	32,15	9,25	1,03	0,07	0,97	56,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.10 Persentase Pemuda yang Rawat Inap Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2025

Karakteristik	Jenis Jaminan Kesehatan					Tidak Menggunakan
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	48,56	32,65	0,93	0,57	3,32	14,13
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	44,25	32,68	1,43	0,54	3,52	17,68
Perempuan	49,87	32,64	0,78	0,57	3,26	13,05
Kelompok Umur						
16–18 Tahun	50,95	29,05	0,83	0,67	2,20	16,38
19–24 Tahun	51,91	29,14	1,09	0,51	2,87	14,61
25–30 Tahun	45,61	36,04	0,85	0,58	3,94	13,20
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	48,40	32,77	0,93	0,56	3,35	14,16
Disabilitas	65,40	20,20	1,88	1,42	0,67	11,04
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
Tamat Pendidikan Tinggi	27,69	54,54	0,42	1,81	4,76	10,82
Tamat SMA/SMK	48,66	33,32	0,87	0,38	3,68	13,26
Tamat SMP Sederajat	53,79	25,99	0,94	0,32	2,44	16,72
Tamat SD Sederajat	70,16	9,16	2,52	0,02	1,42	16,95
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	68,15	14,61	1,19	–	2,89	13,16
Distribusi Pengeluaran						
20% Teratas	23,71	53,00	0,88	1,53	6,08	14,97
40% Menengah	51,11	30,82	1,05	0,36	2,99	13,82
40% Terbawah	65,87	18,13	0,83	0,03	1,47	13,84
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	44,04	39,13	0,71	0,73	3,81	11,67
Perdesaan	56,43	21,37	1,33	0,28	2,47	18,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.11 Persentase Pemuda yang Merokok menurut Frekuensi Merokok dan Karakteristik, 2025

Karakteristik	Merokok Setiap Hari	Merokok Tidak Setiap Hari	Tidak Merokok
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	23,48	2,38	74,14
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	45,59	4,48	49,93
Perempuan	0,94	0,25	98,82
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	8,49	1,83	89,68
19–24 Tahun	24,55	2,67	72,78
25–30 Tahun	30,58	2,40	67,02
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	12,34	1,70	85,97
Tamat SMA/SMK Sederajat	26,35	2,55	71,10
Tamat SMP Sederajat	20,43	2,26	77,31
Tamat SD Sederajat	35,65	2,61	61,74
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	27,98	3,71	68,32
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	21,83	2,10	76,07
40% Menengah	24,91	2,12	72,97
40% Terbawah	22,81	2,85	74,34
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	21,96	2,37	75,67
Perdesaan	25,94	2,40	71,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.12 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15,13	13,80	12,16	16,41	14,29
Sumatera Utara	13,35	17,53	13,25	16,90	15,02
Sumatera Barat	20,33	19,78	17,47	22,80	20,08
Riau	16,01	12,33	12,31	15,54	13,88
Jambi	17,54	16,57	14,84	18,99	16,90
Sumatera Selatan	15,79	17,86	15,24	18,90	17,04
Bengkulu	21,23	20,03	18,38	22,60	20,46
Lampung	20,54	20,83	18,57	22,93	20,73
Kep. Bangka Belitung	20,80	21,07	19,07	22,85	20,91
Kepulauan Riau	8,69	10,53	8,70	8,88	8,79
DKI Jakarta	14,47	–	13,20	15,66	14,47
Jawa Barat	19,30	26,25	18,42	22,51	20,44
Jawa Tengah	23,36	25,61	21,92	26,81	24,35
DI Yogyakarta	24,58	25,59	22,32	27,09	24,77
Jawa Timur	22,05	20,89	19,14	24,06	21,59
Banten	16,17	19,68	13,52	20,01	16,72
Bali	12,50	14,47	12,73	13,16	12,94
Nusa Tenggara Barat	32,36	35,09	30,60	36,53	33,59
Nusa Tenggara Timur	17,44	21,91	18,23	22,87	20,54
Kalimantan Barat	16,50	14,48	13,46	17,12	15,28
Kalimantan Tengah	18,36	18,79	16,36	20,91	18,59
Kalimantan Selatan	17,02	23,44	18,13	22,10	20,08
Kalimantan Timur	14,07	12,32	11,03	16,22	13,56
Kalimantan Utara	12,49	12,89	10,48	14,88	12,63
Sulawesi Utara	11,99	15,34	12,20	14,57	13,35
Sulawesi Tengah	16,28	13,93	13,35	16,23	14,79
Sulawesi Selatan	17,89	18,14	15,75	20,24	18,01
Sulawesi Tenggara	12,09	14,08	11,95	14,48	13,23
Gorontalo	19,37	19,55	19,13	19,81	19,46
Sulawesi Barat	17,14	15,62	14,78	17,07	15,92
Maluku	13,66	11,47	11,71	13,39	12,55
Maluku Utara	5,41	6,68	5,30	7,27	6,27
Papua Barat	10,00	9,01	7,99	10,78	9,33
Papua Barat Daya	8,39	14,69	9,17	12,96	10,95
Papua	7,62	8,01	8,99	6,32	7,76
Papua Selatan	14,28	8,26	9,18	11,74	10,41
Papua Tengah	8,33	5,68	6,14	6,37	6,24
Papua Pegunungan	19,84 ¹	9,81	9,67	11,30	10,46
Indonesia	18,54	19,74	16,93	21,11	19,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.13 Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,44	7,39	5,66	7,68	6,67
Sumatera Utara	5,01	6,79	4,77	6,74	5,72
Sumatera Barat	7,60	9,53	6,89	10,09	8,46
Riau	6,83	5,30	5,67	6,24	5,95
Jambi	4,92	6,04	5,24	6,08	5,66
Sumatera Selatan	3,04	4,31	2,78	4,86	3,81
Bengkulu	5,94	8,87	7,38	8,26	7,81
Lampung	7,73	8,13	7,07	8,91	7,98
Kep. Bangka Belitung	6,00	4,10	4,47	6,00	5,21
Kepulauan Riau	3,26	5,58	2,53 ¹	4,24	3,39
DKI Jakarta	4,74	–	4,11	5,32	4,74
Jawa Barat	7,72	12,61	7,57	9,50	8,52
Jawa Tengah	9,24	11,17	8,83	11,37	10,09
DI Yogyakarta	8,68	11,93	8,43	10,09	9,28
Jawa Timur	7,36	7,83	6,75	8,36	7,55
Banten	6,66	5,83	5,40	7,68	6,53
Bali	5,12	6,41	4,85	6,00	5,41
Nusa Tenggara Barat	13,68	13,24	11,42	15,52	13,49
Nusa Tenggara Timur	6,43	9,64	7,32	10,00	8,65
Kalimantan Barat	6,48	5,80	4,97	7,17	6,07
Kalimantan Tengah	4,86	5,36	4,56	5,72	5,13
Kalimantan Selatan	3,62	7,67	5,03	6,08	5,55
Kalimantan Timur	4,40	4,37	3,03	5,81	4,39
Kalimantan Utara	4,77	6,47	4,40	6,33	5,34
Sulawesi Utara	5,48	7,29	5,78	6,67	6,22
Sulawesi Tengah	5,59	7,46	5,88	7,66	6,77
Sulawesi Selatan	6,79	7,11	5,99	7,88	6,94
Sulawesi Tenggara	5,53	5,28	5,17	5,61	5,39
Gorontalo	9,65	9,20	9,22	9,63	9,42
Sulawesi Barat	5,80	6,92	6,25	7,15	6,70
Maluku	4,98	4,91	4,57	5,33	4,95
Maluku Utara	3,30	3,63	3,26	3,79	3,52
Papua Barat	4,55	3,83	3,20	4,99	4,06
Papua Barat Daya	3,18 ¹	6,90	3,49	6,05	4,69
Papua	4,72	5,47	5,85	3,99	5,00
Papua Selatan	6,55 ¹	3,29	4,60 ¹	4,30	4,46
Papua Tengah	3,30 ¹	1,70	1,87	2,25	2,04
Papua Pegunungan	19,84 ¹	2,24	3,91	2,84	3,39
Indonesia	6,93	8,02	6,42	8,29	7,35

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.14 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Upaya Pengobatan, 2025

Provinsi	Mengobati Sendiri Saja	Rawat Jalan Saja	Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan	Tidak Melakukan Pengobatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	56,74	16,94	20,64	5,68
Sumatera Utara	67,07	12,28	14,43	6,23
Sumatera Barat	54,52	22,58	16,69	6,22
Riau	63,77	15,82	14,37	6,04
Jambi	72,02	12,18	11,52	4,27
Sumatera Selatan	72,61	9,36	12,92	5,11
Bengkulu	62,86	14,58	16,18	6,38
Lampung	63,89	13,23	18,19	4,69
Kep. Bangka Belitung	70,19	11,10	15,98	2,74 ¹
Kepulauan Riau	54,59	25,50	19,19 ¹	NA
DKI Jakarta	62,29	12,34	21,86	3,51 ¹
Jawa Barat	63,58	13,27	19,63	3,53
Jawa Tengah	63,10	15,81	16,20	4,88
DI Yogyakarta	62,20	20,39	13,32	4,09
Jawa Timur	67,30	12,80	16,68	3,23
Banten	66,61	12,47	18,06	2,86 ¹
Bali	50,29	25,83	19,70	4,18 ¹
Nusa Tenggara Barat	67,64	10,91	18,89	2,56
Nusa Tenggara Timur	68,83	12,18	13,69	5,30
Kalimantan Barat	73,67	8,80	14,09	3,44 ¹
Kalimantan Tengah	79,45	5,14	11,63	3,78 ¹
Kalimantan Selatan	82,68	5,66	8,67	2,99 ¹
Kalimantan Timur	72,32	13,51	8,80	5,37 ¹
Kalimantan Utara	62,71	14,68	17,49	5,12 ¹
Sulawesi Utara	65,31	14,78	16,45	3,46 ¹
Sulawesi Tengah	78,02	5,88	10,95	5,16
Sulawesi Selatan	73,68	10,74	10,50	5,09
Sulawesi Tenggara	76,23	7,25	9,95	6,57 ¹
Gorontalo	66,66	18,17	11,36	3,82 ¹
Sulawesi Barat	61,40	16,65	10,18	11,77
Maluku	78,55	9,93	6,61	4,92 ¹
Maluku Utara	67,09	15,12	9,34	8,45 ¹
Papua Barat	58,07	14,46 ¹	19,01 ¹	8,46 ¹
Papua Barat Daya	63,26	17,96	12,24 ¹	6,55 ¹
Papua	47,54	28,48	19,55	4,43 ¹
Papua Selatan	64,87	14,84	6,72 ¹	13,57 ¹
Papua Tengah	38,78	22,43	3,77 ¹	35,01
Papua Pegunungan	60,00	12,82	20,85	6,33 ¹
Indonesia	65,73	13,51	16,47	4,28

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.15 Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan (Sebulan Terakhir) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	81,58	74,67	78,58	76,49	77,38
Sumatera Utara	80,34	82,81	83,24	80,04	81,49
Sumatera Barat	70,83	71,67	72,68	70,02	71,20
Riau	74,53	81,57	81,32	75,48	78,14
Jambi	81,62	84,60	83,91	83,25	83,54
Sumatera Selatan	84,95	85,86	86,16	85,00	85,53
Bengkulu	81,52	77,56	77,71	80,14	79,04
Lampung	82,49	81,85	84,60	80,00	82,08
Kep. Bangka Belitung	83,60	89,78	86,21	86,13	86,17
Kepulauan Riau	73,81	73,30	80,30	67,48	73,78
DKI Jakarta	84,16	–	87,84	81,25	84,16
Jawa Barat	83,02	83,89	85,15	81,57	83,21
Jawa Tengah	78,47	80,28	80,75	78,11	79,31
DI Yogyakarta	75,93	73,75	76,74	74,55	75,51
Jawa Timur	83,84	84,19	85,25	82,95	83,98
Banten	83,25	90,92	83,38	85,57	84,67
Bali	69,71	70,80	71,64	68,31	69,98
Nusa Tenggara Barat	84,46	88,87	88,00	85,32	86,53
Nusa Tenggara Timur	79,50	83,59	82,32	82,68	82,52
Kalimantan Barat	84,92	89,88	88,95	86,81	87,76
Kalimantan Tengah	91,97	90,35	89,75	92,16	91,08
Kalimantan Selatan	91,34	91,35	91,81	90,96	91,35
Kalimantan Timur	80,98	81,52	84,72	78,56	81,12
Kalimantan Utara	80,07	80,45	76,37	83,02	80,20
Sulawesi Utara	85,24	77,79	82,78	80,86	81,76
Sulawesi Tengah	88,97	88,96	91,23	87,11	88,96
Sulawesi Selatan	83,24	85,18	86,08	82,72	84,18
Sulawesi Tenggara	82,00	88,87	83,84	88,08	86,18
Gorontalo	69,98	85,63	77,00	79,04	78,01
Sulawesi Barat	63,79	73,66	73,76	69,66	71,58
Maluku	87,47	82,49	87,06	83,48	85,16
Maluku Utara	92,87	70,20	78,52	74,86	76,43
Papua Barat	75,76	77,78	79,89	74,82	77,09
Papua Barat Daya	83,79	68,59	84,63	68,18	75,50
Papua	66,67	67,77	68,13	65,36	67,09
Papua Selatan	81,67	61,89	71,18	71,94	71,59
Papua Tengah	32,73 ¹	46,44	45,15	39,56	42,56
Papua Pegunungan	88,06	79,83	83,92	78,09	80,85
Indonesia	81,75	82,89	83,60	81,06	82,20

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.16 Persentase Pemuda yang Melakukan Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan (Sebulan Terakhir) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	29,89	42,52	35,40	39,19	37,58
Sumatera Utara	31,06	21,74	24,05	28,91	26,70
Sumatera Barat	37,73	41,22	31,64	45,33	39,27
Riau	37,43	23,32	26,66	33,14	30,19
Jambi	25,82	22,55	21,03	25,82	23,71
Sumatera Selatan	24,05	21,25	20,17	24,03	22,28
Bengkulu	30,47	30,93	31,77	29,92	30,76
Lampung	28,04	33,34	29,72	32,83	31,42
Kep. Bangka Belitung	30,47	22,31	25,29	28,65	27,08
Kepulauan Riau	45,73	29,64 ¹	35,86	53,20	44,68
DKI Jakarta	34,20	–	29,31	38,06	34,20
Jawa Barat	33,20	31,74	28,01	37,01	32,89
Jawa Tengah	32,84	31,05	29,17	34,37	32,01
DI Yogyakarta	32,43	39,14	29,87	36,72	33,71
Jawa Timur	29,26	29,81	25,98	32,28	29,47
Banten	30,87	29,01	31,44	29,89	30,53
Bali	47,13	40,76	45,47	45,59	45,53
Nusa Tenggara Barat	30,58	28,91	25,76	33,13	29,80
Nusa Tenggara Timur	21,32	27,47	21,82	29,14	25,87
Kalimantan Barat	28,64	18,59	20,79	24,56	22,89
Kalimantan Tengah	16,63	16,87	14,84	18,32	16,76
Kalimantan Selatan	14,79	13,97	13,51	15,03	14,33
Kalimantan Timur	23,13	20,01	17,47	25,75	22,31
Kalimantan Utara	30,21	35,89	31,79	32,45	32,17
Sulawesi Utara	29,19	33,55	29,12	33,10	31,23
Sulawesi Tengah	13,38	19,16	15,61	17,83	16,83
Sulawesi Selatan	20,20	22,34	21,50	21,03	21,24
Sulawesi Tenggara	19,92	15,45	15,88	18,27	17,20
Gorontalo	33,79	25,48	28,95	30,11	29,53
Sulawesi Barat	23,28	27,78	25,48	28,03	26,83
Maluku	14,16	19,28	11,93	20,60	16,54
Maluku Utara	14,62 ¹	28,19	22,52	25,91	24,46
Papua Barat	32,45 ¹	34,01	27,61 ¹	38,19	33,47
Papua Barat Daya	18,66 ¹	39,80	28,52	31,54	30,19
Papua	49,79	45,21	45,89	51,62	48,03
Papua Selatan	7,61 ¹	34,99	19,22 ¹	23,54	21,56
Papua Tengah	78,05	NA	23,90 ¹	28,86	26,20
Papua Pegunungan	52,24 ¹	31,04	32,10	35,08	33,67
Indonesia	31,08	28,31	26,84	32,55	29,98

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.17 Persentase Pemuda yang Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,97	3,69	2,14	6,18	4,16
Sumatera Utara	3,57	2,59	1,54	4,92	3,18
Sumatera Barat	4,15	4,39	1,09	7,55	4,26
Riau	3,84	2,23	1,31	4,60	2,91
Jambi	3,56	2,94	1,73	4,59	3,15
Sumatera Selatan	3,99	3,34	1,07	6,20	3,59
Bengkulu	5,26	3,24	1,81	6,18	3,97
Lampung	4,61	5,48	2,36	8,02	5,16
Kep. Bangka Belitung	3,78	3,71	0,89 ¹	6,76	3,75
Kepulauan Riau	4,21	3,02	NA	7,28	4,15
DKI Jakarta	3,92	–	1,93	5,79	3,92
Jawa Barat	4,10	4,17	2,17	6,11	4,11
Jawa Tengah	5,88	6,08	3,41	8,57	5,97
DI Yogyakarta	5,55	7,11	2,74	8,79	5,84
Jawa Timur	4,69	4,58	2,12	7,20	4,65
Banten	3,09	2,49 ¹	1,21	4,82	2,99
Bali	4,94	4,46	2,17	7,61	4,83
Nusa Tenggara Barat	5,03	5,98	2,21	8,66	5,46
Nusa Tenggara Timur	3,94	4,04	0,85	7,21	4,01
Kalimantan Barat	3,92	2,67	1,08	5,28	3,17
Kalimantan Tengah	2,27	1,71	0,73 ¹	3,24	1,96
Kalimantan Selatan	2,50	2,57	0,69 ¹	4,43	2,53
Kalimantan Timur	3,56	3,26	1,34	5,70	3,47
Kalimantan Utara	5,10	3,97	1,17 ¹	8,45	4,72
Sulawesi Utara	4,63	4,74	2,56	6,93	4,68
Sulawesi Tengah	5,97	4,46	1,96	8,05	5,02
Sulawesi Selatan	7,20	5,44	2,44	10,22	6,36
Sulawesi Tenggara	4,09	3,48	1,69	5,77	3,75
Gorontalo	8,87	5,40	2,06	12,37	7,10
Sulawesi Barat	3,22	5,28	2,25	7,54	4,87
Maluku	3,70	1,13	1,35 ¹	3,45	2,40
Maluku Utara	2,01	1,92	0,85 ¹	3,08	1,95
Papua Barat	1,73 ¹	1,63	0,59 ¹	2,83	1,66
Papua Barat Daya	3,03 ¹	2,11	0,65 ¹	4,92	2,66
Papua	3,13	1,51 ¹	0,84 ¹	4,52	2,53
Papua Selatan	3,59 ¹	2,06	1,45 ¹	3,84	2,60
Papua Tengah	3,23 ¹	NA	0,28 ¹	1,48 ¹	0,83 ¹
Papua Pegunungan	NA	0,17 ¹	NA	NA	NA
Indonesia	4,39	4,09	1,97	6,62	4,27

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.18 Persentase Pemuda yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,55	99,27	99,32	99,44	99,38
Sumatera Utara	77,68	70,59	74,31	75,40	74,84
Sumatera Barat	83,86	79,21	80,80	82,81	81,78
Riau	82,62	75,00	76,58	79,93	78,21
Jambi	74,37	60,50	62,96	67,53	65,23
Sumatera Selatan	85,41	71,04	76,11	77,35	76,72
Bengkulu	83,90	76,27	76,93	81,14	79,01
Lampung	84,05	73,53	76,81	77,96	77,38
Kep. Bangka Belitung	88,00	83,46	85,94	86,33	86,13
Kepulauan Riau	89,18	89,85	89,23	89,19	89,21
DKI Jakarta	96,80	–	97,01	96,60	96,80
Jawa Barat	80,38	66,56	76,56	79,72	78,12
Jawa Tengah	82,09	76,21	78,27	80,77	79,51
DI Yogyakarta	91,35	91,24	89,79	92,80	91,33
Jawa Timur	82,80	72,78	78,08	79,48	78,78
Banten	85,55	65,11	81,24	83,42	82,32
Bali	89,31	95,50	91,59	89,78	90,71
Nusa Tenggara Barat	82,48	71,83	78,36	77,04	77,69
Nusa Tenggara Timur	84,48	83,29	82,83	84,49	83,66
Kalimantan Barat	80,49	68,22	72,34	73,83	73,08
Kalimantan Tengah	75,64	69,51	71,92	72,72	72,31
Kalimantan Selatan	77,08	79,23	76,28	79,99	78,11
Kalimantan Timur	91,05	88,99	89,58	91,38	90,46
Kalimantan Utara	91,71	91,83	89,60	94,01	91,75
Sulawesi Utara	90,78	85,27	86,99	90,19	88,54
Sulawesi Tengah	89,47	82,70	83,79	86,57	85,18
Sulawesi Selatan	93,65	89,81	91,32	92,28	91,81
Sulawesi Tenggara	89,97	89,24	89,32	89,78	89,56
Gorontalo	94,53	91,92	92,44	93,99	93,20
Sulawesi Barat	93,76	92,56	90,70	94,93	92,80
Maluku	73,09	64,70	68,23	69,44	68,83
Maluku Utara	80,11	75,45	75,38	78,54	76,94
Papua Barat	83,31	81,34	81,28	82,73	81,97
Papua Barat Daya	88,26	93,82	90,52	90,52	90,52
Papua	84,62	82,50	82,47	85,44	83,83
Papua Selatan	88,70	96,04	93,13	93,72	93,41
Papua Tengah	76,33	75,41	74,74	76,63	75,60
Papua Pegunungan	97,22	96,38	96,28	96,59	96,43
Indonesia	84,08	76,38	80,17	82,14	81,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.19 Persentase Pemuda yang Merokok Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Merokok	Tidak Merokok	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23,75	76,25	100,00
Sumatera Utara	21,30	78,70	100,00
Sumatera Barat	27,13	72,87	100,00
Riau	23,75	76,25	100,00
Jambi	27,48	72,52	100,00
Sumatera Selatan	27,51	72,49	100,00
Bengkulu	28,71	71,29	100,00
Lampung	31,03	68,97	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	24,93	75,07	100,00
Kepulauan Riau	21,26	78,74	100,00
DKI Jakarta	23,24	76,76	100,00
Jawa Barat	28,86	71,14	100,00
Jawa Tengah	27,65	72,35	100,00
DI Yogyakarta	24,12	75,88	100,00
Jawa Timur	25,99	74,01	100,00
Banten	27,93	72,07	100,00
Bali	18,84	81,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,94	70,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,38	73,62	100,00
Kalimantan Barat	25,39	74,61	100,00
Kalimantan Tengah	23,74	76,26	100,00
Kalimantan Selatan	20,87	79,13	100,00
Kalimantan Timur	19,76	80,24	100,00
Kalimantan Utara	23,47	76,53	100,00
Sulawesi Utara	21,16	78,84	100,00
Sulawesi Tengah	24,43	75,57	100,00
Sulawesi Selatan	22,01	77,99	100,00
Sulawesi Tenggara	21,43	78,57	100,00
Gorontalo	26,55	73,45	100,00
Sulawesi Barat	23,59	76,41	100,00
Maluku	22,00	78,00	100,00
Maluku Utara	22,98	77,02	100,00
Papua Barat	24,57	75,43	100,00
Papua Barat Daya	23,33	76,67	100,00
Papua	17,54	82,46	100,00
Papua Selatan	28,11	71,89	100,00
Papua Tengah	18,65	81,35	100,00
Papua Pegunungan	14,29	85,71	100,00
Indonesia	25,86	74,14	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.20 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	15,13	13,08	17,19	6,93	13,80	12,49	15,11	4,84
Sumatera Utara	13,35	11,76	14,94	6,07	17,53	16,04	19,02	4,33
Sumatera Barat	20,33	18,11	22,55	5,57	19,78	18,00	21,55	4,57
Riau	16,01	13,85	18,16	6,87	12,33	10,68	13,98	6,81
Jambi	17,54	14,66	20,43	8,40	16,57	14,61	18,54	6,04
Sumatera Selatan	15,79	13,21	18,37	8,33	17,86	16,29	19,42	4,48
Bengkulu	21,23	17,31	25,15	9,42	20,03	17,76	22,30	5,78
Lampung	20,54	18,07	23,01	6,13	20,83	18,91	22,76	4,72
Kep. Bangka Belitung	20,80	17,78	23,82	7,40	21,07	17,47	24,67	8,71
Kepulauan Riau	8,69	6,76	10,63	11,36	10,53	6,45	14,61	19,77
DKI Jakarta	14,47	12,77	16,17	5,98	–	–	–	–
Jawa Barat	19,30	18,20	20,40	2,92	26,25	23,84	28,66	4,69
Jawa Tengah	23,36	22,22	24,51	2,50	25,61	24,00	27,21	3,20
DI Yogyakarta	24,58	21,86	27,30	5,65	25,59	19,82	31,35	11,49
Jawa Timur	22,05	20,90	23,20	2,66	20,89	19,45	22,33	3,51
Banten	16,17	14,04	18,30	6,73	19,68	15,57	23,78	10,64
Bali	12,50	10,42	14,58	8,51	14,47	11,85	17,09	9,23
Nusa Tenggara Barat	32,36	29,67	35,04	4,23	35,09	31,49	38,69	5,23
Nusa Tenggara Timur	17,44	14,84	20,04	7,62	21,91	20,42	23,39	3,46
Kalimantan Barat	16,50	14,22	18,79	7,07	14,48	12,90	16,06	5,56
Kalimantan Tengah	18,36	15,78	20,95	7,18	18,79	16,44	21,14	6,38
Kalimantan Selatan	17,02	15,02	19,02	6,00	23,44	21,08	25,81	5,15
Kalimantan Timur	14,07	12,05	16,09	7,33	12,32	9,52	15,11	11,58
Kalimantan Utara	12,49	9,68	15,30	11,49	12,89	9,28	16,50	14,28
Sulawesi Utara	11,99	10,03	13,94	8,32	15,34	13,28	17,41	6,86
Sulawesi Tengah	16,28	13,25	19,30	9,48	13,93	12,01	15,85	7,02
Sulawesi Selatan	17,89	15,93	19,84	5,58	18,14	16,72	19,56	3,99
Sulawesi Tenggara	12,09	9,50	14,67	10,91	14,08	12,49	15,67	5,75
Gorontalo	19,37	15,85	22,88	9,26	19,55	16,84	22,26	7,08
Sulawesi Barat	17,14	12,59	21,70	13,56	15,62	13,47	17,76	7,00
Maluku	13,66	10,70	16,62	11,07	11,47	9,63	13,31	8,20
Maluku Utara	5,41	3,70	7,12	16,14	6,68	5,19	8,16	11,31
Papua Barat	10,00	6,43	13,57	18,23	9,01	6,55	11,46	13,91
Papua Barat Daya	8,39	5,42	11,36	18,07	14,69	11,64	17,74	10,59
Papua	7,62	5,10	10,14	16,86	8,01	6,33	9,68	10,69
Papua Selatan	14,28	7,49	21,07	24,26	8,26	5,99	10,53	14,01
Papua Tengah	8,33	4,47	12,19	23,63	5,68	4,32	7,04	12,21
Papua Pegunungan	19,84	4,97	34,71	38,24	9,81	8,40	11,22	7,33
Indonesia	18,54	18,11	18,97	1,19	19,74	19,30	20,19	1,15

Lanjutan Tabel 4.20

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	12,16	10,79	13,53	5,74	16,41	14,97	17,85	4,47	14,29	13,17	15,41	4,01
Sumatera Utara	13,25	11,88	14,63	5,30	16,90	15,45	18,34	4,36	15,02	13,90	16,15	3,82
Sumatera Barat	17,47	15,61	19,34	5,45	22,80	20,91	24,68	4,23	20,08	18,62	21,54	3,71
Riau	12,31	10,67	13,96	6,81	15,54	13,81	17,26	5,68	13,88	12,57	15,20	4,83
Jambi	14,84	12,93	16,75	6,56	18,99	16,87	21,11	5,69	16,90	15,28	18,53	4,91
Sumatera Selatan	15,24	13,64	16,84	5,36	18,90	17,12	20,68	4,81	17,04	15,65	18,43	4,17
Bengkulu	18,38	15,75	21,01	7,29	22,60	20,03	25,16	5,78	20,46	18,44	22,48	5,05
Lampung	18,57	16,73	20,40	5,04	22,93	20,90	24,97	4,53	20,73	19,21	22,25	3,74
Kep. Bangka Belitung	19,07	16,22	21,92	7,62	22,85	19,89	25,81	6,61	20,91	18,60	23,22	5,64
Kepulauan Riau	8,70	6,15	11,25	14,97	8,88	6,29	11,47	14,89	8,79	6,95	10,64	10,70
DKI Jakarta	13,20	11,02	15,37	8,41	15,66	13,37	17,96	7,48	14,47	12,77	16,17	5,98
Jawa Barat	18,42	17,18	19,66	3,44	22,51	21,17	23,86	3,05	20,44	19,43	21,44	2,51
Jawa Tengah	21,92	20,72	23,12	2,79	26,81	25,57	28,05	2,35	24,35	23,39	25,30	2,00
DI Yogyakarta	22,32	19,35	25,30	6,80	27,09	23,77	30,41	6,25	24,77	22,30	27,23	5,07
Jawa Timur	19,14	18,03	20,26	2,97	24,06	22,84	25,27	2,58	21,59	20,69	22,48	2,12
Banten	13,52	11,34	15,71	8,24	20,01	17,52	22,49	6,33	16,72	14,82	18,63	5,82
Bali	12,73	10,56	14,91	8,72	13,16	11,07	15,25	8,10	12,94	11,23	14,66	6,77
Nusa Tenggara Barat	30,60	27,88	33,31	4,52	36,53	33,79	39,27	3,83	33,59	31,40	35,77	3,32
Nusa Tenggara Timur	18,23	16,67	19,79	4,37	22,87	21,19	24,55	3,74	20,54	19,23	21,84	3,25
Kalimantan Barat	13,46	11,83	15,09	6,18	17,12	15,38	18,86	5,18	15,28	13,97	16,59	4,39
Kalimantan Tengah	16,36	14,24	18,48	6,61	20,91	18,65	23,16	5,50	18,59	16,86	20,33	4,77
Kalimantan Selatan	18,13	16,25	20,00	5,29	22,10	20,04	24,15	4,75	20,08	18,53	21,63	3,93
Kalimantan Timur	11,03	9,11	12,95	8,89	16,22	13,98	18,45	7,02	13,56	11,91	15,21	6,21
Kalimantan Utara	10,48	7,84	13,11	12,82	14,88	11,97	17,78	9,96	12,63	10,40	14,85	9,00
Sulawesi Utara	12,20	10,38	14,02	7,62	14,57	12,74	16,40	6,40	13,35	11,92	14,78	5,48
Sulawesi Tengah	13,35	11,25	15,45	8,03	16,23	14,29	18,16	6,09	14,79	13,15	16,43	5,67
Sulawesi Selatan	15,75	14,24	17,26	4,88	20,24	18,71	21,76	3,84	18,01	16,79	19,23	3,47
Sulawesi Tenggara	11,95	10,15	13,76	7,69	14,48	12,78	16,19	6,01	13,23	11,79	14,66	5,52
Gorontalo	19,13	16,31	21,94	7,52	19,81	17,07	22,56	7,07	19,46	17,25	21,67	5,79
Sulawesi Barat	14,78	12,34	17,23	8,43	17,07	14,66	19,48	7,21	15,92	13,97	17,86	6,23
Maluku	11,71	9,44	13,98	9,87	13,39	11,15	15,63	8,53	12,55	10,81	14,29	7,07
Maluku Utara	5,30	3,95	6,65	12,98	7,27	5,81	8,74	10,29	6,27	5,12	7,42	9,34
Papua Barat	7,99	5,67	10,30	14,80	10,78	8,12	13,44	12,60	9,33	7,30	11,35	11,09
Papua Barat Daya	9,17	6,58	11,76	14,40	12,96	9,86	16,07	12,22	10,95	8,75	13,15	10,24
Papua	8,99	6,40	11,57	14,70	6,32	4,72	7,92	12,91	7,76	6,07	9,46	11,16
Papua Selatan	9,18	6,06	12,30	17,33	11,74	8,13	15,35	15,70	10,41	7,57	13,26	13,94
Papua Tengah	6,14	4,52	7,75	13,47	6,37	4,72	8,02	13,21	6,24	4,89	7,59	11,04
Papua Pegunungan	9,67	7,50	11,84	11,46	11,30	9,11	13,49	9,89	10,46	8,84	12,09	7,93
Indonesia	16,93	16,54	17,32	1,17	21,11	20,69	21,53	1,01	19,00	18,68	19,32	0,85

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.21 *Sampling Error* Angka Kesakitan Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	5,44	4,40	6,48	9,78	7,39	6,43	8,35	6,62
Sumatera Utara	5,01	4,12	5,91	9,13	6,79	5,70	7,87	8,16
Sumatera Barat	7,60	6,38	8,81	8,15	9,53	8,28	10,79	6,70
Riau	6,83	5,38	8,29	10,87	5,30	4,26	6,34	10,04
Jambi	4,92	3,62	6,22	13,53	6,04	4,88	7,21	9,81
Sumatera Selatan	3,04	2,15	3,93	14,92	4,31	3,53	5,09	9,20
Bengkulu	5,94	4,27	7,61	14,35	8,87	7,17	10,56	9,75
Lampung	7,73	6,31	9,14	9,37	8,13	6,94	9,31	7,45
Kep. Bangka Belitung	6,00	4,22	7,77	15,11	4,10	2,30	5,91	22,46
Kepulauan Riau	3,26	1,98	4,54	19,98	5,58	3,24	7,93	21,43
DKI Jakarta	4,74	3,71	5,77	11,07	–	–	–	–
Jawa Barat	7,72	7,04	8,39	4,47	12,61	10,87	14,36	7,07
Jawa Tengah	9,24	8,55	9,92	3,79	11,17	10,04	12,31	5,17
DI Yogyakarta	8,68	7,03	10,32	9,66	11,93	7,94	15,92	17,05
Jawa Timur	7,36	6,70	8,01	4,57	7,83	6,88	8,78	6,17
Banten	6,66	5,09	8,23	12,05	5,83	3,81	7,84	17,62
Bali	5,12	3,89	6,35	12,24	6,41	4,65	8,18	14,06
Nusa Tenggara Barat	13,68	11,87	15,50	6,78	13,24	11,13	15,35	8,13
Nusa Tenggara Timur	6,43	4,90	7,96	12,16	9,64	8,67	10,61	5,14
Kalimantan Barat	6,48	5,10	7,85	10,81	5,80	4,71	6,88	9,56
Kalimantan Tengah	4,86	3,58	6,14	13,42	5,36	4,13	6,60	11,75
Kalimantan Selatan	3,62	2,78	4,46	11,84	7,67	6,10	9,24	10,44
Kalimantan Timur	4,40	3,25	5,54	13,33	4,37	2,70	6,04	19,48
Kalimantan Utara	4,77	3,14	6,39	17,40	6,47	3,99	8,96	19,59
Sulawesi Utara	5,48	4,12	6,84	12,69	7,29	5,94	8,64	9,45
Sulawesi Tengah	5,59	4,09	7,09	13,66	7,46	5,94	8,98	10,41
Sulawesi Selatan	6,79	5,56	8,02	9,23	7,11	6,17	8,04	6,69
Sulawesi Tenggara	5,53	3,65	7,42	17,38	5,28	4,44	6,13	8,15
Gorontalo	9,65	7,37	11,92	12,03	9,20	7,22	11,17	10,95
Sulawesi Barat	5,80	3,22	8,37	22,67	6,92	5,38	8,45	11,35
Maluku	4,98	3,36	6,60	16,61	4,91	3,70	6,13	12,65
Maluku Utara	3,30	1,88	4,71	21,89	3,63	2,56	4,70	15,09
Papua Barat	4,55	2,47	6,62	23,34	3,83	2,15	5,50	22,30
Papua Barat Daya	3,18	1,50	4,85	26,91	6,90	4,74	9,06	15,97
Papua	4,72	2,67	6,77	22,17	5,47	4,02	6,91	13,52
Papua Selatan	6,55	1,26	11,85	41,22	3,29	1,78	4,80	23,37
Papua Tengah	3,30	1,05	5,56	34,75	1,70	0,94	2,46	22,70
Papua Pegunungan	19,84	4,97	34,71	38,24	2,24	1,58	2,89	14,89
Indonesia	6,93	6,67	7,20	1,95	8,02	7,72	8,32	1,90

Lanjutan Tabel 4.21

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	5,66	4,77	6,55	8,04	7,68	6,70	8,66	6,53	6,67	5,95	7,39	5,49
Sumatera Utara	4,77	3,87	5,67	9,62	6,74	5,79	7,68	7,15	5,72	5,03	6,42	6,17
Sumatera Barat	6,89	5,84	7,95	7,82	10,09	8,79	11,40	6,60	8,46	7,59	9,34	5,28
Riau	5,67	4,51	6,83	10,41	6,24	5,12	7,35	9,13	5,95	5,08	6,81	7,39
Jambi	5,24	4,12	6,36	10,90	6,08	4,88	7,29	10,14	5,66	4,78	6,55	7,98
Sumatera Selatan	2,78	2,12	3,45	12,11	4,86	3,96	5,76	9,41	3,81	3,22	4,39	7,88
Bengkulu	7,38	5,65	9,10	11,91	8,26	6,71	9,81	9,56	7,81	6,57	9,06	8,14
Lampung	7,07	5,96	8,18	8,01	8,91	7,65	10,17	7,22	7,98	7,06	8,89	5,85
Kep. Bangka Belitung	4,47	3,16	5,78	14,97	6,00	4,07	7,94	16,45	5,21	3,93	6,50	12,55
Kepulauan Riau	2,53	1,05	4,01	29,93	4,24	2,28	6,19	23,53	3,39	2,17	4,60	18,28
DKI Jakarta	4,11	2,90	5,33	15,06	5,32	3,88	6,76	13,79	4,74	3,71	5,77	11,07
Jawa Barat	7,57	6,74	8,39	5,57	9,50	8,61	10,39	4,77	8,52	7,89	9,15	3,80
Jawa Tengah	8,83	8,03	9,63	4,63	11,37	10,51	12,23	3,85	10,09	9,46	10,72	3,18
DI Yogyakarta	8,43	6,52	10,34	11,58	10,09	7,97	12,20	10,69	9,28	7,74	10,81	8,43
Jawa Timur	6,75	6,06	7,44	5,22	8,36	7,59	9,12	4,65	7,55	7,00	8,09	3,70
Banten	5,40	3,84	6,97	14,77	7,68	5,95	9,42	11,52	6,53	5,17	7,89	10,65
Bali	4,85	3,60	6,10	13,15	6,00	4,68	7,32	11,23	5,41	4,38	6,44	9,73
Nusa Tenggara Barat	11,42	9,72	13,11	7,58	15,52	13,60	17,45	6,33	13,49	12,11	14,87	5,22
Nusa Tenggara Timur	7,32	6,38	8,26	6,55	10,00	8,86	11,14	5,81	8,65	7,83	9,47	4,85
Kalimantan Barat	4,97	4,01	5,94	9,91	7,17	5,95	8,40	8,70	6,07	5,21	6,92	7,16
Kalimantan Tengah	4,56	3,42	5,71	12,82	5,72	4,56	6,88	10,33	5,13	4,24	6,02	8,84
Kalimantan Selatan	5,03	3,92	6,15	11,27	6,08	4,90	7,26	9,92	5,55	4,68	6,42	8,02
Kalimantan Timur	3,03	2,07	3,98	16,15	5,81	4,43	7,20	12,16	4,39	3,44	5,34	11,02
Kalimantan Utara	4,40	2,82	5,99	18,32	6,33	4,54	8,11	14,39	5,34	3,97	6,71	13,07
Sulawesi Utara	5,78	4,47	7,10	11,61	6,67	5,45	7,89	9,33	6,22	5,24	7,19	8,03
Sulawesi Tengah	5,88	4,49	7,28	12,07	7,66	6,34	8,98	8,80	6,77	5,66	7,89	8,39
Sulawesi Selatan	5,99	4,99	7,00	8,57	7,88	6,85	8,91	6,66	6,94	6,16	7,72	5,73
Sulawesi Tenggara	5,17	3,98	6,37	11,80	5,61	4,52	6,70	9,94	5,39	4,45	6,33	8,91
Gorontalo	9,22	7,31	11,12	10,54	9,63	7,66	11,60	10,44	9,42	7,92	10,92	8,13
Sulawesi Barat	6,25	4,56	7,95	13,85	7,15	5,50	8,79	11,75	6,70	5,36	8,03	10,19
Maluku	4,57	3,22	5,91	15,04	5,33	3,99	6,67	12,85	4,95	3,94	5,96	10,42
Maluku Utara	3,26	2,22	4,31	16,32	3,79	2,71	4,87	14,59	3,52	2,66	4,38	12,45
Papua Barat	3,20	1,74	4,66	23,31	4,99	3,14	6,84	18,90	4,06	2,74	5,38	16,58
Papua Barat Daya	3,49	2,09	4,89	20,51	6,05	3,94	8,15	17,75	4,69	3,34	6,04	14,66
Papua	5,85	3,79	7,92	17,99	3,99	2,65	5,33	17,08	5,00	3,61	6,39	14,22
Papua Selatan	4,60	1,96	7,25	29,29	4,30	2,24	6,37	24,47	4,46	2,32	6,60	24,47
Papua Tengah	1,87	1,00	2,74	23,76	2,25	1,19	3,30	23,90	2,04	1,28	2,80	19,08
Papua Pegunungan	3,91	2,14	5,69	23,18	2,84	1,62	4,05	21,93	3,39	2,25	4,53	17,20
Indonesia	6,42	6,17	6,67	2,00	8,29	8,02	8,57	1,69	7,35	7,15	7,55	1,39

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.22 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Upaya Pengobatan, 2025

Provinsi	Mengobati Sendiri Saja				Rawat Jalan Saja			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	56,74	52,90	60,57	3,45	16,94	14,19	19,69	8,28
Sumatera Utara	67,07	63,63	70,50	2,61	12,28	9,41	15,14	11,91
Sumatera Barat	54,52	50,60	58,43	3,66	22,58	19,57	25,60	6,81
Riau	63,77	59,15	68,39	3,70	15,82	12,02	19,61	12,24
Jambi	72,02	67,54	76,50	3,17	12,18	8,58	15,79	15,08
Sumatera Selatan	72,61	68,99	76,23	2,54	9,36	6,95	11,78	13,14
Bengkulu	62,86	57,69	68,03	4,20	14,58	10,20	18,96	15,32
Lampung	63,89	60,06	67,73	3,06	13,23	10,45	16,01	10,72
Kep. Bangka Belitung	70,19	64,95	75,42	3,80	11,10	7,65	14,54	15,83
Kepulauan Riau	54,59	43,23	65,95	10,61	25,50	15,17	35,83	20,67
DKI Jakarta	62,29	56,42	68,17	4,81	12,34	8,39	16,28	16,32
Jawa Barat	63,58	61,03	66,13	2,05	13,27	11,45	15,09	6,99
Jawa Tengah	63,10	61,07	65,14	1,65	15,81	14,31	17,31	4,84
DI Yogyakarta	62,20	57,22	67,18	4,09	20,39	16,32	24,46	10,18
Jawa Timur	67,30	65,17	69,42	1,61	12,80	11,27	14,33	6,10
Banten	66,61	60,36	72,86	4,78	12,47	6,58	18,35	24,09
Bali	50,29	43,06	57,51	7,33	25,83	19,90	31,77	11,71
Nusa Tenggara Barat	67,64	64,32	70,96	2,50	10,91	8,76	13,05	10,03
Nusa Tenggara Timur	68,83	65,83	71,84	2,23	12,18	10,14	14,22	8,53
Kalimantan Barat	73,67	69,74	77,60	2,72	8,80	6,29	11,32	14,58
Kalimantan Tengah	79,45	75,50	83,41	2,54	5,14	3,17	7,10	19,55
Kalimantan Selatan	82,68	79,71	85,65	1,84	5,66	3,73	7,60	17,45
Kalimantan Timur	72,32	66,83	77,80	3,87	13,51	9,66	17,36	14,54
Kalimantan Utara	62,71	54,34	71,09	6,81	14,68	9,35	20,01	18,52
Sulawesi Utara	65,31	59,78	70,84	4,32	14,78	10,87	18,68	13,48
Sulawesi Tengah	78,02	73,64	82,39	2,86	5,88	3,75	8,00	18,45
Sulawesi Selatan	73,68	70,55	76,81	2,17	10,74	8,82	12,65	9,10
Sulawesi Tenggara	76,23	71,08	81,38	3,44	7,25	4,74	9,77	17,69
Gorontalo	66,66	60,56	72,75	4,67	18,17	12,38	23,95	16,25
Sulawesi Barat	61,40	55,47	67,32	4,92	16,65	12,12	21,18	13,88
Maluku	78,55	73,70	83,40	3,15	9,93	6,52	13,33	17,49
Maluku Utara	67,09	58,64	75,54	6,43	15,12	7,91	22,34	24,34
Papua Barat	58,07	46,53	69,62	10,14	14,46	6,58	22,34	27,81
Papua Barat Daya	63,26	53,86	72,66	7,58	17,96	10,98	24,94	19,84
Papua	47,54	35,66	59,42	12,75	28,48	16,56	40,41	21,36
Papua Selatan	64,87	53,57	76,16	8,88	14,84	7,74	21,95	24,43
Papua Tengah	38,78	29,55	48,02	12,15	22,43	13,13	31,73	21,16
Papua Pegunungan	60,00	52,78	67,22	6,14	12,82	7,93	17,71	19,46
Indonesia	65,73	64,88	66,58	0,66	13,51	12,88	14,15	2,40

Lanjutan Tabel 4.22

Provinsi	Mengobati Sendiri dan Rawat jalan				Tidak Melakukan Pengobatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	20,64	17,42	23,85	7,95	5,68	3,86	7,51	16,39
Sumatera Utara	14,43	11,96	16,89	8,71	6,23	4,63	7,84	13,14
Sumatera Barat	16,69	14,14	19,24	7,80	6,22	3,79	8,65	19,94
Riau	14,37	11,13	17,62	11,50	6,04	3,73	8,36	19,58
Jambi	11,52	8,76	14,29	12,25	4,27	2,57	5,97	20,28
Sumatera Selatan	12,92	10,31	15,52	10,28	5,11	3,36	6,86	17,51
Bengkulu	16,18	12,63	19,73	11,20	6,38	3,96	8,80	19,34
Lampung	18,19	15,36	21,02	7,94	4,69	2,62	6,75	22,49
Kep. Bangka Belitung	15,98	11,61	20,35	13,95	2,74	1,07	4,41	31,15
Kepulauan Riau	19,19	9,18	29,19	26,59	NA	NA	NA	51,91
DKI Jakarta	21,86	16,92	26,80	11,52	3,51	1,10	5,92	35,05
Jawa Barat	19,63	17,58	21,67	5,32	3,53	2,56	4,49	14,02
Jawa Tengah	16,20	14,69	17,72	4,78	4,88	3,86	5,90	10,63
DI Yogyakarta	13,32	9,41	17,23	14,99	4,09	2,30	5,89	22,36
Jawa Timur	16,68	14,97	18,38	5,21	3,23	2,47	3,98	11,93
Banten	18,06	14,01	22,11	11,44	2,86	1,42	4,30	25,64
Bali	19,70	14,43	24,96	13,63	4,18	1,66	6,70	30,75
Nusa Tenggara Barat	18,89	16,10	21,68	7,54	2,56	1,57	3,55	19,73
Nusa Tenggara Timur	13,69	11,76	15,62	7,19	5,30	3,37	7,22	18,54
Kalimantan Barat	14,09	11,02	17,15	11,11	3,44	1,54	5,35	28,21
Kalimantan Tengah	11,63	8,51	14,74	13,66	3,78	1,53	6,04	30,38
Kalimantan Selatan	8,67	6,59	10,75	12,26	2,99	1,50	4,48	25,44
Kalimantan Timur	8,80	5,34	12,27	20,08	5,37	2,50	8,24	27,25
Kalimantan Utara	17,49	10,73	24,25	19,72	5,12	1,51	8,73	35,99
Sulawesi Utara	16,45	11,81	21,09	14,38	3,46	1,68	5,25	26,31
Sulawesi Tengah	10,95	7,56	14,34	15,81	5,16	2,84	7,47	22,91
Sulawesi Selatan	10,50	8,18	12,82	11,27	5,09	3,43	6,74	16,58
Sulawesi Tenggara	9,95	7,03	12,86	14,95	6,57	2,17	10,98	34,20
Gorontalo	11,36	8,18	14,53	14,26	3,82	1,49	6,15	31,16
Sulawesi Barat	10,18	6,85	13,51	16,69	11,77	7,20	16,33	19,80
Maluku	6,61	3,79	9,43	21,78	4,92	2,12	7,71	28,99
Maluku Utara	9,34	5,30	13,37	22,05	8,45	3,82	13,08	27,95
Papua Barat	19,01	8,30	29,73	28,76	8,46	3,06	13,86	32,59
Papua Barat Daya	12,24	5,40	19,07	28,50	6,55	1,92	11,18	36,09
Papua	19,55	11,93	27,17	19,89	4,43	1,65	7,20	31,99
Papua Selatan	6,72	2,58	10,87	31,47	13,57	5,38	21,76	30,79
Papua Tengah	3,77	0,10	7,45	49,66	35,01	27,11	42,91	11,51
Papua Pegunungan	20,85	14,72	26,97	14,99	6,33	3,15	9,51	25,65
Indonesia	16,47	15,82	17,12	2,02	4,28	3,94	4,63	4,11

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.23 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	81,58	76,95	86,21	2,90	74,67	70,37	78,98	2,94
Sumatera Utara	80,34	75,12	85,55	3,31	82,81	79,62	85,99	1,96
Sumatera Barat	70,83	65,71	75,96	3,69	71,67	67,43	75,91	3,02
Riau	74,53	68,05	81,00	4,43	81,57	76,35	86,78	3,26
Jambi	81,62	74,24	89,01	4,62	84,60	80,07	89,12	2,73
Sumatera Selatan	84,95	79,51	90,38	3,26	85,86	82,54	89,19	1,98
Bengkulu	81,52	72,76	90,27	5,48	77,56	71,99	83,14	3,67
Lampung	82,49	76,92	88,06	3,44	81,85	77,82	85,87	2,51
Kep. Bangka Belitung	83,60	78,05	89,14	3,38	89,78	85,08	94,49	2,67
Kepulauan Riau	73,81	62,80	84,82	7,61	73,30	57,53	89,08	10,98
DKI Jakarta	84,16	79,67	88,64	2,72	–	–	–	–
Jawa Barat	83,02	80,75	85,30	1,40	83,89	79,45	88,32	2,70
Jawa Tengah	78,47	76,35	80,59	1,38	80,28	77,50	83,06	1,77
DI Yogyakarta	75,93	71,16	80,70	3,21	73,75	63,88	83,62	6,83
Jawa Timur	83,84	81,70	85,99	1,31	84,19	81,48	86,89	1,64
Banten	83,25	76,13	90,36	4,36	90,92	86,22	95,62	2,64
Bali	69,71	61,86	77,55	5,74	70,80	62,15	79,46	6,24
Nusa Tenggara Barat	84,46	81,11	87,81	2,02	88,87	85,65	92,09	1,85
Nusa Tenggara Timur	79,50	72,68	86,32	4,38	83,59	80,92	86,25	1,63
Kalimantan Barat	84,92	79,65	90,19	3,17	89,88	86,32	93,43	2,02
Kalimantan Tengah	91,97	88,14	95,80	2,12	90,35	86,12	94,57	2,39
Kalimantan Selatan	91,34	88,16	94,53	1,78	91,35	87,99	94,71	1,88
Kalimantan Timur	80,98	75,66	86,30	3,35	81,52	72,11	90,93	5,89
Kalimantan Utara	80,07	72,17	87,96	5,03	80,45	69,46	91,43	6,97
Sulawesi Utara	85,24	79,17	91,31	3,63	77,79	72,03	83,56	3,78
Sulawesi Tengah	88,97	83,43	94,50	3,17	88,96	85,37	92,55	2,06
Sulawesi Selatan	83,24	79,22	87,25	2,46	85,18	82,50	87,86	1,61
Sulawesi Tenggara	82,00	71,14	92,86	6,76	88,87	85,78	91,96	1,77
Gorontalo	69,98	59,53	80,44	7,62	85,63	80,34	90,91	3,15
Sulawesi Barat	63,79	48,87	78,70	11,93	73,66	67,71	79,61	4,12
Maluku	87,47	81,34	93,61	3,58	82,49	76,51	88,46	3,69
Maluku Utara	92,87	86,23	99,51	3,65	70,20	59,76	80,63	7,59
Papua Barat	75,76	59,70	91,82	10,82	77,78	66,67	88,89	7,29
Papua Barat Daya	83,79	70,49	97,09	8,10	68,59	58,51	78,67	7,50
Papua	66,67	48,42	84,92	13,97	67,77	57,34	78,20	7,85
Papua Selatan	81,67	66,99	96,34	9,17	61,89	48,11	75,67	11,36
Papua Tengah	32,73	9,85	55,61	35,67	46,44	36,76	56,12	10,63
Papua Pegunungan	88,06	63,77	100,00	14,07	79,83	74,42	85,23	3,45
Indonesia	81,75	80,77	82,74	0,61	82,89	81,95	83,84	0,58

Lanjutan Tabel 4.23

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	78,58	74,04	83,12	2,95	76,49	72,55	80,42	2,63	77,38	74,16	80,59	2,12
Sumatera Utara	83,24	78,65	87,82	2,81	80,04	76,57	83,52	2,22	81,49	78,33	84,65	1,98
Sumatera Barat	72,68	67,12	78,25	3,91	70,02	65,94	74,10	2,97	71,20	67,78	74,62	2,45
Riau	81,32	75,98	86,66	3,35	75,48	69,95	81,01	3,74	78,14	74,00	82,28	2,71
Jambi	83,91	79,08	88,75	2,94	83,25	78,38	88,13	2,99	83,54	79,61	87,47	2,40
Sumatera Selatan	86,16	82,21	90,11	2,34	85,00	81,46	88,55	2,13	85,53	82,63	88,42	1,73
Bengkulu	77,71	69,95	85,48	5,10	80,14	75,29	85,00	3,09	79,04	74,26	83,81	3,08
Lampung	84,60	80,58	88,62	2,42	80,00	75,95	84,04	2,58	82,08	78,82	85,34	2,03
Kep. Bangka Belitung	86,21	80,93	91,49	3,12	86,13	81,65	90,61	2,65	86,17	82,36	89,97	2,25
Kepulauan Riau	80,30	67,04	93,57	8,43	67,48	52,67	82,28	11,20	73,78	63,43	84,12	7,15
DKI Jakarta	87,84	82,40	93,28	3,16	81,25	75,11	87,38	3,85	84,16	79,67	88,64	2,72
Jawa Barat	85,15	82,53	87,76	1,57	81,57	78,95	84,19	1,64	83,21	81,18	85,23	1,24
Jawa Tengah	80,75	78,41	83,10	1,48	78,11	75,94	80,28	1,42	79,31	77,59	81,02	1,10
DI Yogyakarta	76,74	70,61	82,87	4,08	74,55	68,88	80,22	3,88	75,51	71,23	79,80	2,90
Jawa Timur	85,25	83,10	87,41	1,29	82,95	80,74	85,16	1,36	83,98	82,30	85,66	1,02
Banten	83,38	74,83	91,93	5,23	85,57	80,24	90,89	3,17	84,67	78,75	90,59	3,57
Bali	71,64	64,20	79,08	5,30	68,31	60,52	76,10	5,82	69,98	63,72	76,24	4,56
Nusa Tenggara Barat	88,00	85,02	90,99	1,73	85,32	82,19	88,44	1,87	86,53	84,19	88,87	1,38
Nusa Tenggara Timur	82,32	78,79	85,86	2,19	82,68	79,59	85,78	1,91	82,52	79,86	85,18	1,65
Kalimantan Barat	88,95	84,91	92,99	2,32	86,81	82,82	90,79	2,34	87,76	84,72	90,79	1,77
Kalimantan Tengah	89,75	85,47	94,02	2,43	92,16	88,81	95,51	1,85	91,08	88,19	93,97	1,62
Kalimantan Selatan	91,81	88,71	94,91	1,72	90,96	87,94	93,98	1,69	91,35	89,01	93,69	1,31
Kalimantan Timur	84,72	78,74	90,70	3,60	78,56	72,79	84,33	3,75	81,12	76,49	85,75	2,91
Kalimantan Utara	76,37	65,94	86,81	6,97	83,02	76,39	89,64	4,07	80,20	73,79	86,60	4,08
Sulawesi Utara	82,78	77,36	88,20	3,34	80,86	75,45	86,26	3,41	81,76	77,56	85,96	2,62
Sulawesi Tengah	91,23	87,39	95,08	2,15	87,11	83,09	91,12	2,35	88,96	85,87	92,06	1,77
Sulawesi Selatan	86,08	82,94	89,22	1,86	82,72	79,61	85,82	1,92	84,18	81,73	86,62	1,48
Sulawesi Tenggara	83,84	76,99	90,70	4,17	88,08	83,82	92,33	2,46	86,18	81,41	90,94	2,82
Gorontalo	77,00	69,50	84,50	4,97	79,04	72,43	85,66	4,27	78,01	72,05	83,97	3,90
Sulawesi Barat	73,76	65,78	81,73	5,52	69,66	62,40	76,93	5,32	71,58	65,87	77,29	4,07
Maluku	87,06	80,90	93,23	3,61	83,48	77,53	89,42	3,63	85,16	80,88	89,44	2,56
Maluku Utara	78,52	67,95	89,10	6,87	74,86	65,85	83,87	6,14	76,43	68,54	84,31	5,26
Papua Barat	79,89	68,78	91,01	7,10	74,82	63,33	86,32	7,84	77,09	67,93	86,24	6,06
Papua Barat Daya	84,63	76,92	92,34	4,65	68,18	56,61	79,75	8,66	75,50	67,37	83,62	5,49
Papua	68,13	53,55	82,71	10,92	65,36	51,79	78,92	10,59	67,09	55,14	79,04	9,09
Papua Selatan	71,18	56,36	85,99	10,62	71,94	58,95	84,92	9,21	71,59	61,04	82,14	7,52
Papua Tengah	45,15	32,57	57,74	14,22	39,56	27,67	51,45	15,33	42,56	33,02	52,09	11,43
Papua Pegunungan	83,92	77,28	90,56	4,04	78,09	69,81	86,37	5,41	80,85	75,16	86,54	3,59
Indonesia	83,60	82,67	84,54	0,57	81,06	80,19	81,93	0,55	82,20	81,50	82,91	0,44

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.24 Sampling Error Persentase Pemuda Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	29,89	24,09	35,69	9,90	42,52	37,98	47,07	5,46
Sumatera Utara	31,06	25,80	36,32	8,64	21,74	18,13	25,35	8,48
Sumatera Barat	37,73	32,69	42,77	6,82	41,22	36,58	45,87	5,75
Riau	37,43	30,45	44,41	9,51	23,32	17,78	28,86	12,12
Jambi	25,82	18,05	33,59	15,35	22,55	17,49	27,61	11,44
Sumatera Selatan	24,05	17,67	30,43	13,54	21,25	17,51	25,00	9,00
Bengkulu	30,47	21,65	39,30	14,78	30,93	24,96	36,90	9,85
Lampung	28,04	22,47	33,61	10,13	33,34	28,57	38,12	7,31
Kep. Bangka Belitung	30,47	23,62	37,32	11,46	22,31	14,95	29,67	16,83
Kepulauan Riau	45,73	33,67	57,80	13,46	29,64	13,26	46,02	28,20
DKI Jakarta	34,20	28,49	39,90	8,51	–	–	–	–
Jawa Barat	33,20	30,37	36,04	4,35	31,74	26,81	36,67	7,92
Jawa Tengah	32,84	30,47	35,21	3,68	31,05	27,83	34,27	5,30
DI Yogyakarta	32,43	27,08	37,78	8,42	39,14	27,61	50,67	15,03
Jawa Timur	29,26	26,67	31,85	4,52	29,81	26,41	33,20	5,81
Banten	30,87	23,57	38,18	12,07	29,01	19,22	38,80	17,22
Bali	47,13	38,23	56,04	9,64	40,76	31,17	50,35	12,00
Nusa Tenggara Barat	30,58	26,44	34,73	6,91	28,91	23,88	33,94	8,88
Nusa Tenggara Timur	21,32	15,85	26,78	13,08	27,47	24,48	30,46	5,55
Kalimantan Barat	28,64	21,93	35,36	11,96	18,59	14,74	22,44	10,57
Kalimantan Tengah	16,63	11,35	21,90	16,18	16,87	12,08	21,67	14,50
Kalimantan Selatan	14,79	10,78	18,80	13,84	13,97	10,24	17,70	13,62
Kalimantan Timur	23,13	17,27	28,99	12,93	20,01	10,64	29,38	23,88
Kalimantan Utara	30,21	20,65	39,76	16,13	35,89	22,00	49,78	19,75
Sulawesi Utara	29,19	20,70	37,67	14,83	33,55	26,95	40,16	10,04
Sulawesi Tengah	13,38	7,46	19,29	22,56	19,16	14,02	24,30	13,68
Sulawesi Selatan	20,20	15,57	24,84	11,70	22,34	19,09	25,59	7,42
Sulawesi Tenggara	19,92	12,08	27,75	20,07	15,45	11,97	18,93	11,49
Gorontalo	33,79	23,48	44,11	15,57	25,48	19,44	31,52	12,09
Sulawesi Barat	23,28	12,67	33,88	23,24	27,78	22,02	33,55	10,59
Maluku	14,16	8,12	20,20	21,77	19,28	13,65	24,92	14,91
Maluku Utara	14,62	5,53	23,71	31,71	28,19	17,85	38,52	18,71
Papua Barat	32,45	11,43	53,47	33,05	34,01	20,26	47,75	20,62
Papua Barat Daya	18,66	5,59	31,72	35,74	39,80	28,88	50,72	14,00
Papua	49,79	31,72	67,85	18,51	45,21	34,96	55,47	11,57
Papua Selatan	7,61	1,58	13,63	40,44	34,99	21,67	48,32	19,42
Papua Tengah	78,05	57,08	99,03	13,71	NA	NA	NA	58,50
Papua Pegunungan	52,24	17,35	87,14	34,08	31,04	24,69	37,39	10,44
Indonesia	31,08	29,93	32,22	1,88	28,31	27,20	29,43	2,00

Lanjutan Tabel 4.24

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	35,40	29,92	40,89	7,91	39,19	34,83	43,55	5,68	37,58	33,94	41,22	4,94
Sumatera Utara	24,05	19,18	28,92	10,32	28,91	24,91	32,90	7,06	26,70	23,39	30,01	6,33
Sumatera Barat	31,64	26,70	36,59	7,97	45,33	40,90	49,77	4,99	39,27	35,76	42,77	4,55
Riau	26,66	20,60	32,72	11,60	33,14	27,35	38,93	8,91	30,19	25,75	34,63	7,50
Jambi	21,03	15,58	26,48	13,22	25,82	20,38	31,26	10,76	23,71	19,44	27,98	9,19
Sumatera Selatan	20,17	15,87	24,46	10,86	24,03	19,77	28,30	9,05	22,28	18,96	25,60	7,60
Bengkulu	31,77	23,61	39,93	13,10	29,92	24,46	35,37	9,30	30,76	25,77	35,75	8,27
Lampung	29,72	24,96	34,47	8,16	32,83	28,25	37,41	7,12	31,42	27,76	35,08	5,94
Kep. Bangka Belitung	25,29	18,04	32,55	14,64	28,65	22,26	35,05	11,39	27,08	22,02	32,14	9,53
Kepulauan Riau	35,86	22,07	49,66	19,63	53,20	38,06	68,33	14,51	44,68	33,31	56,05	12,98
DKI Jakarta	29,31	22,02	36,60	12,69	38,06	30,20	45,92	10,53	34,20	28,49	39,90	8,51
Jawa Barat	28,01	24,75	31,27	5,94	37,01	33,83	40,19	4,38	32,89	30,43	35,36	3,82
Jawa Tengah	29,17	26,48	31,87	4,71	34,37	31,85	36,89	3,74	32,01	30,05	33,97	3,12
DI Yogyakarta	29,87	23,03	36,71	11,68	36,72	30,13	43,32	9,16	33,71	28,85	38,57	7,36
Jawa Timur	25,98	23,26	28,70	5,34	32,28	29,56	35,00	4,30	29,47	27,41	31,54	3,57
Banten	31,44	22,60	40,28	14,34	29,89	23,53	36,25	10,85	30,53	24,30	36,76	10,41
Bali	45,47	36,41	54,54	10,17	45,59	37,18	54,00	9,41	45,53	38,47	52,59	7,91
Nusa Tenggara Barat	25,76	21,43	30,09	8,58	33,13	28,85	37,40	6,59	29,80	26,57	33,03	5,53
Nusa Tenggara Timur	21,82	18,37	25,27	8,07	29,14	25,73	32,54	5,96	25,87	23,23	28,51	5,21
Kalimantan Barat	20,79	15,41	26,17	13,20	24,56	20,02	29,09	9,42	22,89	19,22	26,56	8,19
Kalimantan Tengah	14,84	10,31	19,38	15,59	18,32	13,52	23,11	13,37	16,76	13,21	20,31	10,80
Kalimantan Selatan	13,51	9,85	17,16	13,82	15,03	11,37	18,70	12,44	14,33	11,60	17,07	9,73
Kalimantan Timur	17,47	10,95	23,99	19,04	25,75	19,79	31,71	11,80	22,31	17,35	27,28	11,35
Kalimantan Utara	31,79	20,24	43,34	18,54	32,45	23,43	41,47	14,19	32,17	24,27	40,06	12,52
Sulawesi Utara	29,12	21,58	36,66	13,22	33,10	26,71	39,49	9,85	31,23	25,78	36,67	8,89
Sulawesi Tengah	15,61	10,16	21,06	17,82	17,83	13,18	22,47	13,30	16,83	12,93	20,72	11,81
Sulawesi Selatan	21,50	17,34	25,66	9,87	21,03	17,64	24,43	8,24	21,24	18,38	24,10	6,87
Sulawesi Tenggara	15,88	11,00	20,77	15,68	18,27	13,78	22,76	12,55	17,20	13,47	20,92	11,05
Gorontalo	28,95	21,41	36,48	13,27	30,11	23,27	36,95	11,59	29,53	23,54	35,51	10,34
Sulawesi Barat	25,48	18,11	32,84	14,74	28,03	21,18	34,88	12,47	26,83	21,73	31,94	9,70
Maluku	11,93	6,92	16,95	21,45	20,60	14,11	27,09	16,07	16,54	12,39	20,68	12,80
Maluku Utara	22,52	11,98	33,06	23,88	25,91	16,93	34,89	17,68	24,46	16,50	32,42	16,60
Papua Barat	27,61	14,03	41,19	25,10	38,19	24,72	51,65	17,99	33,47	21,94	45,00	17,57
Papua Barat Daya	28,52	15,37	41,67	23,52	31,54	19,81	43,26	18,97	30,19	21,37	39,02	14,91
Papua	45,89	30,63	61,16	16,97	51,62	38,76	64,48	12,71	48,03	36,21	59,85	12,56
Papua Selatan	19,22	9,28	29,15	26,39	23,54	12,23	34,86	24,51	21,56	13,27	29,85	19,62
Papua Tengah	23,90	11,48	36,31	26,50	28,86	17,55	40,17	19,99	26,20	17,15	35,25	17,62
Papua Pegunungan	32,10	21,64	42,56	16,63	35,08	25,50	44,67	13,94	33,67	26,72	40,62	10,53
Indonesia	26,84	25,74	27,95	2,10	32,55	31,51	33,59	1,63	29,98	29,16	30,80	1,40

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 4.25 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,97	4,09	5,86	9,10	3,69	3,07	4,30	8,52
Sumatera Utara	3,57	2,88	4,27	9,95	2,59	2,14	3,04	8,89
Sumatera Barat	4,15	3,31	5,00	10,34	4,39	3,57	5,20	9,43
Riau	3,84	2,88	4,79	12,76	2,23	1,62	2,85	13,97
Jambi	3,56	2,43	4,69	16,21	2,94	2,19	3,70	13,11
Sumatera Selatan	3,99	2,87	5,11	14,31	3,34	2,67	4,00	10,16
Bengkulu	5,26	3,64	6,87	15,71	3,24	2,47	4,01	12,10
Lampung	4,61	3,58	5,65	11,40	5,48	4,50	6,46	9,15
Kep. Bangka Belitung	3,78	2,52	5,03	16,97	3,71	2,40	5,02	17,96
Kepulauan Riau	4,21	2,67	5,76	18,70	3,02	1,55	4,48	24,79
DKI Jakarta	3,92	2,97	4,87	12,37	–	–	–	–
Jawa Barat	4,10	3,62	4,58	5,99	4,17	3,12	5,22	12,84
Jawa Tengah	5,88	5,37	6,39	4,44	6,08	5,33	6,83	6,29
DI Yogyakarta	5,55	4,22	6,88	12,23	7,11	4,00	10,22	22,30
Jawa Timur	4,69	4,19	5,20	5,46	4,58	3,95	5,21	7,03
Banten	3,09	2,35	3,82	12,20	2,49	0,99	4,00	30,82
Bali	4,94	3,82	6,06	11,55	4,46	3,17	5,76	14,79
Nusa Tenggara Barat	5,03	4,01	6,06	10,38	5,98	4,54	7,42	12,31
Nusa Tenggara Timur	3,94	2,89	4,98	13,51	4,04	3,47	4,62	7,23
Kalimantan Barat	3,92	2,82	5,03	14,37	2,67	2,03	3,31	12,29
Kalimantan Tengah	2,27	1,49	3,05	17,52	1,71	1,13	2,28	17,17
Kalimantan Selatan	2,50	1,78	3,22	14,67	2,57	1,83	3,30	14,63
Kalimantan Timur	3,56	2,69	4,43	12,43	3,26	1,91	4,61	21,15
Kalimantan Utara	5,10	3,41	6,79	16,89	3,97	2,32	5,62	21,18
Sulawesi Utara	4,63	3,57	5,70	11,68	4,74	3,75	5,74	10,72
Sulawesi Tengah	5,97	4,48	7,46	12,76	4,46	3,56	5,36	10,27
Sulawesi Selatan	7,20	5,99	8,41	8,57	5,44	4,74	6,15	6,58
Sulawesi Tenggara	4,09	2,91	5,28	14,75	3,48	2,80	4,17	10,07
Gorontalo	8,87	6,60	11,13	13,05	5,40	3,87	6,93	14,46
Sulawesi Barat	3,22	1,72	4,71	23,78	5,28	4,08	6,48	11,60
Maluku	3,70	2,14	5,27	21,57	1,13	0,65	1,61	21,50
Maluku Utara	2,01	1,04	2,98	24,58	1,92	1,29	2,54	16,61
Papua Barat	1,73	0,66	2,80	31,52	1,63	0,95	2,31	21,31
Papua Barat Daya	3,03	1,40	4,66	27,40	2,11	1,22	3,00	21,52
Papua	3,13	1,79	4,46	21,77	1,51	0,65	2,37	28,95
Papua Selatan	3,59	1,15	6,02	34,64	2,06	1,05	3,06	24,95
Papua Tengah	3,23	1,41	5,05	28,74	NA	NA	NA	55,05
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	72,93	0,17	0,03	0,32	42,95
Indonesia	4,39	4,20	4,58	2,22	4,09	3,89	4,28	2,43

Lanjutan Tabel 4.25

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	2,14	1,60	2,67	12,73	6,18	5,32	7,04	7,10	4,16	3,65	4,67	6,22
Sumatera Utara	1,54	1,08	2,00	15,12	4,92	4,11	5,73	8,42	3,18	2,72	3,64	7,31
Sumatera Barat	1,09	0,71	1,47	17,95	7,55	6,42	8,67	7,61	4,26	3,67	4,85	7,08
Riau	1,31	0,78	1,84	20,69	4,60	3,65	5,55	10,58	2,91	2,37	3,45	9,43
Jambi	1,73	1,09	2,36	18,79	4,59	3,54	5,65	11,70	3,15	2,52	3,78	10,19
Sumatera Selatan	1,07	0,68	1,45	18,42	6,20	5,05	7,35	9,46	3,59	3,00	4,19	8,48
Bengkulu	1,81	1,08	2,54	20,65	6,18	4,85	7,51	10,99	3,97	3,20	4,73	9,81
Lampung	2,36	1,63	3,10	15,90	8,02	6,75	9,29	8,08	5,16	4,43	5,89	7,21
Kep. Bangka Belitung	0,89	0,32	1,47	32,95	6,76	4,99	8,54	13,38	3,75	2,83	4,66	12,43
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	56,91	7,28	4,63	9,94	18,61	4,15	2,68	5,61	17,98
DKI Jakarta	1,93	1,05	2,80	23,14	5,79	4,18	7,40	14,19	3,92	2,97	4,87	12,37
Jawa Barat	2,17	1,71	2,63	10,85	6,11	5,37	6,86	6,23	4,11	3,67	4,55	5,43
Jawa Tengah	3,41	2,92	3,90	7,31	8,57	7,84	9,29	4,32	5,97	5,53	6,41	3,73
DI Yogyakarta	2,74	1,71	3,77	19,17	8,79	6,68	10,91	12,27	5,84	4,61	7,07	10,75
Jawa Timur	2,12	1,75	2,49	8,94	7,20	6,51	7,89	4,90	4,65	4,26	5,04	4,32
Banten	1,21	0,70	1,71	21,51	4,82	3,64	6,01	12,56	2,99	2,33	3,66	11,34
Bali	2,17	1,31	3,04	20,40	7,61	5,98	9,25	10,95	4,83	3,92	5,75	9,65
Nusa Tenggara Barat	2,21	1,42	3,00	18,24	8,66	7,16	10,15	8,80	5,46	4,60	6,32	8,03
Nusa Tenggara Timur	0,85	0,52	1,18	19,89	7,21	6,26	8,16	6,72	4,01	3,50	4,52	6,49
Kalimantan Barat	1,08	0,57	1,58	23,92	5,28	4,26	6,31	9,87	3,17	2,58	3,75	9,46
Kalimantan Tengah	0,73	0,34	1,12	27,04	3,24	2,36	4,11	13,80	1,96	1,49	2,44	12,29
Kalimantan Selatan	0,69	0,32	1,07	27,17	4,43	3,45	5,40	11,24	2,53	2,02	3,05	10,37
Kalimantan Timur	1,34	0,71	1,97	23,92	5,70	4,36	7,04	12,02	3,47	2,74	4,20	10,72
Kalimantan Utara	1,17	0,36	1,97	35,26	8,45	6,12	10,77	14,06	4,72	3,47	5,97	13,51
Sulawesi Utara	2,56	1,80	3,32	15,15	6,93	5,60	8,25	9,77	4,68	3,93	5,43	8,17
Sulawesi Tengah	1,96	1,25	2,68	18,63	8,05	6,63	9,47	8,99	5,02	4,22	5,81	8,04
Sulawesi Selatan	2,44	1,80	3,09	13,44	10,22	9,00	11,44	6,10	6,36	5,64	7,07	5,73
Sulawesi Tenggara	1,69	1,15	2,24	16,39	5,77	4,61	6,93	10,26	3,75	3,10	4,39	8,74
Gorontalo	2,06	1,11	3,02	23,58	12,37	9,85	14,89	10,40	7,10	5,73	8,46	9,79
Sulawesi Barat	2,25	1,28	3,21	21,89	7,54	5,87	9,21	11,32	4,87	3,86	5,88	10,58
Maluku	1,35	0,26	2,45	41,21	3,45	2,21	4,68	18,34	2,40	1,58	3,21	17,42
Maluku Utara	0,85	0,35	1,34	29,95	3,08	2,13	4,02	15,64	1,95	1,42	2,47	13,77
Papua Barat	0,59	0,12	1,07	40,80	2,83	1,78	3,88	18,93	1,66	1,09	2,24	17,67
Papua Barat Daya	0,65	0,25	1,06	31,56	4,92	2,79	7,05	22,09	2,66	1,62	3,69	19,90
Papua	0,84	0,11	1,56	44,32	4,52	2,75	6,29	19,96	2,53	1,63	3,42	18,12
Papua Selatan	1,45	0,25	2,66	42,17	3,84	1,97	5,72	24,92	2,60	1,52	3,69	21,24
Papua Tengah	0,28	0,01	0,56	49,33	1,48	0,63	2,34	29,33	0,83	0,41	1,25	25,55
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	86,87	NA	NA	NA	62,08	NA	NA	NA	55,50
Indonesia	1,97	1,84	2,11	3,56	6,62	6,37	6,86	1,87	4,27	4,13	4,41	1,67

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB V

KETENAGAKERJAAN

<https://www.pptgo.id>





<https://www.bps.go.id>



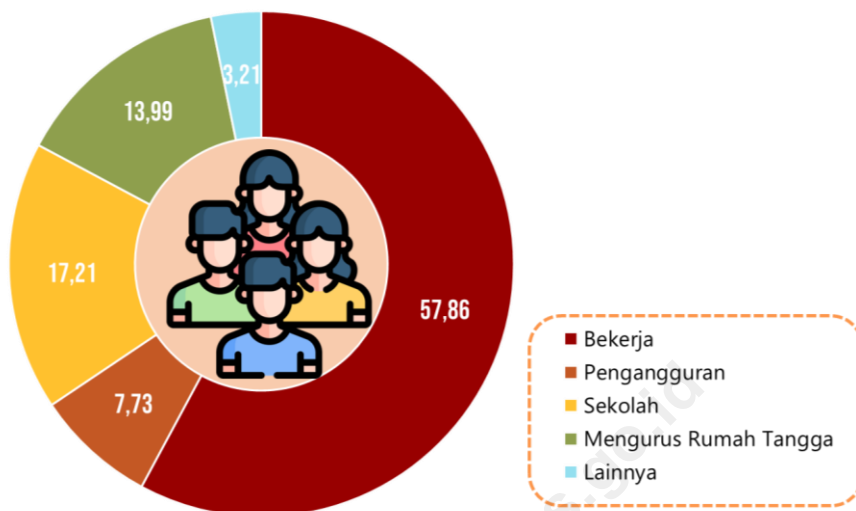
Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi negara dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan ekonomi dengan dukungan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif. Sebagai bagian dari penduduk usia produktif, pemuda berperan penting dalam menyumbang kemajuan ekonomi. Partisipasi pemuda dalam ketenagakerjaan memberikan gambaran kontribusi mereka yang tidak dapat dipisahkan dalam perekonomian. Bab ini membahas mengenai kondisi dan karakteristik ketenagakerjaan pemuda yang meliputi aktivitas dan produktivitas pemuda dalam kegiatan ekonomi termasuk di antaranya tingkat pengangguran pemuda. Selain itu, bab ini juga menyajikan profil pekerjaan pemuda yang dilihat dari latar belakang pendidikan pemuda bekerja dan beberapa indikator ketenagakerjaan lain.

5.1 Aktivitas Pemuda

Undang-undang kepemudaan menetapkan bahwa pemuda adalah individu berusia 16–30 tahun, yang mencakup masa sekolah dan masa kerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar pemuda terlibat dalam kegiatan pendidikan atau aktivitas ekonomi (bekerja/mencari kerja). Bekerja diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau membantu mendapatkan pendapatan atau keuntungan, setidaknya selama 1 jam tanpa terputus dalam seminggu terakhir. Aktivitas ini juga mencakup pekerjaan tak berbayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023b).

Hasil Sakernas Agustus 2025 sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (57,86 persen). Namun demikian, masih terdapat sekitar 7,73 persen pemuda berstatus pengangguran. Pemuda yang masuk dalam kategori menganggur di antaranya yang sedang dalam proses mencari kerja, mempersiapkan usaha, pemuda yang putus asa, dan

pemuda yang sudah diterima kerja namun belum memulai bekerja. Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat bahwa sekitar 17,21 persen pemuda memiliki aktivitas utama bersekolah dan sebanyak 13,99 persen pemuda menghabiskan waktu terbanyak untuk mengurus rumah tangga.

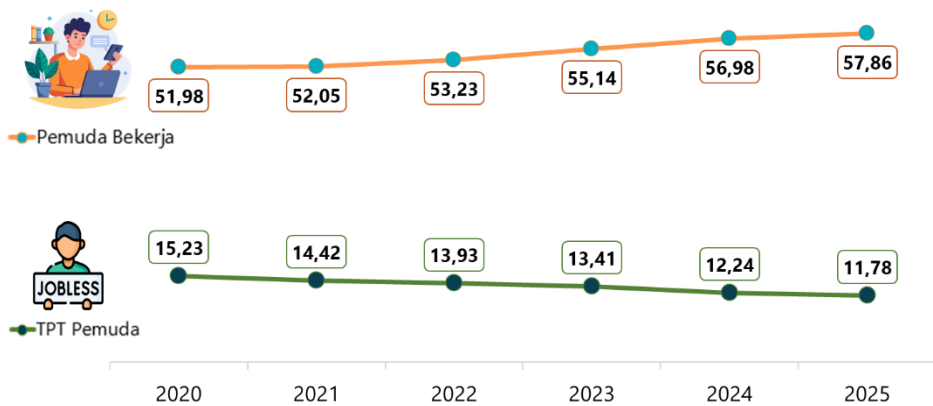


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.1 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2025

Indikator yang digunakan untuk dapat mengukur besarnya angkatan kerja yang menjadi pengangguran disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT umumnya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah, menggambarkan tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan, atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, tercatat TPT pemuda sebesar 11,78 persen, yang menggambarkan bahwa terdapat sekitar 11 hingga 12 dari 100 pemuda yang masuk dalam angkatan kerja, namun tidak terserap dalam pasar kerja. Kondisi tersebut sudah cukup baik, karena mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, bahkan dalam kurun lima tahun terakhir.

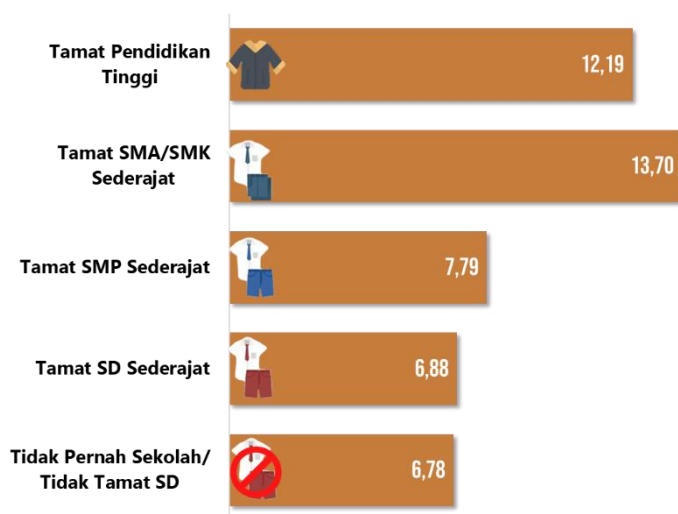
Berdasarkan Gambar 5.2 terlihat bahwa, dalam kurun waktu enam tahun terakhir persentase pemuda yang bekerja semakin meningkat. Setidaknya dari tahun 2020 hingga tahun 2025, persentase pemuda yang bekerja meningkat sebesar 5,88 poin. Disisi sebaliknya, TPT pemuda mengalami penurunan, sebesar 3,45 poin dalam kurun yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020–2025

Gambar 5.2 Perkembangan Persentase Pemuda Bekerja dan TPT Pemuda, 2020–2025

Selanjutnya, masih tingginya pengangguran pemuda membuat daya saing pemuda belum mencapai posisi yang optimal. Salah satu penyebab tingginya TPT pemuda adalah rendahnya daya saing pemuda di pasar kerja. Selain itu, tingginya TPT pemuda mengindikasikan kurangnya potensi meraih keuntungan ekonomi. Apabila dilihat menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Gambar 5.3), TPT pemuda tertinggi terjadi pada kelompok pemuda tamatan SMA/SMK sederajat (13,70 persen), diikuti pemuda tamatan pendidikan tinggi (12,19 persen), kemudian tamatan SMP sederajat (7,79 persen).



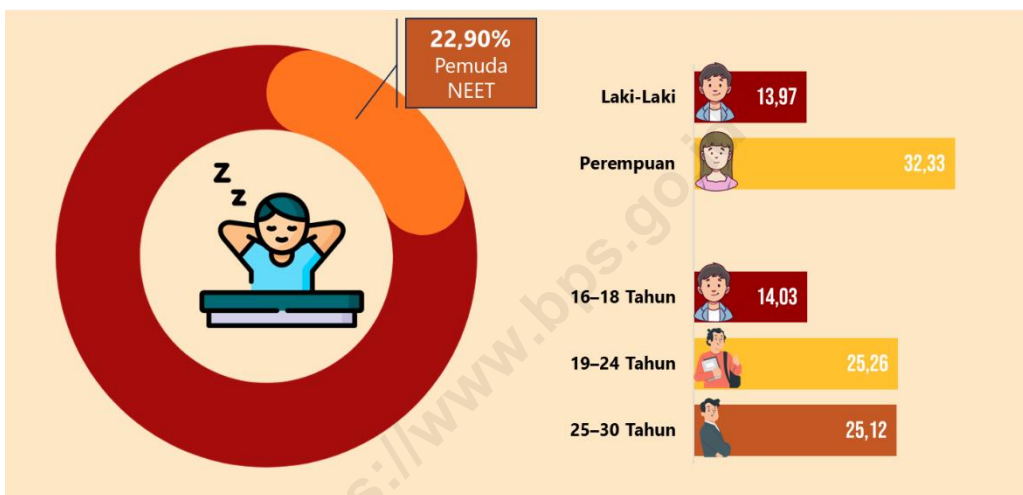
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dipantau melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (*Not in Education, Employment, and Training/NEET*). NEET menggambarkan penduduk usia muda yang tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/pelatihan/kursus/*training*) atau tidak terserap pasar kerja. Dalam publikasi ini, NEET yang dibahas adalah NEET untuk pemuda, yakni usia 16–30 tahun. Persentase penduduk usia 16–30 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi sebesar 22,90 persen, dari sebelumnya pada tahun 2024 sebesar 23,78 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, pemuda yang berstatus NEET sebesar 22,90 persen. Artinya, dari 100 pemuda, setidaknya terdapat sekitar 22 hingga pemuda di Indonesia yang tidak bersekolah, tidak bekerja, maupun tidak sedang mengikuti pelatihan/kursus/*training*. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat disparitas yang cukup lebar antara pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus NEET. Persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET adalah lebih dari dua kali persentase pemuda laki-laki yang tergolong NEET (32,33 persen berbanding 13,97 persen). Jika dilihat berdasarkan

kelompok umur, persentase pemuda yang berstatus NEET paling sedikit berada pada kelompok umur muda 16–18 tahun, yakni sebesar 14,03 persen. Meskipun pada kelompok umur 16–18 tahun memiliki persentase NEET terendah dibanding kelompok umur lainnya, namun yang perlu diperhatikan bahwa pada kelompok ini seharusnya pemuda sedang mengenyam pendidikan formal, setidaknya pada jenjang pendidikan menengah atas. Sehingga angka ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena terdapat sejumlah 14 dari 100 orang pemuda pada usia 16–18 tahun yang sudah tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, maupun sedang tidak mengikuti kursus.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

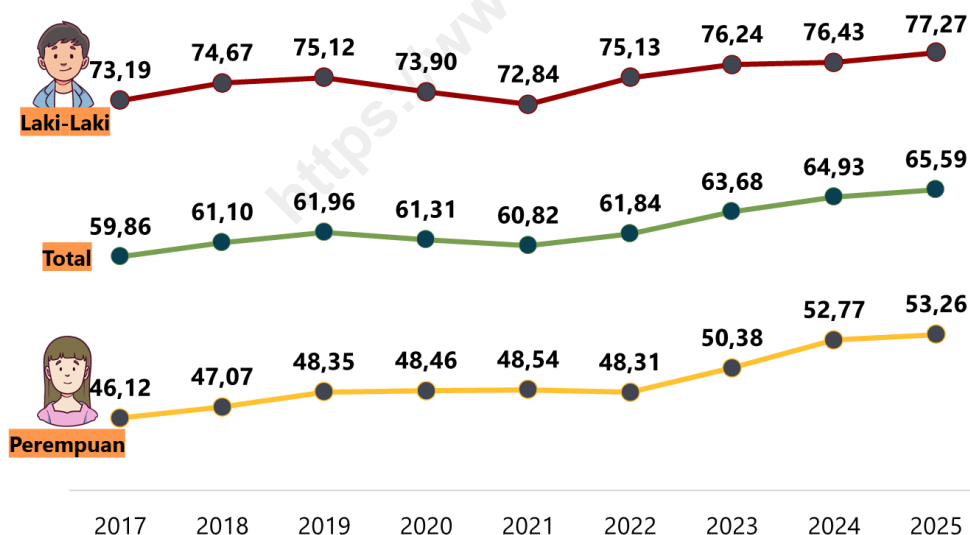
Gambar 5.4 Persentase Pemuda *Not in Education, Employment, and Training* (NEET) Menurut Karakteristik, 2025

5.2 Pemuda dalam Pasar Kerja

Angkatan kerja mewakili penawaran tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar angkatan kerja maka diharapkan akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda menunjukkan seberapa besar pasokan tenaga kerja pemuda (*youth labour supply*) yang tersedia untuk menyokong kegiatan perekonomian. TPAK pemuda merupakan perbandingan antara pemuda angkatan kerja (jumlah penduduk usia 16–30 tahun yang bekerja dan pemuda

yang mengganggu) terhadap jumlah seluruh pemuda (penduduk usia 16–30 tahun).

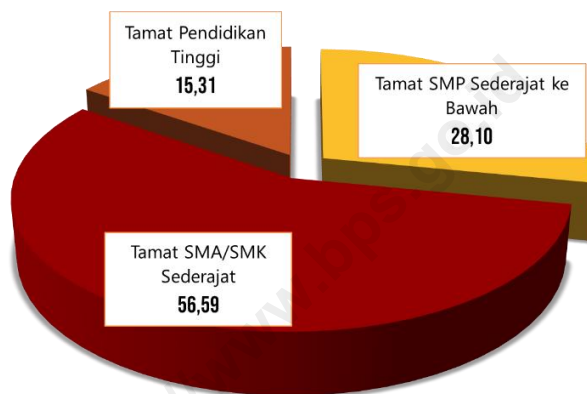
Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan TPAK pemuda pada tahun 2025 sebesar 65,59 persen (Gambar 5.5). Artinya, dari 100 orang pemuda, setidaknya 65 orang diantaranya siap masuk pasar kerja. Dalam periode 2017–2025 pergerakan nilai TPAK pemuda relatif stabil di sekitar angka 60 persen. Namun, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat kesenjangan antara TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan yang cukup lebar. Pemuda laki-laki masih mendominasi dengan memberikan kontribusi lebih besar terhadap TPAK pemuda. Capaian TPAK pemuda laki-laki secara konsisten berada pada nilai lebih dari 70 persen dalam kurun beberapa tahun terakhir. Capaian TPAK pemuda laki-laki di tahun 2025 sebesar 77,27 persen, terpaut sekitar 24,01 poin dibanding TPAK pemuda perempuan (53,26 persen). Di sisi lain, TPAK pemuda perempuan meskipun berada cukup jauh di bawah TPAK pemuda laki-laki, namun mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding dengan TPAK pemuda laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017–2025

Gambar 5.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, 2017–2025

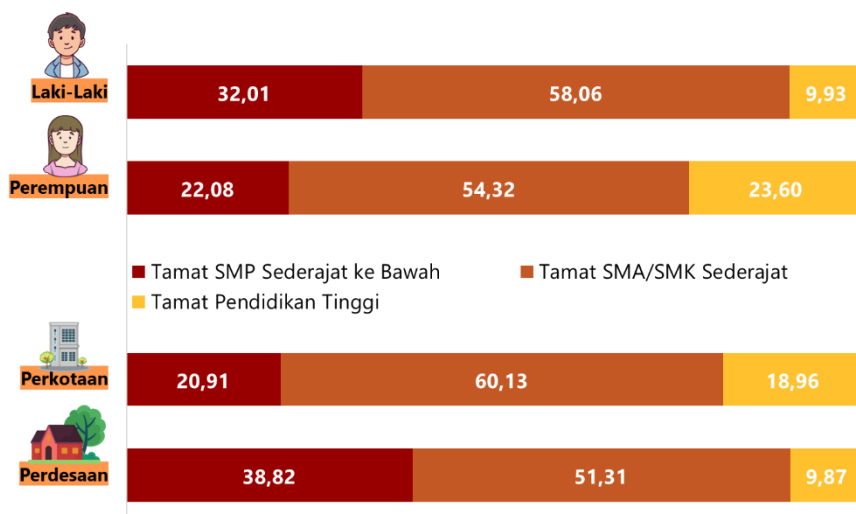
Pemuda yang produktif secara ekonomi ditandai dari aktivitas ekonominya, yakni bekerja. Pemuda dengan kondisi kerja yang baik tentu memberikan nilai pengembalian ekonomi yang tinggi. Gambar 5.6 memperlihatkan pemuda yang bekerja ditinjau dari jenjang pendidikannya. Pemuda bekerja didominasi oleh pemuda tamatan SMA/SMK sederajat, dengan komposisi sebesar 56,59 persen, sementara persentase pemuda bekerja yang tamat pendidikan tinggi hanya sebesar 15,31 persen. Fenomena ini dimungkinkan karena secara komposisi, pemuda memang didominasi oleh tamatan SMA/SMK sederajat dibandingkan pendidikan tinggi seperti yang tertuang pada Bab 3.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.6 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Jika dilihat menurut tipe daerah, terdapat sedikit perbedaan pada pola jenjang pendidikan pemuda bekerja di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, pemuda bekerja didominasi oleh pemuda berpendidikan yang merupakan tamatan SMA/SMK sederajat. Lebih dari separuh (60,13 persen) pemuda bekerja di perkotaan merupakan tamatan SMA/SMK sederajat, diikuti 18,96 persen pemuda tamat pendidikan tinggi. Kondisi yang cukup kontradiktif terlihat di perdesaan, dimana persentase pemuda bekerja tamatan SMP sederajat ke bawah masih cukup tinggi (38,82 persen), sebesar hampir dua kali persentase pemuda tamatan SMP ke bawah yang bekerja di perkotaan. Sementara itu, pemuda bekerja yang lulusan SMA/SMK sederajat di perdesaan sebesar 51,31 persen, sedangkan lulusan pendidikan tinggi yang bekerja hanya 9,87 persen.

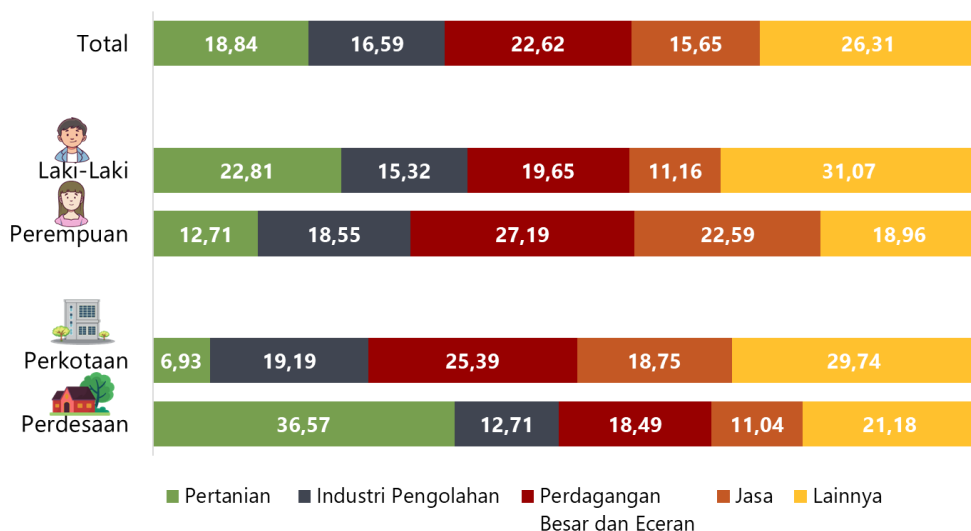


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.7 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan dan Karakteristik, 2025

Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebelumnya telah digambarkan bahwa TPAK pemuda perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pemuda laki-laki, faktanya pemuda perempuan yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.7. Persentase pemuda bekerja dengan pendidikan tamatan pendidikan tinggi perempuan, lebih banyak dari dua kali pemuda laki-laki yang bekerja pada jenjang pendidikan yang sama, 23,60 persen dibanding dengan 9,93 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan pemuda perempuan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk bekerja, namun mereka yang terserap dalam pasar kerja memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari pemuda laki-laki.

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Berdasarkan strukturnya, lapangan usaha dapat dikelompokkan kedalam lima sektor terbesar, yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, jasa-jasa, serta kategori lainnya.

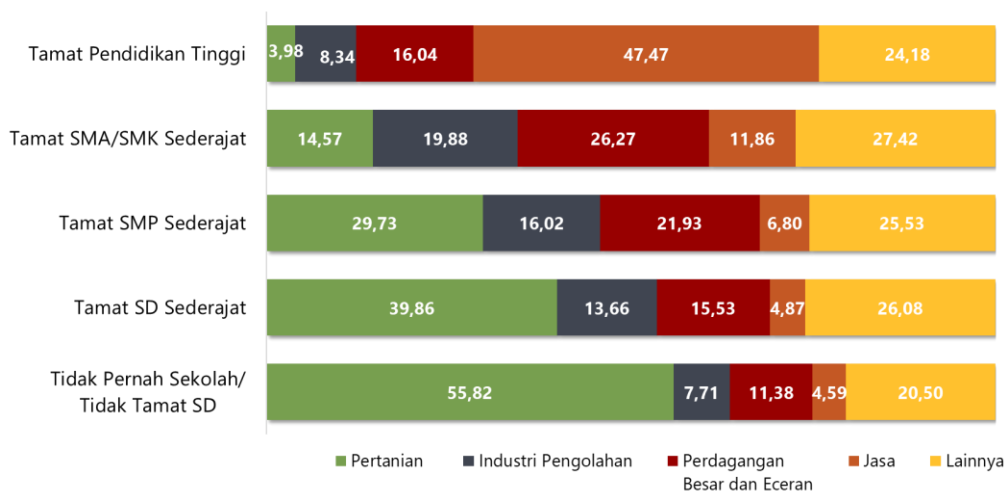


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.8 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Karakteristik, 2025

Gambar 5.8 memperlihatkan struktur lapangan usaha pekerjaan utama pemuda yang bekerja dalam lima sektor. Pemuda bekerja hampir merata di seluruh sektor, dengan proporsi sedikit lebih tinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, di perkotaan mayoritas pemuda bekerja di sektor perdagangan, sedangkan di perdesaan mayoritas pemuda bekerja di sektor pertanian, dengan proporsi hampir enam kali lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (36,57 persen). Berdasarkan jenis kelamin, pemuda laki-laki paling banyak bekerja di sektor pertanian (22,81 persen), sementara pemuda perempuan lebih banyak bekerja di sektor perdagangan (27,19 persen) dan jasa (22,59 persen).

Apabila ditarik benang merah antara jenjang pendidikan dan lapangan usaha pekerjaan pemuda, terlihat pola bahwa semakin tinggi pendidikan, pemuda cenderung lebih mendominasi pekerjaan di sektor jasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.9. Sebaliknya, pekerjaan di sektor pertanian didominasi oleh pemuda dengan jenjang pendidikan yang cenderung lebih rendah. Sebuah fenomena yang sangat disayangkan mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun tidak diminati oleh para pemuda berpendidikan tinggi.

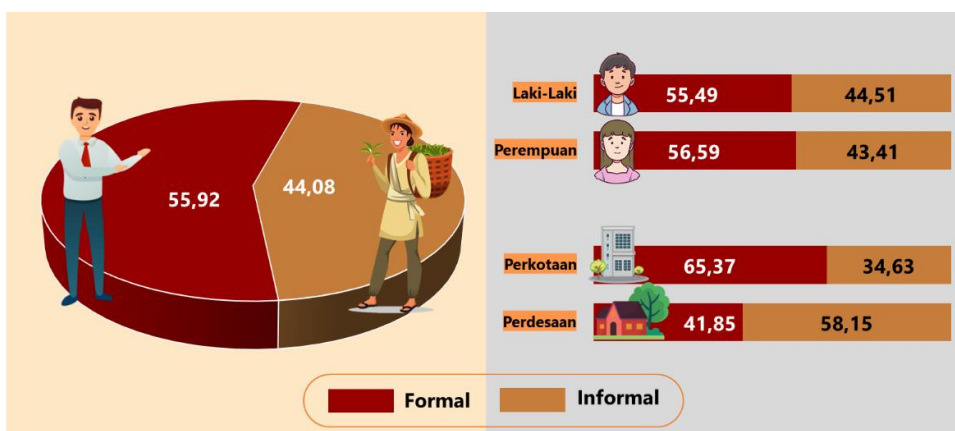


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.9 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Selanjutnya, struktur pekerjaan pemuda pada sektor formal dan informal dapat dianalisis melalui komposisi status pekerjaannya. Pekerja formal umumnya identik dengan status pekerjaan yang layak dengan tingkat upah yang lebih besar dan risiko pemberhentian kerja yang kecil. Pekerja formal terdiri dari pekerja dengan status pekerjaan utama sebagai pengusaha yang dibantu buruh tetap/dibayar serta pegawai yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Di sisi lain, pemuda yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja keluarga/tidak dibayar, serta pekerja bebas di pertanian dan non pertanian, dikategorikan sebagai pekerja informal.

Lebih dari separuh pemuda (55,92 persen) bekerja pada sektor formal, sisanya sebesar 44,08 persen pemuda bekerja pada sektor informal. Jika dilihat menurut klasifikasi desa, struktur lapangan pekerjaan terlihat kontradiktif. Pemuda di perkotaan yang bekerja pada sektor formal jauh lebih tinggi daripada sektor informal (65,37 persen berbanding 34,63 persen). Sebaliknya, pemuda di perdesaan yang bekerja pada sektor informal lebih tinggi dibanding sektor formal (58,15 persen berbanding 41,85 persen). Adapun berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan pola yang signifikan antara pemuda perempuan dan pemuda laki-laki, dan keduanya lebih banyak bekerja di sektor formal.



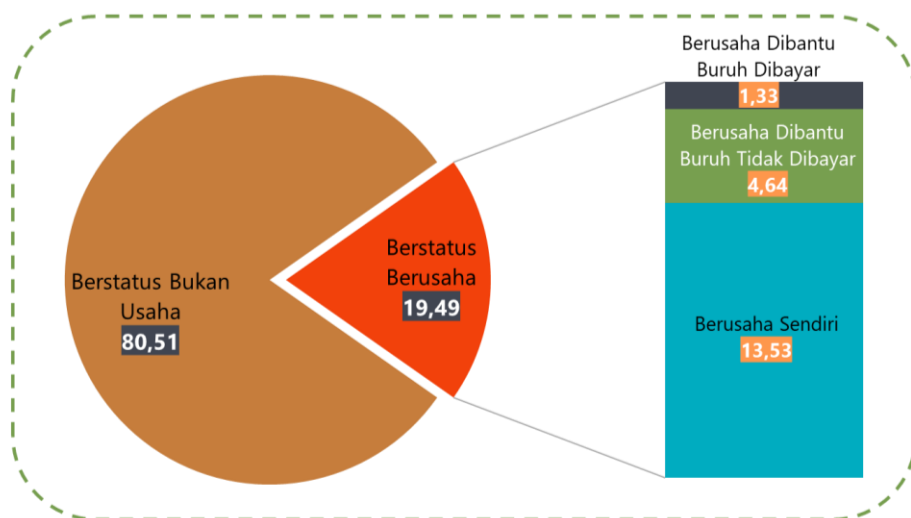
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.10 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Karakteristik, 2025

5.3 Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha

Hasil Sakernas Agustus 2025 dapat memberikan gambaran status pekerjaan utama pemuda bekerja, yang dapat dibagi ke dalam pemuda bekerja dengan status berusaha (pemuda pengusaha) dan pemuda bekerja dengan status bukan berusaha (bukan pengusaha). Dalam publikasi ini, pemuda pengusaha didefinisikan sebagai pemuda bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Selanjutnya, pemuda bukan pengusaha mencakup pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan, pekerja keluarga/tidak dibayar, dan pekerja bebas pertanian serta pekerja bebas non pertanian.

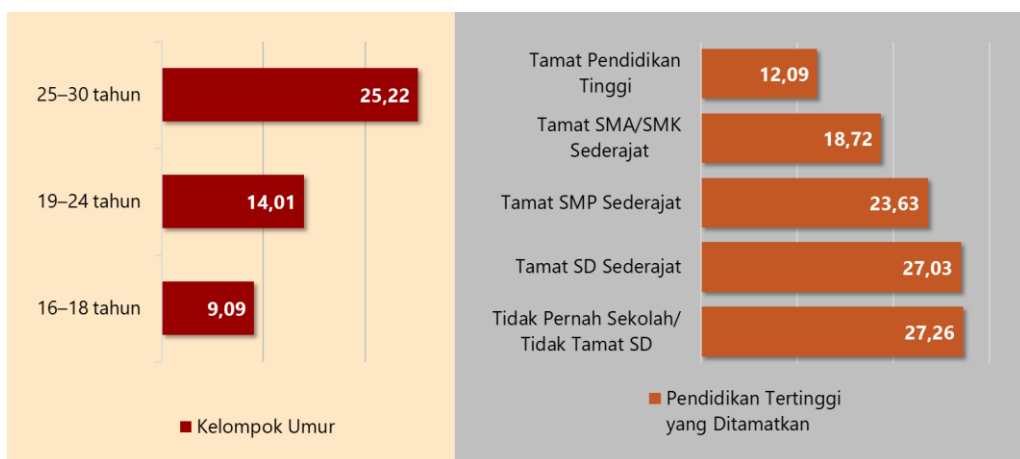
Gambar 5.11 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda bekerja berstatus sebagai bukan pengusaha (80,51 persen). Sedangkan sisanya, sekitar 19,49 persen pemuda bekerja dengan status berusaha (pemuda pengusaha). Dari sejumlah pemuda pengusaha tersebut, 13,53 persen di antaranya adalah pemuda pengusaha dengan status/kedudukan berusaha sendiri, sedangkan pemuda pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap dan tidak dibayar sebesar 4,64 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pemuda berusaha cenderung memiliki usaha dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.11 Persentase Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha Menurut Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan, 2025

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur pemuda, mayoritas pemuda pengusaha berada pada kelompok umur 25–30 tahun, sebesar 25,22 persen. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat pola bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah persentase pemuda yang bekerja sebagai pemuda pengusaha. Gambar 5.13 menunjukkan bahwa persentase pemuda pengusaha yang berpendidikan tidak pernah sekolah/tidak tamat SD jumlahnya lebih dari dua kali pemuda pengusaha yang berpendidikan tamatan pendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi seseorang pemuda, semakin besar peluangnya untuk bekerja di lapangan usaha dengan jabatan/status sebagai pegawai/karyawan, sehingga kurang berminat untuk memiliki usaha sendiri.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.12 Persentase Pemuda Bekerja dengan Status Berusaha Menurut Karakteristik, 2025

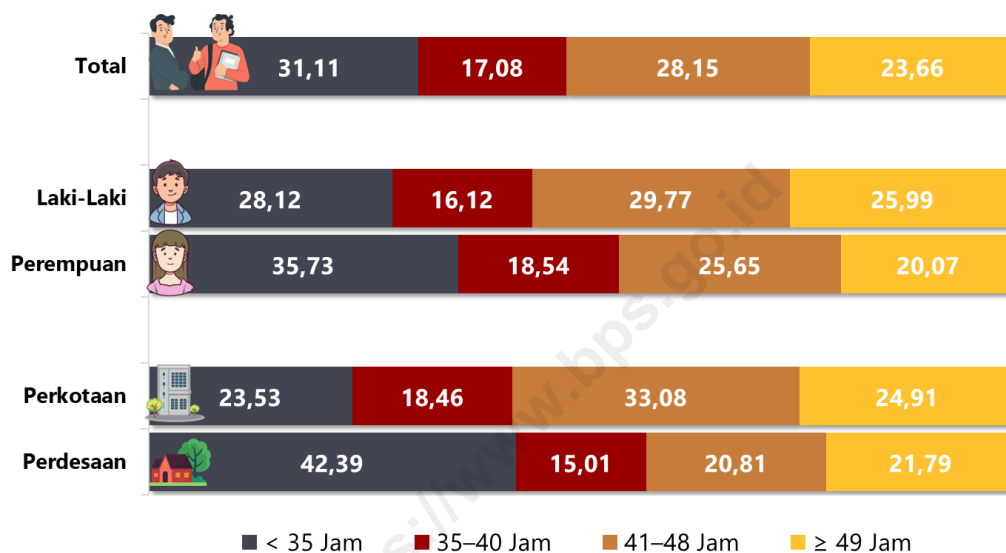
5.4 Jam Kerja Pemuda

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan terkait jam kerja. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja yang dibagi dalam 2 (dua) sistem. Kedua sistem tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebijakan perusahaan yaitu 7 (tujuh) jam per hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, atau 8 (delapan) jam per hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

Jam kerja berlebih dapat diamati melalui dua pendekatan. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa jam kerja berlebih dalam konteks Indonesia didefinisikan berdasarkan ambang batas 48 jam per minggu seperti dinyatakan pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) (Badan Pusat Statistik, 2023b). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur ketentuan bahwa 40 jam sebagai jam kerja maksimum per minggu.

Komposisi pemuda yang bekerja menurut jumlah jam kerja dalam seminggu dapat dilihat pada Gambar 5.13. Dari gambar tersebut terlihat bahwa persentase pemuda yang bekerja dengan jumlah jam 35–40 jam dalam seminggu

sebesar 17,08 persen. Sementara itu, persentase pemuda yang bekerja dengan jumlah jam lebih dari 40 jam dalam seminggu sebesar 51,81 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pemuda bekerja dengan jam kerja berlebih. Pola ini juga terjadi pada pemuda laki-laki maupun pemuda yang tinggal di daerah perkotaan. Pemuda yang bekerja masih didominasi oleh pemuda bekerja dengan jam kerja berlebih. Sedangkan untuk pemuda perempuan atau pemuda yang tinggal di daerah perdesaan, didominasi oleh pemuda bekerja dengan jam kerja yang sesuai (<40 jam).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Gambar 5.13 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dan Karakteristik, 2025

Selain beberapa hal yang telah diulas di atas, terdapat indikator pekerjaan dengan jam kerja berlebih (*Employment in Excessive Working Time/EEWT*) yang memberikan informasi mengenai perbandingan penduduk yang bekerja dengan jam kerja lebih dari 48 jam seminggu (*excessive hours*) (BPS 2023;52). Pada tahun 2025, pemuda yang bekerja dengan jam kerja berlebih/*excessive hours* (jam kerja lebih dari 48 jam seminggu) sebesar 23,66 persen. Artinya, sekitar satu dari empat pemuda yang bekerja, bekerja dengan jumlah jam kerja yang berlebih. Lebih detail, persentase pemuda laki-laki yang memiliki jam kerja lebih dari 48 jam seminggu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan (25,99 persen dibanding 20,07 persen). Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan daerah



tempat tinggal, pemuda yang memiliki jam kerja lebih dari 48 jam seminggu di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (24,91 persen dibanding 21,79 persen).

Di sisi lain, terdapat sekitar 31,14 persen pemuda bekerja dengan jam kerja rendah, atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pemuda di perdesaan yang menjadi pekerja tidak penuh hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding pemuda di perkotaan (42,39 persen berbanding 23,53 persen). Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda perempuan lebih banyak yang menjadi pekerja tidak penuh dibanding pemuda laki-laki (35,73 persen dibanding 28,12 persen). Kondisi tersebut kemungkinan dikarenakan pemuda perempuan bekerja selain untuk menambah penghasilan rumah tangga juga untuk mengisi waktu luang sembari mengurus rumah tangga.

<https://www.bps.go.id>

Tabel 5.1 Persentase Pemuda *Not in Education, Employment, and Training* (NEET) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur			Pemuda NEET
	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	14,03	25,26	25,12	22,90
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	13,63	18,91	9,38	13,97
Perempuan	14,45	32,05	41,56	32,33
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	67,81	27,49	16,89	19,86
Tamat SMA/SMK Sederajat	39,13	22,31	25,30	24,95
Tamat SMP Sederajat	3,77	35,06	32,13	17,06
Tamat SD Sederajat	33,04	32,76	26,44	29,32
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	45,21	36,72	31,67	34,96
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	14,20	23,81	25,48	22,52
Perdesaan	13,75	27,60	24,53	23,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.2 Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/*Training* dan Memperoleh Sertifikat Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur			Pemuda yang Memperoleh Sertifikat
	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	5,57	16,92	19,69	15,72
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	5,58	16,43	19,35	15,39
Perempuan	5,56	17,44	20,05	16,07
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	NA	40,74	46,95	45,21
Tamat SMA/SMK Sederajat	11,95	18,42	19,64	18,30
Tamat SMP Sederajat	4,01	3,45	3,09	3,66
Tamat SD Sederajat	0,53	0,79	1,24	1,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	NA	0,50	0,85	0,65
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	6,04	18,98	23,33	18,09
Perdesaan	4,82	13,60	13,84	11,90

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Karakteristik	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					TPT Pemuda
	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	6,78	6,88	7,79	13,70	12,19	11,78
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	6,65	7,21	8,14	13,32	12,95	11,55
Perempuan	7,17	5,96	7,11	14,32	11,70	12,14
Kelompok Umur						
16–18 Tahun	15,72	15,55	10,41	38,55	67,81	24,77
19–24 Tahun	7,89	9,13	11,53	16,02	23,34	15,65
25–30 Tahun	4,86	4,23	4,31	6,49	7,87	6,18
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	10,27	10,44	9,86	15,00	13,11	13,65
Perdesaan	5,12	3,99	5,83	11,35	9,48	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2025

Karakteristik	Kelompok Umur			TPAK Pemuda
	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	26,77	72,15	78,90	65,59
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	30,97	82,43	95,76	77,27
Perempuan	22,32	61,18	61,29	53,26
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	NA	88,48	88,85	88,75
Tamat SMA/SMK Sederajat	57,19	71,45	78,63	72,90
Tamat SMP Sederajat	14,69	65,73	70,78	39,00
Tamat SD Sederajat	49,40	73,19	76,74	71,72
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	47,78	66,83	71,78	67,32
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	24,10	71,74	79,25	65,02
Perdesaan	31,07	72,82	78,34	66,52

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.5 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Karakteristik	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	2,68	9,16	16,27	56,59	15,31	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	3,33	11,12	17,56	58,06	9,93	100,00
Perempuan	1,68	6,13	14,27	54,32	23,60	100,00
Kelompok Umur						
16–18 Tahun	2,76	11,56	45,93	39,74	NA	100,00
19–24 Tahun	2,21	6,81	11,72	70,13	9,12	100,00
25–30 Tahun	3,03	10,68	15,77	48,26	22,26	100,00
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,39	6,60	12,92	60,13	18,96	100,00
Perdesaan	4,60	12,97	21,25	51,31	9,87	100,00

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.6 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan Usaha Utama, 2025

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama			Jumlah
	Jasa	Manufaktur	Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	64,57	16,59	18,84	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	61,87	15,32	22,81	100,00
Perempuan	68,74	18,55	12,71	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	56,52	14,36	29,12	100,00
19–24 Tahun	63,93	18,26	17,82	100,00
25–30 Tahun	66,19	15,58	18,23	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	87,69	8,34	3,98	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	65,55	19,88	14,57	100,00
Tamat SMP Sederajat	54,26	16,02	29,73	100,00
Tamat SD Sederajat	46,48	13,66	39,86	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	36,47	7,71	55,82	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	73,88	19,19	6,93	100,00
Perdesaan	50,72	12,71	36,57	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.7 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Status Pekerjaan Utama, 2025

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama		
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	13,53	4,64	1,33
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	13,56	4,51	1,71
Perempuan	13,48	4,83	0,72
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	7,36	1,60	0,13
19–24 Tahun	10,60	2,75	0,66
25–30 Tahun	16,67	6,54	2,01
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	7,83	2,40	1,86
Tamat SMA/SMK Sederajat	13,13	4,30	1,28
Tamat SMP Sederajat	16,71	5,78	1,13
Tamat SD Sederajat	18,57	7,18	1,27
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	17,93	8,80	0,52
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	12,96	3,13	1,41
Perdesaan	14,38	6,88	1,19

Lanjutan Tabel 5.7

Karakteristik	Status Pekerjaan Utama			Jumlah
	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	Pekerja Bebas ¹	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	54,60	8,58	17,33	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	53,78	11,78	14,66	100,00
Perempuan	55,86	3,65	21,45	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	31,46	8,90	50,54	100,00
19–24 Tahun	58,72	8,31	18,95	100,00
25–30 Tahun	54,53	8,75	11,50	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	78,10	2,18	7,64	100,00
Tamat SMA/SMK	58,67	6,99	15,62	100,00
Sederajat				
Tamat SMP Sederajat	34,23	13,86	28,28	100,00
Tamat SD Sederajat	34,45	17,33	21,19	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	26,78	16,83	29,12	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	63,96	6,84	11,70	100,00
Perdesaan	40,66	11,17	25,71	100,00

Catatan:¹Pekerja Bebas: mencakup pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian.
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.8 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Sektor Pekerjaan Utama, 2025

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama		Jumlah
	Formal ¹	Informal ²	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	55,92	44,08	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	55,49	44,51	100,00
Perempuan	56,59	43,41	100,00
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	31,59	68,41	100,00
19–24 Tahun	59,38	40,62	100,00
25–30 Tahun	56,54	43,46	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	79,96	20,04	100,00
Tamat SMA/SMK	59,95	40,05	100,00
Sederajat			
Tamat SMP Sederajat	35,36	64,64	100,00
Tamat SD Sederajat	35,72	64,28	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	27,31	72,69	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	65,37	34,63	100,00
Perdesaan	41,85	58,15	100,00

Catatan:

¹ Pekerja Formal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

² Pekerja Informal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.9 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja Seluruh Pekerja dalam Seminggu, 2025

Karakteristik	Jam Kerja Seluruh Pekerja				Rata-Rata Jam Kerja Seluruh Pekerja
	< 35 Jam	35–40 Jam	41–48 Jam	> 48 Jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	31,11	17,08	28,15	23,66	39,23
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	28,12	16,12	29,77	25,99	40,67
Perempuan	35,73	18,54	25,65	20,07	37,00
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	59,29	9,97	16,31	14,43	27,55
19–24 Tahun	30,09	15,63	30,45	23,82	39,57
25–30 Tahun	28,05	19,18	27,97	24,80	40,56
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	25,40	30,43	28,37	15,81	39,21
Tamat SMA/SMK Sederajat	26,91	15,41	31,58	26,11	40,89
Tamat SMP Sederajat	44,25	12,08	21,35	22,33	35,00
Tamat SD Sederajat	38,98	13,71	21,86	25,46	37,82
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	45,94	17,90	17,42	18,74	34,69
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	23,54	18,46	33,08	24,91	41,49
Perdesaan	42,39	15,01	20,81	21,79	35,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.10 Persentase Pemuda *Not in Education, Employment, and Training* (NEET) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Pemuda NEET
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30,46	27,57	18,30	39,48	28,73
Sumatera Utara	22,89	18,95	12,79	30,31	21,32
Sumatera Barat	21,42	24,31	15,43	30,42	22,73
Riau	22,78	26,34	11,99	38,24	24,78
Jambi	22,30	24,95	11,66	36,89	23,92
Sumatera Selatan	24,18	24,44	13,32	35,94	24,33
Bengkulu	19,78	23,33	11,82	32,96	21,97
Lampung	23,82	24,42	12,16	36,79	24,18
Kep. Bangka Belitung	20,86	22,48	11,16	32,71	21,46
Kepulauan Riau	21,19	24,76	14,66	28,36	21,45
DKI Jakarta	17,03	–	11,60	22,71	17,03
Jawa Barat	27,15	32,05	18,22	38,35	28,01
Jawa Tengah	18,87	21,27	12,52	27,63	19,87
DI Yogyakarta	13,60	19,92	10,26	19,90	14,94
Jawa Timur	19,43	21,25	10,93	29,79	20,13
Banten	24,87	38,30	20,12	35,36	27,58
Bali	7,95	6,99	4,30	11,30	7,69
Nusa Tenggara Barat	20,35	17,77	9,96	28,99	19,22
Nusa Tenggara Timur	21,97	17,77	14,65	23,78	19,09
Kalimantan Barat	23,72	22,92	12,09	35,10	23,26
Kalimantan Tengah	23,03	28,84	11,45	41,35	25,97
Kalimantan Selatan	21,50	24,48	12,43	33,90	22,87
Kalimantan Timur	21,78	25,61	12,45	33,88	22,84
Kalimantan Utara	22,19	21,68	11,79	33,56	22,02
Sulawesi Utara	31,27	32,64	20,25	44,26	31,82
Sulawesi Tengah	19,98	23,24	12,27	32,49	22,01
Sulawesi Selatan	23,56	21,26	13,09	32,22	22,44
Sulawesi Tenggara	22,93	23,88	14,22	33,16	23,49
Gorontalo	25,74	26,68	13,37	39,65	26,21
Sulawesi Barat	19,92	20,63	8,86	32,95	20,45
Maluku	32,41	31,69	24,98	39,50	31,99
Maluku Utara	28,78	26,15	16,96	37,70	26,98
Papua Barat	34,61	22,12	21,78	32,31	26,78
Papua Barat Daya	29,27	23,64	19,46	34,19	26,58
Papua	32,11	34,01	25,71	40,70	32,75
Papua Selatan	21,03	26,19	17,22	31,97	24,09
Papua Tengah	29,23	22,26	19,61	28,95	23,87
Papua Pegunungan	18,56 ¹	7,93	6,73	12,06	9,16
Indonesia	22,52	23,52	13,97	32,33	22,90

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.11 Persentase Pemuda yang Mengikuti Kursus/Pelatihan/Training dan Memperoleh Sertifikat Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Pelatihan Sertifikat
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,30	7,55	10,73	11,42	11,07
Sumatera Utara	19,69	12,02	14,90	18,45	16,63
Sumatera Barat	23,10	13,65	15,90	21,89	18,82
Riau	19,17	9,37	13,34	14,00	13,66
Jambi	17,64	12,43	14,40	14,53	14,46
Sumatera Selatan	18,75	10,73	13,10	15,09	14,07
Bengkulu	19,21	11,41	13,28	15,59	14,39
Lampung	16,98	10,21	11,78	14,04	12,88
Kep. Bangka Belitung	20,78	11,26	17,43	17,07	17,26
Kepulauan Riau	23,81	16,92	26,09	20,48	23,31
DKI Jakarta	29,74	–	27,73	31,83	29,74
Jawa Barat	13,11	8,25	12,22	12,30	12,26
Jawa Tengah	16,71	14,44	15,38	16,18	15,77
DI Yogyakarta	22,28	11,61	17,33	22,82	20,00
Jawa Timur	19,90	16,67	19,57	17,72	18,67
Banten	13,18	7,92 ¹	11,72	12,53	12,11
Bali	36,78	28,28	36,58	32,24	34,47
Nusa Tenggara Barat	19,49	13,90	17,96	16,06	17,04
Nusa Tenggara Timur	17,11	8,52	10,94	11,54	11,23
Kalimantan Barat	14,79	8,20	10,83	11,19	11,00
Kalimantan Tengah	18,00	9,64	14,24	13,26	13,77
Kalimantan Selatan	24,52	19,31	22,14	22,10	22,12
Kalimantan Timur	23,12	22,26	24,27	21,40	22,88
Kalimantan Utara	13,62	13,26	13,35	13,68	13,50
Sulawesi Utara	20,01	10,97	15,15	17,74	16,40
Sulawesi Tengah	16,66	8,11	10,59	12,14	11,34
Sulawesi Selatan	17,74	12,89	14,07	16,76	15,38
Sulawesi Tenggara	16,14	9,40	11,86	12,49	12,17
Gorontalo	15,98	11,78	11,70	16,20	13,90
Sulawesi Barat	17,98	13,06	12,95	15,76	14,30
Maluku	12,66	7,31	9,29	9,78	9,53
Maluku Utara	13,40	6,15	8,64	8,26	8,45
Papua Barat	9,38	11,06	9,77	11,17	10,44
Papua Barat Daya	15,51	11,92	14,82	12,70	13,80
Papua	28,17	7,32	19,39	23,24	21,20
Papua Selatan	13,72 ¹	2,54	7,47 ¹	6,66 ¹	7,09 ¹
Papua Tengah	15,40	1,57	4,57	4,99	4,76
Papua Pegunungan	NA	0,23 ¹	NA	0,23 ¹	0,24 ¹
Indonesia	18,09	11,90	15,39	16,07	15,72

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		TPT
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	Pemuda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,94	9,31	10,25	17,45	12,99
Sumatera Utara	14,68	8,37	11,27	13,29	12,09
Sumatera Barat	14,51	11,65	12,15	14,81	13,21
Riau	12,04	8,74	8,97	12,37	10,19
Jambi	15,51	9,22	11,40	12,13	11,66
Sumatera Selatan	13,23	8,39	9,46	12,04	10,42
Bengkulu	11,20	6,76	7,64	9,62	8,37
Lampung	14,36	7,31	8,53	12,72	10,06
Kep. Bangka Belitung	11,09	8,10	8,97	11,57	9,96
Kepulauan Riau	14,19	10,45	14,84	12,60	13,92
DKI Jakarta	12,96	–	13,01	12,90	12,96
Jawa Barat	17,38	14,57	17,37	16,11	16,89
Jawa Tengah	11,87	10,29	11,18	11,24	11,21
DI Yogyakarta	10,63	5,90 ¹	9,45	9,82	9,60
Jawa Timur	10,40	7,43	9,02	9,61	9,26
Banten	14,91	21,75	17,12	14,76	16,17
Bali	3,94	3,55 ¹	4,29	3,28	3,82
Nusa Tenggara Barat	7,68	6,01	7,49	6,08	6,91
Nusa Tenggara Timur	12,65	6,10	7,20	9,06	8,01
Kalimantan Barat	15,82	8,10	11,29	11,37	11,32
Kalimantan Tengah	9,48	9,26	8,96	10,14	9,37
Kalimantan Selatan	11,42	8,22	10,06	9,71	9,92
Kalimantan Timur	12,38	10,07	11,10	12,78	11,74
Kalimantan Utara	10,65	6,12	7,26	12,09	9,03
Sulawesi Utara	18,86	13,98	14,35	21,38	16,91
Sulawesi Tengah	9,56	6,06	6,69	8,40	7,34
Sulawesi Selatan	13,27	5,81	8,79	10,55	9,47
Sulawesi Tenggara	10,96	5,49	6,70	9,12	7,67
Gorontalo	10,80	7,07	7,80	10,90	8,89
Sulawesi Barat	10,67	5,43	5,22	9,18	6,67
Maluku	21,59	11,32	13,21	18,71	15,40
Maluku Utara	18,31	8,26	9,36	14,38	11,23
Papua Barat	16,49	8,21	11,17	10,56	10,93
Papua Barat Daya	18,70	12,27	15,24	16,24	15,65
Papua	18,63	14,95	14,44	22,01	17,34
Papua Selatan	12,44 ¹	8,19	11,91	6,04 ¹	9,72
Papua Tengah	22,47	3,78	8,31	6,27	7,47
Papua Pegunungan	NA	2,56	2,89	3,27 ¹	3,06 ¹
Indonesia	13,65	8,85	11,55	12,14	11,78

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		TPAK Pemuda
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	55,52	60,17	71,17	45,04	58,30
Sumatera Utara	67,59	71,23	80,32	57,15	69,04
Sumatera Barat	64,69	64,57	75,64	53,05	64,64
Riau	62,24	61,31	77,02	45,61	61,72
Jambi	62,51	62,80	78,44	46,02	62,69
Sumatera Selatan	65,00	64,04	78,72	49,38	64,44
Bengkulu	59,35	64,27	75,50	48,19	62,39
Lampung	63,06	64,53	79,40	47,74	63,95
Kep. Bangka Belitung	66,83	68,77	80,07	53,86	67,55
Kepulauan Riau	64,74	64,17	75,29	53,93	64,70
DKI Jakarta	62,96	–	70,53	55,04	62,96
Jawa Barat	65,00	63,00	78,22	50,31	64,64
Jawa Tengah	69,09	70,14	78,84	59,69	69,53
DI Yogyakarta	64,80	66,21	73,07	56,68	65,10
Jawa Timur	66,25	67,23	78,09	54,58	66,62
Banten	64,45	57,56	73,71	51,95	63,06
Bali	71,00	78,11	76,48	69,16	72,93
Nusa Tenggara Barat	67,51	73,13	80,67	58,67	69,97
Nusa Tenggara Timur	62,56	70,29	74,63	60,71	67,85
Kalimantan Barat	65,27	67,76	80,57	51,99	66,70
Kalimantan Tengah	62,48	63,07	80,04	44,51	62,78
Kalimantan Selatan	62,44	63,97	76,10	49,45	63,15
Kalimantan Timur	62,94	62,83	75,41	49,61	62,91
Kalimantan Utara	61,62	68,77	76,52	49,89	64,00
Sulawesi Utara	60,81	60,72	74,58	45,93	60,77
Sulawesi Tengah	63,76	66,87	78,36	52,07	65,70
Sulawesi Selatan	61,61	67,77	77,84	50,75	64,60
Sulawesi Tenggara	61,09	64,25	74,00	51,43	62,95
Gorontalo	60,43	64,24	78,94	44,92	62,32
Sulawesi Barat	62,91	68,51	81,97	51,06	67,09
Maluku	54,32	58,45	66,14	46,65	56,73
Maluku Utara	55,71	61,93	72,73	46,29	59,96
Papua Barat	50,79	61,89	67,05	47,46	57,75
Papua Barat Daya	59,68	58,79	67,23	50,73	59,25
Papua	50,17	54,18	59,98	41,94	51,51
Papua Selatan	51,69	63,28	68,56	47,07	58,56
Papua Tengah	58,14	71,16	73,58	61,67	68,15
Papua Pegunungan	69,14	88,02	87,32	84,08	85,84
Indonesia	65,02	66,52	77,27	53,26	65,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.14 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	Tamat SD Sederajat	Tamat SMP Sederajat	Tamat SMA/SMK Sederajat	Tamat Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,97	5,93	15,87	59,97	17,27
Sumatera Utara	2,11	5,98	14,99	61,67	15,26
Sumatera Barat	5,32	10,04	14,75	50,15	19,75
Riau	3,66	8,43	14,38	58,21	15,32
Jambi	2,15	7,66	15,02	58,06	17,11
Sumatera Selatan	3,52	9,30	14,48	58,87	13,84
Bengkulu	4,86	8,82	15,14	49,16	22,03
Lampung	2,73	9,74	20,53	54,73	12,28
Kep. Bangka Belitung	5,53	12,00	13,57	55,24	13,66
Kepulauan Riau	1,32 ¹	3,75	8,74	65,67	20,52
DKI Jakarta	NA	2,21	7,25	64,49	25,83
Jawa Barat	1,41	10,77	18,05	57,50	12,27
Jawa Tengah	1,47	9,86	19,72	57,04	11,91
DI Yogyakarta	0,61 ¹	3,99	12,40	60,69	22,32
Jawa Timur	1,14	8,76	17,31	58,23	14,56
Banten	1,05	8,59	16,06	60,83	13,47
Bali	0,93	3,89	10,37	58,33	26,49
Nusa Tenggara Barat	2,48	6,95	21,61	54,07	14,90
Nusa Tenggara Timur	6,54	10,42	15,80	47,38	19,87
Kalimantan Barat	5,05	12,59	16,42	51,99	13,94
Kalimantan Tengah	3,57	10,61	16,03	54,29	15,49
Kalimantan Selatan	3,44	9,96	13,55	55,66	17,40
Kalimantan Timur	1,64	5,92	11,06	60,62	20,76
Kalimantan Utara	3,58	8,82	13,87	53,51	20,23
Sulawesi Utara	3,81	8,35	13,14	55,48	19,22
Sulawesi Tengah	3,70	11,01	16,75	51,68	16,86
Sulawesi Selatan	4,09	10,27	14,46	50,82	20,35
Sulawesi Tenggara	4,70	7,49	13,57	51,34	22,89
Gorontalo	10,13	11,62	12,81	49,81	15,62
Sulawesi Barat	6,59	11,79	18,23	46,90	16,48
Maluku	3,15	6,81	10,93	60,01	19,11
Maluku Utara	4,99	6,13	13,00	58,39	17,50
Papua Barat	9,09	11,01	14,69	50,74	14,46
Papua Barat Daya	3,41	4,95	9,70	60,99	20,95
Papua	4,63	6,86	11,16	60,05	17,30
Papua Selatan	16,92	15,00	15,73	38,06	14,29
Papua Tengah	27,62	28,89	16,25	21,80	5,44
Papua Pegunungan	33,96	36,56	11,67	16,77	1,04 ¹
Indonesia	2,68	9,16	16,27	56,59	15,31

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA : Data tidak dapat ditampilkan

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.15 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha Utama, 2025

Provinsi	Jasa	Manufaktur	Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	61,55	6,68	31,77
Sumatera Utara	63,63	11,28	25,10
Sumatera Barat	65,57	8,38	26,04
Riau	63,57	8,52	27,91
Jambi	63,70	5,61	30,69
Sumatera Selatan	59,28	5,99	34,73
Bengkulu	61,57	4,37	34,05
Lampung	61,42	9,38	29,20
Kep. Bangka Belitung	74,50	7,02	18,48
Kepulauan Riau	66,92	28,39	4,70
DKI Jakarta	88,47	11,32	0,21
Jawa Barat	69,58	23,73	6,69
Jawa Tengah	59,31	29,56	11,13
DI Yogyakarta	77,46	18,70	3,84
Jawa Timur	62,95	19,72	17,33
Banten	64,57	28,45	6,98
Bali	82,54	11,30	6,16
Nusa Tenggara Barat	62,18	10,65	27,17
Nusa Tenggara Timur	50,56	7,36	42,08
Kalimantan Barat	63,92	4,66	31,42
Kalimantan Tengah	68,84	5,20	25,96
Kalimantan Selatan	75,93	8,15	15,92
Kalimantan Timur	81,78	6,25	11,97
Kalimantan Utara	67,25	6,77	25,98
Sulawesi Utara	74,01	11,23	14,76
Sulawesi Tengah	59,04	8,57	32,39
Sulawesi Selatan	63,34	7,37	29,29
Sulawesi Tenggara	64,60	8,83	26,56
Gorontalo	70,27	7,16	22,57
Sulawesi Barat	49,31	7,72	42,96
Maluku	57,46	11,81	30,73
Maluku Utara	51,60	27,66	20,74
Papua Barat	53,61	3,09	43,30
Papua Barat Daya	68,44	6,04	25,52
Papua	65,34	4,14	30,52
Papua Selatan	44,11	4,88	51,00
Papua Tengah	22,60	1,42	75,98
Papua Pegunungan	5,09	0,02	94,89
Indonesia	64,57	16,59	18,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.16 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Pekerjaan Utama, 2025

Provinsi	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)
Aceh	39,79	60,21
Sumatera Utara	51,77	48,23
Sumatera Barat	43,66	56,34
Riau	53,83	46,17
Jambi	53,37	46,63
Sumatera Selatan	48,09	51,91
Bengkulu	43,94	56,06
Lampung	50,42	49,58
Kep. Bangka Belitung	59,19	40,81
Kepulauan Riau	78,29	21,71
DKI Jakarta	79,39	20,61
Jawa Barat	60,63	39,37
Jawa Tengah	61,58	38,42
DI Yogyakarta	70,77	29,23
Jawa Timur	56,40	43,60
Banten	66,80	33,20
Bali	69,84	30,16
Nusa Tenggara Barat	39,80	60,20
Nusa Tenggara Timur	36,17	63,83
Kalimantan Barat	56,99	43,01
Kalimantan Tengah	63,09	36,91
Kalimantan Selatan	62,67	37,33
Kalimantan Timur	68,17	31,83
Kalimantan Utara	62,75	37,25
Sulawesi Utara	58,54	41,46
Sulawesi Tengah	43,27	56,73
Sulawesi Selatan	47,44	52,56
Sulawesi Tenggara	46,39	53,61
Gorontalo	46,74	53,26
Sulawesi Barat	34,23	65,77
Maluku	34,06	65,94
Maluku Utara	39,23	60,77
Papua Barat	39,25	60,75
Papua Barat Daya	50,88	49,12
Papua	48,52	51,48
Papua Selatan	35,19	64,81
Papua Tengah	14,84	85,16
Papua Pegunungan	2,57	97,43
Indonesia	55,92	44,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.17 Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja dalam Seminggu, 2025

Provinsi	Jam Kerja Seluruh Pekerjaan				Rata-Rata Jam Kerja
	< 35 Jam	35–40 Jam	41–48 Jam	> 48 Jam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42,94	16,31	18,13	22,63	36,35
Sumatera Utara	34,35	14,81	28,95	21,88	38,65
Sumatera Barat	41,77	15,92	20,12	22,19	36,02
Riau	33,32	15,75	22,44	28,49	39,85
Jambi	33,67	17,21	23,53	25,59	39,06
Sumatera Selatan	37,30	14,87	21,76	26,07	38,44
Bengkulu	43,32	16,95	18,09	21,65	35,68
Lampung	36,84	15,07	21,03	27,06	37,82
Kep. Bangka Belitung	30,85	17,60	27,98	23,57	39,54
Kepulauan Riau	18,55	20,95	36,16	24,33	42,74
DKI Jakarta	12,15	27,55	38,78	21,52	43,62
Jawa Barat	24,98	18,31	30,67	26,05	41,64
Jawa Tengah	26,60	17,44	32,83	23,13	39,93
DI Yogyakarta	25,74	15,47	41,24	17,55	38,99
Jawa Timur	30,69	12,49	31,90	24,92	39,49
Banten	22,82	24,37	32,29	20,53	40,45
Bali	21,22	16,60	41,52	20,65	41,27
Nusa Tenggara Barat	44,09	15,53	19,26	21,12	34,33
Nusa Tenggara Timur	52,34	15,21	16,05	16,39	32,16
Kalimantan Barat	34,58	15,65	26,21	23,55	37,85
Kalimantan Tengah	26,99	18,80	28,28	25,93	40,29
Kalimantan Selatan	31,58	17,38	24,86	26,18	39,40
Kalimantan Timur	21,41	15,39	31,85	31,35	43,58
Kalimantan Utara	24,38	19,57	21,97	34,08	43,58
Sulawesi Utara	30,70	20,71	28,00	20,58	39,18
Sulawesi Tengah	40,12	18,40	20,91	20,56	36,18
Sulawesi Selatan	38,32	16,52	21,41	23,75	37,11
Sulawesi Tenggara	42,85	15,70	17,46	23,99	35,81
Gorontalo	32,61	16,46	18,38	32,56	40,80
Sulawesi Barat	50,52	14,81	12,94	21,73	32,78
Maluku	47,87	15,71	14,92	21,49	35,19
Maluku Utara	45,03	14,00	12,98	27,99	36,54
Papua Barat	49,59	19,20	15,21	16,00	34,42
Papua Barat Daya	30,64	19,88	21,64	27,84	40,95
Papua	40,28	17,15	18,41	24,16	37,40
Papua Selatan	39,22	21,97	21,26	17,54	36,49
Papua Tengah	57,99	23,65	11,89	6,47	29,43
Papua Pegunungan	53,13	33,84	11,06	1,97	31,78
Indonesia	31,11	17,08	28,15	23,66	39,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.18 Sampling Error Persentase Pemuda Not in Education, Employment, and Training (NEET) Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	30,46	28,51	32,48	3,32	27,57	25,41	29,84	4,09
Sumatera Utara	22,89	21,37	24,48	3,47	18,95	17,47	20,52	4,10
Sumatera Barat	21,42	19,75	23,20	4,11	24,31	22,24	26,52	4,49
Riau	22,78	20,86	24,81	4,42	26,34	24,57	28,20	3,51
Jambi	22,30	19,86	24,94	5,81	24,95	22,95	27,06	4,20
Sumatera Selatan	24,18	22,11	26,38	4,51	24,44	22,86	26,09	3,37
Bengkulu	19,78	17,31	22,51	6,70	23,33	21,55	25,20	4,00
Lampung	23,82	21,88	25,87	4,28	24,42	22,15	26,85	4,91
Kep. Bangka Belitung	20,86	18,73	23,16	5,42	22,48	19,72	25,49	6,55
Kepulauan Riau	21,19	18,76	23,83	6,11	24,76	21,70	28,09	6,59
DKI Jakarta	17,03	15,34	18,87	5,30	–	–	–	–
Jawa Barat	27,15	26,11	28,20	1,96	32,05	29,16	35,09	4,72
Jawa Tengah	18,87	17,99	19,78	2,42	21,27	19,44	23,22	4,53
DI Yogyakarta	13,60	11,81	15,61	7,12	19,92	15,62	25,04	12,06
Jawa Timur	19,43	18,53	20,36	2,40	21,25	18,98	23,71	5,68
Banten	24,87	22,95	26,90	4,06	38,30	32,96	43,94	7,34
Bali	7,95	6,89	9,15	7,24	6,99	4,86	9,95	18,31
Nusa Tenggara Barat	20,35	18,37	22,48	5,15	17,77	14,75	21,25	9,33
Nusa Tenggara Timur	21,97	19,83	24,26	5,14	17,77	16,47	19,14	3,84
Kalimantan Barat	23,72	21,72	25,84	4,44	22,92	21,40	24,51	3,46
Kalimantan Tengah	23,03	20,97	25,22	4,71	28,84	26,84	30,93	3,62
Kalimantan Selatan	21,50	19,90	23,19	3,89	24,48	22,57	26,48	4,07
Kalimantan Timur	21,78	20,00	23,67	4,30	25,61	22,53	28,96	6,41
Kalimantan Utara	22,19	19,46	25,18	6,57	21,68	18,59	25,13	7,70
Sulawesi Utara	31,27	29,09	33,54	3,63	32,64	30,24	35,13	3,83
Sulawesi Tengah	19,98	17,78	22,37	5,86	23,24	21,50	25,07	3,92
Sulawesi Selatan	23,56	21,99	25,21	3,48	21,26	19,80	22,80	3,59
Sulawesi Tenggara	22,93	20,60	25,45	5,40	23,88	22,13	25,72	3,83
Gorontalo	25,74	22,96	28,73	5,72	26,68	24,01	29,54	5,29
Sulawesi Barat	19,92	17,59	22,49	6,28	20,63	18,48	22,96	5,54
Maluku	32,41	29,27	35,73	5,09	31,69	29,20	34,28	4,09
Maluku Utara	28,78	25,16	32,69	6,69	26,15	24,08	28,33	4,14
Papua Barat	34,61	31,04	38,35	5,40	22,12	18,69	25,97	8,40
Papua Barat Daya	29,27	24,77	34,21	8,24	23,64	20,38	27,25	7,41
Papua	32,11	28,44	36,02	6,03	34,01	30,94	37,21	4,71
Papua Selatan	21,03	14,55	29,41	18,03	26,19	22,96	29,69	6,56
Papua Tengah	29,23	24,53	34,42	8,65	22,26	19,39	25,41	6,90
Papua Pegunungan	18,56	8,74	35,17	36,03	7,93	6,54	9,59	9,75
Indonesia	22,52	22,14	22,90	0,87	23,52	22,96	24,08	1,22

Lanjutan Tabel 5.18

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	18,30	16,58	20,16	4,99	39,48	37,29	41,71	2,86	28,73	27,21	30,30	2,74
Sumatera Utara	12,79	11,58	14,09	5,00	30,31	28,59	32,08	2,93	21,32	20,22	22,45	2,67
Sumatera Barat	15,43	13,72	17,31	5,93	30,42	28,61	32,29	3,08	22,73	21,40	24,11	3,04
Riau	11,99	10,48	13,69	6,81	38,24	36,06	40,47	2,94	24,78	23,47	26,14	2,75
Jambi	11,66	9,98	13,58	7,86	36,89	34,43	39,42	3,45	23,92	22,36	25,55	3,41
Sumatera Selatan	13,32	11,95	14,82	5,49	35,94	33,77	38,16	3,12	24,33	23,06	25,65	2,72
Bengkulu	11,82	10,32	13,51	6,87	32,96	30,39	35,65	4,07	21,97	20,50	23,52	3,50
Lampung	12,16	10,49	14,05	7,45	36,79	34,22	39,44	3,62	24,18	22,59	25,85	3,43
Kep. Bangka Belitung	11,16	9,62	12,91	7,51	32,71	29,75	35,81	4,74	21,46	19,75	23,27	4,18
Kepulauan Riau	14,66	11,78	18,10	10,97	28,36	24,80	32,20	6,66	21,45	19,18	23,90	5,61
DKI Jakarta	11,60	9,86	13,61	8,23	22,71	19,97	25,70	6,44	17,03	15,34	18,87	5,30
Jawa Barat	18,22	17,04	19,46	3,38	38,35	36,79	39,93	2,09	28,01	27,02	29,02	1,83
Jawa Tengah	12,52	11,36	13,78	4,94	27,63	26,08	29,24	2,92	19,87	18,95	20,83	2,42
DI Yogyakarta	10,26	8,31	12,60	10,62	19,90	17,08	23,05	7,65	14,94	13,22	16,84	6,17
Jawa Timur	10,93	9,20	12,94	8,71	29,79	28,35	31,27	2,51	20,13	19,07	21,22	2,73
Banten	20,12	17,82	22,64	6,12	35,36	32,34	38,50	4,45	27,58	25,69	29,56	3,58
Bali	4,30	3,34	5,51	12,80	11,30	9,63	13,21	8,07	7,69	6,69	8,83	7,08
Nusa Tenggara Barat	9,96	8,20	12,04	9,81	28,99	26,18	31,97	5,10	19,22	17,44	21,12	4,88
Nusa Tenggara Timur	14,65	13,36	16,04	4,67	23,78	22,07	25,58	3,77	19,09	17,96	20,28	3,09
Kalimantan Barat	12,09	10,83	13,48	5,57	35,10	33,03	37,23	3,05	23,26	22,03	24,53	2,75
Kalimantan Tengah	11,45	9,95	13,16	7,15	41,35	38,82	43,93	3,16	25,97	24,51	27,49	2,92
Kalimantan Selatan	12,43	11,07	13,93	5,87	33,90	31,79	36,08	3,23	22,87	21,63	24,16	2,82
Kalimantan Timur	12,45	10,83	14,27	7,02	33,88	31,34	36,53	3,91	22,84	21,28	24,47	3,57
Kalimantan Utara	11,79	9,47	14,59	11,04	33,56	29,93	37,39	5,68	22,02	19,90	24,30	5,09
Sulawesi Utara	20,25	18,36	22,27	4,92	44,26	41,74	46,80	2,92	31,82	30,19	33,50	2,66
Sulawesi Tengah	12,27	10,71	14,02	6,85	32,49	30,31	34,75	3,49	22,01	20,62	23,45	3,28
Sulawesi Selatan	13,09	11,94	14,35	4,69	32,22	30,40	34,10	2,93	22,44	21,36	23,57	2,51
Sulawesi Tenggara	14,22	12,58	16,02	6,16	33,16	30,93	35,46	3,49	23,49	22,07	24,98	3,16
Gorontalo	13,37	11,16	15,94	9,11	39,65	36,37	43,03	4,29	26,21	24,26	28,25	3,89
Sulawesi Barat	8,86	7,21	10,84	10,39	32,95	30,08	35,96	4,55	20,45	18,72	22,29	4,45
Maluku	24,98	22,26	27,92	5,79	39,50	36,64	42,43	3,74	31,99	30,02	34,03	3,20
Maluku Utara	16,96	14,92	19,22	6,45	37,70	34,82	40,67	3,96	26,98	25,15	28,90	3,54
Papua Barat	21,78	18,87	25,01	7,20	32,31	28,75	36,08	5,79	26,78	24,20	29,52	5,07
Papua Barat Daya	19,46	16,46	22,86	8,38	34,19	30,41	38,19	5,81	26,58	23,76	29,61	5,62
Papua	25,71	22,55	29,14	6,54	40,70	36,90	44,62	4,85	32,75	30,08	35,53	4,24
Papua Selatan	17,22	13,54	21,65	11,98	31,97	27,23	37,12	7,91	24,09	20,58	27,99	7,85
Papua Tengah	19,61	16,85	22,70	7,60	28,95	25,78	32,34	5,79	23,87	21,37	26,56	5,54
Papua Pegunungan	6,73	5,34	8,44	11,71	12,06	8,95	16,06	14,94	9,16	7,22	11,55	12,00
Indonesia	13,97	13,56	14,40	1,53	32,33	31,83	32,83	0,79	22,90	22,58	23,22	0,71

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.19 Sampling Error Persentase Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16,30	14,55	18,22	5,73	7,55	5,98	9,49	11,78
Sumatera Utara	19,69	17,31	22,30	6,47	12,02	10,58	13,62	6,44
Sumatera Barat	23,10	20,50	25,91	5,97	13,65	11,63	15,95	8,06
Riau	19,17	16,87	21,71	6,44	9,37	7,96	11,01	8,28
Jambi	17,64	14,78	20,92	8,88	12,43	10,71	14,39	7,54
Sumatera Selatan	18,75	15,68	22,26	8,94	10,73	9,23	12,45	7,64
Bengkulu	19,21	15,64	23,37	10,26	11,41	9,78	13,27	7,79
Lampung	16,98	14,45	19,84	8,09	10,21	8,34	12,45	10,24
Kep. Bangka Belitung	20,78	17,90	23,99	7,48	11,26	8,81	14,30	12,37
Kepulauan Riau	23,81	19,61	28,60	9,64	16,92	13,43	21,10	11,55
DKI Jakarta	29,74	26,42	33,29	5,90	–	–	–	–
Jawa Barat	13,11	12,09	14,21	4,13	8,25	6,32	10,71	13,44
Jawa Tengah	16,71	15,64	17,84	3,35	14,44	12,46	16,67	7,44
DI Yogyakarta	22,28	19,48	25,34	6,71	11,61	7,92	16,70	19,06
Jawa Timur	19,90	18,44	21,44	3,86	16,67	12,60	21,74	13,94
Banten	13,18	11,10	15,58	8,65	7,92	4,70	13,04	26,13
Bali	36,78	33,62	40,04	4,46	28,28	22,48	34,91	11,25
Nusa Tenggara Barat	19,49	16,86	22,42	7,28	13,90	11,01	17,39	11,67
Nusa Tenggara Timur	17,11	14,03	20,69	9,91	8,52	7,50	9,67	6,49
Kalimantan Barat	14,79	12,34	17,63	9,12	8,20	6,92	9,70	8,62
Kalimantan Tengah	18,00	15,00	21,45	9,13	9,64	8,07	11,48	8,99
Kalimantan Selatan	24,52	21,66	27,62	6,20	19,31	17,10	21,73	6,12
Kalimantan Timur	23,12	20,60	25,85	5,79	22,26	17,99	27,20	10,55
Kalimantan Utara	13,62	10,76	17,11	11,84	13,26	9,89	17,56	14,67
Sulawesi Utara	20,01	17,53	22,75	6,64	10,97	9,00	13,30	9,95
Sulawesi Tengah	16,66	14,31	19,32	7,66	8,11	6,79	9,67	9,04
Sulawesi Selatan	17,74	15,47	20,27	6,89	12,89	11,39	14,55	6,24
Sulawesi Tenggara	16,14	13,88	18,68	7,59	9,40	8,08	10,92	7,69
Gorontalo	15,98	13,08	19,38	10,04	11,78	9,20	14,97	12,44
Sulawesi Barat	17,98	14,75	21,73	9,90	13,06	10,84	15,65	9,38
Maluku	12,66	10,37	15,36	10,02	7,31	5,99	8,89	10,08
Maluku Utara	13,40	10,39	17,13	12,78	6,15	4,75	7,92	13,03
Papua Barat	9,38	7,06	12,35	14,28	11,06	7,53	15,97	19,24
Papua Barat Daya	15,51	10,98	21,45	17,13	11,92	9,32	15,12	12,35
Papua	28,17	22,61	34,49	10,79	7,32	5,17	10,26	17,52
Papua Selatan	13,72	5,73	29,35	42,29	2,54	1,70	3,78	20,38
Papua Tengah	15,40	10,37	22,26	19,55	1,57	0,97	2,51	24,21
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	100,79	0,23	0,10	0,52	41,70
Indonesia	18,09	17,60	18,60	1,41	11,90	11,15	12,69	3,32

Lanjutan Tabel 5.19

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	10,73	9,25	12,41	7,49	11,42	10,00	13,00	6,68	11,07	9,86	12,41	5,88
Sumatera Utara	14,90	13,31	16,64	5,71	18,45	16,45	20,64	5,79	16,63	15,06	18,32	4,99
Sumatera Barat	15,90	14,14	17,84	5,92	21,89	19,64	24,33	5,46	18,82	17,11	20,67	4,83
Riau	13,34	11,74	15,11	6,45	14,00	12,38	15,79	6,20	13,66	12,34	15,10	5,14
Jambi	14,40	12,42	16,63	7,46	14,53	12,71	16,55	6,75	14,46	12,91	16,16	5,74
Sumatera Selatan	13,10	11,30	15,14	7,47	15,09	13,27	17,11	6,48	14,07	12,50	15,81	6,00
Bengkulu	13,28	11,25	15,62	8,38	15,59	13,34	18,15	7,87	14,39	12,66	16,31	6,47
Lampung	11,78	9,98	13,86	8,38	14,04	12,12	16,20	7,42	12,88	11,33	14,61	6,49
Kep. Bangka Belitung	17,43	14,84	20,37	8,08	17,07	14,63	19,82	7,75	17,26	15,20	19,54	6,41
Kepulauan Riau	26,09	21,09	31,79	10,49	20,48	16,23	25,50	11,54	23,31	19,39	27,74	9,14
DKI Jakarta	27,73	24,14	31,63	6,90	31,83	27,98	35,95	6,40	29,74	26,42	33,29	5,90
Jawa Barat	12,22	11,11	13,42	4,81	12,30	11,15	13,54	4,94	12,26	11,33	13,24	3,97
Jawa Tengah	15,38	14,03	16,84	4,66	16,18	14,94	17,49	4,01	15,77	14,71	16,88	3,51
DI Yogyakarta	17,33	14,69	20,34	8,30	22,82	19,40	26,64	8,10	20,00	17,61	22,63	6,40
Jawa Timur	19,57	17,32	22,03	6,14	17,72	15,96	19,62	5,28	18,67	16,79	20,70	5,34
Banten	11,72	9,64	14,17	9,83	12,53	10,31	15,13	9,78	12,11	10,29	14,21	8,24
Bali	36,58	33,24	40,05	4,75	32,24	29,09	35,57	5,14	34,47	31,64	37,42	4,28
Nusa Tenggara Barat	17,96	15,11	21,21	8,65	16,06	13,91	18,47	7,24	17,04	15,03	19,25	6,33
Nusa Tenggara Timur	10,94	9,37	12,74	7,85	11,54	10,20	13,03	6,25	11,23	9,99	12,61	5,95
Kalimantan Barat	10,83	9,31	12,57	7,66	11,19	9,67	12,91	7,37	11,00	9,70	12,46	6,40
Kalimantan Tengah	14,24	12,17	16,61	7,94	13,26	11,44	15,33	7,48	13,77	12,06	15,67	6,69
Kalimantan Selatan	22,14	19,94	24,51	5,27	22,10	19,79	24,60	5,56	22,12	20,25	24,11	4,45
Kalimantan Timur	24,27	21,55	27,21	5,94	21,40	18,84	24,21	6,39	22,88	20,68	25,24	5,09
Kalimantan Utara	13,35	10,65	16,60	11,33	13,68	11,21	16,59	10,00	13,50	11,23	16,16	9,30
Sulawesi Utara	15,15	13,16	17,38	7,11	17,74	15,66	20,04	6,30	16,40	14,68	18,27	5,58
Sulawesi Tengah	10,59	9,07	12,33	7,84	12,14	10,48	14,02	7,44	11,34	10,10	12,71	5,86
Sulawesi Selatan	14,07	12,67	15,61	5,33	16,76	14,78	18,93	6,31	15,38	13,98	16,90	4,83
Sulawesi Tenggara	11,86	10,38	13,52	6,75	12,49	10,81	14,39	7,30	12,17	10,92	13,54	5,48
Gorontalo	11,70	9,54	14,26	10,27	16,20	13,63	19,15	8,69	13,90	11,90	16,17	7,83
Sulawesi Barat	12,95	10,68	15,63	9,73	15,76	13,46	18,36	7,92	14,30	12,42	16,41	7,10
Maluku	9,29	7,72	11,14	9,37	9,78	8,15	11,69	9,21	9,53	8,29	10,93	7,06
Maluku Utara	8,64	6,91	10,74	11,24	8,26	6,67	10,18	10,80	8,45	7,06	10,09	9,11
Papua Barat	9,77	6,79	13,86	18,23	11,17	8,37	14,77	14,53	10,44	7,95	13,58	13,68
Papua Barat Daya	14,82	11,62	18,72	12,19	12,70	9,63	16,58	13,87	13,80	11,02	17,15	11,30
Papua	19,39	15,39	24,14	11,51	23,24	18,65	28,55	10,87	21,20	17,31	25,68	10,07
Papua Selatan	7,47	3,57	14,98	36,84	6,66	3,50	12,30	32,20	7,09	3,57	13,61	34,33
Papua Tengah	4,57	3,18	6,53	18,33	4,99	3,44	7,17	18,72	4,76	3,49	6,47	15,78
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	52,49	0,23	0,09	0,54	44,93	0,24	0,11	0,51	38,53
Indonesia	15,39	14,88	15,90	1,69	16,07	15,60	16,55	1,50	15,72	15,30	16,15	1,38

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.20 *Sampling Error* Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18,94	16,90	21,16	5,74	9,31	7,74	11,14	9,29
Sumatera Utara	14,68	13,17	16,34	5,50	8,37	7,08	9,88	8,51
Sumatera Barat	14,51	12,66	16,57	6,88	11,65	9,71	13,91	9,17
Riau	12,04	10,12	14,25	8,73	8,74	6,80	11,16	12,63
Jambi	15,51	12,85	18,60	9,44	9,22	7,62	11,12	9,66
Sumatera Selatan	13,23	11,08	15,73	8,95	8,39	7,20	9,76	7,78
Bengkulu	11,20	8,56	14,51	13,47	6,76	5,47	8,31	10,65
Lampung	14,36	12,32	16,68	7,73	7,31	5,96	8,95	10,39
Kep. Bangka Belitung	11,09	9,32	13,14	8,78	8,10	5,80	11,20	16,81
Kepulauan Riau	14,19	11,49	17,40	10,60	10,45	7,94	13,63	13,80
DKI Jakarta	12,96	11,09	15,10	7,88	–	–	–	–
Jawa Barat	17,38	16,21	18,61	3,52	14,57	10,98	19,07	14,10
Jawa Tengah	11,87	10,98	12,82	3,94	10,29	8,49	12,43	9,74
DI Yogyakarta	10,63	8,65	13,00	10,40	5,90	3,35	10,20	28,52
Jawa Timur	10,40	9,51	11,38	4,59	7,43	6,24	8,81	8,79
Banten	14,91	13,04	16,98	6,74	21,75	16,59	27,99	13,37
Bali	3,94	3,09	4,99	12,21	3,55	1,65	7,48	38,66
Nusa Tenggara Barat	7,68	6,08	9,65	11,77	6,01	3,78	9,43	23,34
Nusa Tenggara Timur	12,65	10,64	14,97	8,71	6,10	5,18	7,17	8,31
Kalimantan Barat	15,82	13,71	18,19	7,21	8,10	6,83	9,59	8,68
Kalimantan Tengah	9,48	7,75	11,54	10,16	9,26	7,47	11,41	10,82
Kalimantan Selatan	11,42	9,90	13,13	7,20	8,22	6,70	10,03	10,29
Kalimantan Timur	12,38	10,60	14,41	7,83	10,07	7,96	12,68	11,89
Kalimantan Utara	10,65	8,03	14,00	14,20	6,12	4,24	8,76	18,53
Sulawesi Utara	18,86	16,51	21,45	6,68	13,98	11,71	16,61	8,93
Sulawesi Tengah	9,56	7,66	11,87	11,18	6,06	4,92	7,44	10,55
Sulawesi Selatan	13,27	11,62	15,11	6,71	5,81	4,92	6,85	8,43
Sulawesi Tenggara	10,96	9,02	13,25	9,82	5,49	4,44	6,76	10,75
Gorontalo	10,80	8,04	14,35	14,79	7,07	5,44	9,15	13,26
Sulawesi Barat	10,67	8,06	14,00	14,12	5,43	4,07	7,20	14,53
Maluku	21,59	17,09	26,88	11,57	11,32	8,56	14,82	14,01
Maluku Utara	18,31	14,56	22,76	11,41	8,26	6,49	10,47	12,23
Papua Barat	16,49	12,95	20,78	12,07	8,21	5,22	12,69	22,73
Papua Barat Daya	18,70	13,91	24,66	14,64	12,27	8,18	18,00	20,20
Papua	18,63	14,20	24,07	13,50	14,95	11,33	19,47	13,83
Papua Selatan	12,44	6,71	21,91	30,40	8,19	5,83	11,38	17,07
Papua Tengah	22,47	15,44	31,50	18,27	3,78	2,79	5,11	15,44
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	89,47	2,56	1,72	3,79	20,13
Indonesia	13,65	13,24	14,07	1,56	8,85	8,33	9,39	3,03

Lanjutan Tabel 5.20

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	10,25	8,89	11,80	7,24	17,45	15,22	19,93	6,89	12,99	11,70	14,40	5,30
Sumatera Utara	11,27	9,94	12,76	6,36	13,29	11,70	15,06	6,44	12,09	11,04	13,22	4,61
Sumatera Barat	12,15	10,47	14,06	7,53	14,81	12,88	16,98	7,07	13,21	11,84	14,72	5,54
Riau	8,97	7,35	10,91	10,07	12,37	10,47	14,56	8,42	10,19	8,78	11,81	7,55
Jambi	11,40	9,54	13,56	8,99	12,13	10,05	14,58	9,51	11,66	10,20	13,30	6,78
Sumatera Selatan	9,46	8,17	10,93	7,42	12,04	10,21	14,14	8,30	10,42	9,26	11,71	5,97
Bengkulu	7,64	6,26	9,28	10,03	9,62	7,31	12,56	13,81	8,37	7,06	9,90	8,63
Lampung	8,53	7,15	10,14	8,90	12,72	10,66	15,10	8,88	10,06	8,87	11,38	6,36
Kep. Bangka Belitung	8,97	7,41	10,83	9,69	11,57	9,02	14,73	12,52	9,96	8,52	11,62	7,94
Kepulauan Riau	14,84	11,82	18,48	11,41	12,60	8,84	17,66	17,69	13,92	11,40	16,89	10,05
DKI Jakarta	13,01	10,60	15,87	10,30	12,90	10,34	15,98	11,12	12,96	11,09	15,10	7,88
Jawa Barat	17,37	16,02	18,81	4,09	16,11	14,48	17,88	5,39	16,89	15,71	18,14	3,67
Jawa Tengah	11,18	9,94	12,56	5,98	11,24	9,89	12,75	6,47	11,21	10,26	12,23	4,47
DI Yogyakarta	9,45	7,36	12,05	12,60	9,82	7,42	12,89	14,10	9,60	7,90	11,63	9,87
Jawa Timur	9,02	8,11	10,03	5,42	9,61	8,51	10,84	6,17	9,26	8,53	10,05	4,18
Banten	17,12	14,65	19,92	7,84	14,76	12,24	17,69	9,39	16,17	14,34	18,18	6,06
Bali	4,29	3,16	5,80	15,51	3,28	2,23	4,80	19,63	3,82	2,92	5,00	13,72
Nusa Tenggara Barat	7,49	5,60	9,94	14,64	6,08	4,47	8,23	15,60	6,91	5,48	8,68	11,74
Nusa Tenggara Timur	7,20	6,11	8,47	8,33	9,06	7,75	10,56	7,89	8,01	7,10	9,02	6,10
Kalimantan Barat	11,29	9,89	12,86	6,70	11,37	9,60	13,40	8,50	11,32	10,14	12,62	5,59
Kalimantan Tengah	8,96	7,42	10,79	9,55	10,14	8,19	12,48	10,75	9,37	8,09	10,82	7,42
Kalimantan Selatan	10,06	8,72	11,58	7,24	9,71	8,10	11,61	9,20	9,92	8,83	11,14	5,93
Kalimantan Timur	11,10	9,46	12,99	8,08	12,78	10,61	15,32	9,38	11,74	10,30	13,36	6,62
Kalimantan Utara	7,26	5,38	9,73	15,15	12,09	8,88	16,26	15,44	9,03	7,15	11,34	11,79
Sulawesi Utara	14,35	12,53	16,39	6,85	21,38	18,36	24,75	7,62	16,91	15,20	18,77	5,39
Sulawesi Tengah	6,69	5,48	8,14	10,13	8,40	6,84	10,28	10,39	7,34	6,31	8,52	7,65
Sulawesi Selatan	8,79	7,65	10,08	7,04	10,55	9,07	12,25	7,65	9,47	8,52	10,51	5,35
Sulawesi Tenggara	6,70	5,52	8,12	9,86	9,12	7,46	11,10	10,16	7,67	6,64	8,84	7,32
Gorontalo	7,80	5,94	10,18	13,73	10,90	8,37	14,09	13,30	8,89	7,26	10,86	10,28
Sulawesi Barat	5,22	3,86	7,02	15,25	9,18	6,86	12,18	14,64	6,67	5,42	8,18	10,49
Maluku	13,21	10,46	16,56	11,73	18,71	15,10	22,96	10,71	15,40	12,92	18,25	8,82
Maluku Utara	9,36	7,40	11,77	11,85	14,38	11,36	18,03	11,79	11,23	9,48	13,26	8,58
Papua Barat	11,17	8,23	14,98	15,30	10,56	7,69	14,34	15,93	10,93	8,44	14,05	13,03
Papua Barat Daya	15,24	11,52	19,89	13,95	16,24	12,16	21,36	14,40	15,65	12,41	19,56	11,62
Papua	14,44	11,27	18,34	12,44	22,01	17,07	27,91	12,57	17,34	14,09	21,15	10,38
Papua Selatan	11,91	8,63	16,22	16,14	6,04	3,30	10,81	30,36	9,72	6,94	13,44	16,89
Papua Tengah	8,31	6,07	11,29	15,86	6,27	4,50	8,66	16,71	7,47	5,73	9,67	13,36
Papua Pegunungan	2,89	1,87	4,46	22,24	3,27	1,25	8,29	48,54	3,06	1,79	5,18	27,14
Indonesia	11,55	11,15	11,96	1,78	12,14	11,67	12,62	1,99	11,78	11,46	12,12	1,42

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Tabel 5.21 *Sampling Error* Persentase Pemuda Bekerja Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD				Tamat SD Sederajat				Tamat SMP Sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0,97	0,64	1,47	21,18	5,93	4,94	7,09	9,18	15,87	14,28	17,59	5,32
Sumatera Utara	2,11	1,72	2,58	10,37	5,98	5,17	6,89	7,33	14,99	13,82	16,24	4,12
Sumatera Barat	5,32	4,45	6,35	9,08	10,04	8,79	11,44	6,72	14,75	13,48	16,10	4,53
Riau	3,66	2,77	4,83	14,19	8,43	7,24	9,79	7,71	14,38	12,83	16,09	5,77
Jambi	2,15	1,47	3,13	19,22	7,66	6,45	9,07	8,72	15,02	13,33	16,88	6,02
Sumatera Selatan	3,52	2,73	4,52	12,90	9,30	8,12	10,61	6,82	14,48	13,06	16,02	5,20
Bengkulu	4,86	3,78	6,22	12,73	8,82	7,45	10,42	8,57	15,14	13,47	16,97	5,89
Lampung	2,73	1,84	4,02	19,97	9,74	8,36	11,31	7,71	20,53	18,41	22,83	5,49
Kep. Bangka Belitung	5,53	4,25	7,18	13,41	12,00	10,35	13,87	7,47	13,57	11,67	15,72	7,60
Kepulauan Riau	1,32	0,76	2,26	27,71	3,75	2,60	5,38	18,56	8,74	6,83	11,12	12,42
DKI Jakarta	NA	NA	NA	66,82	2,21	1,47	3,30	20,66	7,25	5,83	8,99	11,07
Jawa Barat	1,41	1,08	1,86	13,93	10,77	9,71	11,92	5,23	18,05	16,80	19,37	3,63
Jawa Tengah	1,47	1,13	1,91	13,32	9,86	8,80	11,02	5,74	19,72	18,50	21,01	3,25
DI Yogyakarta	0,61	0,25	1,48	45,68	3,99	2,85	5,54	16,94	12,40	10,04	15,21	10,62
Jawa Timur	1,14	0,82	1,57	16,58	8,76	7,71	9,94	6,50	17,31	16,19	18,50	3,40
Banten	1,05	0,65	1,69	24,36	8,59	7,07	10,40	9,85	16,06	13,89	18,49	7,29
Bali	0,93	0,59	1,46	23,11	3,89	3,06	4,93	12,21	10,37	8,82	12,16	8,19
Nusa Tenggara Barat	2,48	1,85	3,30	14,73	6,95	5,54	8,69	11,51	21,61	19,06	24,39	6,29
Nusa Tenggara Timur	6,54	5,73	7,44	6,65	10,42	9,35	11,59	5,47	15,80	14,70	16,96	3,65
Kalimantan Barat	5,05	4,14	6,15	10,08	12,59	11,25	14,07	5,71	16,42	15,04	17,91	4,46
Kalimantan Tengah	3,57	2,64	4,81	15,27	10,61	9,12	12,32	7,68	16,03	14,34	17,88	5,62
Kalimantan Selatan	3,44	2,61	4,52	14,04	9,96	8,67	11,40	6,99	13,55	12,08	15,16	5,78
Kalimantan Timur	1,64	1,08	2,48	21,29	5,92	4,88	7,18	9,87	11,06	9,60	12,71	7,17
Kalimantan Utara	3,58	2,47	5,15	18,72	8,82	6,96	11,12	11,96	13,87	11,68	16,38	8,63
Sulawesi Utara	3,81	2,91	4,97	13,63	8,35	7,08	9,82	8,34	13,14	11,56	14,90	6,47
Sulawesi Tengah	3,70	2,90	4,69	12,25	11,01	9,65	12,55	6,71	16,75	15,01	18,66	5,56
Sulawesi Selatan	4,09	3,39	4,93	9,57	10,27	9,30	11,33	5,04	14,46	13,42	15,57	3,79
Sulawesi Tenggara	4,70	3,79	5,81	10,88	7,49	6,41	8,73	7,87	13,57	12,29	14,97	5,03
Gorontalo	10,13	8,23	12,42	10,52	11,62	9,73	13,82	8,96	12,81	11,04	14,81	7,49
Sulawesi Barat	6,59	5,14	8,42	12,62	11,79	9,93	13,95	8,67	18,23	16,19	20,46	5,98
Maluku	3,15	2,19	4,51	18,41	6,81	5,66	8,17	9,37	10,93	9,48	12,57	7,20
Maluku Utara	4,99	3,56	6,96	17,14	6,13	4,66	8,02	13,87	13,00	10,97	15,34	8,56
Papua Barat	9,09	6,35	12,85	18,02	11,01	7,52	15,85	19,08	14,69	11,52	18,55	12,16
Papua Barat Daya	3,41	2,47	4,67	16,24	4,95	3,55	6,88	16,89	9,70	7,84	11,93	10,72
Papua	4,63	3,33	6,42	16,77	6,86	4,62	10,07	19,91	11,16	8,20	15,01	15,46
Papua Selatan	16,92	13,76	20,63	10,33	15,00	12,05	18,51	10,98	15,73	12,40	19,76	11,89
Papua Tengah	27,62	24,95	30,47	5,10	28,89	25,99	31,98	5,29	16,25	13,85	18,97	8,04
Papua Pegunungan	33,96	31,73	36,26	3,41	36,56	33,91	39,30	3,76	11,67	9,82	13,82	8,72
Indonesia	2,68	2,54	2,82	2,61	9,16	8,84	9,49	1,81	16,27	15,89	16,65	1,20

Lanjutan Tabel 5.21

Provinsi	Tamat SMA/SMK Sederajat				Tamat Pendidikan Tinggi			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Aceh	59,97	57,87	62,03	1,77	17,27	15,75	18,90	4,65
Sumatera Utara	61,67	59,94	63,36	1,42	15,26	13,89	16,74	4,76
Sumatera Barat	50,15	48,10	52,19	2,09	19,75	18,01	21,63	4,67
Riau	58,21	55,83	60,56	2,07	15,32	13,67	17,12	5,73
Jambi	58,06	55,54	60,53	2,20	17,11	15,02	19,43	6,57
Sumatera Selatan	58,87	56,69	61,02	1,88	13,84	12,10	15,78	6,78
Bengkulu	49,16	46,36	51,96	2,91	22,03	19,55	24,72	5,99
Lampung	54,73	52,19	57,24	2,35	12,28	10,74	14,00	6,75
Kep. Bangka Belitung	55,24	52,29	58,15	2,71	13,66	11,72	15,86	7,73
Kepulauan Riau	65,67	61,38	69,71	3,24	20,52	16,89	24,70	9,70
DKI Jakarta	64,49	60,91	67,92	2,77	25,83	22,53	29,43	6,82
Jawa Barat	57,50	55,77	59,21	1,53	12,27	11,18	13,45	4,72
Jawa Tengah	57,04	55,48	58,59	1,39	11,91	10,96	12,93	4,22
DI Yogyakarta	60,69	57,06	64,21	3,01	22,32	19,24	25,73	7,42
Jawa Timur	58,23	56,66	59,78	1,37	14,56	13,47	15,73	3,97
Banten	60,83	57,71	63,87	2,59	13,47	11,59	15,60	7,57
Bali	58,33	55,70	60,91	2,28	26,49	24,28	28,82	4,38
Nusa Tenggara Barat	54,07	51,06	57,05	2,83	14,90	13,05	16,96	6,69
Nusa Tenggara Timur	47,38	45,62	49,14	1,90	19,87	18,33	21,51	4,08
Kalimantan Barat	51,99	49,78	54,20	2,17	13,94	12,42	15,61	5,84
Kalimantan Tengah	54,29	51,52	57,04	2,60	15,49	13,54	17,67	6,78
Kalimantan Selatan	55,66	53,30	58,00	2,16	17,40	15,49	19,48	5,85
Kalimantan Timur	60,62	58,01	63,17	2,17	20,76	18,58	23,13	5,59
Kalimantan Utara	53,51	49,72	57,25	3,60	20,23	17,31	23,51	7,82
Sulawesi Utara	55,48	52,78	58,15	2,47	19,22	16,80	21,90	6,77
Sulawesi Tengah	51,68	49,31	54,04	2,34	16,86	15,14	18,72	5,41
Sulawesi Selatan	50,82	49,03	52,60	1,79	20,35	18,79	22,01	4,04
Sulawesi Tenggara	51,34	49,26	53,43	2,07	22,89	21,05	24,85	4,24
Gorontalo	49,81	46,62	53,01	3,28	15,62	13,48	18,04	7,43
Sulawesi Barat	46,90	43,73	50,10	3,47	16,48	14,46	18,73	6,59
Maluku	60,01	57,31	62,65	2,27	19,11	16,95	21,47	6,03
Maluku Utara	58,39	55,17	61,53	2,78	17,50	15,13	20,14	7,30
Papua Barat	50,74	44,60	56,86	6,19	14,46	12,04	17,28	9,23
Papua Barat Daya	60,99	56,76	65,07	3,49	20,95	17,29	25,15	9,56
Papua	60,05	55,08	64,82	4,15	17,30	14,03	21,14	10,47
Papua Selatan	38,06	32,29	44,20	8,02	14,29	9,24	21,44	21,58
Papua Tengah	21,80	19,27	24,55	6,18	5,44	3,94	7,47	16,36
Papua Pegunungan	16,77	14,68	19,09	6,70	1,04	0,57	1,89	30,70
Indonesia	56,59	56,07	57,11	0,47	15,31	14,94	15,69	1,25

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025



<https://www.bps.go.id>





BAB VI

SOSIAL EKONOMI

<https://www.buku.go.id>





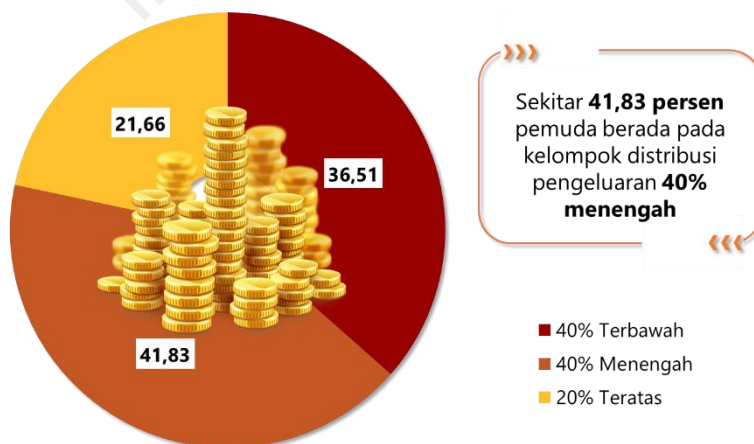
<https://www.bps.go.id>



Pemuda memainkan peran krusial dalam perjalanan sejarah dan pembangunan bangsa sebagai motor penggerak perubahan. Mereka memiliki potensi besar untuk membentuk arah masa depan negara. Agar mampu menjalankan peran strategis ini secara efektif, pemuda perlu memiliki kualitas hidup yang memadai. Kualitas tersebut tercermin dalam berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi yang stabil, lingkungan tempat tinggal yang layak, serta kehidupan sosial yang sehat dan mendukung.

6.1 Status Ekonomi Pemuda

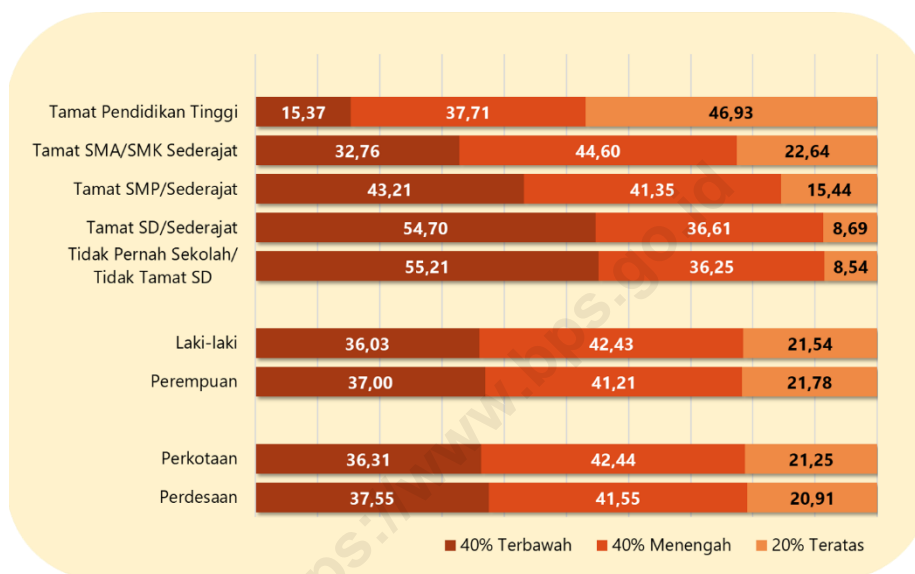
Tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga dapat diukur dari kondisi ekonomi yang dimilikinya. Dalam konteks pembangunan, pemuda memegang peranan penting sebagai subjek yang aktif dan idealnya berada dalam kondisi ekonomi yang mendukung. Untuk memahami status ekonomi pemuda secara lebih mendalam, pendekatan yang digunakan adalah distribusi pengeluaran per kapita rumah tangga yang memiliki anggota berstatus pemuda. Distribusi ini dikelompokkan menjadi tiga kategori: 20 persen dengan pengeluaran tertinggi, 40 persen kelompok menengah, dan 40 persen dengan pengeluaran terendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.1 Persentase Pemuda Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

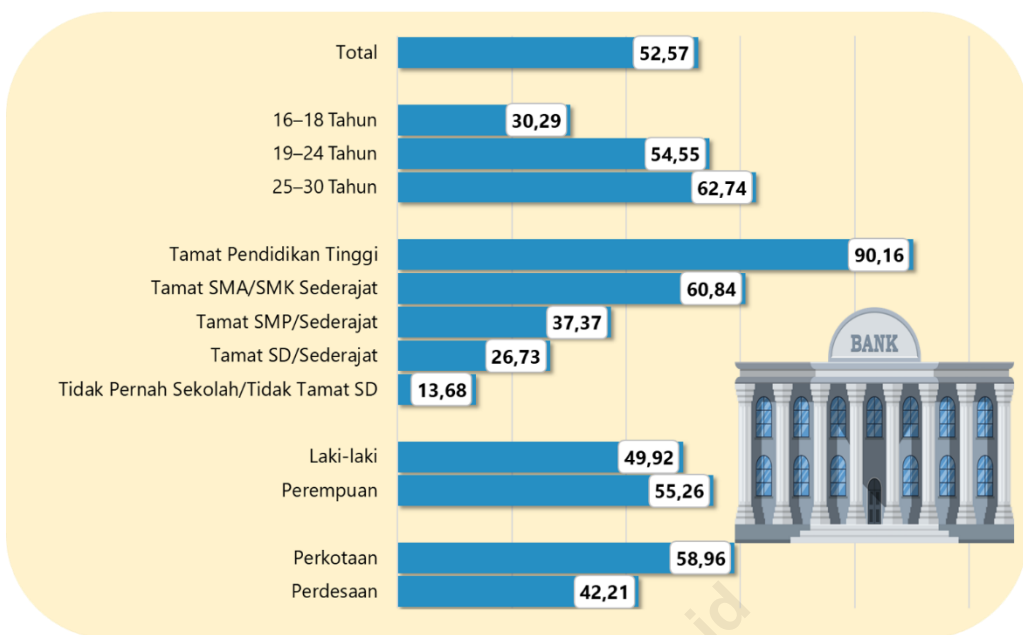
Pada tahun 2025, lebih dari 40 persen (41,83 persen) pemuda tinggal dalam rumah tangga yang termasuk dalam kelompok ekonomi 40 persen menengah (lihat Gambar 6.1). Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, baik pemuda laki-laki maupun perempuan menunjukkan pola yang serupa, keduanya didominasi oleh kelompok ekonomi menengah (lihat Gambar 6.2). Tren ini juga konsisten ketika dilihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal, di mana pemuda di wilayah perkotaan maupun perdesaan sebagian besar berada dalam rumah tangga dengan status ekonomi yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.2 Persentase Pemuda Menurut Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga dan Karakteristik, 2025

Tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh pemuda menunjukkan keterkaitan yang erat dengan kondisi ekonomi rumah tangga tempat mereka tinggal. Data tahun 2025 mengungkap bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda, maka semakin besar peluang pemuda tersebut untuk masuk pada kelompok pengeluaran teratas. Temuan lain melalui data Susenas 2025 juga menunjukkan bahwa akses dan keberhasilan pendidikan pada jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi lebih banyak dinikmati oleh pemuda dari kelompok ekonomi menengah dan atas, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelompok ekonomi terbawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

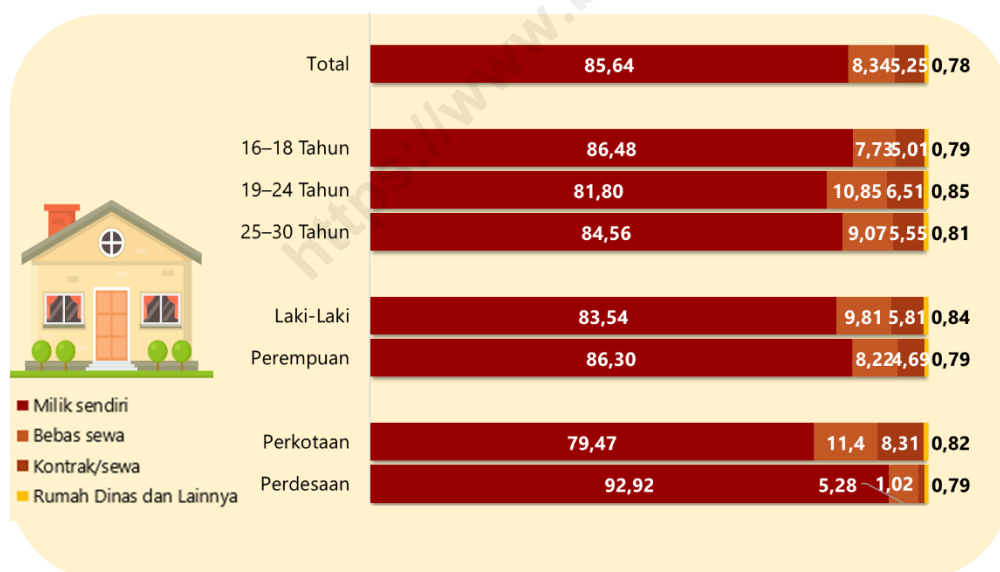
Gambar 6.3 Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Karakteristik, 2025

Berikutnya, pada Gambar 6.3 ditunjukkan bahwa lebih separuh pemuda Indonesia, tepatnya 52,57 persen, telah memiliki rekening tabungan. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pemuda perempuan tercatat memiliki tingkat kepemilikan rekening yang lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki. Perbedaan yang cukup mencolok juga terlihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal. Pemuda yang tinggal di daerah perkotaan memiliki akses dan kepemilikan rekening tabungan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan, 58,96 persen dibanding 42,21 persen.

Selain itu, terdapat pola yang konsisten terkait usia dan pendidikan. Semakin tinggi kelompok umur pemuda, semakin besar pula persentase yang memiliki rekening tabungan. Hal yang sama berlaku untuk jenjang pendidikan, pemuda dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak memiliki rekening tabungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor demografis dan sosial-ekonomi seperti jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, usia, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap akses ke layanan keuangan formal di kalangan pemuda.

6.2 Kondisi Rumah Tempat Tinggal Pemuda

Pada tahun 2025, sebagian besar pemuda Indonesia, sebesar 85,64 persen, menempati rumah yang dikategorikan sebagai milik sendiri. Artinya, rumah tersebut dimiliki oleh salah satu anggota rumah tangga yang di dalamnya terdapat pemuda. Selain itu, sekitar 8,34 persen pemuda tinggal di rumah bebas sewa. Rumah bebas sewa ini merujuk pada tempat tinggal yang diperoleh dari pihak lain, baik keluarga maupun bukan keluarga, termasuk orang tua yang tinggal terpisah, tanpa adanya kewajiban membayar sewa. Selain itu, adanya variasi dalam kepemilikan tempat tinggal di kalangan pemuda jika dilihat dari jenis kelamin dan klasifikasi wilayah. Secara umum, persentase pemuda laki-laki yang tinggal di rumah milik sendiri sedikit lebih sedikit dibandingkan pemuda perempuan. Sebaliknya, untuk jenis hunian kontrak/sewa maupun bebas sewa, pemuda perempuan tercatat memiliki persentase yang cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa pemuda laki-laki cenderung lebih banyak tinggal di hunian yang bukan milik sendiri.

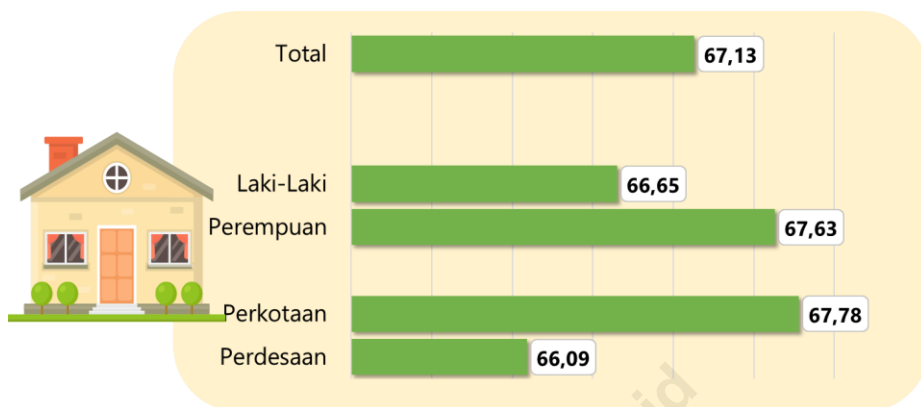


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.4 Persentase Pemuda Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal dan Karakteristik, 2025

Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi desa, terdapat perbedaan pola yang cukup mencolok, dimana persentase pemuda yang tinggal di perdesaan jauh

lebih banyak menempati rumah milik sendiri dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Sementara itu, pemuda yang tinggal di rumah kontrak/sewa maupun bebas sewa lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan daripada di perdesaan.

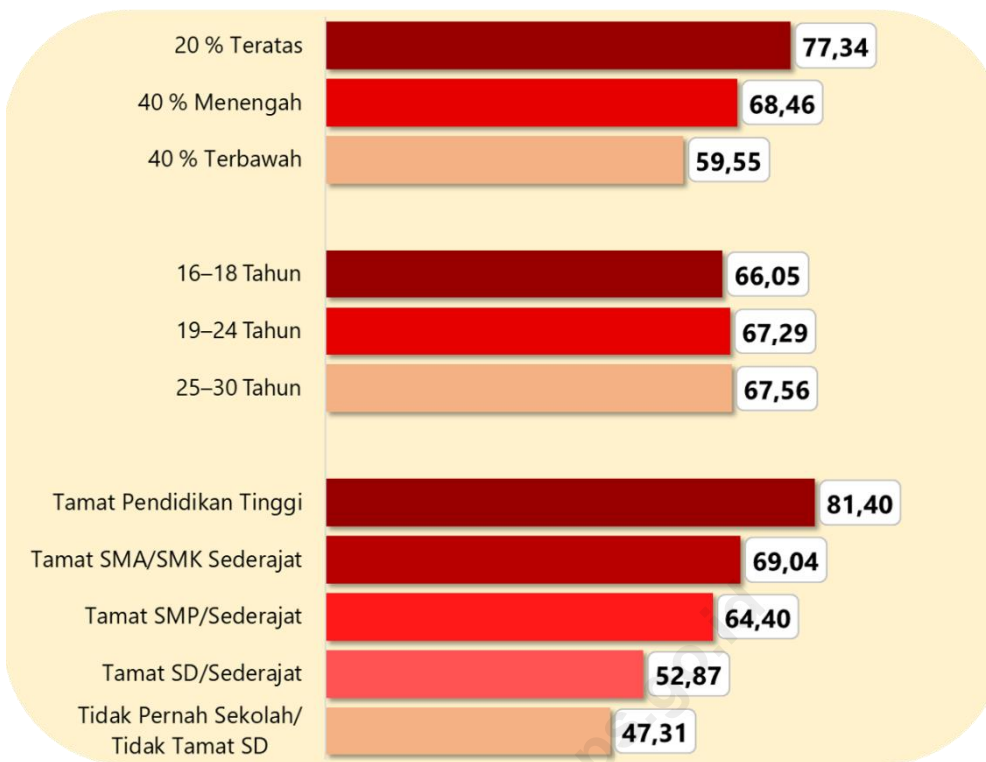


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.5 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik, 2025

Kondisi tempat tinggal memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Menurut *World Health Organization* (2018), perumahan yang sehat adalah hunian yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, serta memberikan rasa aman, nyaman, dan privasi. Berdasarkan data pada Gambar 6.5, lebih dari separuh pemuda Indonesia tinggal di rumah yang tergolong layak huni. Jika dilihat dari jenis kelamin, pemuda perempuan cenderung memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi dalam hal tinggal di rumah layak huni dibandingkan pemuda laki-laki. Perbedaan juga terlihat dari klasifikasi wilayah. Pemuda yang tinggal di perkotaan cenderung lebih banyak menempati rumah layak huni dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Selain itu, jenjang pendidikan turut memengaruhi kualitas tempat tinggal (Gambar 6.6). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula kemungkinan pemuda tinggal di rumah layak huni. Bahkan, pemuda lulusan pendidikan tinggi memiliki capaian hampir dari dua kali lipat dibandingkan mereka yang tidak pernah sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.6 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Klasifikasi Desa Tempat Tinggal dan Karakteristik, 2025

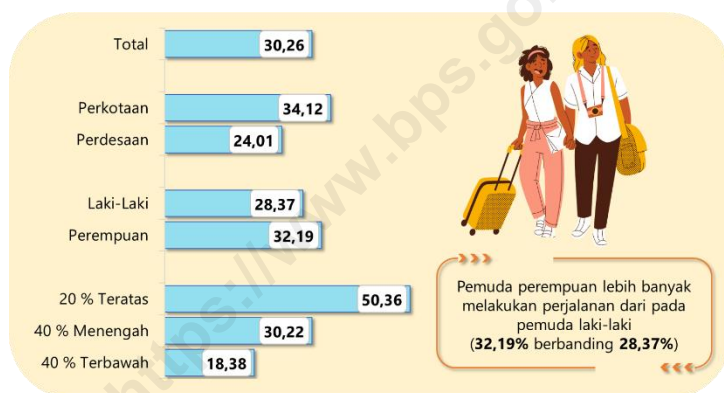
Pola yang sama terjadi pada persentase pemuda yang tinggal di rumah layak huni menurut distribusi pengeluaran (Gambar 6.6). Semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diukur melalui tingkat pengeluaran pemuda, maka semakin besar peluang pemuda untuk dapat tinggal di rumah layak huni. Sejalan dengan itu, jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya juga memberikan gambaran yang hampir sama, dimana pemuda yang berumur lebih dewasa lebih berpeluang untuk tinggal di rumah yang layak huni.

6.3 Kehidupan Sosial Pemuda

Pada tahun 2025, sekitar 30,26 persen pemuda tercatat melakukan perjalanan ke luar wilayah tempat tinggal mereka. Aktivitas bepergian ini merujuk pada kunjungan ke lokasi utama di luar kabupaten atau kota asal, yang bukan merupakan rutinitas harian, dan berlangsung kurang dari 12 bulan. Perjalanan tersebut dilakukan secara individu maupun dalam kelompok, dengan

durasi tinggal di lokasi tujuan minimal 6 jam, tidak termasuk waktu perjalanan, dan bukan untuk keperluan sekolah atau pekerjaan rutin.

Jika dilihat dari jenis kelamin, mobilitas pemuda laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang relatif serupa, meskipun pemuda perempuan sedikit lebih aktif dalam melakukan perjalanan. Sementara itu, perbedaan yang lebih mencolok terlihat dari klasifikasi wilayah tempat tinggal. Pemuda yang tinggal di perkotaan memiliki tingkat mobilitas lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan. Gambar 6.7 juga menunjukkan bahwa mobilitas pemuda memiliki pola yang konsisten jika dilihat dari distribusi pengeluaran pemuda, dimana semakin besar pengeluaran pemuda, maka semakin besar pula persentase mereka yang melakukan perjalanan.

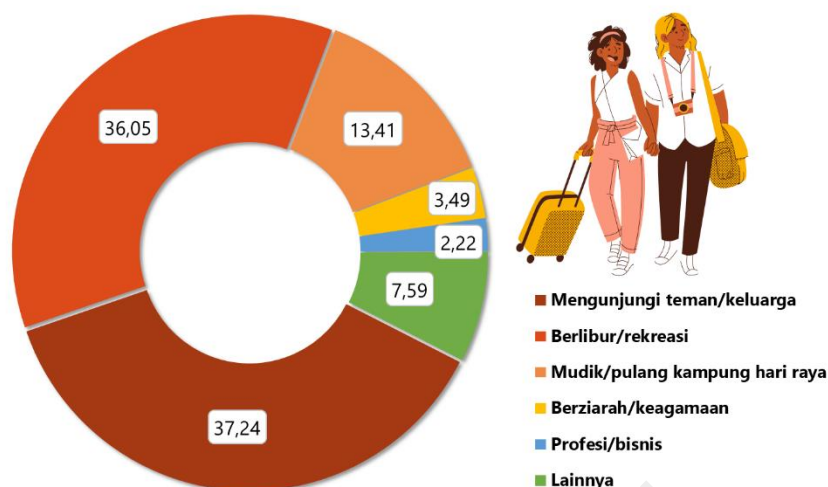


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.7 Persentase Pemuda yang Bepergian Menurut Karakteristik, 2025

Adapun tujuan utama bepergian yang tercatat dalam Gambar 6.8, sebagian besar pemuda melakukan perjalanan untuk mengunjungi teman atau keluarga, yaitu sebesar 37,24 persen. Disusul oleh tujuan berlibur atau rekreasi yang mencapai 36,05 persen. Selain itu, terdapat beragam maksud lain yang melatarbelakangi aktivitas bepergian pemuda, seperti keperluan kesehatan atau pengobatan, belanja, pelatihan atau pendidikan, urusan profesi atau bisnis, kegiatan olahraga dan kesenian, serta partisipasi dalam misi, pertemuan, kongres, atau seminar. Temuan ini mencerminkan bahwa mobilitas pemuda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia dan pendidikan, tetapi juga oleh kebutuhan

sosial, rekreasi, dan pengembangan diri.

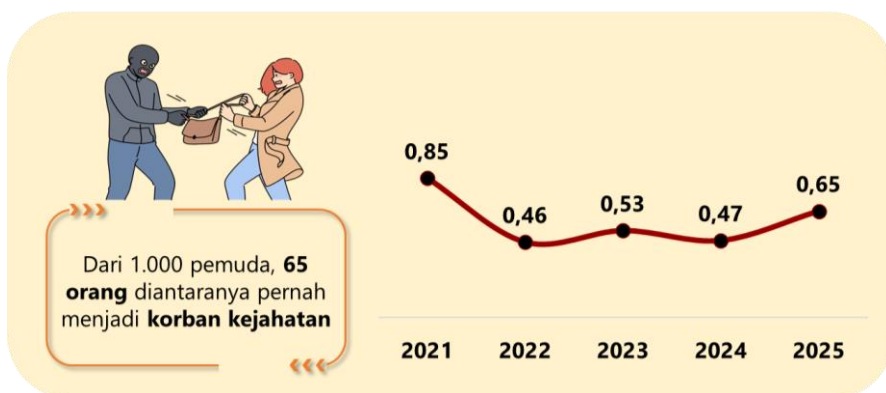


Catatan: Termasuk alasan lainnya antara lain: menghadiri misi/pertemuan/kongres/seminar/Training/pendidikan/pelatihan; kesehatan/berobat; olahraga/kesenian; belanja/shopping; dan alasan lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.8 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Maksud Utama Bepergian, 2025

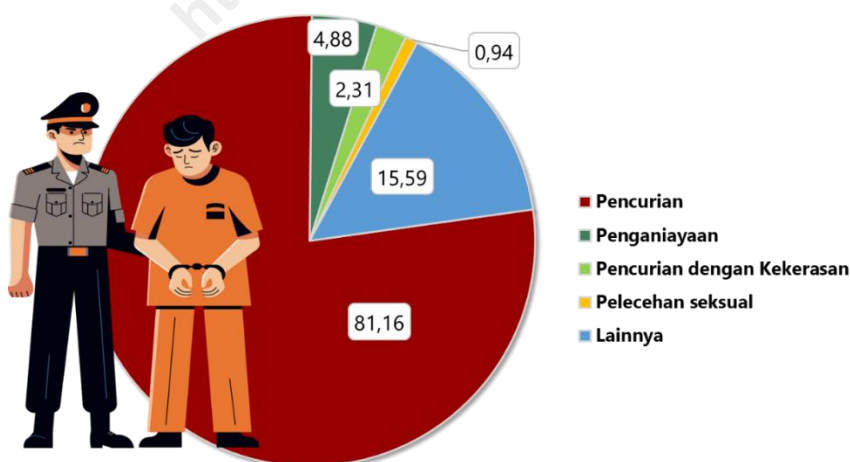
Pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, namun mereka juga rentan menjadi sasaran tindak kejahatan. Kejahatan, dalam bentuk apa pun, selalu menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil. Data dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 0,65 persen pemuda pernah mengalami tindak kejahatan. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2024 (lihat Gambar 6.9). Temuan ini menjadi pengingat penting bahwa perlindungan terhadap pemuda, baik dalam ruang fisik maupun digital, perlu terus diperkuat agar mereka dapat tumbuh dan berkontribusi dalam lingkungan yang aman dan mendukung.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025

Gambar 6.9 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2021–2025

Pada tahun 2025, dari seluruh pemuda yang tercatat pernah menjadi korban kejahatan, sebagian besar mengalami pencurian, yaitu sebesar 81,16 persen. Jenis kejahatan lainnya yang dialami pemuda mencakup penganiayaan (4,88 persen), pencurian disertai kekerasan (2,31 persen), dan pelecehan seksual (0,94 persen), sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 6.10. Data ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan bentuk kejahatan yang paling umum dialami oleh pemuda, sementara bentuk-bentuk kejahatan lainnya meskipun lebih kecil secara persentase, tetap menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan dan pencegahan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6.10 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2025

Tabel 6.1 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Karakteristik	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	20% Teratas	40% Menengah	40% Terbawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	21,66	41,83	36,51	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	21,54	42,43	36,03	100,00
Perempuan	21,78	41,21	37,00	100,00
Kelompok Umur				
16–18 Tahun	17,25	42,34	40,41	100,00
19–24 Tahun	22,16	41,93	35,91	100,00
25–30 Tahun	23,58	41,44	34,99	100,00
Status Disabilitas				
Nondisabilitas	21,75	41,84	36,41	100,00
Disabilitas	13,06	40,22	46,72	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan				
Tamat Pendidikan Tinggi	46,93	37,71	15,37	100,00
Tamat SMA/SMK	22,64	44,60	32,76	100,00
Sederajat				
Tamat SMP Sederajat	15,44	41,35	43,21	100,00
Tamat SD Sederajat	8,69	36,61	54,70	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	8,54	36,25	55,21	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	21,25	42,44	36,31	100,00
Perdesaan	20,91	41,55	37,55	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.2 Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	58,96	42,21	52,57
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	56,67	39,07	49,92
Perempuan	61,28	45,44	55,26
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	32,61	26,80	30,29
19–24 Tahun	62,40	41,29	54,55
25–30 Tahun	69,40	51,92	62,74
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	59,31	42,52	52,91
Disabilitas	21,53	13,30	18,09
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	92,27	84,10	90,16
Tamat SMA/SMK Sederajat	66,55	49,49	60,84
Tamat SMP Sederajat	39,63	34,39	37,37
Tamat SD Sederajat	30,08	23,93	26,73
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	14,75	13,00	13,68
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	80,40	56,58	74,76
40% Menengah	61,76	42,61	53,71
40% Terbawah	43,15	33,76	38,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.3 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025

Karakteristik	Kepemilikan Tempat Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	85,64	5,25	8,34	0,78	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	83,54	5,81	9,81	0,84	100,00
Perempuan	86,30	4,69	8,22	0,78	100,00
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	86,48	5,01	7,73	0,78	100,00
19–24 Tahun	81,80	6,51	10,85	0,85	100,00
25–30 Tahun	84,56	5,55	9,07	0,82	100,00
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	88,40	3,28	8,18	0,15	100,00
Disabilitas	86,58	4,73	7,67	1,01	100,00
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	83,21	6,44	9,50	0,85	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	85,23	5,06	9,03	0,68	100,00
Tamat SMP Sederajat	85,44	4,49	9,25	0,81	100,00
Tamat SD Sederajat	88,30	3,03	7,92	0,75	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	82,62	7,23	8,57	1,57	100,00
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	83,17	6,30	9,65	0,87	100,00
40% Menengah	87,41	3,63	8,68	0,28	100,00
40% Terbawah	84,60	5,53	9,06	0,81	100,00
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	79,47	8,31	11,40	0,82	100,00
Perdesaan	92,92	1,02	5,28	0,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.4 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	67,78	66,09	67,13
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	67,56	65,18	66,65
Perempuan	68,00	67,01	67,63
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	66,24	65,76	66,05
19–24 Tahun	68,15	65,84	67,29
25–30 Tahun	68,21	66,51	67,56
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	67,78	66,07	67,13
Disabilitas	67,46	67,55	67,50
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	81,69	80,57	81,40
Tamat SMA/SMK Sederajat	68,06	71,00	69,04
Tamat SMP Sederajat	64,24	64,60	64,40
Tamat SD Sederajat	53,06	52,71	52,87
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	57,18	41,05	47,31
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	79,46	76,54	77,34
40% Menengah	68,31	67,89	68,46
40% Terbawah	60,33	58,27	59,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.5 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	34,12	24,01	30,26
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	31,89	22,72	28,37
Perempuan	36,40	25,33	32,19
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	31,44	19,81	26,79
19–24 Tahun	33,01	23,34	29,41
25–30 Tahun	36,67	27,05	33,00
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	34,24	24,13	30,39
Disabilitas	21,21	12,61	17,62
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	50,41	44,17	48,80
Tamat SMA/SMK Sederajat	34,04	25,84	31,30
Tamat SMP Sederajat	30,04	20,89	26,10
Tamat SD Sederajat	20,69	18,00	19,22
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	17,99	11,77	14,19
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	56,09	36,33	50,36
40% Menengah	35,13	24,27	30,22
40% Terbawah	20,10	16,85	18,38

Catatan: Bepergian yang dimaksud adalah pada periode Januari–Desember 2024 keluar kabupaten/kota bukan secara rutin, minimal 6 jam di tempat tujuan, dan tidak untuk sekolah atau bekerja.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.6 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik dan Maksud Utama Bepergian, 2025

Karakteristik	Maksud Utama Bepergian				
	Mengunjungi Teman/Keluarga	Berlibur/Rekreasi	Mudik/Pulang Kampung Hari Raya	Berziarah/Keagamaan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	37,24	36,05	13,41	3,49	9,81
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	38,32	35,99	13,46	3,44	8,79
Perempuan	36,75	37,10	14,04	3,68	8,43
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	36,62	36,98	13,26	3,37	9,77
19–24 Tahun	39,34	34,67	13,33	3,45	9,21
25–30 Tahun	37,78	36,11	13,42	3,47	9,22
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	43,02	20,03	15,60	3,32	18,03
Disabilitas	35,52	37,65	11,82	2,79	12,22
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	37,07	36,88	14,24	3,27	8,54
Tamat SMA/SMK Sederajat	38,35	35,42	13,79	3,85	8,58
Tamat SMP Sederajat	48,45	27,96	10,28	5,14	8,16
Tamat SD Sederajat	43,90	25,59	14,68	5,11	10,72
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	33,28	40,07	15,89	2,39	8,36
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	38,17	35,63	13,55	3,79	8,85
40% Menengah	44,49	30,15	9,23	4,60	11,53
40% Terbawah	37,81	36,02	13,44	3,46	9,27
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	35,98	36,52	17,30	3,06	7,13
Perdesaan	42,02	34,85	4,55	4,39	14,20

Catatan: Lainnya termasuk belanja/*shopping*, pendidikan/pelatihan, kesehatan/berobat, profesi/bisnis, olahraga/kesenian, kongres/seminar, dsb

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.7 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,76	0,47	0,65
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	0,87	0,45	0,71
Perempuan	0,66	0,49	0,59
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	0,58	0,28	0,46
19–24 Tahun	0,78	0,41	0,64
25–30 Tahun	0,84	0,64	0,76
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	0,76	0,47	0,65
Disabilitas	0,59	0,80	0,67
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	0,59	0,50	0,57
Tamat SMA/SMK Sederajat	0,90	0,50	0,77
Tamat SMP Sederajat	0,66	0,44	0,57
Tamat SD Sederajat	0,60	0,46	0,53
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	0,95	0,52	0,68
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	0,78	0,73	0,83
40% Menengah	0,80	0,46	0,64
40% Terbawah	0,71	0,34	0,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.8 Persentase Pemuda yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Karakteristik dan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2025

Karakteristik	Jenis Kejahatan				
	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan Kekerasan	Pelecehan Seksual	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	81,16	4,88	2,31	0,94	15,59
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	83,47	6,88	2,70	0,18	12,45
Perempuan	78,35	2,45	1,82	1,87	19,40
Kelompok Umur					
16–18 Tahun	80,37	9,71	3,25	0,90	11,60
19–24 Tahun	79,22	3,37	1,08	1,39	20,38
25–30 Tahun	83,05	4,55	3,03	0,58	12,89
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	81,58	4,91	2,33	0,67	15,23
Disabilitas	39,95	1,96	–	27,52	51,32
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	77,54	1,49	2,10	0,12	25,19
Tamat SMA/SMK Sederajat	80,02	4,76	1,93	0,76	16,42
Tamat SMP Sederajat	83,68	5,49	2,31	0,97	11,19
Tamat SD Sederajat	93,11	4,43	6,32	0,50	9,67
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	57,87	15,95	0,22	9,37	25,69
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	75,21	3,60	2,27	0,52	24,43
40% Menengah	83,46	5,30	2,28	0,76	12,09
40% Terbawah	83,34	5,45	2,37	1,55	12,46
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	81,07	4,51	2,12	0,73	16,45
Perdesaan	81,39	5,84	2,81	1,51	13,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.9 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melaporkan ke Polisi Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025

Karakteristik	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	28,83	22,06	26,96
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	30,22	19,19	27,51
Perempuan	26,97	24,79	26,28
Kelompok Umur			
16–18 Tahun	25,38	14,58	22,77
19–24 Tahun	26,90	25,45	26,56
25–30 Tahun	31,91	21,81	28,67
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	29,01	21,47	26,94
Disabilitas	3,58	54,43	28,68
Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	40,90	17,84	35,63
Tamat SMA/SMK Sederajat	31,09	22,67	29,25
Tamat SMP Sederajat	20,29	24,38	21,65
Tamat SD Sederajat	33,24	9,25	21,72
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	–	41,50	19,13
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	34,30	27,83	27,52
40% Menengah	24,42	15,18	25,25
40% Terbawah	31,14	25,44	28,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.10 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	20% Teratas	40% Menengah	40% Terbawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,78	39,82	39,40	100,00
Sumatera Utara	21,22	42,89	35,89	100,00
Sumatera Barat	21,25	40,16	38,59	100,00
Riau	20,91	43,38	35,71	100,00
Jambi	19,27	42,00	38,73	100,00
Sumatera Selatan	19,68	43,23	37,09	100,00
Bengkulu	21,68	43,60	34,72	100,00
Lampung	21,30	44,18	34,52	100,00
Kep. Bangka Belitung	19,79	41,49	38,72	100,00
Kepulauan Riau	19,30	42,28	38,42	100,00
DKI Jakarta	18,86	43,67	37,47	100,00
Jawa Barat	21,73	42,18	36,08	100,00
Jawa Tengah	22,28	42,63	35,09	100,00
DI Yogyakarta	25,98	39,48	34,54	100,00
Jawa Timur	22,01	42,47	35,52	100,00
Banten	20,69	44,17	35,14	100,00
Bali	23,66	41,47	34,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,81	42,26	35,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,08	39,63	40,29	100,00
Kalimantan Barat	19,45	40,04	40,51	100,00
Kalimantan Tengah	20,38	41,48	38,14	100,00
Kalimantan Selatan	20,34	42,28	37,38	100,00
Kalimantan Timur	19,38	41,58	39,04	100,00
Kalimantan Utara	17,37	41,77	40,87	100,00
Sulawesi Utara	16,96	41,46	41,58	100,00
Sulawesi Tengah	19,00	40,12	40,88	100,00
Sulawesi Selatan	21,60	41,04	37,36	100,00
Sulawesi Tenggara	21,61	41,14	37,26	100,00
Gorontalo	19,15	43,63	37,22	100,00
Sulawesi Barat	16,52	44,06	39,42	100,00
Maluku	19,30	41,62	39,07	100,00
Maluku Utara	20,71	38,89	40,41	100,00
Papua Barat	15,88	39,59	44,53	100,00
Papua Barat Daya	17,27	38,63	44,10	100,00
Papua	19,51	38,28	42,22	100,00
Papua Selatan	18,19	32,52	49,29	100,00
Papua Tengah	16,60	42,06	41,34	100,00
Papua Pegunungan	5,86 ¹	32,78 ¹	61,37	100,00
Indonesia	21,25	42,44	36,31	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.11 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	20% Teratas	40% Menengah	40% Terbawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	21,01	40,27	38,72	100,00
Sumatera Utara	20,41	44,44	35,14	100,00
Sumatera Barat	21,99	42,50	35,52	100,00
Riau	20,76	39,55	39,69	100,00
Jambi	21,04	40,63	38,33	100,00
Sumatera Selatan	21,19	41,39	37,42	100,00
Bengkulu	20,82	40,27	38,90	100,00
Lampung	20,90	42,66	36,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	20,59	40,11	39,30	100,00
Kepulauan Riau	22,01	37,35	40,65	100,00
DKI Jakarta	—	—	—	—
Jawa Barat	21,56	39,94	38,50	100,00
Jawa Tengah	22,45	41,74	35,80	100,00
DI Yogyakarta	21,98	44,20	33,81	100,00
Jawa Timur	22,23	40,77	37,00	100,00
Banten	20,96	38,83	40,21	100,00
Bali	22,80	38,37	38,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,06	40,85	38,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,23	41,24	38,53	100,00
Kalimantan Barat	20,29	42,39	37,32	100,00
Kalimantan Tengah	19,55	41,97	38,48	100,00
Kalimantan Selatan	21,59	40,00	38,41	100,00
Kalimantan Timur	18,77	39,77	41,45	100,00
Kalimantan Utara	19,50	39,72	40,77	100,00
Sulawesi Utara	16,19	39,74	44,08	100,00
Sulawesi Tengah	19,55	40,50	39,95	100,00
Sulawesi Selatan	20,43	41,03	38,54	100,00
Sulawesi Tenggara	19,79	41,57	38,64	100,00
Gorontalo	18,53	41,42	40,04	100,00
Sulawesi Barat	20,26	40,29	39,45	100,00
Maluku	17,67	40,92	41,40	100,00
Maluku Utara	18,86	40,17	40,97	100,00
Papua Barat	15,99	41,45	42,55	100,00
Papua Barat Daya	16,77	40,76	42,46	100,00
Papua	15,82	39,56	44,62	100,00
Papua Selatan	13,01	43,58	43,41	100,00
Papua Tengah	17,70	40,71	41,59	100,00
Papua Pegunungan	17,18	39,37	43,45	100,00
Indonesia	20,91	41,55	37,55	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.12 Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	20% Teratas	40% Menengah	40% Terbawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	21,86	41,71	36,43	100,00
Sumatera Utara	21,24	45,58	33,18	100,00
Sumatera Barat	21,38	43,54	35,08	100,00
Riau	21,77	41,74	36,48	100,00
Jambi	18,63	44,65	36,72	100,00
Sumatera Selatan	21,68	41,30	37,01	100,00
Bengkulu	22,18	41,90	35,92	100,00
Lampung	21,63	43,40	34,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	19,55	41,87	38,58	100,00
Kepulauan Riau	18,48	44,24	37,28	100,00
DKI Jakarta	16,62	45,44	37,94	100,00
Jawa Barat	21,60	41,66	36,74	100,00
Jawa Tengah	22,40	43,04	34,56	100,00
DI Yogyakarta	26,88	39,90	33,22	100,00
Jawa Timur	22,84	41,80	35,36	100,00
Banten	22,06	42,47	35,47	100,00
Bali	25,28	41,19	33,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,90	42,48	35,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	21,06	42,89	36,06	100,00
Kalimantan Barat	20,62	43,30	36,08	100,00
Kalimantan Tengah	20,26	41,35	38,38	100,00
Kalimantan Selatan	20,92	41,63	37,45	100,00
Kalimantan Timur	18,01	41,97	40,02	100,00
Kalimantan Utara	17,73	38,16	44,11	100,00
Sulawesi Utara	16,75	40,49	42,76	100,00
Sulawesi Tengah	19,61	40,04	40,34	100,00
Sulawesi Selatan	21,47	42,60	35,93	100,00
Sulawesi Tenggara	21,29	41,38	37,33	100,00
Gorontalo	20,18	42,47	37,35	100,00
Sulawesi Barat	19,89	41,84	38,27	100,00
Maluku	19,63	41,83	38,53	100,00
Maluku Utara	20,39	40,02	39,59	100,00
Papua Barat	16,00	40,53	43,48	100,00
Papua Barat Daya	17,55	40,29	42,15	100,00
Papua	19,40	41,47	39,13	100,00
Papua Selatan	15,88	37,07	47,05	100,00
Papua Tengah	17,31	38,81	43,88	100,00
Papua Pegunungan	15,69	39,40	44,91	100,00
Indonesia	21,54	42,43	36,03	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.13 Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	20% Teratas	40% Menengah	40% Terbawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	19,74	39,09	41,16	100,00
Sumatera Utara	20,25	43,09	36,65	100,00
Sumatera Barat	21,45	39,92	38,63	100,00
Riau	20,16	40,33	39,51	100,00
Jambi	20,12	39,51	40,37	100,00
Sumatera Selatan	20,84	41,41	37,74	100,00
Bengkulu	20,64	40,53	38,82	100,00
Lampung	20,65	41,98	37,37	100,00
Kep. Bangka Belitung	20,20	39,77	40,02	100,00
Kepulauan Riau	20,90	41,04	38,05	100,00
DKI Jakarta	20,96	42,01	37,03	100,00
Jawa Barat	22,58	41,38	36,05	100,00
Jawa Tengah	22,68	40,97	36,35	100,00
DI Yogyakarta	26,55	38,59	34,86	100,00
Jawa Timur	22,27	41,61	36,12	100,00
Banten	20,69	43,71	35,60	100,00
Bali	24,17	39,94	35,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,32	40,33	38,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,65	42,43	37,92	100,00
Kalimantan Barat	20,07	40,19	39,74	100,00
Kalimantan Tengah	20,37	41,07	38,56	100,00
Kalimantan Selatan	21,79	40,77	37,44	100,00
Kalimantan Timur	20,54	39,48	39,98	100,00
Kalimantan Utara	19,36	41,94	38,70	100,00
Sulawesi Utara	17,62	40,27	42,11	100,00
Sulawesi Tengah	20,50	40,38	39,12	100,00
Sulawesi Selatan	21,17	40,13	38,70	100,00
Sulawesi Tenggara	20,29	41,98	37,73	100,00
Gorontalo	17,61	42,06	40,32	100,00
Sulawesi Barat	20,02	38,33	41,65	100,00
Maluku	19,84	40,15	40,01	100,00
Maluku Utara	19,93	39,82	40,25	100,00
Papua Barat	15,22	40,04	44,74	100,00
Papua Barat Daya	16,83	39,77	43,40	100,00
Papua	16,98	38,00	45,02	100,00
Papua Selatan	15,64	38,70	45,67	100,00
Papua Tengah	17,75	38,94	43,31	100,00
Papua Pegunungan	15,32	41,30	43,37	100,00
Indonesia	21,78	41,21	37,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.14 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Provinsi	Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga			Jumlah
	20% Teratas	40% Menengah	40% Terbawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	20,80	40,40	38,80	100,00
Sumatera Utara	20,76	44,37	34,87	100,00
Sumatera Barat	21,41	41,77	36,82	100,00
Riau	20,99	41,06	37,95	100,00
Jambi	19,37	42,10	38,53	100,00
Sumatera Selatan	21,27	41,36	37,37	100,00
Bengkulu	21,42	41,23	37,35	100,00
Lampung	21,15	42,70	36,16	100,00
Kep. Bangka Belitung	19,87	40,85	39,28	100,00
Kepulauan Riau	19,70	42,63	37,67	100,00
DKI Jakarta	18,86	43,67	37,47	100,00
Jawa Barat	22,08	41,52	36,40	100,00
Jawa Tengah	22,54	42,01	35,45	100,00
DI Yogyakarta	26,71	39,23	34,06	100,00
Jawa Timur	22,55	41,71	35,74	100,00
Banten	21,38	43,08	35,53	100,00
Bali	24,74	40,58	34,68	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,61	41,40	36,99	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,36	42,66	36,98	100,00
Kalimantan Barat	20,35	41,75	37,90	100,00
Kalimantan Tengah	20,32	41,21	38,47	100,00
Kalimantan Selatan	21,35	41,21	37,44	100,00
Kalimantan Timur	19,25	40,75	40,00	100,00
Kalimantan Utara	18,53	40,00	41,47	100,00
Sulawesi Utara	17,18	40,38	42,44	100,00
Sulawesi Tengah	20,05	40,21	39,73	100,00
Sulawesi Selatan	21,32	41,35	37,33	100,00
Sulawesi Tenggara	20,79	41,68	37,53	100,00
Gorontalo	18,93	42,27	38,80	100,00
Sulawesi Barat	19,95	40,10	39,95	100,00
Maluku	19,73	40,99	39,27	100,00
Maluku Utara	20,16	39,92	39,92	100,00
Papua Barat	15,62	40,29	44,08	100,00
Papua Barat Daya	17,21	40,05	42,74	100,00
Papua	18,29	39,87	41,83	100,00
Papua Selatan	15,77	37,85	46,38	100,00
Papua Tengah	17,51	38,87	43,62	100,00
Papua Pegunungan	15,51	40,33	44,16	100,00
Indonesia	21,66	41,83	36,51	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.15 Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	60,30	39,64	44,38	50,16	47,27
Sumatera Utara	46,97	35,36	39,90	44,88	42,32
Sumatera Barat	59,41	46,02	45,79	61,37	53,43
Riau	56,20	38,02	45,09	46,33	45,69
Jambi	55,58	37,11	39,69	47,18	43,41
Sumatera Selatan	56,45	33,32	40,27	44,73	42,47
Bengkulu	60,40	42,98	44,37	54,23	49,24
Lampung	51,58	39,26	40,62	46,97	43,77
Kep. Bangka Belitung	50,38	36,14	41,63	47,55	44,51
Kepulauan Riau	67,19	46,96	66,52	65,67	66,09
DKI Jakarta	77,45	–	76,61	78,23	77,45
Jawa Barat	57,17	47,33	54,12	57,02	55,55
Jawa Tengah	63,62	56,96	55,74	65,72	60,69
DI Yogyakarta	76,32	64,69	72,60	75,67	74,18
Jawa Timur	56,15	43,85	48,62	53,84	51,22
Banten	56,75	31,18	52,82	52,60	52,71
Bali	68,54	52,92	65,82	64,19	65,02
Nusa Tenggara Barat	50,39	37,01	41,30	47,40	44,37
Nusa Tenggara Timur	55,03	35,15	37,78	44,76	41,25
Kalimantan Barat	54,76	37,82	42,92	46,15	44,53
Kalimantan Tengah	54,83	37,92	45,57	45,73	45,65
Kalimantan Selatan	53,54	44,64	47,34	51,32	49,30
Kalimantan Timur	74,10	58,49	70,05	69,09	69,58
Kalimantan Utara	61,91	58,67	56,93	64,89	60,82
Sulawesi Utara	49,58	37,13	36,62	52,91	44,52
Sulawesi Tengah	50,56	35,58	35,68	46,43	41,07
Sulawesi Selatan	58,60	47,63	47,69	58,90	53,33
Sulawesi Tenggara	58,93	51,32	50,25	58,85	54,58
Gorontalo	46,04	37,57	36,38	47,30	41,71
Sulawesi Barat	55,01	43,16	39,38	51,67	45,48
Maluku	49,60	25,13	31,76	42,64	37,18
Maluku Utara	53,33	26,35	32,33	37,64	34,95
Papua Barat	51,97	34,64	38,58	41,97	40,21
Papua Barat Daya	54,37	42,24	46,10	53,20	49,43
Papua	56,96	26,94	44,47	47,32	45,78
Papua Selatan	51,83	15,67	26,38	31,00	28,60
Papua Tengah	50,58	8,83	18,66	16,53	17,69
Papua Pegunungan	34,60 ¹	6,92	10,92	6,44	8,73
Indonesia	58,96	42,21	49,92	55,26	52,57

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.16 Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	80,18	8,36	10,22	1,24	100,00
Sumatera Utara	67,68	14,09	14,89	3,34	100,00
Sumatera Barat	65,67	14,24	19,67	0,42 ¹	100,00
Riau	70,90	16,79	10,78	1,53	100,00
Jambi	82,67	9,83	6,60	0,90 ¹	100,00
Sumatera Selatan	77,27	7,78	14,43	0,51 ¹	100,00
Bengkulu	81,10	8,50	10,37	NA	100,00
Lampung	84,10	5,92	9,16	0,83 ¹	100,00
Kep. Bangka Belitung	85,94	5,27	7,46	1,33 ¹	100,00
Kepulauan Riau	73,14	18,87	4,63	3,36 ¹	100,00
DKI Jakarta	55,97	19,87	23,19	0,98	100,00
Jawa Barat	80,13	7,16	12,35	0,36	100,00
Jawa Tengah	87,31	2,93	9,59	0,16	100,00
DI Yogyakarta	79,06	10,25	10,29	0,40 ¹	100,00
Jawa Timur	86,61	4,45	8,65	0,29 ¹	100,00
Banten	85,53	8,00	5,64	0,84 ¹	100,00
Bali	81,99	14,57	3,22	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,10	2,96	9,63	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	82,93	8,17	8,51	0,39 ¹	100,00
Kalimantan Barat	87,15	3,33	9,22	NA	100,00
Kalimantan Tengah	78,04	10,09	9,29	2,58	100,00
Kalimantan Selatan	78,31	7,49	13,09	1,11 ¹	100,00
Kalimantan Timur	73,63	13,31	11,32	1,73	100,00
Kalimantan Utara	76,66	11,15	10,06	2,13 ¹	100,00
Sulawesi Utara	73,78	4,70	20,07	1,44 ¹	100,00
Sulawesi Tengah	84,06	6,87	8,29	NA	100,00
Sulawesi Selatan	81,78	4,37	12,38	1,47 ¹	100,00
Sulawesi Tenggara	84,73	5,55	9,72	–	100,00
Gorontalo	79,86	2,85 ¹	16,96	NA	100,00
Sulawesi Barat	93,82	3,07 ¹	2,80 ¹	NA	100,00
Maluku	81,24	5,15	11,02	NA	100,00
Maluku Utara	87,18	3,29	8,96	NA	100,00
Papua Barat	74,96	9,91	11,69	3,44 ¹	100,00
Papua Barat Daya	79,46	11,52	6,37	2,65 ¹	100,00
Papua	74,82	12,13	7,84	5,22	100,00
Papua Selatan	67,76	6,69 ¹	11,16 ¹	14,39	100,00
Papua Tengah	68,12	21,59	9,56	0,72 ¹	100,00
Papua Pegunungan	77,25	NA	NA	–	100,00
Indonesia	79,47	8,31	11,40	0,82	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.17 Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	90,94	1,87	6,86	0,33 ¹	100,00
Sumatera Utara	81,75	4,16	10,06	4,03	100,00
Sumatera Barat	81,99	2,68	14,73	0,59	100,00
Riau	85,68	3,67	6,12	4,53	100,00
Jambi	91,74	1,09	6,18	0,99	100,00
Sumatera Selatan	90,51	1,35	7,68	0,46 ¹	100,00
Bengkulu	94,75	1,19 ¹	3,41	0,65 ¹	100,00
Lampung	95,60	0,70 ¹	3,64	NA	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,86	1,20 ¹	3,17	1,78 ¹	100,00
Kepulauan Riau	93,84	1,43 ¹	4,12 ¹	NA	100,00
DKI Jakarta	—	—	—	—	—
Jawa Barat	92,67	0,92 ¹	6,38	NA	100,00
Jawa Tengah	95,35	0,16 ¹	4,49	—	100,00
DI Yogyakarta	94,95	—	5,05 ¹	—	100,00
Jawa Timur	96,07	0,28 ¹	3,59	NA	100,00
Banten	95,29	NA	4,71 ¹	—	100,00
Bali	95,04	NA	4,32	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	96,22	0,19 ¹	3,54	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,98	0,40 ¹	2,44	0,18 ¹	100,00
Kalimantan Barat	96,20	0,44 ¹	3,06	0,31 ¹	100,00
Kalimantan Tengah	87,34	1,12 ¹	4,93	6,60	100,00
Kalimantan Selatan	89,36	1,67 ¹	6,90	2,07	100,00
Kalimantan Timur	90,82	2,05 ¹	5,46	1,66 ¹	100,00
Kalimantan Utara	93,14	1,62 ¹	4,80	0,43 ¹	100,00
Sulawesi Utara	90,39	0,55 ¹	8,98	NA	100,00
Sulawesi Tengah	93,35	0,75 ¹	5,53	0,38 ¹	100,00
Sulawesi Selatan	95,63	0,17 ¹	4,07	0,13 ¹	100,00
Sulawesi Tenggara	96,97	0,33 ¹	2,65	NA	100,00
Gorontalo	92,51	NA	7,25	0,14 ¹	100,00
Sulawesi Barat	95,32	0,48 ¹	2,46	1,75	100,00
Maluku	93,46	NA	6,11	0,21 ¹	100,00
Maluku Utara	95,66	1,15 ¹	3,00	NA	100,00
Papua Barat	92,61	0,85 ¹	5,02	1,52 ¹	100,00
Papua Barat Daya	94,58	1,22 ¹	1,99 ¹	2,21 ¹	100,00
Papua	95,06	1,29 ¹	1,88 ¹	1,78 ¹	100,00
Papua Selatan	88,25	NA	10,55	NA	100,00
Papua Tengah	98,48	NA	1,16 ¹	—	100,00
Papua Pegunungan	99,30	0,32 ¹	NA	0,38 ¹	100,00
Indonesia	92,92	1,02	5,28	0,78	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.18 Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	88,46	3,89	7,01	0,64	100,00
Sumatera Utara	74,53	10,07	11,89	3,52	100,00
Sumatera Barat	74,85	8,42	16,31	0,43	100,00
Riau	81,27	8,42	7,48	2,83	100,00
Jambi	89,72	3,33	6,00	0,95	100,00
Sumatera Selatan	85,94	4,03	9,58	0,45 ¹	100,00
Bengkulu	90,58	3,48	5,55	0,39 ¹	100,00
Lampung	91,99	2,55	5,20	0,26 ¹	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,48	3,75	5,57	1,20 ¹	100,00
Kepulauan Riau	77,82	15,94	4,46	1,78 ¹	100,00
DKI Jakarta	58,22	18,47	22,23	1,08 ¹	100,00
Jawa Barat	83,20	5,99	10,53	0,28 ¹	100,00
Jawa Tengah	91,41	1,62	6,83	0,13 ¹	100,00
DI Yogyakarta	83,38	7,30	8,78	NA	100,00
Jawa Timur	91,06	2,52	6,16	0,25 ¹	100,00
Banten	87,83	6,60	4,64	0,93 ¹	100,00
Bali	85,77	11,00	3,13	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	92,46	1,77	5,59	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,92	2,59	4,26	0,22 ¹	100,00
Kalimantan Barat	93,59	1,14	4,99	0,29 ¹	100,00
Kalimantan Tengah	84,02	5,33	6,09	4,56	100,00
Kalimantan Selatan	85,17	4,69	8,78	1,35 ¹	100,00
Kalimantan Timur	79,91	9,22	9,40	1,47	100,00
Kalimantan Utara	83,89	6,78	7,76	1,58 ¹	100,00
Sulawesi Utara	82,23	2,84	14,13	0,80 ¹	100,00
Sulawesi Tengah	91,80	2,24	5,44	0,53 ¹	100,00
Sulawesi Selatan	89,78	2,27	7,33	0,62 ¹	100,00
Sulawesi Tenggara	92,54	2,95	4,49	NA	100,00
Gorontalo	88,36	1,36 ¹	10,16	NA	100,00
Sulawesi Barat	95,12	0,85 ¹	2,58	1,45	100,00
Maluku	87,69	2,58 ¹	8,12	NA	100,00
Maluku Utara	93,51	2,24 ¹	3,97	NA	100,00
Papua Barat	87,67	4,04	6,34	1,95 ¹	100,00
Papua Barat Daya	86,82	7,51	3,23	2,44 ¹	100,00
Papua	81,61	8,41	6,31	3,67	100,00
Papua Selatan	80,03	2,73 ¹	11,13	6,11	100,00
Papua Tengah	93,48	4,02	2,35 ¹	NA	100,00
Papua Pegunungan	96,86	NA	NA	NA	100,00
Indonesia	85,64	5,25	8,34	0,78	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.19 Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	85,48	4,64	9,19	0,69	100,00
Sumatera Utara	72,04	10,16	14,08	3,72	100,00
Sumatera Barat	71,00	9,76	18,67	0,57	100,00
Riau	77,50	10,05	8,73	3,72	100,00
Jambi	87,56	4,82	6,65	0,97 ¹	100,00
Sumatera Selatan	84,60	3,76	11,14	0,51 ¹	100,00
Bengkulu	89,10	4,16	6,28	0,47 ¹	100,00
Lampung	90,77	2,66	6,13	0,43 ¹	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,92	3,43	5,81	1,84 ¹	100,00
Kepulauan Riau	70,76	19,87	4,74	4,63 ¹	100,00
DKI Jakarta	53,86	21,18	24,08	0,89 ¹	100,00
Jawa Barat	81,14	6,29	12,23	0,34 ¹	100,00
Jawa Tengah	90,26	1,81	7,88	0,05 ¹	100,00
DI Yogyakarta	80,67	9,36	9,84	NA	100,00
Jawa Timur	89,73	3,02	7,09	0,15 ¹	100,00
Banten	86,29	6,88	6,36	0,47 ¹	100,00
Bali	84,04	11,82	3,83	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,96	1,67	8,17	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,41	2,98	4,34	0,26 ¹	100,00
Kalimantan Barat	91,63	2,03	6,01	NA	100,00
Kalimantan Tengah	82,13	5,10	7,79	4,98	100,00
Kalimantan Selatan	81,93	4,74	11,54	1,79	100,00
Kalimantan Timur	77,24	10,93	9,86	1,97	100,00
Kalimantan Utara	80,51	9,13	8,82	1,54 ¹	100,00
Sulawesi Utara	78,72	3,21	17,09	0,98 ¹	100,00
Sulawesi Tengah	88,10	3,74	7,63	0,53 ¹	100,00
Sulawesi Selatan	87,09	2,43	9,44	1,03 ¹	100,00
Sulawesi Tenggara	90,92	2,18	6,86	NA	100,00
Gorontalo	84,19	1,53 ¹	13,92	0,36 ¹	100,00
Sulawesi Barat	94,92	1,12 ¹	2,48	1,48	100,00
Maluku	87,19	2,71 ¹	8,94	NA	100,00
Maluku Utara	92,39	1,40	5,86	0,34 ¹	100,00
Papua Barat	86,15	3,45	8,06	2,34 ¹	100,00
Papua Barat Daya	84,24	7,13	6,12	2,51 ¹	100,00
Papua	83,23	7,72	4,80	4,25	100,00
Papua Selatan	81,88	3,31 ¹	10,39	4,42 ¹	100,00
Papua Tengah	90,31	5,87	3,66	NA	100,00
Papua Pegunungan	98,90	NA	NA	NA	100,00
Indonesia	83,54	5,81	9,81	0,84	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.20 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Status Kepemilikan Rumah Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	86,96	4,27	8,10	0,67	100,00
Sumatera Utara	73,32	10,11	12,95	3,62	100,00
Sumatera Barat	72,96	9,08	17,47	0,50	100,00
Riau	79,44	9,21	8,09	3,26	100,00
Jambi	88,65	4,07	6,32	0,96	100,00
Sumatera Selatan	85,28	3,89	10,35	0,48	100,00
Bengkulu	89,85	3,81	5,91	0,43 ¹	100,00
Lampung	91,39	2,61	5,66	0,35 ¹	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,21	3,59	5,69	1,51	100,00
Kepulauan Riau	74,26	17,92	4,60	3,21 ¹	100,00
DKI Jakarta	55,97	19,87	23,19	0,98	100,00
Jawa Barat	82,18	6,14	11,37	0,31	100,00
Jawa Tengah	90,84	1,71	7,35	0,09	100,00
DI Yogyakarta	81,99	8,36	9,32	0,32 ¹	100,00
Jawa Timur	90,40	2,77	6,62	0,20	100,00
Banten	87,07	6,73	5,49	0,70 ¹	100,00
Bali	84,92	11,40	3,47	NA	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,20	1,72	6,89	NA	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,67	2,79	4,30	0,24 ¹	100,00
Kalimantan Barat	92,62	1,58	5,50	0,31 ¹	100,00
Kalimantan Tengah	83,09	5,22	6,93	4,76	100,00
Kalimantan Selatan	83,58	4,72	10,14	1,57	100,00
Kalimantan Timur	78,61	10,06	9,62	1,71	100,00
Kalimantan Utara	82,24	7,93	8,28	1,56 ¹	100,00
Sulawesi Utara	80,53	3,02	15,57	0,89 ¹	100,00
Sulawesi Tengah	89,95	2,99	6,54	0,53 ¹	100,00
Sulawesi Selatan	88,43	2,35	8,39	0,83 ¹	100,00
Sulawesi Tenggara	91,73	2,56	5,68	NA	100,00
Gorontalo	86,32	1,45 ¹	12,00	0,23 ¹	100,00
Sulawesi Barat	95,02	0,98 ¹	2,53	1,46	100,00
Maluku	87,44	2,65	8,53	NA	100,00
Maluku Utara	92,96	1,83	4,90	0,31 ¹	100,00
Papua Barat	86,94	3,76	7,16	2,13	100,00
Papua Barat Daya	85,61	7,33	4,59	2,47 ¹	100,00
Papua	82,36	8,09	5,62	3,94	100,00
Papua Selatan	80,92	3,01	10,77	5,30	100,00
Papua Tengah	92,04	4,86	2,95	0,15 ¹	100,00
Papua Pegunungan	97,85	NA	NA	0,35 ¹	100,00
Indonesia	84,60	5,53	9,06	0,81	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.21 Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	77,20	64,22	67,97	70,07	69,02
Sumatera Utara	79,34	66,98	73,98	74,83	74,39
Sumatera Barat	68,47	55,86	62,99	62,68	62,84
Riau	85,72	76,68	79,73	81,30	80,50
Jambi	78,28	63,61	67,58	69,66	68,61
Sumatera Selatan	69,49	62,19	63,64	66,56	65,08
Bengkulu	61,51	56,44	56,81	59,74	58,26
Lampung	62,09	72,17	68,06	68,91	68,48
Kep. Bangka Belitung	33,64	24,66	29,42	30,48	29,93
Kepulauan Riau	60,72	24,89	58,11	59,42	58,77
DKI Jakarta	35,70	–	36,19	35,23	35,70
Jawa Barat	56,93	58,81	56,67	57,82	57,24
Jawa Tengah	74,90	73,65	74,02	74,69	74,35
DI Yogyakarta	87,04	88,17	88,24	86,30	87,25
Jawa Timur	76,17	75,82	75,35	76,71	76,03
Banten	71,18	59,28	68,56	70,06	69,30
Bali	84,64	86,00	84,64	85,27	84,95
Nusa Tenggara Barat	73,13	66,99	71,70	69,06	70,37
Nusa Tenggara Timur	72,55	59,36	62,35	64,48	63,41
Kalimantan Barat	81,79	69,79	74,03	75,07	74,54
Kalimantan Tengah	79,79	53,53	64,60	66,49	65,53
Kalimantan Selatan	71,86	51,35	60,85	63,35	62,08
Kalimantan Timur	80,52	64,91	76,15	75,84	76,00
Kalimantan Utara	76,29	64,15	70,62	73,82	72,18
Sulawesi Utara	77,80	66,06	71,86	74,27	73,03
Sulawesi Tengah	68,11	57,68	60,72	62,27	61,50
Sulawesi Selatan	77,89	76,45	76,80	77,60	77,20
Sulawesi Tenggara	85,08	73,53	77,77	79,18	78,48
Gorontalo	78,18	71,07	75,93	73,10	74,55
Sulawesi Barat	73,35	63,30	64,57	65,97	65,26
Maluku	73,15	58,43	65,45	65,90	65,67
Maluku Utara	91,13	66,05	73,13	74,99	74,04
Papua Barat	62,99	50,95	55,91	53,62	54,81
Papua Barat Daya	60,15	44,20	49,95	57,87	53,66
Papua	55,57	42,78	51,63	49,83	50,80
Papua Selatan	53,40	28,19	37,36	37,04	37,21
Papua Tengah	75,20	14,82	27,34	27,98	27,63
Papua Pegunungan	45,50	4,70	7,04	7,73	7,37
Indonesia	67,78	66,09	66,65	67,63	67,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.22 Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30,36	26,49	27,23	28,61	27,92
Sumatera Utara	30,38	24,37	26,25	29,79	27,97
Sumatera Barat	36,96	30,25	31,56	36,46	33,96
Riau	32,48	18,07	22,63	25,76	24,16
Jambi	27,82	28,14	26,54	29,54	28,03
Sumatera Selatan	21,55	24,15	21,96	24,32	23,13
Bengkulu	37,88	33,09	33,98	35,66	34,81
Lampung	27,63	23,65	23,47	26,78	25,11
Kep. Bangka Belitung	35,39	51,49	39,82	44,36	42,03
Kepulauan Riau	20,95	16,01	18,21	23,11	20,68
DKI Jakarta	44,10	–	41,31	46,71	44,10
Jawa Barat	34,19	24,07	29,91	35,23	32,53
Jawa Tengah	32,43	22,90	26,11	30,41	28,25
DI Yogyakarta	47,55	24,43	40,29	46,13	43,28
Jawa Timur	41,17	25,81	33,83	36,19	35,00
Banten	37,85	23,67	33,09	38,19	35,61
Bali	38,46	22,89	34,43	35,52	34,96
Nusa Tenggara Barat	36,58	32,02	35,22	33,85	34,53
Nusa Tenggara Timur	21,19	17,42	18,04	19,12	18,58
Kalimantan Barat	26,10	21,50	22,63	24,01	23,32
Kalimantan Tengah	29,75	19,99	22,52	26,45	24,45
Kalimantan Selatan	29,13	32,45	28,24	33,26	30,71
Kalimantan Timur	24,32	22,67	21,24	26,56	23,84
Kalimantan Utara	11,27	14,35	10,46	14,26	12,31
Sulawesi Utara	29,65	33,04	28,00	34,24	31,03
Sulawesi Tengah	19,35	18,27	17,29	20,03	18,66
Sulawesi Selatan	33,04	25,59	27,24	31,66	29,46
Sulawesi Tenggara	28,45	32,45	28,67	32,77	30,74
Gorontalo	32,21	37,78	35,47	34,62	35,06
Sulawesi Barat	25,12	22,32	21,27	24,49	22,87
Maluku	20,12	17,22	15,51	21,82	18,65
Maluku Utara	14,59	13,37	12,17	15,40	13,76
Papua Barat	13,56	15,34	14,18	15,40	14,76
Papua Barat Daya	11,49	29,61	19,00	18,71	18,86
Papua	11,67	17,52	13,81	13,89	13,85
Papua Selatan	13,41	3,22 ¹	6,33	7,43	6,86
Papua Tengah	6,91 ¹	1,35 ¹	2,31	2,78	2,53
Papua Pegunungan	26,83 ¹	12,02	13,96	11,98	12,99
Indonesia	34,12	24,01	28,37	32,19	30,26

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.23 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Pemuda Korban Kejahatan
(1)	(2)
Aceh	0,18
Sumatera Utara	0,76
Sumatera Barat	0,65
Riau	0,43
Jambi	0,82 ¹
Sumatera Selatan	0,50
Bengkulu	0,68 ¹
Lampung	1,01
Kep. Bangka Belitung	0,39 ¹
Kepulauan Riau	0,58 ¹
DKI Jakarta	0,69
Jawa Barat	1,18
Jawa Tengah	0,58
DI Yogyakarta	1,23
Jawa Timur	0,43
Banten	0,39 ¹
Bali	0,33 ¹
Nusa Tenggara Barat	0,75
Nusa Tenggara Timur	0,26 ¹
Kalimantan Barat	0,25 ¹
Kalimantan Tengah	0,15 ¹
Kalimantan Selatan	0,23 ¹
Kalimantan Timur	0,29 ¹
Kalimantan Utara	0,54 ¹
Sulawesi Utara	0,36 ¹
Sulawesi Tengah	0,61 ¹
Sulawesi Selatan	0,35 ¹
Sulawesi Tenggara	0,65 ¹
Gorontalo	0,53 ¹
Sulawesi Barat	0,33 ¹
Maluku	0,78 ¹
Maluku Utara	0,35 ¹
Papua Barat	0,78 ¹
Papua Barat Daya	0,95 ¹
Papua	0,55 ¹
Papua Selatan	0,52 ¹
Papua Tengah	0,30 ¹
Papua Pegunungan	0,48 ¹
Indonesia	0,65

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.24 Sampling Error Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga, 2025

Provinsi	20% Teratas				40% Menengah				40% Terbawah			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	20,78	18,48	23,07	5,64	39,82	36,80	42,84	3,87	39,40	36,29	42,52	4,03
Sumatera Utara	21,22	18,90	23,54	5,57	42,89	40,05	45,73	3,38	35,89	33,23	38,55	3,79
Sumatera Barat	21,25	18,56	23,94	6,46	40,16	36,94	43,38	4,09	38,59	35,25	41,93	4,42
Riau	20,91	17,83	24,00	7,53	43,38	39,65	47,11	4,39	35,71	32,02	39,39	5,27
Jambi	19,27	15,89	22,65	8,96	42,00	37,61	46,39	5,33	38,73	34,31	43,16	5,83
Sumatera Selatan	19,68	16,25	23,11	8,89	43,23	39,20	47,25	4,75	37,09	33,30	40,89	5,22
Bengkulu	21,68	17,39	25,97	10,10	43,60	38,36	48,83	6,13	34,72	29,79	39,65	7,25
Lampung	21,30	18,35	24,26	7,08	44,18	40,67	47,68	4,05	34,52	31,22	37,82	4,88
Kepl. Bangka Belitung	19,79	16,70	22,88	7,97	41,49	37,46	45,51	4,95	38,72	34,67	42,77	5,33
Kepulauan Riau	19,30	15,31	23,29	10,55	42,28	36,94	47,62	6,45	38,42	33,11	43,73	7,05
DKI Jakarta	18,86	16,33	21,39	6,84	43,67	40,69	46,64	3,48	37,47	34,59	40,36	3,93
Jawa Barat	21,73	20,35	23,12	3,25	42,18	40,57	43,80	1,96	36,08	34,54	37,63	2,18
Jawa Tengah	22,28	21,03	23,53	2,87	42,63	41,13	44,12	1,79	35,09	33,65	36,53	2,09
DI Yogyakarta	25,98	22,89	29,06	6,06	39,48	35,90	43,07	4,64	34,54	30,98	38,10	5,26
Jawa Timur	22,01	20,63	23,40	3,21	42,47	40,84	44,10	1,96	35,52	34,09	36,95	2,05
Banten	20,69	18,56	22,82	5,26	44,17	41,15	47,19	3,49	35,14	32,20	38,08	4,27
Bali	23,66	20,96	26,36	5,83	41,47	38,20	44,74	4,02	34,87	32,01	37,74	4,20
Nusa Tenggara Barat	21,81	19,27	24,35	5,95	42,26	39,17	45,36	3,74	35,93	32,95	38,91	4,23
Nusa Tenggara Timur	20,08	16,78	23,39	8,39	39,63	35,27	43,98	5,61	40,29	35,84	44,74	5,63
Kalimantan Barat	19,45	16,51	22,39	7,70	40,04	36,20	43,88	4,90	40,51	36,66	44,37	4,85
Kalimantan Tengah	20,38	17,53	23,23	7,14	41,48	37,80	45,15	4,52	38,14	34,56	41,73	4,79
Kalimantan Selatan	20,34	17,66	23,03	6,73	42,28	39,17	45,38	3,75	37,38	34,21	40,55	4,32
Kalimantan Timur	19,38	16,83	21,93	6,72	41,58	38,26	44,90	4,07	39,04	35,67	42,42	4,41
Kalimantan Utara	17,37	13,87	20,86	10,26	41,77	36,13	47,41	6,89	40,87	34,87	46,86	7,49
Sulawesi Utara	16,96	14,49	19,43	7,42	41,46	37,89	45,03	4,39	41,58	37,92	45,25	4,50
Sulawesi Tengah	19,00	15,81	22,19	8,58	40,12	35,47	44,77	5,91	40,88	36,20	45,56	5,84
Sulawesi Selatan	21,60	18,76	24,43	6,70	41,04	37,83	44,26	4,00	37,36	34,16	40,56	4,37
Sulawesi Tenggara	21,61	17,94	25,28	8,66	41,14	36,71	45,56	5,48	37,26	33,08	41,43	5,72
Gorontalo	19,15	15,17	23,13	10,61	43,63	38,39	48,88	6,14	37,22	31,96	42,47	7,20
Sulawesi Barat	16,52	11,62	21,43	15,15	44,06	37,19	50,93	7,96	39,42	32,64	46,19	8,77
Maluku	19,30	15,03	23,58	11,30	41,62	36,02	47,22	6,87	39,07	33,91	44,24	6,75
Maluku Utara	20,71	16,31	25,10	10,84	38,89	33,11	44,66	7,58	40,41	34,30	46,52	7,72
Papua Barat	15,88	12,23	19,53	11,73	39,59	33,79	45,38	7,47	44,53	38,33	50,73	7,10
Papua Barat Daya	17,27	11,84	22,69	16,03	38,63	31,09	46,18	9,96	44,10	35,62	52,58	9,81
Papua	19,51	15,57	23,45	10,30	38,28	32,85	43,70	7,23	42,22	36,56	47,88	6,84
Papua Selatan	18,19	10,74	25,64	20,91	32,52	23,49	41,55	14,17	49,29	39,17	59,42	10,48
Papua Tengah	16,60	10,69	22,50	18,14	42,06	34,52	49,61	9,15	41,34	33,72	48,97	9,41
Papua Pegunungan	5,86	0,24	11,48	48,97	32,78	13,37	52,18	30,21	61,37	41,47	81,26	16,54
Indonesia	21,25	20,71	21,79	1,29	42,44	41,80	43,08	0,77	36,31	35,71	36,92	0,85

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.25 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	60,30	57,87	62,73	2,06	39,64	37,71	41,56	2,47
Sumatera Utara	46,97	44,76	49,18	2,40	35,36	33,63	37,08	2,49
Sumatera Barat	59,41	56,85	61,97	2,20	46,02	43,91	48,14	2,34
Riau	56,20	53,15	59,24	2,77	38,02	35,68	40,36	3,14
Jambi	55,58	52,14	59,02	3,16	37,11	34,81	39,42	3,17
Sumatera Selatan	56,45	53,26	59,64	2,89	33,32	31,43	35,22	2,91
Bengkulu	60,40	56,28	64,52	3,48	42,98	40,39	45,57	3,07
Lampung	51,58	48,82	54,33	2,72	39,26	37,10	41,42	2,81
Kepl. Bangka Belitung	50,38	47,08	53,69	3,35	36,14	32,30	39,98	5,42
Kepulauan Riau	67,19	63,83	70,56	2,56	46,96	41,46	52,47	5,98
DKI Jakarta	77,45	75,51	79,38	1,27	–	–	–	–
Jawa Barat	57,17	55,85	58,48	1,17	47,33	44,64	50,02	2,90
Jawa Tengah	63,62	62,46	64,77	0,92	56,96	55,30	58,62	1,48
DI Yogyakarta	76,32	73,59	79,06	1,83	64,69	59,03	70,35	4,47
Jawa Timur	56,15	54,84	57,47	1,20	43,85	42,22	45,49	1,90
Banten	56,75	54,41	59,09	2,10	31,18	27,27	35,08	6,39
Bali	68,54	66,17	70,90	1,76	52,92	49,34	56,50	3,45
Nusa Tenggara Barat	50,39	47,86	52,92	2,56	37,01	33,77	40,24	4,46
Nusa Tenggara Timur	55,03	51,80	58,25	2,99	35,15	33,63	36,67	2,20
Kalimantan Barat	54,76	51,73	57,79	2,83	37,82	35,71	39,93	2,85
Kalimantan Tengah	54,83	51,75	57,91	2,87	37,92	35,32	40,51	3,49
Kalimantan Selatan	53,54	50,84	56,24	2,57	44,64	42,17	47,11	2,82
Kalimantan Timur	74,10	71,88	76,32	1,53	58,49	54,57	62,41	3,42
Kalimantan Utara	61,91	57,59	66,24	3,57	58,67	53,48	63,85	4,51
Sulawesi Utara	49,58	46,51	52,64	3,15	37,13	34,41	39,86	3,74
Sulawesi Tengah	50,56	47,29	53,83	3,30	35,58	33,30	37,86	3,27
Sulawesi Selatan	58,60	56,17	61,03	2,12	47,63	45,92	49,35	1,84
Sulawesi Tenggara	58,93	55,89	61,97	2,63	51,32	49,17	53,46	2,13
Gorontalo	46,04	42,21	49,86	4,24	37,57	34,17	40,98	4,62
Sulawesi Barat	55,01	49,82	60,20	4,81	43,16	40,16	46,17	3,55
Maluku	49,60	45,38	53,83	4,35	25,13	22,90	27,36	4,53
Maluku Utara	53,33	48,75	57,91	4,38	26,35	23,89	28,81	4,77
Papua Barat	51,97	46,62	57,32	5,25	34,64	30,75	38,53	5,72
Papua Barat Daya	54,37	47,80	60,94	6,16	42,24	38,55	45,92	4,45
Papua	56,96	52,38	61,53	4,10	26,94	23,66	30,23	6,22
Papua Selatan	51,83	43,54	60,12	8,16	15,67	12,56	18,79	10,14
Papua Tengah	50,58	44,11	57,06	6,53	8,83	7,31	10,35	8,78
Papua Pegunungan	34,60	17,43	51,77	25,32	6,92	5,57	8,27	9,95
Indonesia	58,96	58,45	59,47	0,44	42,21	41,71	42,71	0,61

Lanjutan Tabel 6.25

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	44,38	42,30	46,46	2,39	50,16	48,22	52,10	1,97	47,27	45,73	48,82	1,67
Sumatera Utara	39,90	37,83	41,96	2,64	44,88	42,96	46,81	2,19	42,32	40,81	43,83	1,82
Sumatera Barat	45,79	43,36	48,21	2,70	61,37	59,25	63,48	1,76	53,43	51,70	55,16	1,65
Riau	45,09	42,65	47,53	2,76	46,33	43,88	48,79	2,71	45,69	43,79	47,59	2,12
Jambi	39,69	37,10	42,29	3,33	47,18	44,52	49,84	2,88	43,41	41,47	45,36	2,28
Sumatera Selatan	40,27	38,02	42,53	2,86	44,73	42,46	46,99	2,58	42,47	40,69	44,24	2,13
Bengkulu	44,37	41,31	47,43	3,52	54,23	51,35	57,11	2,71	49,24	46,98	51,49	2,34
Lampung	40,62	38,37	42,87	2,83	46,97	44,66	49,29	2,51	43,77	42,05	45,48	2,00
Kepl. Bangka Belitung	41,63	38,30	44,96	4,08	47,55	44,24	50,86	3,55	44,51	42,01	47,00	2,86
Kepulauan Riau	66,52	62,09	70,95	3,40	65,67	61,00	70,34	3,63	66,09	62,88	69,31	2,48
DKI Jakarta	76,61	73,84	79,39	1,85	78,23	75,74	80,73	1,63	77,45	75,51	79,38	1,27
Jawa Barat	54,12	52,52	55,73	1,51	57,02	55,46	58,59	1,40	55,55	54,37	56,74	1,09
Jawa Tengah	55,74	54,37	57,11	1,26	65,72	64,46	66,98	0,98	60,69	59,72	61,67	0,82
DI Yogyakarta	72,60	69,33	75,88	2,30	75,67	72,50	78,85	2,14	74,18	71,72	76,63	1,69
Jawa Timur	48,62	47,21	50,02	1,47	53,84	52,47	55,21	1,30	51,22	50,18	52,25	1,03
Banten	52,82	49,99	55,64	2,73	52,60	49,87	55,32	2,64	52,71	50,63	54,79	2,01
Bali	65,82	63,13	68,51	2,09	64,19	61,38	67,00	2,23	65,02	62,99	67,05	1,59
Nusa Tenggara Barat	41,30	38,48	44,11	3,48	47,40	44,68	50,12	2,93	44,37	42,34	46,40	2,33
Nusa Tenggara Timur	37,78	35,79	39,77	2,69	44,76	42,85	46,67	2,18	41,25	39,76	42,74	1,84
Kalimantan Barat	42,92	40,55	45,29	2,82	46,15	43,84	48,47	2,56	44,53	42,76	46,30	2,03
Kalimantan Tengah	45,57	42,87	48,28	3,03	45,73	43,07	48,39	2,96	45,65	43,63	47,67	2,25
Kalimantan Selatan	47,34	44,81	49,87	2,73	51,32	48,90	53,73	2,40	49,30	47,45	51,15	1,91
Kalimantan Timur	70,05	67,43	72,66	1,90	69,09	66,31	71,88	2,06	69,58	67,62	71,55	1,44
Kalimantan Utara	56,93	52,34	61,51	4,11	64,89	61,12	68,66	2,96	60,82	57,46	64,17	2,81
Sulawesi Utara	36,62	33,89	39,35	3,80	52,91	50,07	55,75	2,74	44,52	42,39	46,66	2,44
Sulawesi Tengah	35,68	33,23	38,13	3,50	46,43	43,91	48,94	2,76	41,07	39,17	42,96	2,36
Sulawesi Selatan	47,69	45,61	49,77	2,23	58,90	56,91	60,89	1,73	53,33	51,81	54,86	1,46
Sulawesi Tenggara	50,25	47,80	52,69	2,48	58,85	56,49	61,21	2,04	54,58	52,79	56,37	1,68
Gorontalo	36,38	33,06	39,71	4,66	47,30	43,89	50,72	3,68	41,71	39,16	44,27	3,13
Sulawesi Barat	39,38	36,06	42,71	4,30	51,67	48,15	55,19	3,47	45,48	42,85	48,12	2,95
Maluku	31,76	28,57	34,95	5,12	42,64	39,54	45,74	3,70	37,18	34,69	39,66	3,41
Maluku Utara	32,33	29,37	35,30	4,69	37,64	34,60	40,68	4,12	34,95	32,63	37,27	3,38
Papua Barat	38,58	34,46	42,70	5,45	41,97	38,05	45,90	4,77	40,21	37,05	43,36	4,00
Papua Barat Daya	46,10	41,41	50,79	5,19	53,20	47,66	58,75	5,32	49,43	45,31	53,55	4,25
Papua	44,47	40,43	48,52	4,64	47,32	43,10	51,54	4,55	45,78	42,51	49,05	3,64
Papua Selatan	26,38	21,72	31,03	9,01	31,00	26,19	35,80	7,91	28,60	24,72	32,48	6,93
Papua Tengah	18,66	15,98	21,34	7,32	16,53	14,00	19,05	7,79	17,69	15,62	19,76	5,98
Papua Pegunungan	10,92	8,34	13,49	12,02	6,44	4,56	8,31	14,86	8,73	7,00	10,46	10,11
Indonesia	49,92	49,42	50,43	0,52	55,26	54,78	55,75	0,45	52,57	52,20	52,94	0,36

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.26 *Sampling Error* Persentase Pemuda di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Milik sendiri				Kontrak/sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	80,18	77,80	82,56	1,51	8,36	6,74	9,97	9,87
Sumatera Utara	67,68	65,07	70,29	1,97	14,09	12,05	16,13	7,39
Sumatera Barat	65,67	62,49	68,84	2,47	14,24	11,69	16,78	9,12
Riau	70,90	67,62	74,18	2,36	16,79	14,22	19,36	7,81
Jambi	82,67	79,13	86,21	2,19	9,83	6,71	12,96	16,22
Sumatera Selatan	77,27	74,19	80,36	2,04	7,78	5,98	9,59	11,83
Bengkulu	81,10	77,24	84,96	2,43	8,50	5,89	11,11	15,68
Lampung	84,10	81,32	86,87	1,69	5,92	4,11	7,72	15,57
Kepl. Bangka Belitung	85,94	83,07	88,81	1,71	5,27	3,39	7,16	18,23
Kepulauan Riau	73,14	68,49	77,78	3,24	18,87	14,62	23,12	11,49
DKI Jakarta	55,97	53,01	58,93	2,70	19,87	17,59	22,14	5,83
Jawa Barat	80,13	78,84	81,41	0,82	7,16	6,35	7,98	5,82
Jawa Tengah	87,31	86,29	88,34	0,60	2,93	2,26	3,59	11,59
DI Yogyakarta	79,06	76,35	81,77	1,75	10,25	8,37	12,13	9,34
Jawa Timur	86,61	85,48	87,73	0,66	4,45	3,71	5,19	8,49
Banten	85,53	83,69	87,37	1,10	8,00	6,57	9,43	9,13
Bali	81,99	79,25	84,72	1,70	14,57	11,96	17,18	9,15
Nusa Tenggara Barat	87,10	85,03	89,16	1,21	2,96	1,97	3,96	17,13
Nusa Tenggara Timur	82,93	79,63	86,23	2,03	8,17	6,18	10,15	12,39
Kalimantan Barat	87,15	84,76	89,54	1,40	3,33	2,10	4,55	18,81
Kalimantan Tengah	78,04	75,01	81,07	1,98	10,09	7,81	12,38	11,54
Kalimantan Selatan	78,31	75,79	80,83	1,64	7,49	6,03	8,95	9,93
Kalimantan Timur	73,63	70,64	76,62	2,07	13,31	11,07	15,56	8,59
Kalimantan Utara	76,66	71,97	81,35	3,12	11,15	7,65	14,65	16,03
Sulawesi Utara	73,78	70,48	77,08	2,28	4,70	3,05	6,36	17,91
Sulawesi Tengah	84,06	81,00	87,13	1,86	6,87	4,59	9,15	16,93
Sulawesi Selatan	81,78	79,12	84,43	1,66	4,37	2,82	5,91	18,02
Sulawesi Tenggara	84,73	81,63	87,83	1,87	5,55	3,25	7,85	21,17
Gorontalo	79,86	75,76	83,97	2,62	2,85	1,12	4,57	30,94
Sulawesi Barat	93,82	90,97	96,67	1,55	3,07	0,76	5,38	38,33
Maluku	81,24	76,54	85,94	2,95	5,15	2,86	7,43	22,66
Maluku Utara	87,18	82,90	91,46	2,50	3,29	1,83	4,75	22,67
Papua Barat	74,96	70,00	79,91	3,37	9,91	6,56	13,26	17,27
Papua Barat Daya	79,46	73,96	84,96	3,53	11,52	7,18	15,86	19,22
Papua	74,82	70,00	79,63	3,29	12,13	8,59	15,67	14,89
Papua Selatan	67,76	58,68	76,83	6,84	6,69	3,11	10,26	27,28
Papua Tengah	68,12	61,20	75,04	5,18	21,59	15,66	27,53	14,02
Papua Pegunungan	77,25	59,13	95,36	11,96	NA	NA	NA	65,74
Indonesia	79,47	78,95	79,98	0,33	8,31	7,95	8,67	2,19

Lanjutan Tabel 6.26

Provinsi	Bebas sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	10,22	8,34	12,10	9,38	1,24	0,72	1,76	21,34
Sumatera Utara	14,89	12,99	16,79	6,51	3,34	2,42	4,26	14,09
Sumatera Barat	19,67	17,14	22,21	6,58	0,42	0,20	0,64	26,38
Riau	10,78	8,43	13,14	11,15	1,53	1,00	2,06	17,60
Jambi	6,60	4,70	8,49	14,64	0,90	0,15	1,66	42,65
Sumatera Selatan	14,43	11,81	17,05	9,26	0,51	0,14	0,89	37,56
Bengkulu	10,37	7,29	13,45	15,17	NA	NA	NA	72,18
Lampung	9,16	6,85	11,47	12,85	0,83	0,33	1,32	30,42
Kepl. Bangka Belitung	7,46	5,31	9,61	14,72	1,33	0,41	2,25	35,44
Kepulauan Riau	4,63	2,83	6,43	19,85	3,36	1,66	5,06	25,77
DKI Jakarta	23,19	20,71	25,66	5,45	0,98	0,51	1,45	24,49
Jawa Barat	12,35	11,28	13,42	4,43	0,36	0,19	0,53	24,76
Jawa Tengah	9,59	8,76	10,43	4,45	0,16	0,08	0,24	24,85
DI Yogyakarta	10,29	8,16	12,42	10,56	0,40	0,01	0,78	49,43
Jawa Timur	8,65	7,73	9,57	5,43	0,29	0,14	0,45	27,32
Banten	5,64	4,47	6,80	10,53	0,84	0,40	1,28	26,85
Bali	3,22	2,20	4,25	16,25	NA	NA	NA	69,72
Nusa Tenggara Barat	9,63	7,80	11,46	9,71	NA	NA	NA	68,13
Nusa Tenggara Timur	8,51	5,65	11,37	17,15	0,39	0,03	0,76	47,13
Kalimantan Barat	9,22	7,16	11,28	11,40	NA	NA	NA	89,38
Kalimantan Tengah	9,29	7,15	11,43	11,75	2,58	1,74	3,42	16,65
Kalimantan Selatan	13,09	10,96	15,22	8,30	1,11	0,49	1,73	28,55
Kalimantan Timur	11,32	9,07	13,57	10,15	1,73	0,96	2,51	22,80
Kalimantan Utara	10,06	6,85	13,26	16,24	2,13	0,52	3,74	38,57
Sulawesi Utara	20,07	17,05	23,10	7,69	1,44	0,53	2,35	32,13
Sulawesi Tengah	8,29	6,30	10,28	12,24	NA	NA	NA	65,04
Sulawesi Selatan	12,38	10,15	14,61	9,20	1,47	0,66	2,29	28,16
Sulawesi Tenggara	9,72	7,43	12,02	12,03	–	–	–	NA
Gorontalo	16,96	13,12	20,81	11,56	NA	NA	NA	50,29
Sulawesi Barat	2,80	1,17	4,44	29,81	NA	NA	NA	80,87
Maluku	11,02	7,59	14,45	15,86	NA	NA	NA	61,60
Maluku Utara	8,96	4,89	13,02	23,14	NA	NA	NA	70,18
Papua Barat	11,69	7,98	15,40	16,20	3,44	1,67	5,21	26,27
Papua Barat Daya	6,37	3,50	9,23	22,93	2,65	0,48	4,82	41,76
Papua	7,84	4,45	11,22	22,03	5,22	3,31	7,12	18,67
Papua Selatan	11,16	4,55	17,78	30,22	14,39	7,58	21,20	24,14
Papua Tengah	9,56	5,08	14,05	23,93	0,72	0,02	1,42	49,56
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	54,18	–	–	–	NA
Indonesia	11,40	10,99	11,81	1,83	0,82	0,72	0,92	6,15

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.27 *Sampling Error* Persentase Pemuda di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Milik sendiri				Kontrak/sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	90,94	89,78	92,10	0,65	1,87	1,30	2,44	15,63
Sumatera Utara	81,75	80,14	83,37	1,01	4,16	3,41	4,91	9,20
Sumatera Barat	81,99	80,02	83,95	1,22	2,68	1,89	3,48	15,05
Riau	85,68	83,68	87,67	1,19	3,67	2,69	4,66	13,70
Jambi	91,74	90,14	93,33	0,89	1,09	0,57	1,61	24,47
Sumatera Selatan	90,51	89,24	91,79	0,72	1,35	0,88	1,82	17,68
Bengkulu	94,75	93,49	96,02	0,68	1,19	0,52	1,86	28,81
Lampung	95,60	94,65	96,54	0,50	0,70	0,34	1,05	25,94
Kepl. Bangka Belitung	93,86	91,96	95,75	1,03	1,20	0,52	1,88	28,79
Kepulauan Riau	93,84	91,05	96,63	1,52	1,43	0,32	2,54	39,56
DKI Jakarta	–	–	–	–	–	–	–	–
Jawa Barat	92,67	91,12	94,22	0,86	0,92	0,21	1,64	39,46
Jawa Tengah	95,35	94,52	96,17	0,44	0,16	0,02	0,31	45,92
DI Yogyakarta	94,95	91,55	98,36	1,83	–	–	–	NA
Jawa Timur	96,07	95,33	96,80	0,39	0,28	0,09	0,46	33,61
Banten	95,29	92,94	97,64	1,26	NA	NA	NA	100,24
Bali	95,04	93,14	96,95	1,02	NA	NA	NA	58,17
Nusa Tenggara Barat	96,22	94,79	97,64	0,75	0,19	0,03	0,36	44,11
Nusa Tenggara Timur	96,98	96,30	97,66	0,36	0,40	0,10	0,71	38,73
Kalimantan Barat	96,20	95,31	97,08	0,47	0,44	0,15	0,73	33,45
Kalimantan Tengah	87,34	85,13	89,55	1,29	1,12	0,06	2,17	48,11
Kalimantan Selatan	89,36	87,46	91,26	1,09	1,67	0,83	2,51	25,56
Kalimantan Timur	90,82	88,52	93,13	1,29	2,05	0,89	3,22	28,85
Kalimantan Utara	93,14	90,96	95,32	1,19	1,62	0,76	2,48	27,15
Sulawesi Utara	90,39	88,59	92,18	1,01	0,55	0,17	0,93	35,44
Sulawesi Tengah	93,35	92,09	94,61	0,69	0,75	0,29	1,20	30,94
Sulawesi Selatan	95,63	94,91	96,35	0,38	0,17	0,07	0,27	30,00
Sulawesi Tenggara	96,97	96,21	97,73	0,40	0,33	0,15	0,51	27,97
Gorontalo	92,51	90,52	94,49	1,09	NA	NA	NA	79,91
Sulawesi Barat	95,32	93,99	96,65	0,71	0,48	0,15	0,80	34,84
Maluku	93,46	91,75	95,17	0,94	NA	NA	NA	60,62
Maluku Utara	95,66	94,31	97,01	0,72	1,15	0,30	1,99	37,58
Papua Barat	92,61	90,35	94,87	1,24	0,85	0,21	1,49	38,45
Papua Barat Daya	94,58	92,71	96,45	1,01	1,22	0,38	2,06	35,19
Papua	95,06	93,43	96,69	0,88	1,29	0,63	1,94	25,97
Papua Selatan	88,25	85,54	90,95	1,56	NA	NA	NA	51,20
Papua Tengah	98,48	97,65	99,32	0,43	NA	NA	NA	56,47
Papua Pegunungan	99,30	98,84	99,75	0,23	0,32	0,01	0,62	49,09
Indonesia	92,92	92,63	93,20	0,16	1,02	0,92	1,13	5,34

Lanjutan Tabel 6.27

Provinsi	Bebas sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	6,86	5,86	7,86	7,44	0,33	0,12	0,55	32,66
Sumatera Utara	10,06	8,80	11,31	6,38	4,03	3,17	4,89	10,93
Sumatera Barat	14,73	12,90	16,57	6,35	0,59	0,33	0,86	23,04
Riau	6,12	4,70	7,54	11,85	4,53	3,36	5,70	13,15
Jambi	6,18	4,71	7,65	12,14	0,99	0,58	1,39	20,84
Sumatera Selatan	7,68	6,51	8,84	7,74	0,46	0,17	0,74	31,78
Bengkulu	3,41	2,39	4,43	15,27	0,65	0,25	1,06	31,78
Lampung	3,64	2,76	4,51	12,28	NA	NA	NA	67,45
Kepl. Bangka Belitung	3,17	1,77	4,57	22,57	1,78	0,67	2,88	31,80
Kepulauan Riau	4,12	1,64	6,60	30,77	NA	NA	NA	56,12
DKI Jakarta	–	–	–	–	–	–	–	–
Jawa Barat	6,38	4,98	7,79	11,24	NA	NA	NA	78,95
Jawa Tengah	4,49	3,68	5,30	9,21	–	–	–	NA
DI Yogyakarta	5,05	1,64	8,45	34,47	–	–	–	NA
Jawa Timur	3,59	2,88	4,30	10,11	NA	NA	NA	55,38
Banten	4,71	2,36	7,06	25,49	–	–	–	NA
Bali	4,32	2,51	6,12	21,31	NA	NA	NA	100,11
Nusa Tenggara Barat	3,54	2,13	4,96	20,32	NA	NA	NA	100,03
Nusa Tenggara Timur	2,44	1,83	3,04	12,65	0,18	0,08	0,28	29,50
Kalimantan Barat	3,06	2,25	3,86	13,43	0,31	0,06	0,55	40,42
Kalimantan Tengah	4,93	3,71	6,16	12,70	6,60	4,96	8,25	12,69
Kalimantan Selatan	6,90	5,42	8,38	10,93	2,07	1,08	3,07	24,54
Kalimantan Timur	5,46	3,65	7,27	16,93	1,66	0,81	2,52	26,14
Kalimantan Utara	4,80	2,87	6,73	20,50	0,43	0,01	0,85	49,26
Sulawesi Utara	8,98	7,22	10,74	10,00	NA	NA	NA	63,50
Sulawesi Tengah	5,53	4,37	6,68	10,64	0,38	0,10	0,66	37,38
Sulawesi Selatan	4,07	3,37	4,77	8,83	0,13	0,04	0,22	35,55
Sulawesi Tenggara	2,65	1,92	3,39	14,07	NA	NA	NA	74,62
Gorontalo	7,25	5,28	9,22	13,89	0,14	~0	0,28	49,52
Sulawesi Barat	2,46	1,42	3,50	21,54	1,75	0,98	2,52	22,52
Maluku	6,11	4,42	7,80	14,11	0,21	0,04	0,38	41,24
Maluku Utara	3,00	1,96	4,05	17,77	NA	NA	NA	54,41
Papua Barat	5,02	3,02	7,03	20,38	1,52	0,66	2,38	28,97
Papua Barat Daya	1,99	0,96	3,02	26,37	2,21	0,84	3,58	31,55
Papua	1,88	0,95	2,80	25,25	1,78	0,59	2,96	33,95
Papua Selatan	10,55	8,04	13,07	12,17	NA	NA	NA	57,98
Papua Tengah	1,16	0,41	1,92	33,10	–	–	–	NA
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	57,76	0,38	0,03	0,72	46,97
Indonesia	5,28	5,02	5,53	2,46	0,78	0,70	0,87	5,56

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.28 *Sampling Error* Persentase Pemuda Laki-Laki Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Milik sendiri				Kontrak/sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	88,46	87,05	89,87	0,81	3,89	3,03	4,75	11,34
Sumatera Utara	74,53	72,43	76,63	1,44	10,07	8,34	11,80	8,77
Sumatera Barat	74,85	72,55	77,14	1,56	8,42	6,72	10,11	10,25
Riau	81,27	79,15	83,39	1,33	8,42	6,95	9,88	8,88
Jambi	89,72	87,82	91,62	1,08	3,33	2,06	4,60	19,43
Sumatera Selatan	85,94	84,26	87,62	1,00	4,03	3,08	4,98	12,03
Bengkulu	90,58	88,69	92,47	1,06	3,48	2,25	4,71	18,00
Lampung	91,99	90,73	93,25	0,70	2,55	1,73	3,38	16,55
Kepl. Bangka Belitung	89,48	87,16	91,79	1,32	3,75	2,25	5,25	20,37
Kepulauan Riau	77,82	72,80	82,85	3,29	15,94	11,36	20,52	14,65
DKI Jakarta	58,22	54,63	61,81	3,14	18,47	15,76	21,18	7,48
Jawa Barat	83,20	81,86	84,54	0,82	5,99	5,14	6,84	7,24
Jawa Tengah	91,41	90,61	92,21	0,45	1,62	1,19	2,05	13,45
DI Yogyakarta	83,38	80,67	86,10	1,66	7,30	5,47	9,14	12,81
Jawa Timur	91,06	90,20	91,93	0,48	2,52	2,03	3,02	9,94
Banten	87,83	85,97	89,69	1,08	6,60	5,16	8,03	11,10
Bali	85,77	83,15	88,38	1,56	11,00	8,54	13,46	11,41
Nusa Tenggara Barat	92,46	90,99	93,93	0,81	1,77	1,04	2,50	21,11
Nusa Tenggara Timur	92,92	91,63	94,21	0,71	2,59	1,84	3,33	14,67
Kalimantan Barat	93,59	92,31	94,86	0,69	1,14	0,66	1,61	21,25
Kalimantan Tengah	84,02	81,72	86,31	1,39	5,33	3,80	6,87	14,66
Kalimantan Selatan	85,17	83,22	87,13	1,17	4,69	3,56	5,83	12,32
Kalimantan Timur	79,91	77,26	82,57	1,69	9,22	7,33	11,11	10,48
Kalimantan Utara	83,89	80,42	87,36	2,11	6,78	4,23	9,33	19,20
Sulawesi Utara	82,23	79,75	84,71	1,54	2,84	1,58	4,10	22,64
Sulawesi Tengah	91,80	90,26	93,34	0,86	2,24	1,21	3,26	23,32
Sulawesi Selatan	89,78	88,15	91,41	0,93	2,27	1,28	3,26	22,18
Sulawesi Tenggara	92,54	90,87	94,21	0,92	2,95	1,58	4,32	23,74
Gorontalo	88,36	85,91	90,82	1,42	1,36	0,26	2,46	41,25
Sulawesi Barat	95,12	93,77	96,47	0,72	0,85	0,30	1,39	32,64
Maluku	87,69	84,78	90,61	1,70	2,58	1,21	3,95	27,03
Maluku Utara	93,51	91,66	95,35	1,01	2,24	1,13	3,35	25,30
Papua Barat	87,67	84,99	90,36	1,56	4,04	2,40	5,68	20,73
Papua Barat Daya	86,82	82,94	90,71	2,28	7,51	4,06	10,95	23,41
Papua	81,61	77,85	85,37	2,35	8,41	5,65	11,17	16,75
Papua Selatan	80,03	75,47	84,58	2,90	2,73	1,08	4,39	30,89
Papua Tengah	93,48	91,65	95,32	1,00	4,02	2,59	5,45	18,18
Papua Pegunungan	96,86	94,93	98,79	1,01	NA	NA	NA	50,99
Indonesia	85,64	85,23	86,04	0,24	5,25	4,98	5,52	2,66

Lanjutan Tabel 6.28

Provinsi	Bebas sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	7,01	5,87	8,15	8,28	0,64	0,37	0,92	21,63
Sumatera Utara	11,89	10,50	13,28	5,98	3,52	2,74	4,29	11,21
Sumatera Barat	16,31	14,47	18,14	5,74	0,43	0,23	0,63	24,02
Riau	7,48	5,95	9,01	10,43	2,83	2,07	3,60	13,82
Jambi	6,00	4,56	7,44	12,22	0,95	0,54	1,37	22,30
Sumatera Selatan	9,58	8,14	11,03	7,70	0,45	0,19	0,72	30,01
Bengkulu	5,55	4,07	7,03	13,61	0,39	0,07	0,71	41,52
Lampung	5,20	4,20	6,19	9,79	0,26	0,08	0,44	35,65
Kepl. Bangka Belitung	5,57	3,84	7,30	15,88	1,20	0,49	1,92	30,24
Kepulauan Riau	4,46	2,34	6,57	24,18	1,78	0,26	3,30	43,46
DKI Jakarta	22,23	19,27	25,20	6,80	1,08	0,47	1,69	28,92
Jawa Barat	10,53	9,42	11,64	5,38	0,28	0,12	0,43	28,79
Jawa Tengah	6,83	6,14	7,53	5,19	0,13	0,06	0,20	26,70
DI Yogyakarta	8,78	6,65	10,90	12,34	NA	NA	NA	52,02
Jawa Timur	6,16	5,43	6,89	6,03	0,25	0,09	0,42	33,20
Banten	4,64	3,51	5,77	12,45	0,93	0,34	1,52	32,20
Bali	3,13	2,05	4,20	17,58	NA	NA	NA	89,86
Nusa Tenggara Barat	5,59	4,31	6,87	11,68	NA	NA	NA	67,29
Nusa Tenggara Timur	4,26	3,17	5,35	13,06	0,22	0,09	0,36	29,94
Kalimantan Barat	4,99	3,82	6,16	11,99	0,29	0,04	0,53	43,45
Kalimantan Tengah	6,09	4,70	7,49	11,65	4,56	3,28	5,84	14,35
Kalimantan Selatan	8,78	7,23	10,34	9,03	1,35	0,66	2,05	26,18
Kalimantan Timur	9,40	7,39	11,41	10,91	1,47	0,83	2,11	22,06
Kalimantan Utara	7,76	5,46	10,06	15,14	1,58	0,47	2,68	35,87
Sulawesi Utara	14,13	11,90	16,37	8,06	0,80	0,26	1,35	34,75
Sulawesi Tengah	5,44	4,31	6,56	10,58	0,53	0,11	0,95	40,69
Sulawesi Selatan	7,33	6,02	8,63	9,10	0,62	0,15	1,10	38,90
Sulawesi Tenggara	4,49	3,44	5,53	11,88	NA	NA	NA	91,73
Gorontalo	10,16	7,92	12,41	11,27	NA	NA	NA	52,70
Sulawesi Barat	2,58	1,54	3,61	20,49	1,45	0,76	2,14	24,19
Maluku	8,12	5,88	10,35	14,05	NA	NA	NA	52,33
Maluku Utara	3,97	2,47	5,46	19,20	NA	NA	NA	51,09
Papua Barat	6,34	4,35	8,33	16,00	1,95	0,94	2,96	26,44
Papua Barat Daya	3,23	1,74	4,73	23,63	2,44	1,02	3,85	29,65
Papua	6,31	3,69	8,94	21,24	3,67	2,19	5,15	20,58
Papua Selatan	11,13	7,62	14,64	16,10	6,11	3,12	9,10	24,94
Papua Tengah	2,35	1,12	3,59	26,80	NA	NA	NA	60,13
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	54,44	NA	NA	NA	54,38
Indonesia	8,34	8,02	8,65	1,95	0,78	0,70	0,86	5,48

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.29 *Sampling Error* Persentase Pemuda Perempuan Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Milik sendiri				Kontrak/sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	85,48	84,14	86,82	0,80	4,64	3,89	5,39	8,23
Sumatera Utara	72,04	70,12	73,96	1,36	10,16	8,88	11,44	6,41
Sumatera Barat	71,00	68,60	73,39	1,72	9,76	7,98	11,55	9,34
Riau	77,50	75,37	79,63	1,40	10,05	8,50	11,59	7,86
Jambi	87,56	85,44	89,68	1,24	4,82	3,14	6,51	17,80
Sumatera Selatan	84,60	82,92	86,28	1,01	3,76	2,89	4,62	11,74
Bengkulu	89,10	87,23	90,97	1,07	4,16	2,86	5,45	15,87
Lampung	90,77	89,22	92,33	0,88	2,66	1,79	3,53	16,67
Kepl. Bangka Belitung	88,92	86,81	91,02	1,21	3,43	2,26	4,60	17,42
Kepulauan Riau	70,76	65,42	76,10	3,85	19,87	15,06	24,69	12,36
DKI Jakarta	53,86	50,30	57,41	3,37	21,18	18,39	23,96	6,71
Jawa Barat	81,14	79,87	82,41	0,80	6,29	5,49	7,10	6,55
Jawa Tengah	90,26	89,41	91,11	0,48	1,81	1,33	2,29	13,59
DI Yogyakarta	80,67	77,75	83,59	1,85	9,36	7,30	11,43	11,24
Jawa Timur	89,73	88,80	90,67	0,53	3,02	2,48	3,57	9,13
Banten	86,29	84,40	88,18	1,12	6,88	5,46	8,29	10,51
Bali	84,04	81,32	86,76	1,65	11,82	9,24	14,41	11,15
Nusa Tenggara Barat	89,96	88,38	91,53	0,89	1,67	1,07	2,27	18,23
Nusa Tenggara Timur	92,41	91,07	93,75	0,74	2,98	2,18	3,78	13,66
Kalimantan Barat	91,63	90,29	92,97	0,75	2,03	1,28	2,79	18,89
Kalimantan Tengah	82,13	80,08	84,19	1,28	5,10	3,93	6,28	11,72
Kalimantan Selatan	81,93	79,97	83,90	1,22	4,74	3,80	5,68	10,13
Kalimantan Timur	77,24	74,54	79,94	1,78	10,93	8,95	12,91	9,22
Kalimantan Utara	80,51	76,82	84,19	2,34	9,13	6,43	11,83	15,09
Sulawesi Utara	78,72	76,11	81,34	1,70	3,21	2,03	4,38	18,69
Sulawesi Tengah	88,10	86,29	89,91	1,05	3,74	2,47	5,00	17,32
Sulawesi Selatan	87,09	85,27	88,92	1,07	2,43	1,45	3,41	20,53
Sulawesi Tenggara	90,92	89,28	92,56	0,92	2,18	1,33	3,04	19,99
Gorontalo	84,19	81,45	86,92	1,66	1,53	0,78	2,29	25,21
Sulawesi Barat	94,92	93,47	96,37	0,78	1,12	0,45	1,80	30,80
Maluku	87,19	84,39	90,00	1,64	2,71	1,32	4,11	26,18
Maluku Utara	92,39	90,47	94,32	1,06	1,40	0,78	2,03	22,64
Papua Barat	86,15	83,56	88,74	1,53	3,45	2,41	4,49	15,35
Papua Barat Daya	84,24	80,33	88,15	2,37	7,13	4,58	9,68	18,24
Papua	83,23	79,71	86,76	2,16	7,72	5,10	10,34	17,35
Papua Selatan	81,88	77,85	85,92	2,52	3,31	1,62	5,00	26,06
Papua Tengah	90,31	88,05	92,58	1,28	5,87	4,07	7,68	15,70
Papua Pegunungan	98,90	97,95	99,85	0,49	NA	NA	NA	56,55
Indonesia	83,54	83,14	83,95	0,25	5,81	5,54	6,08	2,35

Lanjutan Tabel 6.29

Provinsi	Bebas sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	9,19	8,06	10,32	6,27	0,69	0,43	0,96	19,63
Sumatera Utara	14,08	12,56	15,61	5,53	3,72	3,05	4,39	9,21
Sumatera Barat	18,67	16,72	20,63	5,34	0,57	0,33	0,80	20,86
Riau	8,73	7,33	10,14	8,21	3,72	2,80	4,64	12,59
Jambi	6,65	5,27	8,03	10,61	0,97	0,48	1,45	25,52
Sumatera Selatan	11,14	9,66	12,62	6,77	0,51	0,26	0,76	25,27
Bengkulu	6,28	4,86	7,69	11,49	0,47	0,19	0,74	30,10
Lampung	6,13	4,79	7,47	11,16	0,43	0,20	0,67	27,73
Kepl. Bangka Belitung	5,81	4,25	7,38	13,76	1,84	0,91	2,77	25,72
Kepulauan Riau	4,74	2,85	6,63	20,33	4,63	1,86	7,40	30,56
DKI Jakarta	24,08	21,11	27,05	6,30	0,89	0,32	1,46	32,67
Jawa Barat	12,23	11,19	13,27	4,35	0,34	0,15	0,52	28,08
Jawa Tengah	7,88	7,15	8,61	4,75	0,05	0,02	0,09	34,33
DI Yogyakarta	9,84	7,55	12,14	11,88	NA	NA	NA	71,42
Jawa Timur	7,09	6,28	7,89	5,77	0,15	0,05	0,26	34,44
Banten	6,36	5,07	7,66	10,41	0,47	0,16	0,78	33,55
Bali	3,83	2,77	4,88	14,04	NA	NA	NA	59,30
Nusa Tenggara Barat	8,17	6,71	9,63	9,11	NA	NA	NA	64,59
Nusa Tenggara Timur	4,34	3,22	5,45	13,11	0,26	0,08	0,45	36,46
Kalimantan Barat	6,01	4,90	7,11	9,38	NA	NA	NA	50,01
Kalimantan Tengah	7,79	6,37	9,21	9,27	4,98	3,84	6,11	11,62
Kalimantan Selatan	11,54	9,88	13,20	7,35	1,79	1,02	2,56	21,99
Kalimantan Timur	9,86	7,89	11,84	10,20	1,97	1,17	2,76	20,55
Kalimantan Utara	8,82	6,22	11,43	15,09	1,54	0,43	2,65	36,79
Sulawesi Utara	17,09	14,66	19,52	7,25	0,98	0,35	1,61	33,00
Sulawesi Tengah	7,63	6,31	8,96	8,88	0,53	0,10	0,96	41,22
Sulawesi Selatan	9,44	7,87	11,02	8,52	1,03	0,48	1,58	27,35
Sulawesi Tenggara	6,86	5,41	8,31	10,76	NA	NA	NA	71,13
Gorontalo	13,92	11,27	16,57	9,71	0,36	0,07	0,65	41,31
Sulawesi Barat	2,48	1,36	3,59	22,92	1,48	0,82	2,14	22,83
Maluku	8,94	6,79	11,09	12,28	NA	NA	NA	68,09
Maluku Utara	5,86	4,04	7,68	15,87	0,34	0,04	0,64	44,70
Papua Barat	8,06	5,91	10,21	13,60	2,34	1,15	3,53	25,91
Papua Barat Daya	6,12	3,31	8,92	23,42	2,51	0,96	4,06	31,45
Papua	4,80	2,69	6,90	22,42	4,25	2,54	5,96	20,55
Papua Selatan	10,39	7,39	13,39	14,73	4,42	1,88	6,97	29,37
Papua Tengah	3,66	2,11	5,21	21,63	NA	NA	NA	53,15
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	76,29	NA	NA	NA	63,72
Indonesia	9,81	9,48	10,13	1,68	0,84	0,76	0,92	4,99

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.30 *Sampling Error* Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2025

Provinsi	Milik sendiri				Kontrak/sewa			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	86,96	85,81	88,12	0,68	4,27	3,56	4,97	8,40
Sumatera Utara	73,32	71,62	75,02	1,18	10,11	8,84	11,38	6,41
Sumatera Barat	72,96	70,97	74,94	1,39	9,08	7,60	10,56	8,32
Riau	79,44	77,64	81,23	1,15	9,21	7,99	10,43	6,77
Jambi	88,65	87,03	90,26	0,93	4,07	2,92	5,22	14,40
Sumatera Selatan	85,28	83,85	86,71	0,85	3,89	3,13	4,65	9,97
Bengkulu	89,85	88,24	91,46	0,91	3,81	2,79	4,84	13,76
Lampung	91,39	90,19	92,59	0,67	2,61	1,90	3,31	13,76
Kepl. Bangka Belitung	89,21	87,33	91,08	1,07	3,59	2,45	4,74	16,29
Kepulauan Riau	74,26	69,88	78,65	3,01	17,92	13,90	21,94	11,44
DKI Jakarta	55,97	53,01	58,93	2,70	19,87	17,59	22,14	5,83
Jawa Barat	82,18	81,08	83,29	0,69	6,14	5,45	6,84	5,76
Jawa Tengah	90,84	90,16	91,52	0,38	1,71	1,33	2,10	11,34
DI Yogyakarta	81,99	79,71	84,28	1,42	8,36	6,83	9,88	9,31
Jawa Timur	90,40	89,66	91,14	0,42	2,77	2,32	3,22	8,29
Banten	87,07	85,48	88,66	0,93	6,73	5,53	7,94	9,13
Bali	84,92	82,74	87,11	1,31	11,40	9,35	13,45	9,18
Nusa Tenggara Barat	91,20	89,89	92,51	0,73	1,72	1,16	2,27	16,45
Nusa Tenggara Timur	92,67	91,53	93,81	0,63	2,79	2,15	3,42	11,68
Kalimantan Barat	92,62	91,53	93,70	0,60	1,58	1,07	2,10	16,62
Kalimantan Tengah	83,09	81,25	84,93	1,13	5,22	4,02	6,42	11,69
Kalimantan Selatan	83,58	81,98	85,17	0,98	4,72	3,86	5,57	9,28
Kalimantan Timur	78,61	76,34	80,87	1,47	10,06	8,42	11,69	8,32
Kalimantan Utara	82,24	79,02	85,45	2,00	7,93	5,58	10,28	15,11
Sulawesi Utara	80,53	78,40	82,65	1,35	3,02	2,02	4,01	16,87
Sulawesi Tengah	89,95	88,57	91,32	0,78	2,99	2,10	3,88	15,15
Sulawesi Selatan	88,43	86,99	89,87	0,83	2,35	1,54	3,16	17,53
Sulawesi Tenggara	91,73	90,31	93,14	0,79	2,56	1,56	3,57	19,96
Gorontalo	86,32	84,05	88,60	1,34	1,45	0,59	2,30	30,04
Sulawesi Barat	95,02	93,82	96,23	0,65	0,98	0,46	1,51	27,17
Maluku	87,44	84,92	89,97	1,47	2,65	1,51	3,78	21,89
Maluku Utara	92,96	91,29	94,63	0,92	1,83	1,09	2,56	20,52
Papua Barat	86,94	84,70	89,18	1,32	3,76	2,59	4,93	15,92
Papua Barat Daya	85,61	82,36	88,86	1,94	7,33	4,77	9,89	17,83
Papua	82,36	79,24	85,47	1,93	8,09	5,85	10,33	14,11
Papua Selatan	80,92	77,15	84,69	2,38	3,01	1,62	4,40	23,61
Papua Tengah	92,04	90,38	93,70	0,92	4,86	3,54	6,18	13,84
Papua Pegunungan	97,85	96,53	99,18	0,69	NA	NA	NA	52,13
Indonesia	84,60	84,26	84,94	0,20	5,53	5,30	5,75	2,08

Lanjutan Tabel 6.30

Provinsi	Bebas sewa				Dinas/Lainnya			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	8,10	7,16	9,04	5,93	0,67	0,43	0,90	17,87
Sumatera Utara	12,95	11,71	14,20	4,89	3,62	2,96	4,27	9,20
Sumatera Barat	17,47	15,84	19,09	4,74	0,50	0,33	0,67	17,40
Riau	8,09	6,80	9,38	8,15	3,26	2,55	3,98	11,16
Jambi	6,32	5,16	7,49	9,39	0,96	0,59	1,33	19,69
Sumatera Selatan	10,35	9,10	11,60	6,15	0,48	0,25	0,71	24,26
Bengkulu	5,91	4,62	7,20	11,15	0,43	0,17	0,69	31,04
Lampung	5,66	4,64	6,68	9,19	0,35	0,16	0,54	27,88
Kepl. Bangka Belitung	5,69	4,29	7,08	12,51	1,51	0,80	2,22	23,90
Kepulauan Riau	4,60	2,89	6,31	18,94	3,21	1,61	4,82	25,50
DKI Jakarta	23,19	20,71	25,66	5,45	0,98	0,51	1,45	24,49
Jawa Barat	11,37	10,44	12,30	4,16	0,31	0,16	0,45	24,44
Jawa Tengah	7,35	6,76	7,94	4,09	0,09	0,05	0,14	24,85
DI Yogyakarta	9,32	7,48	11,17	10,10	0,32	0,01	0,64	49,43
Jawa Timur	6,62	6,00	7,24	4,79	0,20	0,10	0,30	24,78
Banten	5,49	4,44	6,54	9,73	0,70	0,33	1,07	26,85
Bali	3,47	2,58	4,36	13,14	NA	NA	NA	60,14
Nusa Tenggara Barat	6,89	5,70	8,09	8,85	NA	NA	NA	62,00
Nusa Tenggara Timur	4,30	3,31	5,29	11,73	0,24	0,11	0,38	27,65
Kalimantan Barat	5,50	4,55	6,44	8,81	0,31	0,05	0,56	42,91
Kalimantan Tengah	6,93	5,74	8,11	8,75	4,76	3,79	5,74	10,45
Kalimantan Selatan	10,14	8,82	11,46	6,65	1,57	0,99	2,14	18,74
Kalimantan Timur	9,62	7,93	11,32	8,98	1,71	1,11	2,32	17,97
Kalimantan Utara	8,28	6,06	10,50	13,69	1,56	0,48	2,63	35,28
Sulawesi Utara	15,57	13,62	17,52	6,39	0,89	0,35	1,43	31,09
Sulawesi Tengah	6,54	5,51	7,56	8,01	0,53	0,12	0,93	39,23
Sulawesi Selatan	8,39	7,18	9,61	7,39	0,83	0,40	1,25	26,23
Sulawesi Tenggara	5,68	4,62	6,75	9,55	NA	NA	NA	74,61
Gorontalo	12,00	9,85	14,15	9,14	0,23	0,06	0,40	37,88
Sulawesi Barat	2,53	1,63	3,42	18,06	1,46	0,84	2,09	21,84
Maluku	8,53	6,63	10,42	11,33	NA	NA	NA	57,47
Maluku Utara	4,90	3,40	6,40	15,65	0,31	0,03	0,60	46,90
Papua Barat	7,16	5,34	8,98	12,96	2,13	1,32	2,95	19,49
Papua Barat Daya	4,59	2,86	6,31	19,19	2,47	1,07	3,87	28,92
Papua	5,62	3,45	7,79	19,72	3,94	2,67	5,20	16,44
Papua Selatan	10,77	7,91	13,64	13,58	5,30	2,80	7,80	24,08
Papua Tengah	2,95	1,81	4,08	19,65	0,15	0,01	0,30	49,24
Papua Pegunungan	NA	NA	NA	52,50	0,35	0,03	0,67	46,98
Indonesia	9,06	8,79	9,33	1,53	0,81	0,74	0,88	4,39

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.31 *Sampling Error* Persentase Pemuda yang Pernah Bepergian Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	30,36	27,73	33,00	4,42	26,49	24,58	28,39	3,67
Sumatera Utara	30,38	27,93	32,82	4,11	24,37	22,58	26,16	3,75
Sumatera Barat	36,96	34,02	39,90	4,06	30,25	27,86	32,63	4,02
Riau	32,48	29,12	35,84	5,27	18,07	16,00	20,15	5,85
Jambi	27,82	24,27	31,38	6,52	28,14	25,65	30,64	4,52
Sumatera Selatan	21,55	18,54	24,56	7,12	24,15	22,26	26,05	4,01
Bengkulu	37,88	33,09	42,66	6,45	33,09	30,32	35,86	4,27
Lampung	27,63	24,58	30,67	5,62	23,65	21,61	25,69	4,40
Kepl. Bangka Belitung	35,39	31,93	38,85	4,99	51,49	47,25	55,73	4,20
Kepulauan Riau	20,95	16,83	25,06	10,02	16,01	11,35	20,67	14,85
DKI Jakarta	44,10	41,23	46,97	3,32	–	–	–	–
Jawa Barat	34,19	32,74	35,64	2,16	24,07	21,58	26,56	5,28
Jawa Tengah	32,43	31,10	33,77	2,10	22,90	21,34	24,47	3,49
DI Yogyakarta	47,55	44,08	51,02	3,73	24,43	18,89	29,97	11,57
Jawa Timur	41,17	39,64	42,70	1,90	25,81	24,18	27,43	3,21
Banten	37,85	35,11	40,59	3,69	23,67	18,52	28,81	11,09
Bali	38,46	35,34	41,59	4,14	22,89	19,07	26,71	8,51
Nusa Tenggara Barat	36,58	33,70	39,46	4,01	32,02	28,30	35,74	5,93
Nusa Tenggara Timur	21,19	18,01	24,36	7,65	17,42	16,08	18,76	3,93
Kalimantan Barat	26,10	23,13	29,07	5,80	21,50	19,41	23,58	4,95
Kalimantan Tengah	29,75	26,55	32,94	5,48	19,99	17,72	22,27	5,80
Kalimantan Selatan	29,13	26,43	31,82	4,72	32,45	29,78	35,13	4,20
Kalimantan Timur	24,32	21,62	27,02	5,66	22,67	18,42	26,91	9,56
Kalimantan Utara	11,27	8,73	13,82	11,51	14,35	11,22	17,49	11,14
Sulawesi Utara	29,65	26,65	32,65	5,16	33,04	30,17	35,92	4,44
Sulawesi Tengah	19,35	16,22	22,48	8,25	18,27	16,24	20,29	5,65
Sulawesi Selatan	33,04	30,13	35,95	4,50	25,59	23,91	27,28	3,36
Sulawesi Tenggara	28,45	24,64	32,26	6,83	32,45	30,16	34,74	3,60
Gorontalo	32,21	27,64	36,78	7,23	37,78	33,82	41,74	5,35
Sulawesi Barat	25,12	19,66	30,57	11,08	22,32	19,27	25,38	6,98
Maluku	20,12	16,39	23,86	9,47	17,22	14,96	19,48	6,71
Maluku Utara	14,59	11,05	18,13	12,38	13,37	11,38	15,37	7,61
Papua Barat	13,56	10,14	16,98	12,88	15,34	12,86	17,81	8,23
Papua Barat Daya	11,49	7,51	15,48	17,68	29,61	26,23	33,00	5,83
Papua	11,67	8,80	14,55	12,58	17,52	14,54	20,49	8,66
Papua Selatan	13,41	7,42	19,40	22,80	3,22	1,19	5,25	32,20
Papua Tengah	6,91	3,34	10,49	26,40	1,35	0,69	2,01	25,05
Papua Pegunungan	26,83	6,26	47,40	39,12	12,02	10,25	13,79	7,53
Indonesia	34,12	33,54	34,71	0,87	24,01	23,52	24,49	1,04

Lanjutan Tabel 6.31

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	27,23	25,33	29,12	3,56	28,61	26,73	30,49	3,35	27,92	26,37	29,47	2,83
Sumatera Utara	26,25	24,30	28,20	3,79	29,79	27,83	31,75	3,36	27,97	26,34	29,60	2,98
Sumatera Barat	31,56	29,16	33,96	3,88	36,46	34,14	38,78	3,25	33,96	32,03	35,89	2,90
Riau	22,63	20,43	24,83	4,95	25,76	23,45	28,08	4,58	24,16	22,28	26,03	3,95
Jambi	26,54	24,04	29,05	4,82	29,54	27,04	32,05	4,32	28,03	25,99	30,08	3,72
Sumatera Selatan	21,96	20,07	23,86	4,40	24,32	22,27	26,38	4,31	23,13	21,47	24,78	3,65
Bengkulu	33,98	30,95	37,00	4,54	35,66	32,73	38,59	4,20	34,81	32,34	37,28	3,62
Lampung	23,47	21,49	25,45	4,31	26,78	24,58	28,97	4,18	25,11	23,40	26,82	3,48
Kepl. Bangka Belitung	39,82	36,38	43,27	4,41	44,36	40,94	47,78	3,94	42,03	39,28	44,78	3,34
Kepulauan Riau	18,21	13,65	22,78	12,79	23,11	18,52	27,70	10,14	20,68	16,78	24,57	9,61
DKI Jakarta	41,31	37,79	44,84	4,35	46,71	43,23	50,18	3,80	44,10	41,23	46,97	3,32
Jawa Barat	29,91	28,37	31,46	2,64	35,23	33,63	36,83	2,32	32,53	31,25	33,81	2,01
Jawa Tengah	26,11	24,84	27,38	2,48	30,41	29,12	31,71	2,17	28,25	27,23	29,27	1,85
DI Yogyakarta	40,29	36,65	43,92	4,61	46,13	42,37	49,88	4,15	43,28	40,25	46,31	3,57
Jawa Timur	33,83	32,39	35,26	2,17	36,19	34,82	37,56	1,93	35,00	33,87	36,14	1,65
Banten	33,09	30,27	35,91	4,35	38,19	35,19	41,20	4,02	35,61	33,18	38,04	3,49
Bali	34,43	31,32	37,54	4,61	35,52	32,41	38,63	4,47	34,96	32,40	37,52	3,74
Nusa Tenggara Barat	35,22	32,20	38,24	4,38	33,85	31,15	36,55	4,07	34,53	32,23	36,83	3,40
Nusa Tenggara Timur	18,04	16,41	19,66	4,60	19,12	17,37	20,88	4,68	18,58	17,23	19,92	3,70
Kalimantan Barat	22,63	20,55	24,71	4,69	24,01	21,91	26,11	4,46	23,32	21,60	25,04	3,76
Kalimantan Tengah	22,52	20,18	24,87	5,31	26,45	24,08	28,82	4,57	24,45	22,53	26,37	4,01
Kalimantan Selatan	28,24	25,93	30,56	4,18	33,26	30,87	35,64	3,66	30,71	28,81	32,61	3,16
Kalimantan Timur	21,24	18,58	23,90	6,38	26,56	23,67	29,46	5,55	23,84	21,57	26,12	4,87
Kalimantan Utara	10,46	8,16	12,76	11,20	14,26	11,57	16,94	9,61	12,31	10,32	14,31	8,26
Sulawesi Utara	28,00	25,43	30,57	4,68	34,24	31,46	37,01	4,14	31,03	28,89	33,16	3,51
Sulawesi Tengah	17,29	15,14	19,44	6,34	20,03	17,85	22,21	5,55	18,66	16,94	20,38	4,70
Sulawesi Selatan	27,24	25,06	29,41	4,07	31,66	29,66	33,67	3,23	29,46	27,74	31,19	2,98
Sulawesi Tenggara	28,67	26,14	31,21	4,51	32,77	30,26	35,29	3,92	30,74	28,65	32,83	3,47
Gorontalo	35,47	31,77	39,18	5,33	34,62	31,02	38,22	5,31	35,06	32,03	38,08	4,40
Sulawesi Barat	21,27	18,39	24,15	6,91	24,49	21,02	27,96	7,24	22,87	20,19	25,55	5,98
Maluku	15,51	13,19	17,82	7,63	21,82	18,81	24,83	7,03	18,65	16,48	20,82	5,94
Maluku Utara	12,17	10,11	14,22	8,61	15,40	13,07	17,73	7,71	13,76	12,00	15,52	6,54
Papua Barat	14,18	11,90	16,46	8,21	15,40	12,77	18,04	8,73	14,76	12,76	16,77	6,92
Papua Barat Daya	19,00	15,30	22,70	9,94	18,71	15,11	22,30	9,80	18,86	16,00	21,72	7,74
Papua	13,81	11,29	16,33	9,30	13,89	11,26	16,52	9,67	13,85	11,72	15,98	7,83
Papua Selatan	6,33	3,39	9,28	23,74	7,43	4,05	10,81	23,21	6,86	4,32	9,40	18,91
Papua Tengah	2,31	1,24	3,39	23,68	2,78	1,55	4,01	22,52	2,53	1,60	3,46	18,76
Papua Pegunungan	13,96	10,85	17,06	11,35	11,98	9,27	14,69	11,54	12,99	10,79	15,19	8,65
Indonesia	28,37	27,88	28,86	0,89	32,19	31,69	32,69	0,80	30,26	29,86	30,67	0,68

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 6.32 Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	Pemuda Korban Kejahatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
(1)	(2)	Batas Bawah	Batas Atas	(5)
Aceh	0,18	0,10	0,27	23,99
Sumatera Utara	0,76	0,50	1,02	17,61
Sumatera Barat	0,65	0,40	0,90	19,95
Riau	0,43	0,23	0,63	23,41
Jambi	0,82	0,39	1,25	26,64
Sumatera Selatan	0,50	0,32	0,67	17,89
Bengkulu	0,68	0,24	1,13	33,16
Lampung	1,01	0,69	1,33	16,22
Kepl. Bangka Belitung	0,39	0,14	0,63	32,01
Kepulauan Riau	0,58	0,08	1,08	44,32
DKI Jakarta	0,69	0,37	1,00	23,53
Jawa Barat	1,18	0,93	1,43	10,77
Jawa Tengah	0,58	0,45	0,72	11,83
DI Yogyakarta	1,23	0,65	1,82	24,24
Jawa Timur	0,43	0,31	0,55	14,45
Banten	0,39	0,18	0,60	27,86
Bali	0,33	0,03	0,62	45,85
Nusa Tenggara Barat	0,75	0,51	0,98	16,34
Nusa Tenggara Timur	0,26	0,12	0,39	27,17
Kalimantan Barat	0,25	0,12	0,37	25,77
Kalimantan Tengah	0,15	0,05	0,26	35,59
Kalimantan Selatan	0,23	0,08	0,37	32,13
Kalimantan Timur	0,29	0,12	0,46	29,56
Kalimantan Utara	0,54	0,15	0,93	37,22
Sulawesi Utara	0,36	0,17	0,55	26,73
Sulawesi Tengah	0,61	0,27	0,95	28,21
Sulawesi Selatan	0,35	0,17	0,53	26,79
Sulawesi Tenggara	0,65	0,29	1,01	27,96
Gorontalo	0,53	0,13	0,92	38,21
Sulawesi Barat	0,33	0,05	0,61	43,69
Maluku	0,78	0,35	1,22	28,52
Maluku Utara	0,35	0,10	0,60	37,03
Papua Barat	0,78	0,06	1,50	47,39
Papua Barat Daya	0,95	0,21	1,69	39,90
Papua	0,55	0,16	0,94	36,16
Papua Selatan	0,52	0,02	1,01	48,79
Papua Tengah	0,30	0,03	0,57	46,59
Papua Pegunungan	0,48	0,21	0,75	29,03
Indonesia	0,65	0,59	0,71	4,81

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB VII

KESEHATAN

REPRODUKSI





<https://www.bps.go.id>

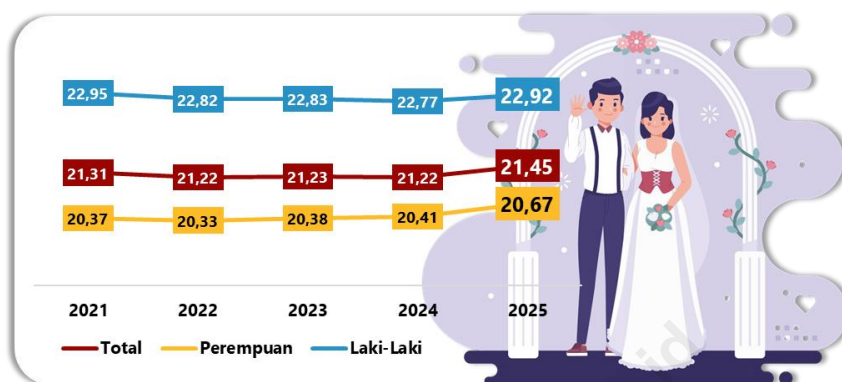


Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kelemahan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya (World Health Organization, 2025a). Pada kelompok usia muda, khususnya pemuda, isu kesehatan reproduksi menjadi perhatian penting karena pada fase ini individu mengalami berbagai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi perilaku serta pengambilan keputusan terkait reproduksi dan kesehatan seksual. Bab ini menguraikan kondisi kesehatan reproduksi pemuda melalui berbagai indikator, seperti usia kawin pertama, bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi pemuda dalam menjaga kesehatan reproduksinya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

7.1 Usia Kawin Pertama Pemuda

Usia saat pertama menikah merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan reproduksi. Pernikahan pada usia terlalu muda perlu mendapat perhatian khusus karena berhubungan dengan banyak hal negatif seperti rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kesehatan ibu dan anak, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, serta besarnya kemungkinan terjadinya perceraian (Anukriti & Dasgupta, 2017). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Undang-Undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raga seorang

perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perubahan batasan umur ini antara lain dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.



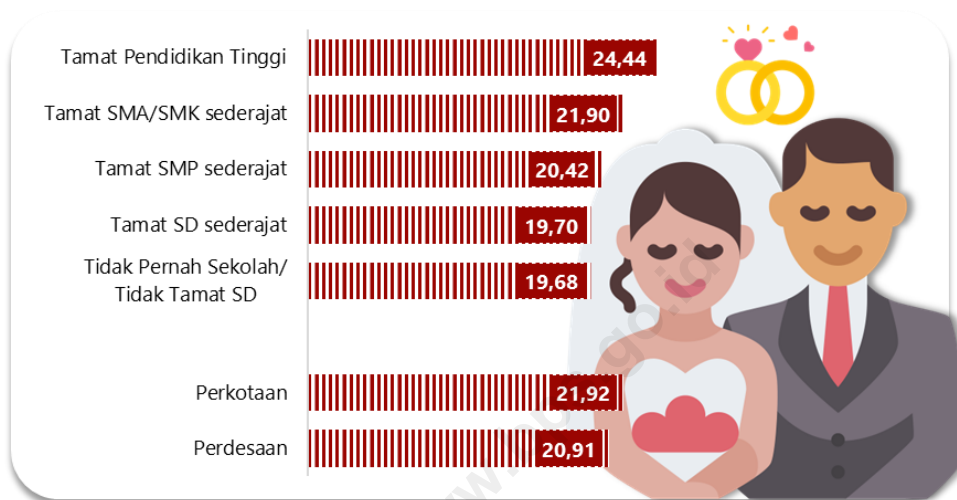
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025

Gambar 7.1 Perkembangan Usia Kawin Pertama Pemuda, 2021–2025

Secara umum, pergerakan dari rata-rata usia kawin pertama pemuda dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung stagnan di kisaran 21 tahun (Gambar 7.1). Pada tahun 2025, rata-rata usia kawin pertama pemuda adalah 21,45 tahun. Jika dibedakan menurut jenis kelaminnya, rata-rata usia kawin pertama pemuda laki-laki lebih tinggi dibandingkan rata-rata usia kawin pertama perempuan (22,92 tahun berbanding 20,67 tahun). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemuda perempuan cenderung memasuki usia perkawinan lebih awal dibandingkan pemuda laki-laki.

Rata-rata usia kawin pertama pemuda terlihat semakin rendah seiring dengan semakin rendahnya tingkat pendidikan pemuda. Pemuda dengan pendidikan tinggi memiliki rata-rata usia kawin pertama 24,44 tahun. Sementara itu, rata-rata usia kawin pertama pemuda dengan tingkat pendidikan rendah (SD sederajat ke bawah) berada pada kisaran 19 tahun, yang mana angka tersebut sama dengan batas minimal usia kawin yang diperbolehkan pada Undang-Undang. Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, pemuda di perdesaan memiliki rata-rata usia kawin pertama yang sedikit lebih

rendah dibandingkan pemuda di perkotaan, yakni 20,91 tahun berbanding 21,92 tahun. Pola ini sejalan dengan *World Health Organization* (2006) yang menyebutkan bahwa usia perkawinan cenderung lebih rendah pada mereka yang berpendidikan lebih rendah dan tinggal di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda dengan pendidikan rendah dan tinggal di perdesaan berisiko lebih tinggi untuk mengalami perkawinan pada usia muda.

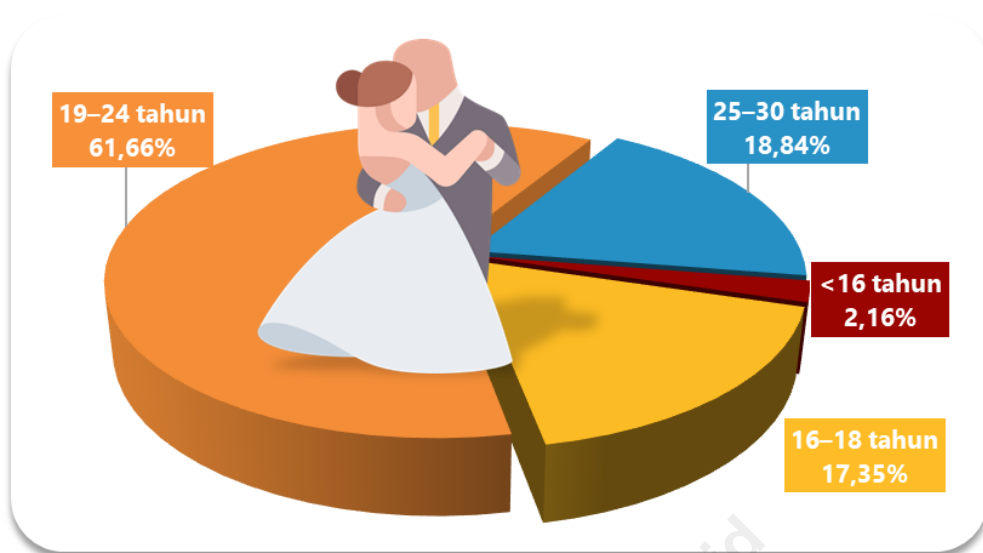


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.2 Usia Kawin Pertama Pemuda Menurut Tingkat Pendidikan dan Klasifikasi Desa, 2025

Meskipun rata-rata usia kawin pertama pemuda telah berada di atas batas minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang, namun jika dilihat lebih rinci berdasarkan kelompok umur saat melangsungkan perkawinan pertama, masih terdapat pemuda yang menikah pada usia di bawah batas minimal tersebut. Data Susenas tahun 2025 mencatat sebesar 19,51 persen pemuda Indonesia melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 19 tahun (Gambar 7.3). Bahkan, masih terjadi kasus perkawinan anak (*child marriage*) pada kalangan pemuda. Pernikahan anak mengacu pada setiap perkawinan resmi atau hubungan tidak resmi antara seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun (*World Health Organization*, 2023a). Lebih lanjut, Gambar 7.3 juga memperlihatkan bahwa sekitar 2,16 persen pemuda di Indonesia menikah untuk pertama kalinya pada usia kurang dari 16 tahun, atau sebelum memasuki

kategori usia pemuda.



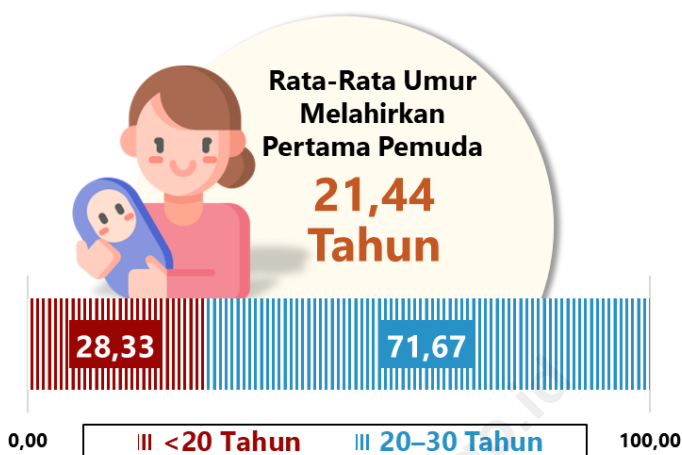
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.3 Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur saat Melangsungkan Kawin Pertama, 2025

Perempuan yang menikah pada usia muda cenderung akan bereproduksi atau memiliki anak pada usia yang lebih muda juga. Padahal, perempuan yang melahirkan sebelum mencapai usia dewasa berisiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, stigma sosial, serta dampak ekonomi yang merugikan sepanjang hidupnya (Fan & Koski, 2022). Di samping itu, kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian di kalangan remaja perempuan berusia 15–19 tahun. Remaja perempuan yang melahirkan juga menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan ibu berusia 20–24 tahun, termasuk komplikasi persalinan yang berkontribusi pada kematian ibu, berat badan bayi lahir rendah, serta kondisi neonatal yang parah (*World Bank*, 2022).

Pada tahun 2025, rata-rata umur melahirkan pertama pemuda perempuan adalah 21,44 tahun. Di antara pemuda perempuan yang pernah melahirkan, sebesar 71,67 persen melahirkan anak pertama pada kelompok umur 20–30 tahun. Artinya, masih ada sebesar 28,33 persen pemuda perempuan pernah

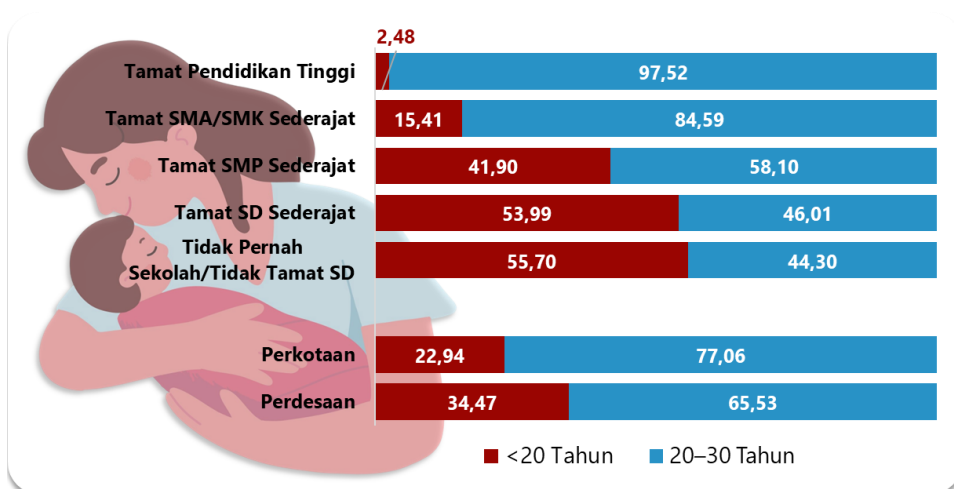
melahirkan pertama di saat umur kurang dari 20 tahun. Angka ini cukup besar sehingga perlu menjadi perhatian mengingat anatomi tubuh perempuan pada usia yang cukup muda belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga berisiko pada keselamatan ibu dan bayi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama, 2025

Secara umum, tingkat pendidikan memiliki hubungan terbalik dengan persentase pemuda perempuan melahirkan pertama di umur kurang dari 20 tahun. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin rendah persentase pemuda perempuan yang melahirkan pertama di umur kurang dari 20 tahun (Gambar 7.5). Data Susenas tahun 2025 mencatat lebih dari setengah perempuan yang berpendidikan rendah (SD sederajat ke bawah) melahirkan pertama di usia kurang dari 20 tahun. Lebih lanjut, dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda perempuan yang pernah melahirkan pertama di saat umur kurang dari 20 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di perdesaan daripada di perkotaan (34,47 persen berbanding 22,94 persen). Hal ini menunjukkan mereka yang berpendidikan rendah atau yang tinggal di perdesaan memiliki peluang lebih tinggi untuk melahirkan pertama kali pada usia yang sangat muda.

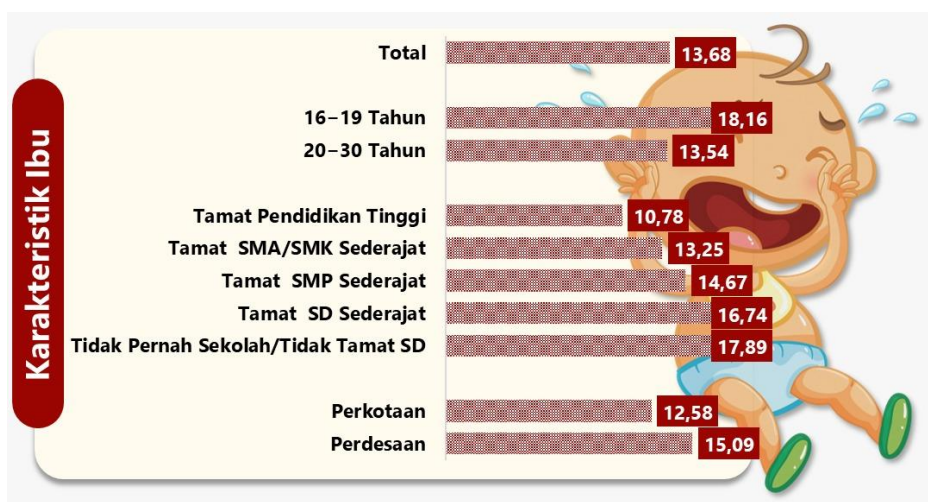


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.5 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama, Tingkat Pendidikan, dan Klasifikasi Desa, 2025

7.2 Persalinan Pemuda

Semua perempuan perlu mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi selama masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan yang baik selama masa kehamilan dapat menekan angka kelahiran bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Ibu memerlukan pemeriksaan kehamilan yang memadai, asupan gizi yang baik, istirahat yang cukup, serta lingkungan yang bersih sehingga dapat melahirkan bayi yang sehat, salah satunya ditandai dengan berat yang cukup, yakni tidak kurang dari 2,5 kilogram (*United Nations Children's Fund & World Health Organization*, 2004). Bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2,5 kilogram) memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal pada bulan pertama kehidupannya, dan bagi yang berhasil bertahan hidup, mereka berisiko menghadapi dampak jangka panjang seperti pertumbuhan terhambat (*stunting*), tingkat kecerdasan (IQ) yang lebih rendah, serta penyakit kronis di usia dewasa seperti obesitas dan diabetes (*United Nations Children's Fund*, 2023).



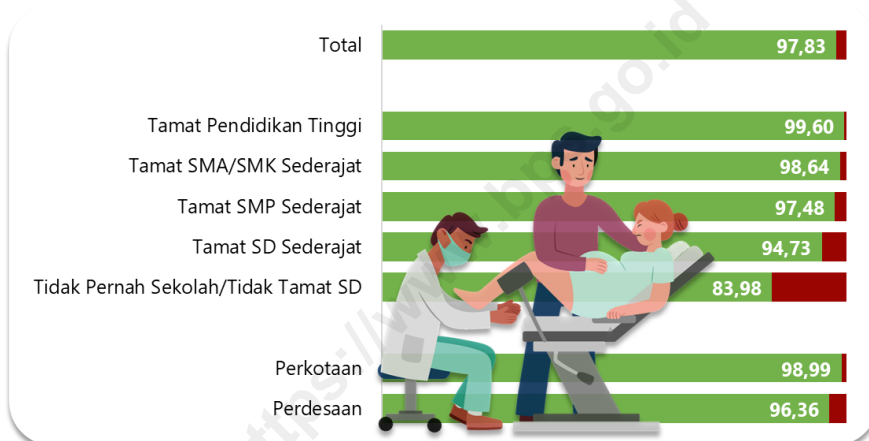
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.6 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (<2,5 kg) Menurut Karakteristik, 2025

Pada tahun 2025 masih terdapat sekitar 13,68 persen pemuda perempuan yang melahirkan bayi dengan BBLR, sebagaimana tersaji pada Gambar 7.6. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur ibu, terlihat bahwa persentase BBLR lebih tinggi pada bayi yang lahir dari pemuda perempuan berusia 16–19 tahun (sebesar 18,16 persen) dibandingkan pemuda perempuan berusia 20–30 tahun (sebesar 13,54 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan pada usia muda berisiko lebih besar melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Dari sisi tingkat pendidikan, semakin rendah pendidikan, semakin tinggi pula persentase pemuda perempuan yang melahirkan bayi BBLR. Pemuda perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki persentase BBLR terendah (10,78 persen), sedangkan pemuda perempuan yang tidak tamat SD mencatatkan angka BBLR tertinggi (17,89 persen). Pola ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam pengetahuan dan perilaku kesehatan selama kehamilan. Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, persentase bayi BBLR di perdesaan (15,09 persen) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (12,58 persen). Perbedaan ini menggambarkan adanya kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi ibu hamil antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Selain masa kehamilan, akses terhadap layanan kesehatan juga sangat penting ketika proses persalinan. Proses persalinan yang tidak aman akan

meningkatkan risiko kematian ibu (*maternal mortality*). Contohnya perdarahan hebat setelah melahirkan (perdarahan *postpartum*) yang merupakan penyebab kematian ibu paling umum, yang dapat menyebabkan kematian hanya dalam hitungan jam apabila tidak segera ditangani (*World Health Organization, 2025b*). Oleh karena itu, sangat penting agar setiap proses persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan terampil, karena penanganan dan perawatan yang tepat waktu dapat menjadi penentu antara hidup dan mati bagi ibu maupun bayi yang baru lahir. Perhatian terhadap isu ini juga tercermin secara global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan ke-3, target 3.1, yang menetapkan sasaran untuk menurunkan angka kematian ibu, salah satunya diukur dari proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan.



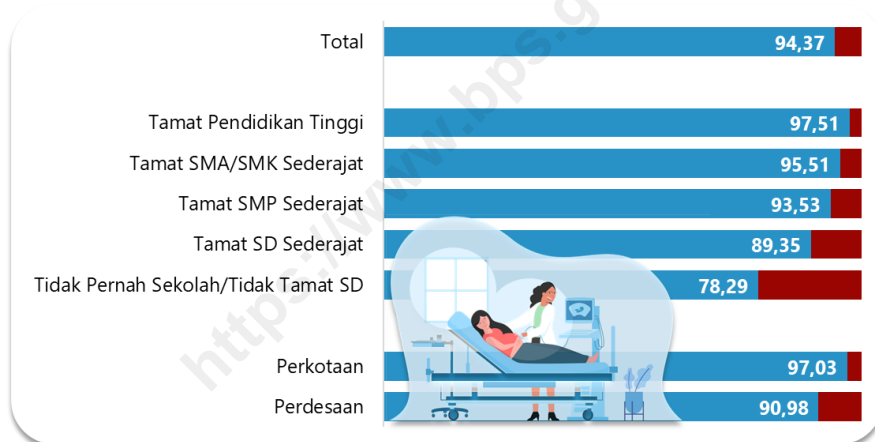
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.7 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025

Gambar 7.7 menunjukkan bahwa sebesar 97,83 persen pemuda perempuan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Meski capaian secara umum sudah cukup tinggi, namun masih ada sekitar 2 persen pemuda perempuan yang melahirkan tidak dibantu oleh tenaga kesehatan. Data Susenas tahun 2025 menunjukkan adanya indikasi pola hubungan positif antara tingkat pendidikan pemuda perempuan dengan persentase pemuda perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin besar persentase pemuda

perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya apabila dilihat menurut klasifikasi desa, persentase pemuda perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan (98,99 persen berbanding 96,36 persen).

Salah satu cara utama untuk memastikan proses persalinan berjalan aman dengan bantuan tenaga kesehatan adalah dengan menjamin bahwa seluruh proses persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan, yang mampu menangani dan mengobati apabila terjadi komplikasi persalinan. Misalnya infeksi pascapersalinan, yang dapat dicegah apabila kebersihan dijaga dengan baik serta tanda-tanda awal infeksi dapat dikenali dan ditangani secara tepat waktu. Oleh karena itu, proporsi persalinan di fasilitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu maupun bayi baru lahir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7.8 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2025

Persentase pemuda perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan secara umum sudah cukup tinggi yaitu mencapai 94,37 persen (Gambar 7.8). Meski capaian secara umum sudah cukup tinggi, namun masih ada sekitar 5 hingga 6 persen pemuda perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Selain itu, hasil Susenas tahun 2025 menunjukkan persentase pemuda yang melahirkan di fasilitas kesehatan semakin rendah seiring semakin



rendahnya tingkat pendidikan pemuda perempuan. Hal ini menunjukkan belum adanya pemahaman mengenai risiko komplikasi persalinan yang dapat mereka hadapi karena masih kurangnya pengetahuan akan bahaya melahirkan pada kalangan pemuda perempuan yang berpendidikan rendah. Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi desa, tampak bahwa persentase pemuda perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan lebih besar di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaaan (97,03 persen berbanding 90,98 persen). Artinya, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan antara pemuda perempuan di wilayah perkotaan dan perdesaaan.

<https://www.bps.go.id>

Tabel 7.1 Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Umur Kawin Pertama, 2025

Karakteristik	Umur Kawin Pertama				Rata-Rata Umur Kawin Pertama
	<16 Tahun	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	2,16	17,35	61,66	18,84	21,45
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	0,56	6,22	62,28	30,95	22,92
Perempuan	3,01	23,26	61,33	12,40	20,67
Status Disabilitas					
Nondisabilitas	2,16	17,34	61,65	18,85	21,45
Disabilitas	2,33	18,15	62,48	17,04	21,44
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tamat Pendidikan Tinggi	0,28	1,44	46,98	51,30	24,44
Tamat SMA/SMK Sederajat	0,34	9,08	73,22	17,36	21,90
Tamat SMP Sederajat	2,97	28,07	56,92	12,03	20,42
Tamat SD Sederajat	7,23	32,71	51,44	8,62	19,70
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	7,85	31,49	51,28	9,39	19,68
Distribusi Pengeluaran					
20% Teratas	0,86	7,94	56,43	34,76	23,04
40% Menengah	1,81	16,17	63,28	18,74	21,54
40% Terbawah	3,09	22,88	62,48	11,54	20,64
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	1,52	13,93	62,04	22,50	21,92
Perdesaan	2,89	21,30	61,22	14,60	20,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Umur Saat Melahirkan Pertama dan Karakteristik, 2025

Karakteristik	Umur Saat Melahirkan Pertama		Rata-Rata Umur Melahirkan Pertama
	< 20 Tahun	20–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	28,33	71,67	21,44
Status Disabilitas			
Nondisabilitas	28,31	71,69	21,44
Disabilitas	35,33	64,67	21,07
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	2,48	97,52	24,79
Tamat SMA/SMK Sederajat	15,41	84,59	22,00
Tamat SMP Sederajat	41,90	58,10	20,42
Tamat SD Sederajat	53,99	46,01	19,45
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	55,70	44,30	19,49
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	14,25	85,75	22,99
40% Menengah	25,97	74,03	21,63
40% Terbawah	34,99	65,01	20,78
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	22,94	77,06	21,95
Perdesaan	34,47	65,53	20,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025

Karakteristik	Berat Badan Bayi Saat Lahir	
	< 2,5 Kg	≥ 2,5 Kg
(1)	(2)	(3)
Total	13,68	84,66
Kelompok Umur Ibu		
16–19 Tahun	18,16	79,22
20–30 Tahun	13,54	84,84
Status Disabilitas		
Nondisabilitas	13,67	84,68
Disabilitas	21,02	78,98
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tamat Pendidikan Tinggi	10,78	88,46
Tamat SMA/SMK Sederajat	13,25	85,52
Tamat SMP Sederajat	14,67	83,72
Tamat SD Sederajat	16,74	80,04
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	17,89	69,32
Distribusi Pengeluaran		
20% Teratas	11,79	87,83
40% Menengah	12,72	86,05
40% Terbawah	15,12	82,46
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	12,58	86,70
Perdesaan	15,09	82,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.4 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Karakteristik dan Penolong Persalinan, 2025

Karakteristik	Penolong Persalinan		Jumlah
	Tenaga Kesehatan	Tanpa Tenaga Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	97,83	2,17	100,00
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	99,60	0,40	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	98,64	1,36	100,00
Tamat SMP Sederajat	97,48	2,52	100,00
Tamat SD Sederajat	94,73	5,27	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	83,98	16,02	100,00
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	99,54	0,46	100,00
40% Menengah	98,78	1,22	100,00
40% Terbawah	96,47	3,53	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	98,99	1,01	100,00
Perdesaan	96,36	3,64	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.5 Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Karakteristik dan Tempat Persalinan, 2025

Karakteristik	Tempat Persalinan		Jumlah
	Fasilitas Kesehatan	Bukan Fasilitas Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	94,37	5,63	100,00
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tamat Pendidikan Tinggi	97,51	2,49	100,00
Tamat SMA/SMK Sederajat	95,51	4,49	100,00
Tamat SMP Sederajat	93,53	6,47	100,00
Tamat SD Sederajat	89,35	10,65	100,00
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	78,29	21,71	100,00
Distribusi Pengeluaran			
20% Teratas	97,11	2,89	100,00
40% Menengah	95,77	4,23	100,00
40% Terbawah	92,29	7,71	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	97,03	2,97	100,00
Perdesaan	90,98	9,02	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.6 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Pemuda Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	22,52	21,82	23,73	21,37	22,04
Sumatera Utara	22,51	21,86	23,39	21,50	22,19
Sumatera Barat	22,95	22,07	23,89	21,68	22,48
Riau	22,88	21,31	23,27	21,15	21,87
Jambi	22,47	21,18	23,02	20,64	21,50
Sumatera Selatan	22,58	20,45	22,37	20,33	21,08
Bengkulu	21,88	20,95	22,52	20,40	21,16
Lampung	21,89	21,26	22,81	20,68	21,43
Kep. Bangka Belitung	21,55	20,49	22,54	20,19	21,09
Kepulauan Riau	23,04	21,50	24,03	22,33	22,97
DKI Jakarta	22,27	—	23,08	21,85	22,27
Jawa Barat	21,60	20,13	22,97	20,45	21,29
Jawa Tengah	22,09	21,18	23,24	20,79	21,61
DI Yogyakarta	22,59	21,72	23,30	21,91	22,38
Jawa Timur	21,79	20,86	22,98	20,50	21,36
Banten	21,99	20,37	22,97	20,95	21,64
Bali	22,69	21,29	23,29	21,75	22,33
Nusa Tenggara Barat	20,93	20,08	21,94	19,73	20,49
Nusa Tenggara Timur	22,15	21,42	22,71	20,93	21,57
Kalimantan Barat	21,58	20,24	22,14	19,87	20,68
Kalimantan Tengah	21,50	20,13	22,42	19,68	20,64
Kalimantan Selatan	21,29	19,91	22,48	19,57	20,57
Kalimantan Timur	21,75	20,96	22,91	20,69	21,47
Kalimantan Utara	21,98	20,86	22,97	20,74	21,54
Sulawesi Utara	21,01	20,46	21,88	20,09	20,74
Sulawesi Tengah	21,32	20,45	22,09	19,96	20,71
Sulawesi Selatan	21,90	20,99	22,78	20,59	21,37
Sulawesi Tenggara	21,43	20,76	22,39	20,21	20,98
Gorontalo	21,92	20,87	22,58	20,36	21,26
Sulawesi Barat	20,94	20,87	22,15	20,10	20,88
Maluku	21,81	21,13	22,48	20,74	21,40
Maluku Utara	21,88	20,52	21,70	20,36	20,86
Papua Barat	21,17	20,49	21,83	19,89	20,65
Papua Barat Daya	21,16	21,00	22,24	20,43	21,07
Papua	21,41	21,26	22,68	20,61	21,35
Papua Selatan	21,39	20,25	21,54	20,03	20,57
Papua Tengah	21,93	20,92	22,18	20,44	21,13
Papua Pegunungan	20,07	20,66	21,65	20,10	20,64
Indonesia	21,92	20,91	22,92	20,67	21,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.7 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2025

Provinsi	Usia Kawin Pertama				Jumlah
	<16 Tahun	16–18 Tahun	19–24 Tahun	25–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,17 ¹	11,60	64,76	22,47	100,00
Sumatera Utara	0,71	11,57	63,56	24,15	100,00
Sumatera Barat	1,08	11,43	57,55	29,95	100,00
Riau	1,35 ¹	15,61	59,95	23,09	100,00
Jambi	2,77	17,47	59,32	20,44	100,00
Sumatera Selatan	3,38	20,06	59,22	17,35	100,00
Bengkulu	3,82	19,72	58,55	17,90	100,00
Lampung	1,62	15,47	66,69	16,22	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,44	20,05	60,21	16,30	100,00
Kepulauan Riau	0,23 ¹	10,32	52,95	36,50	100,00
DKI Jakarta	NA	9,54	64,40	25,48	100,00
Jawa Barat	2,00	19,29	62,26	16,46	100,00
Jawa Tengah	1,01	16,66	63,39	18,94	100,00
DI Yogyakarta	1,76 ¹	10,12	62,09	26,03	100,00
Jawa Timur	2,38	16,34	63,45	17,83	100,00
Banten	1,69 ¹	14,35	65,62	18,33	100,00
Bali	1,51 ¹	10,90	59,08	28,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,93	27,54	51,99	15,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,27	16,07	63,55	19,12	100,00
Kalimantan Barat	3,34	25,29	58,48	12,89	100,00
Kalimantan Tengah	4,09	26,54	53,68	15,69	100,00
Kalimantan Selatan	4,93	22,74	59,08	13,25	100,00
Kalimantan Timur	3,69	15,25	62,97	18,09	100,00
Kalimantan Utara	3,23	14,88	61,86	20,02	100,00
Sulawesi Utara	3,06	24,09	58,78	14,07	100,00
Sulawesi Tengah	4,41	22,69	57,88	15,02	100,00
Sulawesi Selatan	3,94	19,50	56,14	20,42	100,00
Sulawesi Tenggara	3,28	22,28	57,89	16,56	100,00
Gorontalo	3,06	19,35	59,51	18,08	100,00
Sulawesi Barat	3,19	22,77	56,94	17,10	100,00
Maluku	1,12	19,81	61,46	17,62	100,00
Maluku Utara	1,71	23,47	57,92	16,90	100,00
Papua Barat	5,78	20,22	61,23	12,77	100,00
Papua Barat Daya	4,98 ¹	19,06	56,62	19,34	100,00
Papua	3,29 ¹	15,62	62,51	18,58	100,00
Papua Selatan	5,95	21,88	59,36	12,81	100,00
Papua Tengah	2,65	14,91	68,15	14,30	100,00
Papua Pegunungan	2,60	22,74	63,06	11,59	100,00
Indonesia	2,16	17,35	61,66	18,84	100,00

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.8 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Umur saat Melahirkan Pertama, 2025

Provinsi	Umur saat Melahirkan Pertama		Jumlah
	<20 Tahun	20–30 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	20,21	79,79	100,00
Sumatera Utara	19,84	80,16	100,00
Sumatera Barat	20,77	79,23	100,00
Riau	24,33	75,67	100,00
Jambi	31,77	68,23	100,00
Sumatera Selatan	36,11	63,89	100,00
Bengkulu	34,29	65,71	100,00
Lampung	27,43	72,57	100,00
Kep. Bangka Belitung	38,45	61,55	100,00
Kepulauan Riau	15,07	84,93	100,00
DKI Jakarta	16,71	83,29	100,00
Jawa Barat	28,59	71,41	100,00
Jawa Tengah	26,25	73,75	100,00
DI Yogyakarta	19,91	80,09	100,00
Jawa Timur	26,18	73,82	100,00
Banten	24,70	75,30	100,00
Bali	23,22	76,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,01	56,99	100,00
Nusa Tenggara Timur	28,51	71,49	100,00
Kalimantan Barat	40,25	59,75	100,00
Kalimantan Tengah	48,31	51,69	100,00
Kalimantan Selatan	37,11	62,89	100,00
Kalimantan Timur	28,29	71,71	100,00
Kalimantan Utara	29,62	70,38	100,00
Sulawesi Utara	38,78	61,22	100,00
Sulawesi Tengah	38,29	61,71	100,00
Sulawesi Selatan	30,88	69,12	100,00
Sulawesi Tenggara	35,87	64,13	100,00
Gorontalo	34,67	65,33	100,00
Sulawesi Barat	38,84	61,16	100,00
Maluku	33,36	66,64	100,00
Maluku Utara	39,49	60,51	100,00
Papua Barat	40,71	59,29	100,00
Papua Barat Daya	34,97	65,03	100,00
Papua	34,86	65,14	100,00
Papua Selatan	39,35	60,65	100,00
Papua Tengah	33,33	66,67	100,00
Papua Pegunungan	32,50	67,50	100,00
Indonesia	28,33	71,67	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.9 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025

Provinsi	Berat Badan Bayi saat Lahir	
	< 2,5 Kg	≥ 2,5 Kg
(1)	(2)	(3)
Aceh	16,26	82,77
Sumatera Utara	10,83	85,33
Sumatera Barat	14,03	85,34
Riau	13,20	85,83
Jambi	12,17	85,19
Sumatera Selatan	14,35	85,12
Bengkulu	10,56	88,44
Lampung	14,19	85,62
Kep. Bangka Belitung	7,01 ¹	92,99
Kepulauan Riau	NA	94,68
DKI Jakarta	14,03 ¹	85,97
Jawa Barat	15,49	84,03
Jawa Tengah	12,18	87,69
DI Yogyakarta	13,26 ¹	86,74
Jawa Timur	11,80	87,27
Banten	15,34	81,34
Bali	7,56	91,85
Nusa Tenggara Barat	9,56 ¹	87,40
Nusa Tenggara Timur	21,88	72,70
Kalimantan Barat	12,95	85,24
Kalimantan Tengah	14,54	82,44
Kalimantan Selatan	9,84	90,03
Kalimantan Timur	18,44	79,97
Kalimantan Utara	10,05 ¹	88,51
Sulawesi Utara	9,41	88,40
Sulawesi Tengah	14,42	81,49
Sulawesi Selatan	16,54	82,44
Sulawesi Tenggara	17,10	80,60
Gorontalo	23,41	76,09
Sulawesi Barat	22,47	76,01
Maluku	13,91	66,45
Maluku Utara	20,24	73,02
Papua Barat	21,58	57,81
Papua Barat Daya	19,10	68,24
Papua	25,30 ¹	68,84
Papua Selatan	18,25	53,76
Papua Tengah	30,00	47,69
Papua Pegunungan	18,52	49,28
Indonesia	13,68	84,66

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.10 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2025

Provinsi	Penolong Persalinan	
	Tenaga Kesehatan	Tanpa Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)
Aceh	99,90	NA
Sumatera Utara	98,01	1,99
Sumatera Barat	98,72	1,28 ¹
Riau	97,37	2,63 ¹
Jambi	95,73	4,27 ¹
Sumatera Selatan	98,70	1,30 ¹
Bengkulu	98,72	NA
Lampung	99,86	NA
Kep. Bangka Belitung	100,00	–
Kepulauan Riau	100,00	–
DKI Jakarta	100,00	–
Jawa Barat	97,10	2,90
Jawa Tengah	99,87	NA
DI Yogyakarta	99,13	NA
Jawa Timur	99,27	0,73 ¹
Banten	98,39	1,61 ¹
Bali	99,93	NA
Nusa Tenggara Barat	98,67	NA
Nusa Tenggara Timur	93,08	6,92
Kalimantan Barat	94,28	5,72
Kalimantan Tengah	92,79	7,21 ¹
Kalimantan Selatan	98,07	1,93 ¹
Kalimantan Timur	99,50	NA
Kalimantan Utara	100,00	–
Sulawesi Utara	96,84	3,16 ¹
Sulawesi Tengah	94,72	5,28 ¹
Sulawesi Selatan	99,27	0,73 ¹
Sulawesi Tenggara	94,91	5,09
Gorontalo	99,62	NA
Sulawesi Barat	93,44	NA
Maluku	76,96	23,04
Maluku Utara	94,15	5,85 ¹
Papua Barat	86,27	13,73
Papua Barat Daya	77,38	22,62
Papua	96,29	3,71 ¹
Papua Selatan	85,12	14,88
Papua Tengah	83,85	16,15 ¹
Papua Pegunungan	60,86	39,14
Indonesia	97,83	2,17

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.11 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2025

Provinsi	Tempat Persalinan	
	Fasilitas Kesehatan	Bukan Fasilitas Kesehatan
(1)	(2)	(3)
Aceh	97,70	2,30 ¹
Sumatera Utara	91,22	8,78
Sumatera Barat	96,65	3,35
Riau	90,32	9,68
Jambi	87,03	12,97
Sumatera Selatan	90,85	9,15
Bengkulu	96,78	3,22 ¹
Lampung	97,78	2,22 ¹
Kep. Bangka Belitung	100,00	–
Kepulauan Riau	97,48	NA
DKI Jakarta	100,00	–
Jawa Barat	92,51	7,49
Jawa Tengah	99,53	0,47 ¹
DI Yogyakarta	99,13	0,87
Jawa Timur	98,94	1,06
Banten	94,64	5,36
Bali	99,93	0,07
Nusa Tenggara Barat	97,21	2,79
Nusa Tenggara Timur	90,04	9,96
Kalimantan Barat	86,26	13,74
Kalimantan Tengah	76,03	23,97
Kalimantan Selatan	92,83	7,17
Kalimantan Timur	97,12	2,88
Kalimantan Utara	97,90	2,10
Sulawesi Utara	95,69	4,31
Sulawesi Tengah	89,85	10,15
Sulawesi Selatan	98,12	1,88
Sulawesi Tenggara	88,86	11,14
Gorontalo	99,56	0,44
Sulawesi Barat	90,74	9,26
Maluku	57,16	42,84
Maluku Utara	69,72	30,28
Papua Barat	71,96	28,04
Papua Barat Daya	66,98	33,02
Papua	83,71	16,29
Papua Selatan	82,81	17,19
Papua Tengah	64,56	35,44
Papua Pegunungan	36,74	63,26
Indonesia	94,37	5,63

Catatan: ¹Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.12 *Sampling Error* Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Usia Kawin Pertama, 2025

Provinsi	< 16 Tahun				16-18 Tahun			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,17	0,57	1,77	26,10	11,60	9,94	13,26	7,30
Sumatera Utara	0,71	0,39	1,04	23,32	11,57	9,91	13,23	7,33
Sumatera Barat	1,08	0,61	1,54	22,11	11,43	9,78	13,08	7,35
Riau	1,35	0,60	2,10	28,34	15,61	13,12	18,10	8,14
Jambi	2,77	1,82	3,72	17,54	17,47	15,05	19,88	7,05
Sumatera Selatan	3,38	2,51	4,25	13,15	20,06	17,99	22,13	5,26
Bengkulu	3,82	2,64	5,00	15,76	19,72	17,06	22,39	6,88
Lampung	1,62	1,02	2,22	18,98	15,47	13,42	17,52	6,77
Kep. Bangka Belitung	3,44	2,22	4,66	18,13	20,05	16,89	23,21	8,04
Kepulauan Riau	0,23	0,01	0,45	49,21	10,32	5,57	15,08	23,51
DKI Jakarta	NA	NA	NA	68,47	9,54	6,15	12,93	18,14
Jawa Barat	2,00	1,49	2,51	13,11	19,29	17,68	20,90	4,26
Jawa Tengah	1,01	0,69	1,32	16,13	16,66	15,41	17,92	3,84
DI Yogyakarta	1,76	0,33	3,19	41,45	10,12	6,71	13,54	17,21
Jawa Timur	2,38	1,88	2,88	10,82	16,34	15,08	17,59	3,92
Banten	1,69	0,65	2,74	31,60	14,35	11,46	17,25	10,30
Bali	1,51	0,64	2,37	29,23	10,90	8,75	13,05	10,08
Nusa Tenggara Barat	4,93	3,50	6,37	14,79	27,54	24,53	30,55	5,57
Nusa Tenggara Timur	1,27	0,74	1,80	21,11	16,07	14,20	17,93	5,92
Kalimantan Barat	3,34	2,45	4,23	13,58	25,29	22,85	27,72	4,92
Kalimantan Tengah	4,09	2,90	5,28	14,84	26,54	23,86	29,21	5,14
Kalimantan Selatan	4,93	3,58	6,28	13,99	22,74	20,15	25,33	5,82
Kalimantan Timur	3,69	2,26	5,11	19,72	15,25	12,31	18,19	9,85
Kalimantan Utara	3,23	1,73	4,73	23,66	14,88	10,85	18,92	13,83
Sulawesi Utara	3,06	2,02	4,10	17,39	24,09	21,15	27,04	6,23
Sulawesi Tengah	4,41	3,21	5,61	13,87	22,69	20,02	25,37	6,02
Sulawesi Selatan	3,94	3,08	4,79	11,07	19,50	17,64	21,35	4,86
Sulawesi Tenggara	3,28	2,16	4,40	17,43	22,28	19,61	24,94	6,11
Gorontalo	3,06	1,81	4,30	20,76	19,35	16,15	22,55	8,44
Sulawesi Barat	3,19	1,85	4,53	21,44	22,77	19,38	26,16	7,60
Maluku	1,12	0,63	1,61	22,25	19,81	16,56	23,05	8,35
Maluku Utara	1,71	0,95	2,48	22,74	23,47	20,09	26,84	7,34
Papua Barat	5,78	3,36	8,20	21,33	20,22	16,21	24,22	10,10
Papua Barat Daya	4,98	2,01	7,96	30,43	19,06	14,64	23,47	11,82
Papua	3,29	0,82	5,76	38,37	15,62	11,25	20,00	14,29
Papua Selatan	5,95	3,17	8,72	23,84	21,88	17,30	26,46	10,68
Papua Tengah	2,65	1,36	3,93	24,76	14,91	11,71	18,10	10,92
Papua Pegunungan	2,60	1,36	3,85	24,36	22,74	18,40	27,08	9,74
Indonesia	2,16	1,99	2,32	3,85	17,35	16,87	17,82	1,40

Lanjutan Tabel 7.12

Provinsi	19-24 Tahun				25-30 Tahun			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	64,76	62,01	67,50	2,16	22,47	19,94	25,00	5,74
Sumatera Utara	63,56	60,83	66,30	2,19	24,15	21,56	26,75	5,49
Sumatera Barat	57,55	54,60	60,49	2,61	29,95	27,03	32,86	4,96
Riau	59,95	56,60	63,29	2,85	23,09	20,08	26,11	6,66
Jambi	59,32	55,99	62,64	2,86	20,44	17,50	23,39	7,35
Sumatera Selatan	59,22	56,27	62,16	2,54	17,35	14,60	20,09	8,08
Bengkulu	58,55	55,02	62,08	3,07	17,90	14,84	20,96	8,71
Lampung	66,69	63,86	69,52	2,16	16,22	13,88	18,57	7,37
Kep. Bangka Belitung	60,21	55,95	64,47	3,61	16,30	12,60	20,01	11,58
Kepulauan Riau	52,95	44,46	61,44	8,18	36,50	28,65	44,35	10,98
DKI Jakarta	64,40	58,59	70,21	4,60	25,48	19,95	31,02	11,08
Jawa Barat	62,26	60,09	64,42	1,77	16,46	14,61	18,30	5,72
Jawa Tengah	63,39	61,70	65,09	1,36	18,94	17,45	20,42	4,00
DI Yogyakarta	62,09	56,49	67,69	4,60	26,03	20,86	31,20	10,14
Jawa Timur	63,45	61,82	65,08	1,31	17,83	16,47	19,20	3,92
Banten	65,62	61,08	70,16	3,53	18,33	14,31	22,36	11,21
Bali	59,08	55,06	63,10	3,47	28,51	24,58	32,44	7,03
Nusa Tenggara Barat	51,99	48,66	55,32	3,27	15,54	12,86	18,21	8,77
Nusa Tenggara Timur	63,55	61,14	65,96	1,94	19,12	16,90	21,33	5,91
Kalimantan Barat	58,48	55,58	61,39	2,53	12,89	10,72	15,07	8,61
Kalimantan Tengah	53,68	50,52	56,84	3,01	15,69	13,03	18,36	8,66
Kalimantan Selatan	59,08	55,97	62,20	2,69	13,25	10,95	15,55	8,87
Kalimantan Timur	62,97	58,68	67,25	3,47	18,09	14,65	21,54	9,72
Kalimantan Utara	61,86	55,99	67,74	4,85	20,02	14,77	25,28	13,39
Sulawesi Utara	58,78	55,26	62,30	3,06	14,07	11,25	16,89	10,23
Sulawesi Tengah	57,88	54,63	61,13	2,86	15,02	12,36	17,68	9,04
Sulawesi Selatan	56,14	53,64	58,65	2,28	20,42	18,20	22,64	5,55
Sulawesi Tenggara	57,89	54,68	61,09	2,82	16,56	14,00	19,12	7,89
Gorontalo	59,51	55,31	63,70	3,60	18,08	14,35	21,82	10,54
Sulawesi Barat	56,94	52,96	60,93	3,57	17,10	13,36	20,85	11,18
Maluku	61,46	57,05	65,87	3,66	17,62	14,24	20,99	9,77
Maluku Utara	57,92	53,81	62,03	3,62	16,90	13,39	20,40	10,58
Papua Barat	61,23	56,72	65,75	3,76	12,77	9,63	15,91	12,53
Papua Barat Daya	56,62	50,63	62,61	5,39	19,34	14,34	24,34	13,19
Papua	62,51	55,69	69,32	5,56	18,58	11,88	25,28	18,40
Papua Selatan	59,36	53,35	65,37	5,17	12,81	8,27	17,36	18,10
Papua Tengah	68,15	63,69	72,61	3,34	14,30	10,53	18,07	13,46
Papua Pegunungan	63,06	58,29	67,83	3,86	11,59	8,40	14,79	14,07
Indonesia	61,66	61,00	62,31	0,54	18,84	18,27	19,41	1,54

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.13 *Sampling Error* Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Berat Badan Bayi Saat Lahir, 2025

Provinsi	< 2,5 Kg				≥ 2,5 Kg			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16,26	12,25	20,26	12,57	82,77	78,69	86,85	2,51
Sumatera Utara	10,83	8,05	13,62	13,11	85,33	82,25	88,41	1,84
Sumatera Barat	14,03	10,32	17,75	13,51	85,34	81,60	89,09	2,24
Riau	13,20	8,54	17,85	17,99	85,83	81,08	90,58	2,83
Jambi	12,17	7,82	16,52	18,24	85,19	80,47	89,91	2,83
Sumatera Selatan	14,35	10,17	18,53	14,86	85,12	80,92	89,33	2,52
Bengkulu	10,56	6,16	14,96	21,27	88,44	83,93	92,95	2,60
Lampung	14,19	9,55	18,83	16,69	85,62	80,97	90,28	2,77
Kep. Bangka Belitung	7,01	2,16	11,86	35,28	92,99	88,14	97,84	2,66
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	69,45	94,68	88,79	100,00	3,17
DKI Jakarta	14,03	5,92	22,14	29,50	85,97	77,86	94,08	4,81
Jawa Barat	15,49	12,02	18,95	11,42	84,03	80,53	87,53	2,13
Jawa Tengah	12,18	9,71	14,64	10,34	87,69	85,22	90,17	1,44
DI Yogyakarta	13,26	5,80	20,71	28,68	86,74	79,29	94,20	4,38
Jawa Timur	11,80	9,51	14,09	9,90	87,27	84,94	89,60	1,36
Banten	15,34	9,61	21,08	19,06	81,34	75,21	87,47	3,84
Bali	7,56	3,96	11,16	24,32	91,85	88,18	95,51	2,04
Nusa Tenggara Barat	9,56	4,81	14,31	25,34	87,40	82,01	92,79	3,15
Nusa Tenggara Timur	21,88	18,20	25,56	8,58	72,70	68,77	76,63	2,76
Kalimantan Barat	12,95	9,14	16,76	15,02	85,24	81,25	89,23	2,39
Kalimantan Tengah	14,54	9,31	19,77	18,34	82,44	76,84	88,05	3,47
Kalimantan Selatan	9,84	6,06	13,63	19,62	90,03	86,23	93,82	2,15
Kalimantan Timur	18,44	11,47	25,41	19,29	79,97	72,88	87,07	4,53
Kalimantan Utara	10,05	3,71	16,40	32,21	88,51	81,96	95,06	3,77
Sulawesi Utara	9,41	6,08	12,73	18,04	88,40	84,74	92,07	2,12
Sulawesi Tengah	14,42	9,73	19,11	16,59	81,49	76,36	86,63	3,21
Sulawesi Selatan	16,54	12,86	20,22	11,34	82,44	78,68	86,20	2,33
Sulawesi Tenggara	17,10	12,27	21,93	14,41	80,60	75,61	85,60	3,16
Gorontalo	23,41	15,78	31,04	16,63	76,09	68,45	83,74	5,13
Sulawesi Barat	22,47	14,58	30,36	17,92	76,01	68,02	84,00	5,36
Maluku	13,91	8,60	19,21	19,47	66,45	58,75	74,14	5,91
Maluku Utara	20,24	14,10	26,37	15,46	73,02	66,11	79,94	4,83
Papua Barat	21,58	13,82	29,35	18,36	57,81	47,84	67,79	8,80
Papua Barat Daya	19,10	10,33	27,87	23,43	68,24	58,34	78,14	7,40
Papua	25,30	12,40	38,21	26,02	68,84	55,75	81,92	9,70
Papua Selatan	18,25	10,53	25,97	21,58	53,76	42,42	65,10	10,76
Papua Tengah	30,00	16,67	43,34	22,67	47,69	34,02	61,36	14,62
Papua Pegunungan	18,52	10,13	26,90	23,11	49,28	38,57	59,99	11,08
Indonesia	13,68	12,75	14,62	3,49	84,66	83,71	85,62	0,58

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.14 Sampling Error Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Penolong Persalinan, 2025

Provinsi	Tenaga Kesehatan				Tanpa Tenaga Kesehatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	99,90	99,69	100,00	0,10	NA	NA	NA	100,02
Sumatera Utara	98,01	97,18	98,85	0,43	1,99	1,15	2,82	21,41
Sumatera Barat	98,72	97,99	99,44	0,37	1,28	0,56	2,01	28,83
Riau	97,37	95,28	99,46	1,09	2,63	0,54	4,72	40,56
Jambi	95,73	93,05	98,42	1,43	4,27	1,58	6,95	32,12
Sumatera Selatan	98,70	97,82	99,58	0,45	1,30	0,42	2,18	34,41
Bengkulu	98,72	97,44	100,00	0,66	NA	NA	NA	51,35
Lampung	99,86	99,57	100,00	0,14	NA	NA	NA	100,12
Kep. Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	~0	–	–	–	NA
Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00	~0	–	–	–	NA
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	~0	–	–	–	NA
Jawa Barat	97,10	95,88	98,32	0,64	2,90	1,68	4,12	21,50
Jawa Tengah	99,87	99,69	100,00	0,09	NA	NA	NA	73,02
DI Yogyakarta	99,13	97,42	100,00	0,88	NA	NA	NA	99,92
Jawa Timur	99,27	98,79	99,76	0,25	0,73	0,24	1,21	34,32
Banten	98,39	96,84	99,95	0,80	1,61	0,05	3,16	49,31
Bali	99,93	99,80	100,00	0,07	NA	NA	NA	100,23
Nusa Tenggara Barat	98,67	96,84	100,00	0,94	NA	NA	NA	69,75
Nusa Tenggara Timur	93,08	91,01	95,15	1,13	6,92	4,85	8,99	15,26
Kalimantan Barat	94,28	91,57	96,99	1,47	5,72	3,01	8,43	24,14
Kalimantan Tengah	92,79	89,16	96,42	2,00	7,21	3,58	10,84	25,69
Kalimantan Selatan	98,07	96,46	99,69	0,84	1,93	0,31	3,54	42,72
Kalimantan Timur	99,50	98,64	100,00	0,44	NA	NA	NA	86,66
Kalimantan Utara	100,00	100,00	100,00	~0	–	–	–	NA
Sulawesi Utara	96,84	94,83	98,84	1,06	3,16	1,16	5,17	32,33
Sulawesi Tengah	94,72	92,02	97,43	1,46	5,28	2,57	7,98	26,13
Sulawesi Selatan	99,27	98,77	99,77	0,26	0,73	0,23	1,23	35,16
Sulawesi Tenggara	94,91	92,47	97,36	1,31	5,09	2,64	7,53	24,51
Gorontalo	99,62	98,87	100,00	0,38	NA	NA	NA	100,79
Sulawesi Barat	93,44	86,75	100,00	3,65	NA	NA	NA	52,07
Maluku	76,96	70,81	83,11	4,08	23,04	16,89	29,19	13,62
Maluku Utara	94,15	90,27	98,02	2,10	5,85	1,98	9,73	33,78
Papua Barat	86,27	79,72	92,81	3,87	13,73	7,19	20,28	24,32
Papua Barat Daya	77,38	68,03	86,74	6,17	22,62	13,26	31,97	21,10
Papua	96,29	93,92	98,67	1,26	3,71	1,33	6,08	32,65
Papua Selatan	85,12	78,42	91,81	4,01	14,88	8,19	21,58	22,95
Papua Tengah	83,85	75,56	92,15	5,05	16,15	7,85	24,44	26,22
Papua Pegunungan	60,86	49,17	72,55	9,80	39,14	27,45	50,83	15,24
Indonesia	97,83	97,54	98,12	0,15	2,17	1,88	2,46	6,78

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tabel 7.15 *Sampling Error* Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Provinsi dan Tempat Persalinan, 2025

Provinsi	Fasilitas Kesehatan				Bukan Fasilitas Kesehatan			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	97,70	95,96	99,43	0,91	2,30	0,57	4,04	38,47
Sumatera Utara	91,22	89,21	93,24	1,13	8,78	6,76	10,79	11,71
Sumatera Barat	96,65	95,46	97,84	0,63	3,35	2,16	4,54	18,16
Riau	90,32	86,57	94,07	2,12	9,68	5,93	13,43	19,77
Jambi	87,03	82,43	91,63	2,70	12,97	8,37	17,57	18,08
Sumatera Selatan	90,85	88,02	93,68	1,59	9,15	6,32	11,98	15,76
Bengkulu	96,78	94,77	98,79	1,06	3,22	1,21	5,23	31,81
Lampung	97,78	96,28	99,29	0,78	2,22	0,71	3,72	34,64
Kep. Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	~0	–	–	–	NA
Kepulauan Riau	97,48	93,46	100,00	2,10	NA	NA	NA	81,09
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	~0	–	–	–	NA
Jawa Barat	92,51	90,20	94,81	1,27	7,49	5,19	9,80	15,68
Jawa Tengah	99,53	99,11	99,96	0,22	0,47	0,04	0,89	46,65
DI Yogyakarta	99,13	97,42	100,00	0,88	NA	NA	NA	99,92
Jawa Timur	98,94	98,35	99,52	0,30	1,06	0,48	1,65	27,98
Banten	94,64	91,60	97,68	1,64	5,36	2,32	8,40	28,92
Bali	99,93	99,80	100,00	0,07	NA	NA	NA	100,23
Nusa Tenggara Barat	97,21	95,04	99,37	1,14	2,79	0,63	4,96	39,60
Nusa Tenggara Timur	90,04	87,52	92,57	1,43	9,96	7,43	12,48	12,93
Kalimantan Barat	86,26	82,47	90,06	2,24	13,74	9,94	17,53	14,10
Kalimantan Tengah	76,03	69,98	82,07	4,06	23,97	17,93	30,02	12,87
Kalimantan Selatan	92,83	89,67	96,00	1,74	7,17	4,00	10,33	22,55
Kalimantan Timur	97,12	94,03	100,00	1,62	NA	NA	NA	54,63
Kalimantan Utara	97,90	95,94	99,87	1,02	2,10	0,13	4,06	47,89
Sulawesi Utara	95,69	93,47	97,91	1,18	4,31	2,09	6,53	26,31
Sulawesi Tengah	89,85	86,26	93,44	2,04	10,15	6,56	13,74	18,04
Sulawesi Selatan	98,12	97,18	99,05	0,49	1,88	0,95	2,82	25,28
Sulawesi Tenggara	88,86	85,21	92,51	2,09	11,14	7,49	14,79	16,70
Gorontalo	99,56	98,80	100,00	0,39	NA	NA	NA	88,02
Sulawesi Barat	90,74	83,69	97,80	3,96	9,26	2,20	16,31	38,87
Maluku	57,16	49,24	65,09	7,07	42,84	34,91	50,76	9,44
Maluku Utara	69,72	62,32	77,12	5,42	30,28	22,88	37,68	12,47
Papua Barat	71,96	63,66	80,26	5,88	28,04	19,74	36,34	15,10
Papua Barat Daya	66,98	57,10	76,85	7,52	33,02	23,15	42,90	15,25
Papua	83,71	75,52	91,90	4,99	16,29	8,10	24,48	25,64
Papua Selatan	82,81	75,92	89,71	4,25	17,19	10,29	24,08	20,47
Papua Tengah	64,56	55,45	73,66	7,20	35,44	26,34	44,55	13,11
Papua Pegunungan	36,74	26,14	47,33	14,72	63,26	52,67	73,86	8,54
Indonesia	94,37	93,85	94,88	0,28	5,63	5,12	6,15	4,70

Catatan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat

NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



BAB VIII

PROGRAM

KEPEMUDAAN





<https://www.bps.go.id>



Pemuda memiliki peran aktif sebagai ujung tombak generasi penerus dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kesejahteraan. Fungsi dan peran pemuda perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional di bidang kepemudaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Pelayanan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diperlukan koordinasi strategis lintas sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda, meliputi: (i) peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan; (ii) peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan; (iii) peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di perdesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal; (iv) peningkatan kualitas kesehatan Pemuda; (v) peningkatan daya saing wirausaha Pemuda; (vi) peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan (vii) peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Bab ini akan menjelaskan berbagai program kepemudaan yang dilaksanakan pemerintah untuk pembangunan kepemudaan di Indonesia. Umumnya program ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya yang merupakan program unggulan di bidang kepemudaan. Selain itu, terdapat program yang lebih spesifik terkait kepemudaan yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Sejatinya masih banyak lagi program-program kepemudaan yang terlaksana di Indonesia, tetapi kami fokuskan beberapa program kepemudaan yang dilaksanakan Pemerintah selama tahun 2025 yang bersifat pengembangan sebagai berikut.

Program Young Progressive Academy (YPA)

Program *Young Progressive Academy* (YPA) merupakan program hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan *Frederich Ebert Stiftung* (FES) yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan pengetahuan pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, suku, dan agama tentang isu-isu terkini dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Harapannya para pemuda dapat berdaya, berperan, serta berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Peserta dari program ini berasal dari berbagai latar belakang, antara lain pengacara, dosen, peneliti, pegiat kemanusiaan, pegiat literasi, aparatur sipil negara, pastor, guru, jurnalis, dan mahasiswa.

Percepatan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh Indonesia. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional yang bertemakan “Posisi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pasca Diundangkannya PP No. 28 Tahun 2024” pada 12 Juni 2025 di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan rokok dan asap rokok. Saat ini, sebanyak 209 kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait KTR, namun masih ada 28 kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi apa pun. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengeluarkan surat edaran bersama dan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar mempercepat progres legislasi peraturan terkait KTR di wilayahnya masing-masing. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga mendorong agar kementerian, lembaga, dan institusi pemerintah dapat menjadi teladan dalam pelaksanaan KTR, termasuk menyediakan ruang khusus merokok agar tidak mencemari area kerja publik.

Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025

Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) merupakan program unggulan kepemudaan yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemuda Indonesia agar mampu bersaing di kancah global, serta memperluas wawasan, mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan sekaligus menjadi alat promosi bagi Indonesia di kancah internasional, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Program PPAN yang diadakan pada rentang April hingga Desember 2025 meliputi *Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Programme* (SIYLEP), *Australia-Indonesia Youth Exchange Program* (AIYEP), dan *Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Exchange Program* (SSEAYP).

Pemuda Pelopor Desa 2025

Pemuda Pelopor Desa adalah program pembinaan dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan desa yang menjadi program kolaborasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong lahirnya pemuda-pemudi desa yang inovatif, berintegritas, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa berkelanjutan. Bidang kepeloporan yang dilombakan meliputi kewirausahaan, lingkungan, seni dan budaya, ekonomi digital, serta sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Mei hingga Agustus tahun 2025 di Banten dan Jakarta serta dilaksanakan pula secara *hybrid*.

Kelas Antikorupsi 2025

Kelas Antikorupsi 2025 adalah bentuk implementasi sula pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi. Tahun ini, Kelas Antikorupsi menargetkan peserta para pemuda di berbagai daerah untuk mendapatkan pengetahuan terkait pencegahan korupsi dan dilaksanakan di Semarang,



Padang, Samarinda, dan Kendari dalam rentang Juni hingga September 2025. Dalam sejarahnya, para pemuda selalu menjadi motor perubahan di negara ini. Harapan tertumpu kepada para pemuda untuk membantu pemberantasan korupsi di lingkungan sekitar mereka. Kelas Antikorupsi 2025 secara khusus akan membahas tentang integritas pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan bagaimana untuk dapat melapor dengan baik dan benar. Kelas Antikorupsi 2025 bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemuda dan LSM tentang kejahatan korupsi dan permasalahannya serta upaya peran serta yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi; meningkatkan peran serta pemuda dan LSM dalam pemberantasan korupsi di bidang pendidikan, pencegahan, dan penegakkan hukum; serta membina jaringan dan mitra strategis KPK di wilayah dalam rangka pemberantasan korupsi. Para pemuda yang menjadi peserta Kelas Antikorupsi 2025 diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pemahaman ini ke lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan peran serta masyarakat akan meningkat untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Good Game 2025

Good Game adalah program kompetisi inovasi sosial dan pendampingan kepada komunitas dan organisasi kepemudaan yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan inovatif, inklusif, produktif, dan berdampak. *Good Game* terbuka bagi komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia yang aktif dalam peningkatan pembangunan pemuda pada domain pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender. Program ini memberikan pelatihan, mentoring, dan akses jejaring untuk memperkuat kapasitas organisasi dan dampak program. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta pada rentang Agustus hingga Desember 2025.

Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Tahun 2025

Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia atau Kreativesia 2025 merupakan kegiatan tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk



merayakan dan mengapresiasi individu dan komunitas yang telah menghasilkan karya kreatif dan gagasan inovatif di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi, mempromosikan, dan mendukung inovasi serta kreativitas para pemuda Indonesia dalam berbagai bidang seperti teknologi, seni, budaya, dan sosial. Kreativesia 2025 digelar di Sumatera Selatan pada 14 hingga 18 Oktober 2025. Pemerintah berharap agar kegiatan ini dapat menjadi pendorong para pemuda Indonesia agar lebih berinovasi dan berkreativitas dalam menghadapi tantangan masa depan.

Kemah Bhakti Pemuda 2025

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Kemah Bhakti Pemuda 2025 dengan mengusung tema “Asta Cita dan Jalan Panjang Kepemudaan: Dari Tantangan Zaman Menuju Indonesia Berdaulat” pada 27–29 Oktober 2025 dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, mengasah kepemimpinan pemuda, serta merumuskan gagasan kebijakan strategis yang berakar dari daerah menuju tataran nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menegaskan kembali peran HMI sebagai laboratorium kepemimpinan nasional yang terus melahirkan kader berintegritas, berpikir kritis, dan berkomitmen pada cita-cita keislaman dan keindonesiaan yang berdaulat.

Program Magang Nasional

Magang Nasional merupakan program yang menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia. Kemnaker menggaet kalangan dunia usaha sebagai penyelenggara program pemagangan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Perusahaan diharapkan dapat membina langsung lulusan pendidikan tinggi agar siap kerja sesuai kebutuhan industri serta menyaring sekaligus menilai potensi tenaga kerja sebelum direkrut secara permanen.



<https://www.bps.go.id>





DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bimago.id>



<https://www.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Anukriti, S., & Dasgupta, S. (2017). *Discussion PaPer series Marriage Markets in Developing Countries*. Diakses dari www.iza.org
- Badan Pusat Statistik. (2023a, Januari 27). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/01/27/ffb5939b4393e5b1146a9b91/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>
- _____. (2023b). *Konsep/penjelasan teknis ketenagakerjaan*. Diakses dari [https://www.archive.bps.go.id/subject/6/tenaga kerja.html#subjekViewTab1](https://www.archive.bps.go.id/subject/6/tenaga%20kerja.html#subjekViewTab1)
- _____. (2023c). *Statistik Pendidikan 2023*. Jakarta Pusat: BPS.
- _____. (2024a, Desember 31). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html>
- _____. (2024b). *Buku 1 Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2024c). *Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2025, Juni 30). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2025*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/30/7cc0d8a5ea09515a0b2a2729/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2025.html>
- Cobb, C., & Douglas, P. (1928). *A Theory of Production*.
- de Pleijt, A. (2018, Januari). Human capital formation in the long run: evidence from average years of schooling in england, 1300–1900. *Cliometrica*, 12(1), 99-126.
- Doogan, N., Roberts, M., Wewers, M., Stanton, C., Keith, D., Gaalema, D., . . . Higgins, S. (2017, November). A growing geographic disparity: Rural and urban cigarette smoking trends in the United States. *Preventive Medicine*, 104, 79-85.

Fan, S., & Koski, A. (2022, Desember). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, Juni 12). *Darurat Perokok Bocah, Pemerintah Gaspol Aturan Kawasan Tanpa Rokok di Seluruh Indonesia*. Diakses dari <https://kemkes.go.id/eng/darurat-perokok-bocah-pemerintah-gaspol-aturan-kawasan-tanpa-rokok-di-seluruh-indonesia>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025, Oktober 30). *Magang Nasional, Berkontribusi Cetak Talenta Muda Kompeten di Perusahaan*. Diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/magang-nasional-berkontribusi-cetak-talenta-muda-kompeten-di-perusahaan>

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2025a). *Good Game 2025*. Diakses dari <https://deputi1.kemenpora.go.id/informasi/38/good-game-2025>

_____. (2025b). *Kreativesia 2025*. Diakses dari <https://deputi1.kemenpora.go.id/informasi/37/kreativesia-2025>

_____. (2025c). *Pemuda Pelopor Desa 2025*. Diakses dari <https://deputi1.kemenpora.go.id/informasi/36/pemuda-pelopor-desa-2025>

_____. (2025d). *Pertukaran Pemuda Antara Negara 2025*. Diakses dari <https://deputi1.kemenpora.go.id/informasi/39/pertukaran-pemuda-antara-negara-2025>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Metadata Indikator*.

_____. (2024a, Juni 10). *Capai Indonesia Emas 2045 dengan Tingkatkan Kualitas Pemuda*. Diakses dari <https://bappenas.go.id/id/berita/capai-indonesia-emas-2045-dengan-tingkatkan-kualitas-pemuda-Vlv6U>

_____. (2024b). *Metadata Indikator Tahun 2024 Pilar Pembangunan Lingkungan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Koran Nusantara. (2025, Oktober 31). *PB HMI Sukses Gelar Kemah Bhakti Pemuda 2025*. Diakses dari <https://korannusantara.id/2025/10/31/pb-hmi-sukses-gelar-kemah-bhakti-pemu/>
- Kwuta, E. (2025, Februari 17). *Pater Rio Nanto, SVD Ikut Pertemuan Young Progressive Academy (YPA) di Jakarta*. Diakses dari <https://www.syuradikara.sch.id/post/pater-rio-nanto-svd-ikut-pertemuan-young-progressive-academy-ypa-di-jakarta>
- Mankiw, N. (2019). *Principles of Economics* (9 ed.). Harvard University.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2025). *Kelas Antikorupsi*. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/program/kelas-antikorupsi/kelas-antikorupsi>
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z. *Indonesian Health Issues*, 2(1), 48-53. Diakses dari <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>
- Seiler-Ramadas, R., Sandner, I., Haider, S., Grabovac, I., & Dorner, T. E. (2021, Oktober). Health effects of electronic cigarette (e-cigarette) use on organ systems and its implications for public health. *Wiener klinische Wochenschrift*, 133(19-20), 1020-1027.
- Tsai, M., Byun, M. K., Shin, J., & Alexander, L. C. (2020, November). Effects of e-cigarettes and vaping devices on cardiac and pulmonary physiology. *The Journal of Physiology*, 598(22), 5039-5062.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations Children's Fund & World Health Organization. (2004). *Low birthweight : country, regional and global estimates*. United Nations Children's Fund; World Health Organization.

- United Nations Children's Fund. (2023, Juli). *Low Birthweight*. Diakses dari <https://data.unicef.org/topic/nutrition/low-birthweight/>
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. (2019). *UNESCO strategy for youth and adult literacy (2020-2025)*.
- United Nations General Assembly. (1948). *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. New York: United Nations General Assembly. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- World Bank. (2016). *Digital Dividends*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>
- _____. (2022, Februari). *The Social and Educational Consequences of Adolescent Childbearing*. Diakses dari <https://genderdata.worldbank.org/en/data-stories/adolescent-fertility>
- World Health Organization. (2006). *Married Adolescents*. Diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/9241593776>
- _____. (2018). *WHO Housing and Health Guidelines*. Swiss: World Health Organization.
- _____. (2023a). *Child Marriage*. Diakses dari <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- _____. (2023b). *Universal Health Coverage (UHC)*. Diakses dari [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc))
- _____. (2025a). *Reproductive health in the Western Pacific*. Diakses dari <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health>
- _____. (2025b). *Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023*.
- _____. (2025c, Juni). *Tobacco*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>



LAMPIRAN

<https://www.hps.go.id>





<https://www.bps.go.id>





VSEN25.K

Dibuat 1 set untuk
BPS Kab/Kota

REPUBLIC OF INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2025

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

MARET

SELAMAT PAGI/SANGGORE/MAAM. KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU, KAMI/SAYA AKAN MEWAWANCARI BAPAK/IBU BERSERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

- Ya bersedia → Mulai wawancara
Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXII. Catatan
Tidak bersedia → Lengkapi Isian Blok I, Blok II, dan Blok XXII Catatan. Lampirkan Berita Acara
Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pemerintah

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT									
101	Provinsi								
102	Kabupaten/Kota*)								
103	Kecamatan								
104	Desa/Kelurahan*)								
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan	2. Perdesaan						
106	Nomor Blok Sensus								
107	Nomor Kode Sampel								
108	Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal								
109	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga								
110	Nama Kepala Rumah Tangga								
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)								
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga								

BLOK II. KETERANGAN PENDATAAN									
Uraian	Nama dan Kode/NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan					
201. Pendata		Staf BPS Provinsi1 Staf BPS Kab/Kota2 Mitra3	Tgl Bln						
202. Pemeriksa		Staf BPS Provinsi1 Staf BPS Kab/Kota2 Mitra3	Tgl Bln						
203. Hasil pendataan rumah tangga		Terisi lengkap1 Terisi tidak lengkap2 Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendataan3 Responden meninggal4 Rumah tangga pindah/bangunan tempat tinggal sudah tidak ada5		Blok XXII. Calatan					

BLOK III. RINGKASAN	
301	Banyaknya anggota rumah tangga
302	Banyaknya anggota rumah tangga umur 0-4 tahun
303	Banyaknya anggota rumah tangga umur 5 tahun ke atas
304	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas
305	Banyaknya perempuan umur 10-54 tahun berstatus pernah kawin

1) Coret yang tidak perlu

Lanjutan Lampiran 1

KONSEP DAN DEFINISI			
➤ Pertanyaan 615: Apa IjazahSTTB Tertinggi yang Dimiliki? IjazahSTTB adalah lencana atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. ➤ Pertanyaan 613: Dalam 3 Bulan Terakhir, Seberapa Sering Menggunakan Internet? Minimal satu kali dalam sehari, yaitu setiap hari menggunakan internet, artinya orang tersebut tergolong mengakses internet yang tinggi. Minimal satu kali dalam seminggu, tetapi tidak setiap hari, yaitu tidak setiap hari menggunakan internet, tetapi dalam 1 minggu pernah mengakses minimal 1 kali, artinya orang tersebut tergolong jarang mengakses internet. Tidak mengakses lebih dari seminggu, yaitu dalam 3 bulan terakhir, pernah lebih dari 1 minggu tidak mengakses internet, artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet. ➤ Pertanyaan 905: Sejak 1 Januari – 31 Desember 2024, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya? Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan. ➤ Pertanyaan 1304: Jenis Imunisasi			
Jenis Imunisasi	Cara Pemberian	Umur	
Hepatitis B (<24 jam)	Disuntikkan di paha.	Diberikan sesaat setelah bayi lahir sampai bayi berumur 7 hari.	
BCG	Disuntikkan di pangkal lengan kanan atas dan biasanya menimbulkan bekas luka.	Diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum berumur 1 bulan.	
Polio Tetes 1-4		Diberikan 4 kali pada umur 1, 2, 3, dan 4 bulan.	
DPT-HB-Hib 1-3	Disuntikkan di paha, biasa diberikan bersama dengan vaksin polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.	
Rota Virus (RV) 1-3	Diteteskan ke dalam mulut.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 4 bulan.	
PCV 1-3	Disuntikkan di paha kiri, biasanya diberikan bersama vaksin DPT-HB-Hib dan Polio.	Diberikan 3 kali pada umur 2, 3, dan 12 bulan.	
Polio suntik (IPV) 1-2	Disuntikkan di paha kiri.	Diberikan mulai umur 2 atau 3 bulan.	
Campak-Rubella (MR)	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan satu kali mulai umur 9 bulan.	
Japanese Encephalitis (JE)	Disuntikkan di lengan atas.	Diberikan mulai umur 9 bulan di wilayah tertentu sesuai peraturan Kementerian Kesehatan (Bali, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta).	
DPT-HB-HB lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kanan.	Diberikan pada umur 18 bulan.	
Campak-Rubella (MR) Lanjutan	Disuntikkan di paha atau lengan kiri atas.	Diberikan pada umur 18-24 bulan.	

KONSEP DAN DEFINISI	
➤ Pertanyaan 203: Hasil Pendaftaran Rumah Tangga - Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap. - Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pendaftaran, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota. - Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pendaftaran, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pendaftaran. - Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai. - Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tanggabangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pendaftaran. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain. ➤ Pertanyaan 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrol/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT. ➤ Pertanyaan 408: Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini? Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut. ➤ Pertanyaan 605: Apakah Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah? Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. ➤ Pertanyaan 611: Apakah Sedang/Pernah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket AB/C)? Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket AB/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya. ➤ Pertanyaan 613: Apa Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Sedang/Pernah Didikuti? Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki: jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket AB/C). ➤ Pertanyaan 614: Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki? Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkat/keleas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket AB/C) di sekolah negeri/maupun swasta. Tamat sekolah/latasan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket AB/C) di sekolah negeri/maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/latasan pendidikan.	

3

Lanjutan Lampiran 1

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN																			
No. Unit ART	Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKIPERNAH MEMILIKIBUKUKTA NIKAH DIRI KUAL? KANTOR CATATAN SIPIL?	No. Unit Keluarga	No. Unit Ibu Kandung Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ayah kandung tidak tinggal di rumah tangga ini)	No. Unit Ayah Kandung Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ayah kandung tidak tinggal di rumah tangga ini)	APAKAH (nama) MEMILIKI NOMOR INDIK KENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak 509 ←	(Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART) 1. Jika ART mempunyai NIK, tetapi tidak sesuai format → pada empat digit terakhir 506 tuliskan 9998, pada 507 tuliskan kode 9, dan pada 508 tuliskan sumber data NIK sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh ART, dan pada 510 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXII. Catatan. 2. Jika ART mempunyai NIK, tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan → pada empat digit terakhir 506 tuliskan 9998 dan pada 507, 508, dan 510 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXII. Catatan.										Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK (Cek digit ke-7 NIK pada 508) (Kode)	Sumber Data Induk Kependudukan (Kode)	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATNYA? (Kode)	(Disis oleh pemeriksa) Apakah isian 507 sama dengan isian 405? (Cek isian 405) 1. Sama 2. Berbeda 7. Tidak relevan
						505	504	503	502	501	506	507	508	509	510				
401																			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan.		Kode 501: Kepemilikan Buku Akta Nikah 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu		Kode 507: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK 1. Laki-laki 2. Perempuan 5. Tidak dapat ditentukan Jika tidak termasuk kode 1 atau 2		Kode 508: Sumber Data NIK 1. KK 2. KTP 3. Lainnya		Kode 509: Kepemilikan Akta Kelahiran 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu											

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN												
Untuk ART Semua Umur			Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas		Untuk ART Umur 0-10 Tahun			Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas				
No. Urut ART	DIMANKAH TEMPAT LAHIR (nama)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (nama) ketika melahirkan (nama). Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pemeriksa)		DIMANKAH TEMPAT TINGGAL (nama) 5 TAHUN YANG LALU (FEBRUARI 2020)? Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pemeriksa)		APAKAH (nama) SEDANG/ PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRASEKOLAH?	APAKAH (nama) SEDANG/ PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN PRASEKOLAH? (Kode)	Jika pernah/ masih (805= 1,2 atau 3)	Jika tidak/ belum pernah (805-4)	APAKAH (nama) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA SEHARI-HARI DENGAN MENGGUNAKAN:			
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota					HURUF LATIN/ ALFABET? 1.Ya 5.Tidak	HURUF ARAB/ HIAIYAH? 1.Ya 5.Tidak	HURUF LAINNYA? (CONTOH: JAWA, KANU, CINA, DLL.) 1.Ya 5.Tidak	
401	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610		
1							A B X					
2							A B X					
3							A B X					
4							A B X					
5							A B X					
6							A B X					
7							A B X					
8							A B X					
9							A B X					
10							A B X					

Kode 605: Partisipasi Prasekolah		Kode 606: Jenis Prasekolah		Kode 607: Kegiatan Kursus	
1. Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2024/2025)		1. Taman Kanak-kanak		A. Ya, kursus pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung	
2. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2024/2025)		2. Bustanul Athfal		B. Ya, kursus bukan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung	
3. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2024/2025		3. Raudatul Athfal		X. Tidak sedang/ pernah mengikuti kegiatan kursus	
4. Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah		4. Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAMI, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.)			
		5. Kelompok Bermain			
		6. Taman Penitipan Anak			

274

Statistik Pemuda Indonesia 2025

7

Lanjutan Lampiran 1

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI													
No. Urut ART	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN TELEPON SELULER (HP)? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, BERAPA JUMLAH SIMCARD AKTIF YANG DIGUNAKAN (nama) PADA HP, TABLET, ATAU PERANGKAT LAINNYA, MENURUT PROVIDER/OPERATOR BERIKUT:	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, X, YOUTUBE, INSTAGRAM, WHATSAPP, DLL)? 1. Ya 5. Tidak → ART berikutnya/ Blok IX	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, X, YOUTUBE, INSTAGRAM, WHATSAPP, DLL)? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, MEDIA APA SAJA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, DI MANA SAJA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, UNTUK APA SAJA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan)	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, SERING (nama) MENGGUNAKAN INTERNET?					
	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak					
401													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
- Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau dibeli/dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan - Memiliki/menguasai HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/menguasai HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.													

Statistik Pemuda Indonesia 2025

10

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN										
	JAMINAN KESEHATAN APA SAJA YANG DIMILIKI (nama)?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) PERUSAHAAN/ KANTOR MENDAMPINGI SENIOR?	Jika 1109 pilihan A, B, dan C tidak diingkari APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKNU/JAMKESDA UNTUK RAWAT JALAN? A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B. Tidak punya biaya (transportasi, dll.) C. Kartu JKN tidak aktif D. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda E. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi F. Tidak ada fasilitas yang mudah dijangkau dari rumah responden G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan H. Waktu tunggu pelayanan lama/antre panjang I. Lainnya, tuliskan: X. Tidak memiliki JKN/Jamkesda
	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
401	1 A B C D E X									
1	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
2	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
3	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
4	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
5	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
6	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
7	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
8	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
9	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
10	A B C D E X						A B C D E F G H		A B C D E X	A B C D E F G H I
Kode 1106: Alasan Utama Tidak Rawat Jalan 1. Tidak punya biaya borobot 2. Tidak punya biaya transportasi 3. Tidak ada yang mendampingi 4. Mengobati sendiri 5. Merasa tidak perlu 6. Tidak ada sarana transportasi 7. Waktu tunggu pelayanan lama 8. Lainnya Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk penbayaran kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan, seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti: panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk penbayaran kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan, seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti: panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Rawat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memastikan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendampingi petugas kesehatan ke rumah. Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan adalah bila biaya borobot jalan anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.										

280

Statistik Pemuda Indonesia 2025

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XIII. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)					
PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3		
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi					
1301. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	bulan	bulan	bulan		
IMUNISASI (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)					
SAYA AKAN MENYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI					
1302. APAKAH (nama balita) PERNAH DIBERI IMUNISASI?	Ya 1 Tidak 5 → 1307	Ya 1 Tidak 5 → 1307	Ya 1 Tidak 5 → 1307		
1303. APAKAH BAPAK/IBU MEMPUNYAI CATATAN IMUNISASI SEPERTI BUKU KIA/KMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1304.i Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 } 1304.ii Tidak ada kartu/buku 5	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1304.i Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 } 1304.ii Tidak ada kartu/buku 5	Ya, dapat ditunjukkan 1 → 1304.i Ya, tidak dapat ditunjukkan 2 } 1304.ii Tidak ada kartu/buku 5		
1304. Jenis imunisasi Pada 1304.i isian tanggal, bulan, dan tahun: Tulis 44 jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis 66 jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan. Tulis 00 jika imunisasi tidak/belum diberikan.	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YY)	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi
A. HEPATITIS B (<24 JAM)					
B. BCG					
C. POLIO TETES 1					
D. DPT-HB-Hib 1					
E. POLIO TETES 2					
F. ROTA VIRUS (RV) 1					
G. PCV 1					

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1		BALITA 2		BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Bok IV 402 dan 401):					
Jenis imunisasi Pada 1304: isian tanggal, bulan, dan tahun: Tulis 44 jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis 66 jika tidak ada keterangan bahwa imunisasi diberikan, tetapi responden mengingat bahwa imunisasi pernah diberikan. Tulis 00 jika imunisasi tidak/belum diberikan.	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YYYY)	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	Jika 1303 = 1 i. Imunisasi berdasarkan catatan Tanggal-Bulan-Tahun (DD/MM/YYYY)	Jika 1303 = 2 atau 5 ii. Imunisasi berdasarkan ingatan 1. Ya, diberi imunisasi 5. Tidak/belum diberi imunisasi	
H. DPT-HB-Hib 2	/ /	☐	/ /	☐	☐
I. POLIO TETES 3	/ /	☐	/ /	☐	☐
J. ROTA VIRUS (RV) 2	/ /	☐	/ /	☐	☐
K. PCV 2	/ /	☐	/ /	☐	☐
L. DPT-HB-Hib 3	/ /	☐	/ /	☐	☐
M. POLIO TETES 4	/ /	☐	/ /	☐	☐
N. POLIO SUNTIK (IPV) 1	/ /	☐	/ /	☐	☐
O. ROTA VIRUS (RV) 3	/ /	☐	/ /	☐	☐
P. CAMPYAK-RUBELLA (MR)	/ /	☐	/ /	☐	☐
Q. POLIO SUNTIK (IPV) 2	/ /	☐	/ /	☐	☐
R. JAPANESE ENCEPHALITIS (JE)	/ /	☐	/ /	☐	☐
S. PCV 3	/ /	☐	/ /	☐	☐
T. DPT-HB-Hib LANJUTAN	/ /	☐	/ /	☐	☐
U. CAMPYAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN	/ /	☐	/ /	☐	☐

Pastikan tidak ada pencatatan imunisasi yang terlewat (Periksa kembali isian 1304)

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1305. DI MANA SAJA (nama balita) MENDAPAT IMUNISASI?	RS Pemerintah/RS Swasta A Klinik B Praktik dokter/bidan C Puskemas/Pustu/Pusling D Polindes/Poskesdes E Posyandu F Lainnya, tuliskan: G	RS Pemerintah/RS Swasta A Klinik B Praktik dokter/bidan C Puskemas/Pustu/Pusling D Polindes/Poskesdes E Posyandu F Lainnya, tuliskan: G	RS Pemerintah/RS Swasta A Klinik B Praktik dokter/bidan C Puskemas/Pustu/Pusling D Polindes/Poskesdes E Posyandu F Lainnya, tuliskan: G
1306. SIAPA SAJA YANG MEMBERIKAN IMUNISASI PADA (nama balita)?	Dokter spesialis anak A Dokter umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, tuliskan: F	Dokter spesialis anak A Dokter umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, tuliskan: F	Dokter spesialis anak A Dokter umum B Bidan C Perawat D Tenaga kesehatan lainnya E Lainnya, tuliskan: F
1307. Jika balita tidak pernah diberi imunisasi (1302 = 5), APA ALASAN (nama balita) TIDAK PERNAH DIMUNISASI? A. TIDAK TAHU MANFAAT IMUNISASI B. TIDAK MEMILI BIAYA C. TIDAK TAHU PROGRAM IMUNISASI D. KHAWATIR DENGAN EFEK SAMPING VAKSIN E. KHAWATIR DENGAN KANDUNGAN DALAM VAKSIN F. RAGU TERHADAP EFEKTIVITAS IMUNISASI G. LAINNYA, tuliskan:	Ya Tidak A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 5 F) 5 G) 5 tuliskan:	Ya Tidak A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 5 F) 5 G) 5 tuliskan:	Ya Tidak A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 5 F) 5 G) 5 tuliskan:
A S I DAN MP-ASI (UNTUK ART UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1301, berikan tanda centang (✓)			
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV	☐ → 1308 ☐ → Balita berikutnya/Blok XIV
1308. A. APAKAH (nama balita) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR Susu Ibu (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 } 1310	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 } 1310	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 } 1310
B. PADA UMUR BERAPA (nama balita) PERTAMA KALI DIBERIKAN MAKANAN/MINUMAN SELAIN ASI? (Isikan 99, jika belum pernah diberikan makanan/minuman selain ASI)	 bulan	 bulan	 bulan

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut Balita (Salin dari Blok IV 402 dan 401):			
1309. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSUI/DIBERI ASI?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
1310. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENERIMA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH? A. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)? Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta. B. MINUMAN LAIN TANPA GULA (AIR PUTIH, SUP/KALDU, TEH/KOPI TANAH, AIR TAJIN, DLL.)? C. MINUMAN BERPEMANIS GULA (JUS BUAH, MINUMAN RINGAN, TEH/KOPI MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL.)?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali
1311. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN, BAIK BERUPA MAKANAN PADAT, MAKANAN SETENGGAH PADAT, ATAU MAKANAN LUNAK? Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali
1312. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN? A. BUAH DAN/ATAU LEMBUHAN (NASI BUBUR, JAGUNG, PASTA, ROTIPANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL.)? B. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)? C. PRODUK TURUNAN SUSU (KEJU, YOGURT, DLL.)? D. DAGING IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DAGINGKAN DALAM KALENG, DLL.)? E. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL.)? F. BUAH DAN SAYUR TINGGI VITAMIN A, TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP (WORTEL, LABU, BAYAM, DLL.)? G. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL.)? H. MAKANAN MANIS, GURIH, DAN MAKANAN MENGANDUNG KARBOHIDRAT YANG DIGORENG (BAKWAN, KENTANG GORENG, SINGKONG/UBI GORENG, DONAT, CAKE, BISKUIT, MAKANAN RINGAN, PERMEN, COKLAT, DLL.)?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 ☐ kali

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XIV. KETERANGAN PENOLONG PERSALINAN (UNTUK ART PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401):	 tahun tahun	 tahun tahun	 tahun tahun
1401. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL?	Ya, pernah hamil 1 Ya, sedang hamil 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XV	Ya, pernah hamil 1 Ya, sedang hamil 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XV	Ya, pernah hamil 1 Ya, sedang hamil 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XV
B. PADA UMUR BERAPA (nama) HAMIL PERTAMA KALI?	 tahun	 tahun	 tahun
1402. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP?	Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XV	Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XV	Ya 1 Tidak 5 → PPK berikutnya/Blok XV
B. PADA UMUR BERAPA (nama) MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP PERTAMA KALI?	 tahun	 tahun	 tahun
1403. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XV	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XV	2 tahun yang lalu atau kurang... 1 Lebih dari 2 tahun yang lalu 2 PPK berikutnya/Blok XV
1404. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Klinik 2 Praktik dokter/bidan/perawat 3 Puskesmas 4 Pustu 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya 8	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Klinik 2 Praktik dokter/bidan/perawat 3 Puskesmas 4 Pustu 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya 8	RS Pemerintah/RS Swasta 1 Klinik 2 Praktik dokter/bidan/perawat 3 Puskesmas 4 Pustu 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya 8

Lanjutan Lampiran 1

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut PPK Umur 10-54 Tahun: Umur (Salin dari Blok IV 407):	 tahun	 tahun	 tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPABERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1405. BERAPALAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILEYAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	<1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XV. AKSES TERHADAP MAKANAN (DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)	
Nama dan No. Urut Pemberi Informasi:	
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN.	
1501. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1502. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1503. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1504. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTEPENTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1505. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1506. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA RUMAH TANGGA KEHABISAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1507. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9
1508. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
Nama dan No. Urut Pemberi Informasi:	
1601. BEAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? keluarga (Isikan 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)	

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1602. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI?	Milik sendiri 1 Kontrak/sewa 2 Bebas sewa 3 Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5
1603. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI?	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART 1 SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis 3 Sertifikat selanjutnya SHM (SHGB, SHMSRS) 4 Surat bukti lainnya (Girik, AUB, Letter C, dll.) 5 Tidak punya 6
1604. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?	m ² (Bulatkan dalam meter persegi)
1605. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN-NYANAKNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?	Ya 1 Tidak 5
1606. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS?	Beton 1 Genteng 2 Seng 3 Kayu/sirap 4 Asbes 5 Bambu/jerami/lujuk/daun-daunan/tumbia 6 Lainnya 7
1607. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?	Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kawat 2 Kayu/papan/batang kayu 3 Bambu/anyaman bambu 4 Lainnya 5
1608. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmar/granit 1 Keramik/lubin/tegel/teraso 2 Parket/vinil/karpet 3 Kayu/papan 4 Semen/bata merah 5 Bambu/tanah 6 Lainnya 7

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1609 A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SIAPA SAJA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri.....1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu.....2 Ada, di MCK komunal.....3 Ada, di MCK umum/sapapun menggunakan.....4 Ada, ART tidak menggunakan.....5 Tidak ada fasilitas.....6 1609.A
B. <i>Jika 1609.A = 1, 2, atau 3.</i> APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa.....1 Plengsengan dengan tutup.....2 Plengsengan tanpa tutup.....3 Cemplung/cubluk.....4
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJAU?	Tangki septik.....1 IPAL.....2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut.....3 Lubang tanah.....4 Pantai/tanah lapang/kebun.....5 Lainnya.....6 1610.A
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	Tidak tahu..... tahun.....98
E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR, BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/ DILAKUKAN PENYEDOTAN?	☐ kali (<i>Isikan 6, jika 6 kali atau lebih</i>) Tidak pernah.....7 Tidak tahu.....8
1610 A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Air hujan.....10 Lainnya.....11 1611.A
BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. <i>Jika 1610.A = 3 (leding).</i> APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM?	Perpipaan meteran.....1 Perpipaan tanpa meteran.....2 Hidran umum.....3 Keran umum.....4 Terminal air.....5 Tidak ada.....6 Tidak tahu.....8 1611.A
C. <i>Jika 1610.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air).</i> BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJAU TERDEKAT?	< 10 m.....1 ≥ 10 m.....2 Tidak tahu.....8
1611 A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah.....1 → 1612 Di luar kawasan pagar rumah.....2
B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	Tidak tahu..... menit.....998
1612. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8
1613. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?	A. KERUH.....1 B. BERWARNA.....5 C. BERASA.....1 D. BERBUSA.....5 E. BERBAU.....5 Ya Tidak A. KERUH.....1 5 B. BERWARNA.....1 5 C. BERASA.....1 5 D. BERBUSA.....1 5 E. BERBAU.....1 5
1614 A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDICUCIDUL?	Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Air hujan.....10 Lainnya.....11 1615.A

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
1618. APAKAH RUMAH TANGGA MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5
1619. A. DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA LAYANAN PENGUMPULAN SAMPAH DARI RUMAH KE RUMAH?	Ya 1 Tidak 5 → 1620 A
B. APAKAH PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5 Tidak tahu 8
C. BERAPA KALI PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari 1 Setiap 2-3 hari sekali 2 Setiap seminggu sekali 3 Tidak rutin 5
1620. A. DALAM SEBULAN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	Ya 1 Tidak 5 → 1621
B. BERAPA PERKIRAAN JARAK DARI RUMAH KE TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL)?	≤ 200 m 1 Lebih dari 200 m 2
C. APAKAH PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL) MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DAN BERAPA JENIS PEMILAHAN SAMPAH YANG DILAKUKAN?	Ya, 2 jenis pemilahan sampah 1 Ya, 3 jenis atau lebih pemilahan sampah 2 Tidak dilakukan pemilahan sampah 5 Tidak tahu 8
D. BERAPA KALI PETUGAS PENGUMPUL SAMPAH DI TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH BERSAMA (KOMUNAL) MELAKUKAN PENGUMPULAN SAMPAH DALAM SATU MINGGU?	Setiap hari 1 Setiap 2-3 hari sekali 2 Setiap seminggu sekali 3 Tidak rutin 5 Tidak tahu 8

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. [Jika 1614.A = 3 (leding)]: APA MEDIA UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES SUMBER AIR UTAMA UNTUK MANDUCUCI?]	Perpipaan meteran 1 Perpipaan tanpa meteran 2 Hidran umum 3 Keran umum 4 Terminal air 5 Tidak ada 6 Tidak tahu 8
1615. A. BOLEHAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENCUCI TANGAN?	Ya, di dalam rumah 1 Ya, di luar rumah 2 Tidak ada tempat cuci tangan 3 Tidak diizinkan melihat 4 } 1616.A
B. Anafi ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa keran/pompa atau bascom, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
C. Cek ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/detergen 1 Tidak tersedia sabun/detergen 5
1616. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran 1 Listrik PLN tanpa meteran 2 } 1617 Listrik non-PLN 3 Bukan listrik 4
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI?	Meteran 1 Meteran 2 Meteran 3
1. 450 Watt	☐ ☐ ☐
2. 900 Watt	☐ ☐ ☐
3. 1.300 Watt atau lebih	☐ ☐ ☐
1617. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	(Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)
	Listrik 1 Elpiji 5,5 kg/blue gaz 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg 4 Gas kota 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya 11 Tidak memasak di rumah 0

21

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XVI. KETERANGAN PERUMAHAN		
1621. DALAM SEBUAH TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERIKUT INI:	Ya	Tidak
A. DISETOR KE BANK SAMPAH.....	1	5
B. DIDAUUR ULANG/DIBUAT KOMPOS/.....	1	5
C. PAKAN TERNAK (TERMASUK BUDI DAYA MAGGOT).....	1	5
D. DIBAKAR.....	1	5
E. DITIMBUN.....	1	5
F. DIBUANG SEMBARANGAN (SUNGAI/SELOK/DLL).....	1	5
G. LAINNYA.....	1	5
1622. DALAM SETAHUN TERAKHIR, SEBERAPA KHAWATIR ANDA/ART LAINNYA DENGAN KEAMANAN DIRI SAAT BERJALAN KAKI SENDIRIAN PADA MALAM HARI DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH (SLS terkecil)?	Tidak Khawatir.....	1
	CENDERUNG TIDAK KHAWATIR.....	2
	CENDERUNG KHAWATIR.....	3
	KHAWATIR.....	4
	Tidak relevan.....	7

BLOK XVII. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN		
1701. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA/MENCAIRKAN KREDIT?	Ya	Tidak
A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....	1	5
B. KREDIT DARI BANK UMUM SELAIN KUR.....	1	5
C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR).....	1	5
D. KREDIT DARI KOPERASI.....	1	5
E. PERORANGAN DENGAN BUNGA.....	1	5
F. PEGADAIAN.....	1	5
G. PERUSAHAAN LEASING.....	1	5
H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes).....	1	5
I. PINJAMAN ONLINE.....	1	5
J. PNM-MEKAAR.....	1	5
K. LAINNYA.....	1	5
1702. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI UANG ELEKTRONIK?	Ya	Tidak
A. UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (DOMPET DIGITAL/E-WALLET).....	1	5
B. UANG ELEKTRONIK BERBASIS KARTU/CHIP (E-MONEY).....	1	5

BLOK XVIII. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG		
1801. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT?	Ya	Tidak
A. TABUNG GAS 5,5 kg ATAU LEBIH.....	1	5
B. LEMARI ES/KULKAS.....	1	5
C. AC.....	1	5
D. PEMANAS AIR (WATER HEATER).....	1	5
E. TELEPON RUMAH (PSTN).....	1	5
F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET.....	1	5
G. EMAS/PERHIASAN MINIMAL 10 GRAM.....	1	5
H. SEPEDA MOTOR.....	1	5
I. PERAHU.....	1	5
J. PERAHU MOTOR.....	1	5
K. MOBIL.....	1	5
L. TELEVISI LAYAR DATAR MINIMAL 30 INCH.....	1	5
M. TANAH/LAHAN.....	1	5
N. UANG TUNA/TABUNGAN SENILAI 10 GRAM EMAS.....	1	5
1802. Jika 1801.M = 1	KRT.....A	
Jika MEMILIKI TANAH/LAHAN, SIAPA PEMILIK TANAH/LAHAN TERSEBUT?	Pasangan KRT.....B	
	Anak.....C	
	ART lainnya.....D	

BLOK XIX. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA		
1901.A. APAKAH SUMBER TERBESAR PEMBIAYAAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART yang bekerja.....1	
	Kiriman uang/barang.....2 → 1901.C	
	Hasil investasi (deposito, saham, sukuk, reksa dana, royalti, dll).....3 → Blok XX	
	Tabungan.....4 → Blok XX	
	Pensiunan.....5 → Blok XX	
B. Jika 1901.A = 1. SIAPAKAH ART YANG MENANGGUNG PEMBIAYAAN TERBESAR?	Nama ART :.....	
	No Urut ART :	
C. Jika 1901.A = 2. APABILA MENERIMA KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	Orang tua.....1	
	Anak.....2	
	Familil lain.....3	
	Lainnya.....4	

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL				
2001. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENERIMA JAMINAN SOSIAL BERUPA:	(i)		(ii)	
	Ya	Tidak	(iii)	
				APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG SUDAH MELAKUKAN KLAIM MANFAAT JAMINAN SOSIAL TERSEBUT?
				Ya Tidak
A. JAMINAN PENSUN/VETERAN	A. 1 → 2001	iii A. 5 → 2001	B. A. orang	1 5
B. JAMINAN HARI TUA	B. 1 → 2001	iii B. 5 → 2001	C. B. orang	1 5
C. JAMINAN/SURANSI KECELAKAAN KERJA	C. 1 → 2001	iii C. 5 → 2001	D. C. orang	1 5
D. JAMINAN/SURANSI KEMATIAN	D. 1 → 2001	iii D. 5 → 2001	E. D. orang	1 5
E. JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)	E. 1 → 2001	iii E. 5 → 2001	F. E. orang	1 5
F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F. 1 → 2001	iii F. 5 → 2002	G. F. orang	1 5
2002. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya	1	5 → 2004	
2003. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENJADI PENERIMA PKH?	Tidak			
B. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN PKH?	Ya	1	5 } 2004	
	Tidak			
	Tidak tahu	8		
	Kantor pos	1		
	ATM	2		
	Kantor bank	3		
	Agen bank	4		
	Pendamping ketua kelompok	5		
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAJA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?	Belanja pangan	A		
	Biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll.)	B		
	Biaya pengobatan	C		
	Biaya perawatan ibu hamil	D		
	Biaya sekolah	E		
	Pembayaran hutang/kredit	F		
	Lainnya, tuliskan:	G		
2004. JIKA TERDAPAT ART UMUR 5-24 TAHUN, BERSEKOLAH YANG MENERIMA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (Jika 618 terdapat ART yang kode A diilinkari), SEBUTKAN APA SAJA MENU YANG DIPEROLEH SELAMA SEMINGGU TERAKHIR:	A. DAGING	Ya	Tidak	Ya
	B. IKAN	1	5	E. SAYUR
	C. AYAM	1	5	F. SUSU
	D. TAHU/TEMPE	1	5	G. LAINNYA, tuliskan:
	Ya	1		
	Tidak	5 → 2007		
2005. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT Pos?	Ya	1		
	Tidak	5 → 2007		

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XX. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL								
	Bulan Januari 2025		Bulan Desember 2024		Bulan November 2024		Bulan Oktober 2024	
	Ya 1 Tidak 5 → Desember '24	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D Tidak 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D Tidak 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D Tidak 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D Tidak 5 → 2006 D	Ya, tuliskan 1 Rp. 5 → 2006 D Tidak 5 → 2006 D		
2006. DALAM 4 BULAN TERAKHIR, SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGUNAAN PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS: A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS PADA 4 BULAN TERAKHIR?								
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI YANG DITERIMA DARI PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS?								
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?								
D. DI MANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA PROGRAM BPNT/ PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS TERSEBUT?								
E. UNTUK APA SAJA PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO YANG DISALURKAN MELALUI BANK ATAU PT POS DIPERGUNAKAN? ADA LAGI?								
2007. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN/PROGRAM DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:								
2008. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?								
Usaha mikro atau kecil bisa pada sektor apapun, tidak terbatas pada sektor industri atau perdagangan								

BLOK XX. KETERANGAN PERLUNDUNGAN SOSIAL				
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DARI PEMERINTAH SEBAGAI BERIKUT:	(i) PELATIHAN TENNIS PRODUKSI..... (ii) PERIZINAN KOMERSIL/SERTIFIKASI..... (iii) PEMASARAN/DIGITALISASI USAHA..... (iv) PELAPORAN KEUANGAN..... (v) FASILITAS PERMODALAN.....	Ya 1 1 1 1 1	Tidak 5 5 5 5 5	
2009. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?	Ya 1 → 2009. A. i s.d. v Tidak 5 → 2009. B	Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir (i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN Rp. (ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK Rp. (iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA Rp. (iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS Rp. (v) BANTUAN RUTIN LAINNYA Rp. Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir (i) BANTUAN TIDAK RUTIN Rp.		
B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/BANTUAN SOSIAL/SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN TIDAK RUTIN?	Ya 1 → 2009. B. i Tidak 5 → Blok XXI	Anak Umur 2-4 Tahun (2) Anak Umur 2-4 Tahun (3)		
BLOK XXI. KETERANGAN PENGASUHAN ANAK UMUR 2-4 TAHUN				
2101. BERAPA BANYAK BUKU ANAK-ANAK ATAU BUKU BERGAMBAR YANG ADA DI RUMAH INI UNTUK (nama anak)?	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih	☐ buku Isikan 10, jika ada 10 buku atau lebih		
2102. SAYA INGIN MENGETAHUI BENDA-BENDA APA SAJA YANG (nama anak) MAINKAN KETIKA DIA BERMAIN DI RUMAH. APAKAH (nama anak) BERMAIN DENGAN:	Ya Tidak Tidak Tahu A) 1 5 8 B) 1 5 8 C) 1 5 8	Ya Tidak Tidak Tahu A) 1 5 8 B) 1 5 8 C) 1 5 8	Ya Tidak Tidak Tahu A) 1 5 8 B) 1 5 8 C) 1 5 8	

Lanjutan Lampiran 1

BLOK XXII. CATATAN									
Kunjungan I	:	Tanggal	:		:		Selesai:		
Kunjungan II	:	Tanggal	:		:		Selesai:		
Kode 705: Lapangan Usaha (diisi oleh pemeriksa) 01. Pertanian tanaman padi dan palawija 02. Hortikultura 03. Perkebunan 04. Perikanan 05. Peternakan 06. Kehutanan dan pertanian lainnya 07. Pertambangan dan penggalan 08. Industri pengolahan 09. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin 10. Pengelolaan air, limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi 11. Konstruksi 12. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 13. Pengangkutan dan pergudangan 14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 15. Informasi dan komunikasi 16. Aktivitas keuangan dan asuransi 17. Real estat 18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis 19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya 20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 21. Pendidikan 22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial 23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi 24. Aktivitas jasa lainnya 25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja 26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya									
Waktu selesai wawancara:									

Lampiran 2 Kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025



SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL 2025

WAKTU MULAI:

RAHASIA

AGUSTUS

PENGENALAN TEMPAT	
1. PROVINSI	
2. KABUPATEN/KOTA	
3. KECAMATAN	
4. DESA/KELURAHAN	
5. KLASIFIKASI KOTA/DESA	
6. NAMA DAN KODE SLS/NON SLS-SUB SLS	
7. a. NOMOR KODE SAMPEL (NKS)	
b. NOMOR URUT BANGUNAN	
8. NOMOR URUT RUMAH TANGGA SAMPEL	
9. NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	
10. HASIL KUNJUNGAN	1. Berhasil 2. Tidak Bersedia Diwawancara 3. Tidak Dapat Ditemui
11. NAMA PEMBERI INFORMASI UTAMA	
12. NOMOR HP PEMBERI INFORMASI UTAMA	
13. ALAMAT LENGKAP	
WAKTU PENDATAAN	
TANGGAL PENDATAAN	
BULAN PENDATAAN	
TAHUN PENDATAAN	
RINGKASAN	
1. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA (Jumlah ART pada Daftar ART [Prelist dan Tambahan])	
2. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG BERSTATUS ADA (Jumlah ART dengan Status Keberadaan berkode 1. Ada)	
3. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG BERSTATUS ADA (Jumlah ART berumur 5 tahun ke atas dengan Status Keberadaan berkode 1. Ada)	

Lanjutan Lampiran 2

NO	2. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN DEMOGRAFI (DEM)	NO	2. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN DEMOGRAFI (DEM)
	DEM_STR Selamat pagi/siang/malam. Nama Saya, bekerja sebagai mitra Badan Pusat Statistik. Rumah tangga Bapak/Ibu terpilih sebagai sampel dalam survei pemerintah, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang bertujuan mengumpulkan informasi ketenagakerjaan. Informasi yang akan Bapak/Ibu berikan bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Data tersebut akan digunakan untuk membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan kebijakan terkait ketenagakerjaan.		DEM_INTRO Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk seluruh anggota rumah tangga.
			MODUL INI DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN/ATAU UMUR 5 TAHUN KE ATAS
		2.1	TANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA PPNO NOMOR URUT ANGGOTA RUMAH TANGGA _____
A	DEM_CEK1 Sebelum saya mencatat semua nama anggota rumah tangga yang tinggal di rumah ini, saya ingin memastikan: Apakah di rumah tangga ini ada: a. Pembantu rumah tangga, sopir, tukang kebun, pengasuh anak/orang tua, dan sejenisnya. b. Orang yang biasanya tinggal di rumah ini tetapi sedang bepergian selama kurang dari 1 tahun dan tidak bertujuan untuk menetap di tempat tujuan. c. Bayi atau anak kecil. d. Anggota rumah tangga yang sedang bersekolah SD/SMP/SMA atau sederajat dan tinggal di tempat lain, misal pondok pesantren atau <i>boarding school</i> . 1. YA → Pastikan nama tercatat dalam Daftar ART 2. TIDAK	2.2	DEM_NAME1 NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA _____
		2.3	DEM_CEK Status keberadaan (NAMA)? 1. Ada 2. Pindah/Bukan ART 3. Meninggal
		2.4	TANYAKAN JIKA DEM_CEK = 1 DEM_INFO NAMA DAN NOMOR URUT ANGGOTA RUMAH TANGGA PEMBERI INFORMASI No : ____ Nama:
B	DEM_CEK2 Selain itu, apakah di rumah tangga ini ada: a. Orang (termasuk Kepala Rumah Tangga) yang bekerja dan tinggal di tempat lain, dan tidak pulang secara rutin minimal sekali dalam seminggu. b. Orang yang sedang bepergian selama 1 tahun/lebih atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap di tempat tinggal yang baru. c. Orang yang sedang kuliah (diploma/universitas) dan tinggal di tempat lain. 1. YA → Pastikan nama tidak tercatat dalam Daftar ART 2. TIDAK Sekarang saya akan mencatat semua nama Anggota Rumah Tangga (ART) yang tinggal di rumah ini, dimulai dari Kepala Rumah Tangga (KRT). Catatan: - Pada beberapa rumah tangga sampel, daftar ART terisi otomatis berdasarkan hasil pemutakhiran SUPAS (<i>prelist</i>). - Periksa terlebih dahulu nama-nama pada daftar ART (jika tersedia). - Tambahkan nama ART apabila ada yang belum tercantum.	2.5	TANYAKAN JIKA ART PRELIST DAN DEM_CEK = 1 DEM_NAME2 (NAMA) merupakan ART <i>prelist</i> , isikan kembali nama ART dan perbaiki jika terdapat kesalahan penulisan nama. _____
		2.6	TANYAKAN JIKA DEM_CEK = 1 DEM_SEX Apakah jenis kelamin (NAMA)? 1. LAKI-LAKI 2. PEREMPUAN Catatan: Jika isian jenis kelamin terisi otomatis, periksa kembali dan perbaiki jika tidak sesuai.
		2.7	TANYAKAN JIKA DEM_CEK = 1 DEM_NIK Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari (NAMA): (isikan strip "-" jika tidak bisa mengisi NIK) _____ Catatan: Jika isian NIK terisi otomatis, periksa kembali dan perbaiki jika tidak sesuai.
	DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA ART 1 (otomatis) ART 2 (otomatis) + ART 3 (tambahan) + ART 4 (tambahan) Dst	2.8	TANYAKAN JIKA DEM_NIK = STRIP DEM_ALASN Jika NIK tidak terisi, apakah alasan utamanya? 1. DOKUMEN HILANG/RUSAK 2. BELUM/TIDAK PUNYA KK/KTP 3. KK ATAU KTP ADA DI TEMPAT LAIN 4. LAINNYA, TULISKAN

Lanjutan Lampiran 2

NO	2. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN DEMOGRAFI (DEM)	NO	2. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN DEMOGRAFI (DEM)
	DEM_STR Selamat pagi/siang/malam. Nama Saya, bekerja sebagai mitra Badan Pusat Statistik. Rumah tangga Bapak/Ibu terpilih sebagai sampel dalam survei pemerintah, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang bertujuan mengumpulkan informasi ketenagakerjaan. Informasi yang akan Bapak/Ibu berikan bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Data tersebut akan digunakan untuk membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan kebijakan terkait ketenagakerjaan.		DEM_INTRO Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk seluruh anggota rumah tangga.
			MODUL INI DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN/ATAU UMUR 5 TAHUN KE ATAS
		2.1	TANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA PPNO NOMOR URUT ANGGOTA RUMAH TANGGA _____
A	DEM_CEK1 Sebelum saya mencatat semua nama anggota rumah tangga yang tinggal di rumah ini, saya ingin memastikan: Apakah di rumah tangga ini ada: a. Pembantu rumah tangga, sopir, tukang kebun, pengasuh anak/orang tua, dan sejenisnya. b. Orang yang biasanya tinggal di rumah ini tetapi sedang bepergian selama kurang dari 1 tahun dan tidak bertujuan untuk menetap di tempat tujuan. c. Bayi atau anak kecil. d. Anggota rumah tangga yang sedang bersekolah SD/SMP/SMA atau sederajat dan tinggal di tempat lain, misal pondok pesantren atau <i>boarding school</i> . 1. YA → Pastikan nama tercatat dalam Daftar ART 2. TIDAK	2.2	DEM_NAME1 NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA _____
		2.3	DEM_CEK Status keberadaan (NAMA)? 1. Ada 2. Pindah/Bukan ART 3. Meninggal
		2.4	TANYAKAN JIKA DEM_CEK = 1 DEM_INFO NAMA DAN NOMOR URUT ANGGOTA RUMAH TANGGA PEMBERI INFORMASI No : ____ Nama:
B	DEM_CEK2 Selain itu, apakah di rumah tangga ini ada: a. Orang (termasuk Kepala Rumah Tangga) yang bekerja dan tinggal di tempat lain, dan tidak pulang secara rutin minimal sekali dalam seminggu. b. Orang yang sedang bepergian selama 1 tahun/lebih atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud menetap di tempat tinggal yang baru. c. Orang yang sedang kuliah (diploma/universitas) dan tinggal di tempat lain. 1. YA → Pastikan nama tidak tercatat dalam Daftar ART 2. TIDAK Sekarang saya akan mencatat semua nama Anggota Rumah Tangga (ART) yang tinggal di rumah ini, dimulai dari Kepala Rumah Tangga (KRT). Catatan: - Pada beberapa rumah tangga sampel, daftar ART terisi otomatis berdasarkan hasil pemutakhiran SUPAS (<i>prelist</i>). - Periksa terlebih dahulu nama-nama pada daftar ART (jika tersedia). - Tambahkan nama ART apabila ada yang belum tercantum.	2.5	TANYAKAN JIKA ART PRELIST DAN DEM_CEK = 1 DEM_NAME2 (NAMA) merupakan ART <i>prelist</i> , isikan kembali nama ART dan perbaiki jika terdapat kesalahan penulisan nama. _____
		2.6	TANYAKAN JIKA DEM_CEK = 1 DEM_SEX Apakah jenis kelamin (NAMA)? 1. LAKI-LAKI 2. PEREMPUAN Catatan: Jika isian jenis kelamin terisi otomatis, periksa kembali dan perbaiki jika tidak sesuai.
		2.7	TANYAKAN JIKA DEM_CEK = 1 DEM_NIK Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari (NAMA): (isikan strip "-" jika tidak bisa mengisi NIK) _____ Catatan: Jika isian NIK terisi otomatis, periksa kembali dan perbaiki jika tidak sesuai.
	DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA ART 1 (otomatis) ART 2 (otomatis) + ART 3 (tambahan) + ART 4 (tambahan) Dst	2.8	TANYAKAN JIKA DEM_NIK = STRIP DEM_ALASN Jika NIK tidak terisi, apakah alasan utamanya? 1. DOKUMEN HILANG/RUSAK 2. BELUM/TIDAK PUNYA KK/KTP 3. KK ATAU KTP ADA DI TEMPAT LAIN 4. LAINNYA, TULISKAN

Lanjutan Lampiran 2

NO	3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PP)	NO	4. MIGRASI (MIG)
3.7	TANYAKAN JIKA DEM_TRN = 1 DEM_SERT Apakah dari pelatihan/kursus/training tersebut (NAMA) memperoleh sertifikat? 1. YA 2. TIDAK	MODUL INI DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN/ATAU UMUR 5 TAHUN KE ATAS	
3.8	TANYAKAN JIKA DEM_TRN = 1 DEM_P1TH Apakah pelatihan/kursus/training tersebut (bersertifikat maupun tidak bersertifikat) dilaksanakan dalam setahun terakhir? 1. YA 2. TIDAK	4.1	TANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA MIG_BTH Di mana tempat lahir (NAMA)? 1. Indonesia 2. Luar negeri
3.9	TANYAKAN JIKA DEM_P1TH = 1 DEM_JMLP Jumlah pelatihan/kursus/training yang diikuti dalam setahun terakhir: (Hanya untuk 3 yang utama) _____ Catatan: isian berada di rentang 1-3	4.2	TANYAKAN JIKA MIG_BTH = 1 MIG_PROV Di provinsi manakah (NAMA) dilahirkan? _____ NAMA & KODE PROVINSI
3.10	DEM_NMPL_X Pelatihan/kursus/training ke-XX dalam setahun terakhir: NAMA PELATIHAN DEM_KDPL_X KODE PELATIHAN _____ (DIISI OLEH PML)	4.3	TANYAKAN JIKA MIG_BTH = 1 MIG_KAB Di Kabupaten/Kota manakah (NAMA) dilahirkan? _____ NAMA & KODE KAB/KOTA
3.11	DEM_PL4MG Apakah pelaksanaan pelatihan/kursus/training ke-XX dilakukan dalam 4 minggu terakhir? 1. YA 2. TIDAK	4.4	TANYAKAN JIKA MIG_BTH = 2 MIG_NEG Di negara manakah (NAMA) dilahirkan? _____ NAMA & KODE NEGARA
3.12	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DEM_SDGPL Apakah saat ini (NAMA) sedang mengikuti pelatihan/kursus/training (tidak harus bersertifikat)? 1. YA 2. TIDAK	4.5	TANYAKAN JIKA MIG_BTH = 2 MIG_LARR Kapan (NAMA) tiba untuk tinggal di Indonesia? MIG_LARR_M Bulan tiba: _____ 97=TIDAK TAHU MIG_LARR_Y Tahun tiba: _____
3.13	TANYAKAN JIKA DEM_EDL >= 4 DEM_MG Dalam satu tahun terakhir, apakah (NAMA) pernah mengikuti Program Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL)? 1. YA 2. TIDAK	4.6	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 MIG_5TH Pada Agustus 2020 (lima tahun yang lalu), di mana tempat tinggal (NAMA)? 1. Di kabupaten/kota yang SAMA dengan tempat tinggal sekarang 2. Di kabupaten/kota yang BERBEDA dengan tempat tinggal sekarang 3. Di luar negeri
3.14	TANYAKAN JIKA DEM_MG = 1 DEM_MGSERT Apakah dari kegiatan Program Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut, (NAMA) memperoleh sertifikat? 1. YA 2. TIDAK	4.7	TANYAKAN JIKA MIG_5TH = 2 MIG_5_PROV Sebutkan provinsi tempat tinggal (NAMA) pada Agustus 2020 (lima tahun yang lalu): _____ NAMA & KODE PROVINSI
		4.8	TANYAKAN JIKA MIG_5TH = 2 MIG_5_KAB Sebutkan kabupaten/kota tempat tinggal (NAMA) pada Agustus 2020 (lima tahun yang lalu): _____ NAMA & KODE KAB/KOTA

Lanjutan Lampiran 2

4. MIGRASI (MIG)		5. KESULITAN FUNGSIONAL (DIF)	
NO TANYAKAN JIKA MIG_5TH = 3 MIG_5_NEG Sebutkan negara tempat tinggal (NAMA) pada Agustus 2020 (lima tahun yang lalu): NAMA & KODE NEGARA		MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS	
4.9	TANYAKAN JIKA MIG_5TH = 3 MIG_5_NEG Sebutkan negara tempat tinggal (NAMA) pada Agustus 2020 (lima tahun yang lalu): NAMA & KODE NEGARA		TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_INTRO Pertanyaan selanjutnya menanyakan kesulitan (NAMA) dalam melakukan aktivitas tertentu karena masalah kesehatan...
4.10	DITANYAKAN JIKA MIG_BTH = 2 MIG_REAS Apa alasan utama (NAMA) pindah ke Indonesia? 01. MEMULAI SUATU PEKERJAAN 02. MUTASI PEKERJAAN 03. Mencari PEKERJAAN/MEMPERSIAPKAN USAHA 04. SEKOLAH/KULIAH 05. PERKAWINAN 06. KELUARGA PINDAH/BERGABUNG DENGAN KELUARGA 07. PERAWATAN/TINDAKAN MEDIS, KESEHATAN 08. KONFLIK, KETIDAKAMANAN, BENCANA ALAM 09. GAYA HIDUP, BIAYA HIDUP 10. LAINNYA: TULISKAN	5.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_SIGHT Apakah (NAMA) mengalami kesulitan melihat meskipun memakai kacamata? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa melihat
4.11	TANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA MIG_CTZ Apakah kewarganegaraan (NAMA)? 1. WNI 2. WNA	5.2	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_HEAR Apakah (NAMA) mengalami kesulitan mendengar meskipun menggunakan alat bantu dengar? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa mendengar
4.12	TANYAKAN JIKA MIG_CTZ = 2 MIG_CTZ_N Jika WNA, tuliskan kewarganegaraan (NAMA) NAMA & KODE NEGARA	5.3	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_MOBI Apakah (NAMA) mengalami kesulitan berjalan atau menaiki tangga? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga
		5.4	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_HAND Apakah (NAMA) mengalami kesulitan/gangguan menggunakan/menggerakkan tangan/jari? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/menggerakkan tangan/jari
		5.5	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_CONC Apakah (NAMA) mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa mengingat/berkonsentrasi

Lanjutan Lampiran 2

5. KESULITAN FUNGSIONAL (DIF)		6. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	
NO		MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS	
5.6	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_CARE Apakah (NAMA) mengalami kesulitan dalam perawatan diri seperti membersihkan badan atau berpakaian? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa merawat diri	6.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 TIK_HP Dalam tiga bulan terakhir, apakah (NAMA) memiliki/ menguasai telepon selular/telepon pintar (HP/<i>smartphone</i>)? 1. YA 2. TIDAK
5.7	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_COMM Apakah (NAMA) mengalami kesulitan berkomunikasi, seperti sulit memahami atau dipahami oleh orang lain meskipun menggunakan bahasa yang biasa (NAMA) gunakan? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa berkomunikasi	6.2	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 TIK_TI Dalam tiga bulan terakhir, apakah (NAMA) menggunakan teknologi berikut ini? TIK_TI_A a. Komputer (PC, <i>notebook</i>, laptop, tablet, atau PDA) 1. YA 2. TIDAK TIK_TI_B b. Telepon seluler/telepon pintar (HP/<i>smartphone</i>) 1. YA 2. TIDAK TIK_TI_C c. Teknologi digital lain (televisi digital dengan <i>set top box</i>, <i>smart TV</i>, kamera digital, alat perekam suara, alat hitung digital, alat kesehatan digital dan alat digital lainnya) 1. YA 2. TIDAK TIK_TI_D d. Internet (Termasuk menggunakan <i>Whatsapp</i>, <i>Facebook</i>, <i>Instagram</i>, <i>X/Twitter</i> dan media sosial lainnya) 1. YA 2. TIDAK TANYAKAN JIKA TIK_TI_A = 2 DAN TIK_TI_B = 2 DAN TIK_TI_C = 2 DAN TIK_TI_D = 2 TIK_TI_E e. Tidak menggunakan teknologi digital 1. YA
5.8	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DIF_EMOSI Apakah (NAMA) mengalami gangguan perilaku/emosional? 1. Tidak mengalami kesulitan/gangguan 2. Ya, sedikit kesulitan 3. Ya, banyak kesulitan 4. Ya, sama sekali tidak bisa mengendalikan perilaku/ emosional	6.3	TANYAKAN JIKA TIK_TI_D = 1 TIK_INET Dalam tiga bulan terakhir, apakah (NAMA) memanfaatkan internet untuk: TIK_INET_A a. Komunikasi 1. YA 2. TIDAK TIK_INET_B b. Mengakses informasi 1. YA 2. TIDAK

Lanjutan Lampiran 2

NO	6. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	NO	7. BEKERJA (ATW)
	TIK_INET_C c. Penjualan barang/jasa 1. YA 2. TIDAK TIK_INET_D d. Pembelian barang/jasa 1. YA 2. TIDAK TIK_INET_E e. Internet banking 1. YA 2. TIDAK TIK_INET_F f. Lainnya 1. YA, TULISKAN 2. TIDAK		MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN PPNO = 1 ATW_INTRO1 Sekarang saya akan menanyakan pekerjaan semua anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas selain anggota rumah tangga yang berstatus pembantu rumah tangga dan sopir/tukang kebun. Pekerjaan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan tidak harus sebagai buruh/pegawai, misalnya berjualan secara online, membantu menjaga warung, bantu cuci gosok, bertani, kader PKK, atau kegiatan lain yang menghasilkan uang. TANYAKAN UNTUK SETIAP ART BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS DAN CATAT DI LEMBAR KERJA JIKA DIPERLUKAN - Apakah ART 1 bekerja/membantu bekerja? Jika ya, apa saja yang dikerjakan ART 1? - Apakah ART 2 bekerja/membantu bekerja? Jika ya, apa saja yang dikerjakan ART 2? - dst
		7.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN DEM_REL # 9,10 ATW_PAY Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) bekerja untuk memperoleh bayaran/upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam? <i>Contoh: PNS, pegawai swasta, buruh pabrik, penjaga toko, kasir, buruh tani, kuli angkut barang, dan lain-lain.</i> 1. YA 2. TIDAK
		7.2	TANYAKAN JIKA ATW_PAY = 2 ATW_PFT Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) menjalankan usaha, bertani atau melakukan kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan/pendapatan yang dilakukan paling sedikit satu jam? <i>Contoh: membuat barang untuk dijual, bercocok tanam untuk dijual, membeli dan menjual kembali barang, menyediakan jasa, memelihara hewan atau menangkap ikan untuk dijual, dan lain-lain.</i> 1. YA 2. TIDAK
		7.3	TANYAKAN JIKA ATW_PFT = 2 ATW_FAM Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) membantu kegiatan usaha atau pekerjaan keluarga/kerabat lainnya yang dilakukan paling sedikit satu jam? <i>Contoh: membantu orang tua bertani, membantu kerabat jaga warung, atau membantu pekerjaan keluarga/kerabat lainnya.</i> 1. YA 2. TIDAK

Lanjutan Lampiran 2

NO 8. SEMENTARA TIDAK BEKERJA (ABS)		NO 9. PEKERJAAN PERTANIAN (AGF)	
MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS		MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS	
8.1	TANYAKAN JIKA <i>DEM_AGE >= 5 DAN DEM_REL # 9,10 DAN ATW_PAY = 2 DAN ATW_PFT = 2 DAN ATW_FAM = 2</i> ABS_JOB Apakah (NAMA) sebenarnya memiliki pekerjaan/kegiatan usaha, tetapi seminggu terakhir sedang tidak bekerja/tidak menjalankan usaha tersebut? 1. YA 2. TIDAK	9.1	TANYAKAN JIKA <i>ATW_PFT = 1 ATAU ATW_FAM = 1 ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 2 DAN ABS_SEA = 1) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 03-06) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 07-13 DAN ABS_DUR=1) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 07-13 DAN ABS_DUR=2 DAN ABS_PAY=1)</i> AGF_CHK Di bidang apakah pekerjaan (NAMA)? AGF_CHK_A a. Pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, gandum, singkong/ubi kayu, ubi jalar, talas, gadung, dll) 1. YA 2. TIDAK AGF_CHK_B b. Pertanian bukan tanaman pangan (hortikultura dan perkebunan) 1. YA 2. TIDAK AGF_CHK_C c. Pemeliharaan binatang ternak 1. YA 2. TIDAK AGF_CHK_D d. Perikanan 1. YA 2. TIDAK AGF_CHK_E e. Pekerjaan selain bidang yang disebutkan di atas 1. YA 2. TIDAK
8.2	TANYAKAN JIKA <i>ABS_JOB = 1</i> ABS_WHY Apakah alasan utama (NAMA) sementara tidak bekerja selama seminggu terakhir? 01. MENUNGGU UNTUK MEMULAI PEKERJAAN ATAU USAHA BARU 02. MUSIM SEPI/SEDANG TIDAK MUSIM 03. ATURAN WAKTU KERJA/SISTEM SHIFT 04. LIBURAN/LIBUR 05. SAKIT/KECELAKAAN 06. CUTI MELAHIRKAN/CUTI ISTRI MELAHIRKAN ANAK 07. TUGAS BELAJAR ATAU PELATIHAN 08. CUTI PRIBADI LAINNYA (MERAWAT KELUARGA, MENIKAH, IBADAH, DSB) 09. DIBERHENTIKAN/DIRUMAHKAN SEMENTARA, PENURUNAN AKTIVITAS EKONOMI (PENURUNAN PERMINTAAN PASAR/JUMLAH PESANAN), ATAU JEDA BEKERJA 10. CUACA BURUK, BENCANA ALAM 11. PEMOGOKAN ATAU SENGKETA KETENAGAKERJAAN 12. CACAT JANGKA PANJANG 13. LAINNYA, TULISKAN:		
8.3	TANYAKAN JIKA <i>ABS_WHY = 2</i> ABS_SEA Saat musim sepi atau sedang tidak musim, apakah (NAMA) tetap melakukan beberapa kegiatan terkait pekerjaan/kegiatan usaha tersebut? 1. YA 2. TIDAK		
8.4	TANYAKAN JIKA <i>ABS_WHY = 7,8,9,10,11,12,13</i> ABS_DUR Apakah (NAMA) akan kembali ke pekerjaan/usaha yang sama dalam waktu 3 bulan atau kurang, terhitung sejak sementara tidak bekerja? 1. YA 2. TIDAK		
8.5	TANYAKAN JIKA <i>ABS_DUR = 2</i> ABS_PAY Apakah (NAMA) tetap memperoleh bayaran/gaji/upah/keuntungan/pendapatan dari pekerjaan/usahanya selama periode sementara tidak bekerja? 1. YA 2. TIDAK	9.2	TANYAKAN JIKA <i>(DEM_REL # 9,10 DAN ATW_PAY = 2 DAN ATW_PFT = 2 DAN ATW_FAM = 2 DAN ABS_JOB = 2) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 1) (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 2 DAN ABS_SEA = 2) (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 7-13 DAN ABS_DUR = 2 DAN ABS_PAY = 2)</i> AGF_ANY Dalam seminggu terakhir, apakah [NAMA] melakukan kegiatan apa pun di bidang.... AGF_ANY_A a. Pertanian tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, gandum, singkong/ubi kayu, ubi jalar, talas, gadung, dll) 1. YA 2. TIDAK AGF_ANY_B b. Pertanian bukan tanaman pangan 1. YA 2. TIDAK

Lanjutan Lampiran 2

NO	9. PEKERJAAN PERTANIAN (AGF)	NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)
	AGF_ANY_C c. Pemeliharaan binatang ternak 1. YA 2. TIDAK AGF_ANY_D d. Perikanan 1. YA 2. TIDAK AGF_ANY_E e. Pekerjaan selain bidang yang disebutkan di atas 1. YA 2. TIDAK	MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS DAN/ATAU UMUR 15 TAHUN KE ATAS	
9.3	TANYAKAN JIKA (AGF_CHK_A = 1 ATAU AGF_CHK_B = 1 ATAU AGF_CHK_C = 1 ATAU AGF_CHK_D = 1) ATAU (AGF_ANY_A = 1 ATAU AGF_ANY_B = 1 ATAU AGF_ANY_C = 1 ATAU AGF_ANY_D = 1) AGF_MKT Apakah barang/produk yang dihasilkan dari pekerjaan/kegiatan di bidang tersebut digunakan untuk: 1. Seluruhnya untuk dijual 2. Sebagian besar dijual 3. Sebagian besar dikonsumsi rumah tangga 4. Seluruhnya untuk dikonsumsi rumah tangga	10.1	TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 5 DAN DEM_REL = 9,10) ATAU (ATW_PAY = 1) ATAU (ATW_PFT = 1) ATAU (ATW_FAM = 1) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 2 DAN ABS_SEA = 1) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 03-06) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 07-13 DAN ABS_DUR = 1) ATAU (ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 07-13 DAN ABS_DUR = 2 DAN ABS_PAY = 1) ATAU (AGF_MKT = 1,2) ATAU (AGF_HIR = 1) ATAU (AGF_CHK_A = 1) ATAU (AGF_ANY_A = 1) MJJ_MULT Apakah (NAMA) biasanya memiliki lebih dari satu pekerjaan/usaha? 1. TIDAK, HANYA SATU PEKERJAAN/USAHA 2. YA, LEBIH DARI SATU PEKERJAAN/USAHA
9.4	TANYAKAN JIKA AGF_MKT = 3,4 AGF_HIR Apakah (NAMA) dipekerjakan oleh orang lain untuk melakukan pekerjaan/kegiatan di bidang tersebut? 1. YA 2. TIDAK		TANYAKAN JIKA MJJ_MULT = 1 MJJ_INTROA A: Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan mengenai pekerjaan/usaha yang (NAMA) lakukan untuk menghasilkan pendapatan. TANYAKAN JIKA MJJ_MULT = 2 MJJ_INTROB B: Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan mengenai pekerjaan/usaha utama yang dilakukan oleh (NAMA). Pekerjaan utama yang Saya maksud adalah pekerjaan yang biasanya (NAMA) lakukan dengan waktu terbanyak untuk menghasilkan pendapatan.
		10.2	TANYAKAN JIKA MJJ_MULT = 1,2 MJJ_OCCTLE Apa yang dikerjakan (NAMA) di tempat kerja pada pekerjaan utama? BACAKAN JIKA DIBUTUHKAN Contoh: Mencangkul dan mencabut rumput, mengemudi ojek motor, menjual bubur ayam keliling, melakukan pekerjaan tukang bangunan, mengajar les piano, staf tata usaha, dll.
		10.3	TANYAKAN JIKA MJJ_MULT = 1,2 MJJ_OCCMTD Apa komoditas utama yang diproduksi/dihasilkan/dijual/dilayani dari kegiatan usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja? BACAKAN JIKA DIBUTUHKAN Contoh: padi, meja/kursi kayu, jasa angkutan penumpang, jasa pendidikan, jasa pemerintahan, jasa konstruksi, dll.

Lanjutan Lampiran 2

NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)	NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)
10.4	TANYAKAN JIKA MJJ_MULT = 1,2 MJJ_BIDANG Bergerak di bidang apakah usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja? BACAKAN JIKA DIBUTUHKAN Contoh: pertanian padi di sawah milik sendiri, penyediaan makanan/minuman, ojek online, perusahaan konstruksi, sekolah musik, dll.	10.11	TANYAKAN JIKA MJJ_HIRESA = 1 ATAU MJJ_HIRESB = 1 MJJ_JMLBRH Berapa jumlah buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar? ____ Orang
10.5	TANYAKAN JIKA MJJ_MULT = 1,2 MJJ_EMPREL Apakah status pekerjaan (NAMA) pada pekerjaan/usaha utama? 1. Pekerja (buruh/karyawan/pegawai/pekerja bebas) 2. Berusaha 3. Membantu dalam usaha keluarga atau rumah tangga 4. Sebagai magang/praktik kerja dibayar 5. Membantu anggota keluarga yang bekerja untuk orang lain	10.12	TANYAKAN JIKA MJJ_HIRESA = 2 MJJ_PTT Apakah usaha ini mempekerjakan pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga? 1. Ya, dibantu pekerja tidak tetap yang dibayar saja 2. Ya, dibantu pekerja keluarga saja 3. Ya, dibantu pekerja tidak tetap yang dibayar dan pekerja keluarga 4. Tidak dibantu/berusaha sendiri
10.6	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 MJJ_KBLI Kode KBLI (DIISI OLEH PML): _ _ _ _ _	10.13	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_PTT = 1,3 MJJ_JPTT Berapa jumlah pekerja tidak tetap yang dibayar: ____ Orang
10.7	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 MJJ_KBJI Kode KBJI (DIISI OLEH PML): _ _ _ _ _	10.14	TANYAKAN JIKA (MJJ_EMPREL = 1,4,5) ATAU (MJJ_EMPREL = 3 DAN MJJ_CFWCHK = 3,4) MJJ_REM_T Apakah bentuk pembayaran/pengupahan dari pekerjaan utama yang diterima oleh (NAMA) dalam sebulan terakhir? MJJ_REM_TA a. Upah atau gaji dalam bentuk uang 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TB b. Pembayaran per satuan hasil/ per pekerjaan yang diselesaikan 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TC c. Komisi 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TD d. Tip 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TE e. Ongkos jasa 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TF f. Pembayaran dengan makanan atau akomodasi 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TG g. Pembayaran dalam bentuk produk/barang 1. YA 2. TIDAK
10.8	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 3 MJJ_CFWCHK Siapa yang biasanya membuat keputusan tentang pengelolaan usaha keluarga/rumah tangga? 1. Diri Sendiri 2. Diri sendiri bersama keluarga/orang lain 3. Anggota keluarga lain saja 4. Orang lain (bukan keluarga/kerabat) saja		
10.9	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 3 MJJ_CFWINC Siapa yang biasanya memutuskan bagaimana pendapatan yang diperoleh dari usaha ini akan digunakan? 1. Diri Sendiri 2. Diri sendiri bersama keluarga/orang lain 3. Anggota keluarga lain saja 4. Orang lain (bukan keluarga/kerabat) saja		
10.10	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 2 MJJ_HIRESA A. Apakah (NAMA) mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai yang dibayar secara rutin? 1. YA 2. TIDAK TANYAKAN JIKA MJJ_CFWCHK = 1,2 MJJ_HIRESB B. Apakah usaha keluarga mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai yang dibayar secara rutin? 1. YA 2. TIDAK		

Lanjutan Lampiran 2

NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)	NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)
	MJJ_REM_TH h. Borongan 1. YA 2. TIDAK MJJ_REM_TI i. Pembayaran tunai lainnya 1. YA, TULISKAN 2. TIDAK TANYAKAN JIKA (MJJ_REM_TA = 2 DAN MJJ_REM_TB = 2 DAN MJJ_REM_TC = 2 DAN MJJ_REM_TD = 2 DAN MJJ_REM_TE = 2 DAN MJJ_REM_TF = 2 DAN MJJ_REM_TG = 2 DAN MJJ_REM_TH = 2 DAN MJJ_REM_TI = 2) MJJ_REM_TJ j. TIDAK DIBAYAR 1. YA		TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL=1,4 ATAU (MJJ_EMPREL=3 DAN MJJ_CFWCHK=3,4 DAN (MJJ_REM_TA=1 ATAU MJJ_REM_TB=1 ATAU MJJ_REM_TC=1 ATAU MJJ_REM_TD=1 ATAU MJJ_REM_TE=1 ATAU MJJ_REM_TF=1 ATAU MJJ_REM_TG=1 ATAU MJJ_REM_TH=1 ATAU MJJ_REM_TI=1)) ATAU (MJJ_EMPREL=5 DAN (MJJ_REM_TA=1 ATAU MJJ_REM_TB=1 ATAU MJJ_REM_TC=1 ATAU MJJ_REM_TD=1 ATAU MJJ_REM_TE=1 ATAU MJJ_REM_TF=1 ATAU MJJ_REM_TG=1 ATAU MJJ_REM_TH=1 ATAU MJJ_REM_TI=1)) MJJ_PLUS B. Di luar upah/gaji pokok dan tunjangan rutin yang sudah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, berapakah total pendapatan tidak rutin yang diterima selama sebulan terakhir? (termasuk upah lembur, uang makan, tunj. transportasi, THR, tunj. Istri/anak, bonus) MJJ_PLUS_U Uang : Rp. _____ MJJ_PLUS_B Barang: Rp. _____
10.15	TANYAKAN JIKA MJJ_REM_TA = 1 MJJ_P_UPH A. Apa periode pembayaran/pengupahan biasanya pada pekerjaan utama (NAMA)? 1. BULANAN 2. MINGGUAN 3. HARIAN 4. PER JAM 5. LAINNYA, TULISKAN:		TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 2 ATAU (MJJ_EMPREL = 3 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) MJJ_LABA Berapakah keuntungan/pendapatan bersih yang (NAMA) peroleh selama sebulan terakhir dari kegiatan usaha utama ini? MJJ_LABA_U Uang : Rp. _____ MJJ_LABA_B Barang: Rp. _____
	TANYAKAN JIKA MJJ_REM_TA = 1 MJJ_C_UPH B. Bagaimana cara pembayaran/pengupahan biasanya pada pekerjaan utama (NAMA)? 1. Tunai/cash 2. Transfer/digital 3. Tunai/cash dan transfer/digital	10.17	TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_A=1) ATAU (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_B=1) ATAU (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TL_C=1) ATAU (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_D=1) MJJ_TI Sebelumnya (NAMA) tercatat menggunakan teknologi digital: TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT = 1,2 DAN TIK_TI_A = 1) MJJ_TI_A a. Apakah (NAMA) memanfaatkan komputer (PC, notebook, laptop, tablet, atau PDA) pada pekerjaan utama? 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT = 1,2 DAN TIK_TI_B=1) MJJ_TI_B b. Apakah (NAMA) memanfaatkan telepon seluler/ telepon pintar (HP/smartphone) pada pekerjaan utama? 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak
10.16	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL=1,4 ATAU (MJJ_EMPREL=3 DAN MJJ_CFWCHK=3,4 DAN (MJJ_REM_TA=1 ATAU MJJ_REM_TB=1 ATAU MJJ_REM_TC=1 ATAU MJJ_REM_TD=1 ATAU MJJ_REM_TE=1 ATAU MJJ_REM_TF=1 ATAU MJJ_REM_TG=1 ATAU MJJ_REM_TH=1 ATAU MJJ_REM_TI=1)) ATAU (MJJ_EMPREL=5 DAN (MJJ_REM_TA=1 ATAU MJJ_REM_TB=1 ATAU MJJ_REM_TC=1 ATAU MJJ_REM_TD=1 ATAU MJJ_REM_TE=1 ATAU MJJ_REM_TF=1 ATAU MJJ_REM_TG=1 ATAU MJJ_REM_TH=1 ATAU MJJ_REM_TI=1)) MJJ_UPAH A. Berapakah gaji/upah bersih yang (NAMA) terima selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama ini? – Termasuk ke dalam gaji/upah: tunj. kinerja, tunj. jabatan/tunj. fungsional/sertifikasi, tunj. biaya hidup/ tunj. kemahalan; – Tidak termasuk ke dalam gaji/upah: upah lembur, uang makan, tunj. transportasi, THR, tunj. Istri/anak, bonus. MJJ_UPAH_U Uang : Rp. _____ MJJ_UPAH_B Barang: Rp. _____	10.18	TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_A=1) ATAU (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_B=1) ATAU (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TL_C=1) ATAU (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_D=1) MJJ_TI Sebelumnya (NAMA) tercatat menggunakan teknologi digital: TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT = 1,2 DAN TIK_TI_A = 1) MJJ_TI_A a. Apakah (NAMA) memanfaatkan komputer (PC, notebook, laptop, tablet, atau PDA) pada pekerjaan utama? 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT = 1,2 DAN TIK_TI_B=1) MJJ_TI_B b. Apakah (NAMA) memanfaatkan telepon seluler/ telepon pintar (HP/smartphone) pada pekerjaan utama? 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak

Lanjutan Lampiran 2

NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)	NO	10. PEKERJAAN UTAMA - KARAKTERISTIK (MJJ)
	TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_C=1) MJJ_TI_C c. Apakah (NAMA) memanfaatkan teknologi digital lain (televisi digital dengan set top box, smart TV, kamera digital, alat perekam suara, alat hitung digital, alat kesehatan digital dan alat digital lainnya) pada pekerjaan utama? 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak TANYAKAN JIKA (MJJ_MULT=1,2 DAN TIK_TI_D=1) MJJ_TI_D d. Apakah (NAMA) memanfaatkan internet (termasuk menggunakan whatsapp, facebook, instagram, twitter dan media sosial lainnya) pada pekerjaan utama? 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak	MJJ_INET_F f. Melakukan proses pembelian barang/jasa melalui email/sosial media (Instagram, Facebook, X/Twitter, dll)/layanan pesan instan (LINE, Whatsapp, Telegram, dll) 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_G g. Melakukan proses pembelian barang/jasa melalui website/aplikasi marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Olx, Shopee, dan lain-lain) 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_H h. Internet banking 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_I i. Lainnya 1. Ya, dalam satu bulan terakhir, TULISKAN 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir, TULISKAN 3. TIDAK	
10.19	TANYAKAN JIKA MJJ_TI_D = 1,2 MJJ_INET Apakah dalam pekerjaan utama, (NAMA) memanfaatkan internet untuk: MJJ_INET_A a. Komunikasi 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_B b. Promosi 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_C c. Mengakses informasi 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_D d. Melakukan proses penjualan barang/jasa melalui email/sosial media (Instagram, Facebook, X/Twitter, dll)/layanan pesan instan (LINE, Whatsapp, Telegram, dll) 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak MJJ_INET_E e. Melakukan proses penjualan barang/jasa melalui website/aplikasi marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Olx, Shopee, dan lain-lain) 1. Ya, dalam satu bulan terakhir 2. Ya, dalam tiga bulan terakhir 3. Tidak	10.20 TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 WKT_UA A. Dalam seminggu terakhir, berapa jumlah hari (NAMA) bekerja di <u>pekerjaan/usaha utama</u> ini? _____ HARI PER MINGGU Catatan: Jika seminggu terakhir sedang tidak bekerja isikan 0 (nol)	
		TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 WKT_UB B. Dalam seminggu terakhir, berapa jumlah jam (NAMA) bekerja di <u>pekerjaan/usaha utama</u> ini (setelah dikurangi waktu istirahat)? _____ JAM PER MINGGU Catatan: - Jika seminggu terakhir sedang tidak bekerja isikan 0 (nol) - Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)	
		10.21 TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL=1,2,3,4,5 WKT_MJJ Berapa jumlah jam <u>biasanya</u> (NAMA) bekerja selama seminggu di <u>pekerjaan/usaha utama</u> ini (setelah dikurangi waktu istirahat)? _____ JAM PER MINGGU Catatan: Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)	

Lanjutan Lampiran 2

NO 11. PEKERJAAN UTAMA – TEMPAT KERJA (MJU)		NO 11. PEKERJAAN UTAMA – TEMPAT KERJA (MJU)	
MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS DAN/ATAU UMUR 15 TAHUN KE ATAS		TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJU_PLC = 2,3,4,5,6,7,8,9,10,97 MJU_KOMU	
11.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN MJJ_EMPREL= 1,2,3,4,5 MJU_INS Apakah jenis instansi/lembaga/institusi dari tempat kerja/usaha (NAMA)? 1. Pemerintah/negeri 2. BUMN/BUMD 3. Lembaga/organisasi internasional 4. PT/Perseoro/koperasi/CV/Firma/Persekutuan Perdata sektor pertanian 5. PT/Perseoro/koperasi/CV/Firma/Persekutuan Perdata sektor non-pertanian 6. Usaha lainnya/usaha perorangan/usaha rumah tangga sektor pertanian 7. Usaha lainnya/usaha perorangan/usaha rumah tangga sektor non-pertanian 8. Lembaga non-profit/nirlaba 9. Rumah tangga (misal: asisten rumah tangga, tukang kebun, satpam di rumah tangga, guru les privat khusus di satu rumah tangga, dll) Catatan: MJJ_EMPREL= 2,3 tidak boleh terisi kode 1,2,3	11.4	Apakah (NAMA) melakukan perjalanan pergi dan pulang dari rumah/tempat tinggal ke kantor/tempat kerja secara rutin? 1. Ya, pergi pulang pada hari yang sama (<=24 jam), minimal satu kali PP dalam seminggu 2. Ya, pergi pulang tidak pada hari yang sama (>24 jam), misal: dua hari sekali, tiga hari sekali, seminggu sekali, dst 3. Ya, pergi pulang tidak pada minggu yang sama, misal: dua minggu sekali, tiga minggu sekali, sebulan sekali, dua bulan sekali, dst 4. Tidak rutin
11.2	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL= 1,2,3,4,5 MJU_SIZ Berapa total orang yang bekerja di tempat kerja (NAMA), termasuk pengusaha dan (NAMA)? 1. 1-2 2. 3-4 3. 5-9 4. 10-22 5. 23-26 6. 27-49 7. 50+	11.5	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJU_PLC = 2,3,4,5,6,7,8,9,10,97 MJU_LOKASI Di mana tempat (NAMA) bekerja pada pekerjaan utama dalam seminggu terakhir? – UNTUK PEDAGANG (KELILING), ISIKAN TEMPAT BIASANYA MULAI MENJUAL DAGANGAN. – UNTUK DRIVER/SUPIR/OJEK (TERMASUK ONLINE), ISIKAN TEMPAT PANGKALAN/BANDARA/PUL TAKSI/TERMINAL/STASIUN, ATAU TEMPAT BIASANYA MULAI MENGAMBIL PENUMPANG. – UNTUK WARTAWAN DAN KURIR, ISIKAN LOKASI KANTOR. 1. DI KABUPATEN/KOTA YANG SAMA DENGAN TEMPAT TINGGAL SEKARANG 2. DI KABUPATEN/KOTA YANG BERBEDA DENGAN TEMPAT TINGGAL SEKARANG 3. DI LUAR NEGERI
11.3	TANYAKAN JIKA MJJ_EMPREL= 1,2,3,4,5 MJU_PLC Di tempat apa (NAMA) biasanya bekerja, misalnya di kantor, di jalan, di rumah sendiri, di dalam kendaraan, dan sebagainya? 01. DI RUMAH SENDIRI 02. RUMAH KELUARGA/TEMAN/TETANGGA 03. DI RUMAH MAJIKAN/PEMBERI KERJA 04. DI LOKASI PERTANIAN, LAHAN PERTANIAN ATAU PERIKANAN (SAWAH/KEBUN/LADANG/ HUTAN/LAUT/DANAU/ RAWA/KOLAM/EMPANG) 05. DI SENTRA USAHA, KANTOR, PABRIK, MALL, PASAR DENGAN BANGUNAN, PERTOKOAN, TEMPAT ATAU LOKASI TETAP 06. PASAR TANPA BANGUNAN 07. DI JALAN ATAU RUANG PUBLIK LAINNYA TANPA STRUKTUR TETAP 08. DI KENDARAAN (TANPA ADA TEMPAT PANGKAL SEHARI-HARI) 09. RUMAH KE RUMAH (TUKANG KREDIT, BANK KELILING) 10. LAINNYA, TULISKAN 97. TIDAK TAHU Catatan: Jika DEM_REL= 9,10 maka MJU_PLC= 3	11.6	TANYAKAN JIKA MJU_LOKASI=2 MJU_PROV Sebutkan provinsi tempat (NAMA) bekerja: _____ NAMA & KODE PROVINSI
		11.7	TANYAKAN JIKA MJU_LOKASI=2 MJU_KAB Sebutkan kabupaten/kota tempat (NAMA) bekerja: _____ NAMA & KODE KAB/KOTA
		11.8	TANYAKAN JIKA MJU_LOKASI=3 MJU_NEG Sebutkan negara tempat (NAMA) bekerja: _____ NAMA & KODE NEGARA

Lanjutan Lampiran 2

NO	11. PEKERJAAN UTAMA – TEMPAT KERJA (MJU)	NO	12. PEKERJAAN UTAMA – MASA KERJA (MJT)
11.9	TANYAKAN JIKA MJU_KOMU=1 MJU_MODA Apa saja moda transportasi yang biasanya (NAMA) gunakan untuk berangkat ke tempat kerja? MJU_MODA_A a. Mobil pribadi/dinas/bus karyawan 1. YA 2. TIDAK MJU_MODA_B b. Sepeda motor pribadi/dinas 1. YA 2. TIDAK MJU_MODA_C c. Kendaraan pribadi lainnya (sepeda/skuter/perahu/dll) 1. YA 2. TIDAK MJU_MODA_D d. Transportasi umum (becak, motor ojek (non-online), kendaraan jemputan berbayar, taksi, angkutan kota, bus umum/kota, kereta, dll) 1. YA 2. TIDAK MJU_MODA_E e. Transportasi online (Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain baik berupa sepeda motor maupun mobil) 1. YA 2. TIDAK MJU_MODA_F f. Lainnya 1. YA 2. TIDAK TANYAKAN JIKA MJU_MODA_A = 2 DAN MJU_MODA_B = 2 DAN MJU_MODA_C = 2 DAN MJU_MODA_D = 2 DAN MJU_MODA_E = 2 DAN MJU_MODA_F = 2 MJU_MODA_G g. SAMA SEKALI TIDAK MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI (JALAN KAKI) 1. YA	MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS DAN/ATAU UMUR 15 TAHUN KE ATAS TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 MJT_SYR Pada bulan dan tahun berapa (NAMA) mulai bekerja di pekerjaan atau usaha ini? MJT_SYR_M Bulan: ____ MJT_SYR_Y Tahun: ____ TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN (MJT_SYR_M >= 8 DAN MJT_SYR_Y = 2024) ATAU (MJT_SYR_M < 9 DAN MJT_SYR_Y = 2025) MJT_LAMA Jika (NAMA) bekerja sejak Agustus 2024 atau setelahnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha pada pekerjaan ini? ____ (bulan) TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN (MJJ_EMPREL = 1 DAN MJT_SYR_M >= 8 DAN MJT_SYR_Y = 2015) ATAU (MJJ_EMPREL = 1 DAN MJT_SYR_Y > 2015) MJT_UPAH Berapakah besar upah/gaji bersih pertama yang diterima (NAMA) per bulan, baik berupa uang maupun barang saat mulai bekerja pada pekerjaan ini? Rp. _____	
11.10	TANYAKAN JIKA MJU_MODA_A = 1 ATAU MJU_MODA_B = 1 ATAU MJU_MODA_C = 1 ATAU MJU_MODA_D = 1 ATAU MJU_MODA_E = 1 ATAU MJU_MODA_F = 1 MJU_MODA_U Apa moda transportasi utama yang (NAMA) gunakan untuk berangkat ke tempat kerja? 1. MOBIL PRIBADI/DINAS/BUS KARYAWAN 2. SEPEDA MOTOR PRIBADI/DINAS 3. KENDARAAN PRIBADI LAINNYA (SEPEDA/SKUTER/PERAHU/DLL) 4. TRANSPORTASI UMUM (BECAK, MOTOR OJEK (NON-ONLINE), KENDARAAN JEMPUTAN BERBAYAR, TAKSI, ANGKUTAN KOTA, BUS UMUM/KOTA, KERETA, DLL) 5. TRANSPORTASI ONLINE (GOJEK, GRAB, MAXIM, DAN LAIN-LAIN BAIK BERUPA SEPEDA MOTOR MAUPUN MOBIL) 6. LAINNYA, TULISKAN		

Lanjutan Lampiran 2

13. PEKERJAAN UTAMA - PERJANJIAN KERJA (MJC)		13. PEKERJAAN UTAMA - PERJANJIAN KERJA (MJC)	
MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5-17 TAHUN DAN/ATAU UMUR 15 TAHUN KE ATAS			
13.1	TANYAKAN JIKA ($DEM_AGE \geq 15$ DAN $MJJ_EMPREL = 1,4$) ATAU ($DEM_AGE \geq 15$ DAN $MJJ_EMPREL = 3,5$ DAN $MJJ_REM_TA = 1$) MJC_CONTRA Apakah (NAMA) memiliki perjanjian/kontrak kerja? 1. YA, KONTRAK/SURAT KEPUTUSAN TERTULIS 2. YA, PERJANJIAN LISAN 3. TIDAK ADA PERJANJIAN 97. TIDAK TAHU	13.5	TANYAKAN JIKA ($MJC_CONTRA = 1,2,3,97$) ATAU ($DEM_AGE = 5-14$ DAN $MJJ_EMPREL = 1,4$) ATAU ($DEM_AGE = 5-14$ DAN $MJJ_EMPREL = 3,5$ DAN $MJJ_REM_TA = 1$) MJC_PKJ Dalam sebulan terakhir, apakah (NAMA) memiliki lebih dari satu majikan/pemberi kerja? 1. YA 2. TIDAK
13.2	TANYAKAN JIKA $MJC_CONTRA = 1,2$ MJC_CONOP Bagaimana periode waktu kontrak atau perjanjian kerja (NAMA)? 1. Dengan jangka waktu tertentu (contoh: ASN-PPPK, pegawai kontrak lainnya) 2. Sampai tanggal pekerjaan atau masa jabatan selesai (contoh: pekerja borongan, perangkat desa, dll) 3. Tetap/permanen atau sampai pensiun (contoh: ASN-PNS, TNI/POLRI, dll) 4. Belum ditentukan, hingga pemberitahuan lebih lanjut (contoh: pekerja bebas, dll) 97. TIDAK TAHU	13.6	TANYAKAN JIKA ($MJC_TOTAL = 1,2,3,4,5$) ATAU ($MJC_DUR = 1,2,3,4$) MCD_TASKSE Apakah pekerjaan (NAMA) bersifat musiman? 1. YA 2. TIDAK
13.3	TANYAKAN JIKA ($MJC_CONTRA = 2$ DAN $MJC_CONOP = 4,97$) ATAU $MJC_CONTRA = 3,97$ MJC_TOTAL Berapa lama lagi (NAMA) memperkirakan untuk terus bekerja pada pekerjaan ini? 1. HARIAN 2. KURANG DARI SEBULAN 3. ANTARA 1 DAN 2 BULAN 4. LEBIH DARI 2 BULAN TAPI KURANG DARI 3 BULAN 5. 3 SAMPAI KURANG DARI 6 BULAN 6. 6 BULAN ATAU LEBIH 7. SAMPAI PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT/TIDAK ADA PERJANJIAN KHUSUS 97. TIDAK TAHU	13.7	TANYAKAN JIKA $MJC_CONTRA = 1,2$ MCD_CH Apakah kontrak atau perjanjian kerja (NAMA) menyebutkan/menyepakati jumlah jam kerja? 1. YA 2. TIDAK
13.4	TANYAKAN JIKA ($MJC_CONTRA = 1,2$ DAN $MJC_CONOP = 1,2$) MJC_DUR Berapa lama total kontrak atau perjanjian kerja (NAMA) saat ini? 1. KONTRAK/PERJANJIAN HARIAN 2. KURANG DARI SATU BULAN 3. 1 SAMPAI KURANG DARI 3 BULAN 4. 3 SAMPAI KURANG DARI 6 BULAN 5. 6 SAMPAI KURANG DARI 12 BULAN 6. 12 SAMPAI KURANG DARI 24 BULAN 7. DUA TAHUN ATAU LEBIH 8. TIDAK ADA DURASI TERTENTU	13.8	TANYAKAN JIKA $MCD_CH = 1$ MCD_CH_NUM Berapa jam kerja yang disepakati atau yang tertulis pada kontrak kerja (NAMA) per minggu dalam pekerjaan ini? JAM PER MINGGU 997 TIDAK TAHU Catatan: Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)
		13.9	TANYAKAN JIKA $MJC_CONTRA = 1$ DAN $MCD_CH = 2$ MCD_CM_A A. Apakah kontrak kerja menjamin jumlah jam atau jumlah pekerjaan minimum untuk (NAMA)? 1. YA, JAM MINIMUM UNTUK BEKERJA 2. YA, TUGAS ATAU PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN 3. TIDAK, KONTRAK 0 JAM, DIHUBUNGI BILA DIPERLUKAN
			TANYAKAN JIKA $MJC_CONTRA = 2$ DAN $MCD_CH = 2$ MCD_CM_B B. Apakah memiliki jumlah jam kerja atau pekerjaan minimum yang disepakati dengan pemberi kerja/perusahaan (NAMA)? 1. YA, JAM MINIMUM UNTUK BEKERJA 2. YA, TUGAS ATAU PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN 3. TIDAK, KONTRAK 0 JAM, DIHUBUNGI BILA DIPERLUKAN

Lanjutan Lampiran 2

13. PEKERJAAN UTAMA - PERJANJIAN KERJA (MJC)		14. PEKERJAAN UTAMA - PEKERJA INFORMAL (MIE)	
NO		MODUL INI HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS	
13.10	TANYAKAN JIKA ($DEM_AGE \geq 15$ DAN $MJJ_EMPREL = 1$) ATAU ($DEM_AGE \geq 15$ DAN $MJJ_EMPREL = 3,5$ DAN $MJJ_REM_TA = 1$) MCD_SP Apakah (NAMA) terdaftar sebagai anggota dalam serikat pekerja? (Contoh: KSPSI, FSBDSI, SBSI, SPNI, dll) 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU	14.1	TANYAKAN JIKA ($DEM_AGE \geq 15$ DAN $MJJ_EMPREL = 1,4$) ATAU ($DEM_AGE \geq 15$ DAN $MJJ_EMPREL = 3,5$ DAN $MJJ_REM_TA = 1$) MIE_SOC Sehubungan dengan pekerjaan/usaha ini, apakah instansi/perusahaan/usaha tempat (NAMA) bekerja memberikan/menyediakan jaminan sosial dan hak ketenagakerjaan berikut ini: MIE_SOC_A a. Jaminan kesehatan 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_B b. Jaminan kecelakaan kerja 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_C c. Jaminan kematian 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_D d. Jaminan hari tua 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_E e. Jaminan pensiun 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_F f. Jaminan kehilangan pekerjaan 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_G g. Cuti tahunan tanpa memotong upah/gaji pokok 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_H h. Cuti bersalin/cuti mendampingi istri melahirkan tanpa memotong upah/gaji pokok 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU MIE_SOC_I i. Cuti sakit tanpa memotong upah/gaji pokok 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU
13.11	TANYAKAN JIKA $DEM_AGE = 5-17$ DAN $MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5$ MCD_ANK_KD Apakah (NAMA) pernah mengalami kondisi yang membahayakan kesehatan yang disebabkan pekerjaan selama 12 bulan terakhir? 1. YA 2. TIDAK		
13.12	TANYAKAN JIKA $DEM_AGE = 5-17$ DAN $MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5$ MCD_ANK_LK Apakah (NAMA) bekerja dalam lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat? 1. YA 2. TIDAK		
13.13	TANYAKAN JIKA $DEM_AGE \geq 5$ DAN $MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5$ MCD_ANK_KR Apakah (NAMA) pernah mengalami kekerasan di tempat kerja: MCD_ANK_KF a. Kekerasan fisik 1. Ya, dalam setahun terakhir 2. Ya, lebih dari setahun terakhir 3. Tidak MCD_ANK_KE b. Kekerasan emosional/psikis 1. Ya, dalam setahun terakhir 2. Ya, lebih dari setahun terakhir 3. Tidak MCD_ANK_KS c. Kekerasan seksual 1. Ya, dalam setahun terakhir 2. Ya, lebih dari setahun terakhir 3. Tidak		

Lanjutan Lampiran 2

NO	14. PEKERJAAN UTAMA - PEKERJA INFORMAL (MIE)	NO	15. PEKERJAAN UTAMA - INDEPENDENT WORKER RELATIONSHIP (MJI)
	TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) ATAU MIE_SOC_A = 2,97 ATAU MIE_SOC_B = 2,97 ATAU MIE_SOC_C = 2,97 ATAU MIE_SOC_D = 2,97 ATAU MIE_SOC_E = 2,97 ATAU MIE_SOC_F = 2,97 MIE_SELF Sehubungan dengan pekerjaan/usaha ini, apakah (NAMA) membayar sendiri sepenuhnya untuk jaminan sosial berikut ini: TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) ATAU MIE_SOC_A = 2,97 MIE_SELF_A a. Jaminan kesehatan 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) ATAU MIE_SOC_B = 2,97 MIE_SELF_B b. Jaminan kecelakaan kerja 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) ATAU MIE_SOC_C = 2,97 MIE_SELF_C c. Jaminan kematian 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) ATAU MIE_SOC_D = 2,97 MIE_SELF_D d. Jaminan hari tua 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_CFWCHK = 1,2) ATAU MIE_SOC_E = 2,97 MIE_SELF_E e. Jaminan pensiun 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA MIE_SOC_F = 2,97 MIE_SELF_F f. Jaminan kehilangan pekerjaan 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU	MODUL INI HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS	
14.2		15.1	TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_HIRESA = 2 DAN MJJ_PTT= 2,4) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_HIRESB = 2) MJD_SINGLE Apakah sebagian besar pendapatan usaha/kegiatan tersebut berasal dari ...? 1. Hanya satu pelanggan/konsumen/pembeli 2. Lebih dari satu pelanggan/konsumen/pembeli 3. BELUM PUNYA PELANGGAN/KONSUMEN/PEMBELI
		15.2	TANYAKAN JIKA MJD_SINGLE = 2 MJD_SOURCE Apakah (NAMA) mendapatkan pelanggan/konsumen/pembeli melalui pihak lain, misalnya dari perusahaan lain, perantara, atau orang lain...? 1. Ya, semua pelanggan/konsumen/pembeli didapatkan dari perantara 2. Ya, sebagian besar pelanggan/konsumen/pembeli didapatkan dari perantara 3. Ya, sebagian kecil pelanggan/konsumen/pembeli didapatkan dari perantara 4. Tidak ada pelanggan/konsumen/pembeli yang didapatkan dari perantara
		15.3	TANYAKAN JIKA (MJD_SOURCE = 3,4) ATAU (MJD_SINGLE = 3) MJD_SELL Dalam kegiatan usaha ini apakah (NAMA)...? MJD_SELL_A a. Membuat produk atau menyediakan layanan hanya untuk satu perusahaan/perantara/orang 1. YA 2. TIDAK MJD_SELL_B b. Menjual produk atau layanan yang disediakan hanya dari satu perusahaan/perantara/orang 1. YA 2. TIDAK MJD_SELL_C c. Bekerja dengan bahan atau peralatan yang disediakan hanya oleh satu perusahaan/perantara/orang 1. YA 2. TIDAK TANYAKAN JIKA (MJD_SELL_A = 2 DAN MJD_SELL_B = 2 DAN MJJ_SELL_C = 2) MJD_SELL_D d. SELAIN KODE DI ATAS 1. YA

Lanjutan Lampiran 2

NO	15. PEKERJAAN UTAMA - INDEPENDENT WORKER RELATIONSHIP (MJI)	NO	16. PEKERJAAN UTAMA - STATUS TEMPAT KERJA (MJL)
	TANYAKAN JIKA (MJD_SINGLE = 1) ATAU (MJD_SOURCE = 1,2) ATAU (MJD_SELL_A = 1) ATAU (MJD_SELL_B = 1) ATAU (MJD_SELL_C = 1) MJD_CONT 15.4 Apakah perusahaan/perantara/orang tersebut...? MJD_CONT_A a. Menetapkan harga produk atau jasa yang ditawarkan 1. YA 2. TIDAK MJD_CONT_B b. Menentukan jumlah minimum penjualan atau tugas yang harus diselesaikan 1. YA 2. TIDAK MJD_CONT_C c. Menentukan tempat, rute, atau area tempat dalam melakukan pekerjaan 1. YA 2. TIDAK MJD_CONT_D d. Memutuskan bagaimana mengatur pekerjaan, misalnya pengawasan atau menentukan waktu kerja 1. YA 2. TIDAK MJD_CONT_E e. Memutuskan pemasok yang akan digunakan 1. YA 2. TIDAK MJD_CONT_F f. Menyediakan tempat atau mesin yang digunakan 1. YA 2. TIDAK TANYAKAN JIKA (MJD_CONT_A=2 DAN MJD_CONT_B=2 DAN MJD_CONT_C=2 DAN MJD_CONT_D=2 DAN MJD_CONT_E=2 DAN MJD_CONT_F=2) MJD_CONT_G g. BUKAN DARI SALAH SATU PILIHAN DI ATAS 1. YA	MODUL INI HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 2,3) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,4,5 DAN MJJ_INS = 6,7) MJL_REGI 16.1 Apakah usaha/perusahaan tempat (NAMA) bekerja terdaftar di sistem perizinan? 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (MJJ_EMPREL = 2 DAN MJL_REGI = 1) ATAU (MJJ_CFWCHK = 1,2 DAN MJL_REGI = 1) MJL_CORP 16.2 Apakah usaha (NAMA) berbadan hukum? 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (MJJ_EMPREL = 2 DAN MJL_REGI = 1) ATAU (MJJ_CFWCHK = 1,2 DAN MJL_REGI = 1) MJL_WKT 16.3 Sejak kapan usaha ini terdaftar pada sistem perizinan? MJL_WKT_M Bulan: ____ MJL_WKT_Y Tahun: ____ TANYAKAN JIKA (MJJ_EMPREL = 2 DAN MJD_CONT_G = BLANK DAN MJL_REGI = 2,97) ATAU (MJJ_CFWCHK = 1,2 DAN MJD_CONT_G = BLANK DAN MJL_REGI = 2,97) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1 DAN MJJ_REM_TA = 2) MJL_REGP 16.4 Sudahkah tempat kerja/usaha (NAMA) terdaftar sebagai wajib pajak? 1. YA 2. TIDAK 97. TIDAK TAHU TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL=2,3) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,4,5 DAN MJJ_INS = 6,7) MIS_BOOK 16.5 Bagaimana instansi/lembaga/institusi perusahaan/usaha tempat (NAMA) bekerja/berusaha melakukan pembukuan keuangan? 1. Pembukuan lengkap untuk keperluan perpajakan 2. Pembukuan sederhana untuk keperluan perpajakan 3. Pembukuan sederhana bukan untuk keperluan perpajakan 4. Catatan informal tentang pesanan, penjualan, pembelian 5. Tidak ada catatan yang disimpan 97. TIDAK TAHU	

Lanjutan Lampiran 2

17. PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA - KARAKTERISTIK (SJJ)		17. PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA - KARAKTERISTIK (SJJ)	
MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS		TANYAKAN JIKA SJJ_HIRES = 2 SJJ_PTT	
17.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN MJJ_MULT = 1,2 SJB_TEXT Sekarang saya ingin memastikan kembali, apakah (NAMA) memiliki pekerjaan atau kegiatan usaha tambahan lain yang dilakukan untuk menghasilkan uang? 1. YA 2. TIDAK	17.9	Apakah mempekerjakan pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga pada usaha tambahan utama? 1. Ya, dibantu pekerja tidak tetap yang dibayar saja 2. Ya, dibantu pekerja keluarga saja 3. Ya, dibantu pekerja tidak tetap yang dibayar dan pekerja keluarga 4. Tidak dibantu/berusaha sendiri
17.2	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 SJJ_OCCMLE Apa yang dikerjakan (NAMA) di tempat kerja pada pekerjaan/usaha tambahan utama?	17.10	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 WKT_TA A. Dalam seminggu terakhir, berapa jumlah hari (NAMA) bekerja di <u>pekerjaan/usaha tambahan utama</u> ini? HARI PER MINGGU Catatan: Jika seminggu terakhir sedang tidak bekerja isikan 0 (nol)
17.3	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 SJJ_OCCMTD Apa komoditas utama yang diproduksi/dihasilkan/dijual/dilayani dari kegiatan usaha/perusahaan/kantor tempat bekerja pada pekerjaan/usaha tambahan utama (NAMA)?		TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 WKT_TB B. Dalam seminggu terakhir, berapa jumlah jam (NAMA) bekerja di <u>pekerjaan/usaha tambahan utama</u> ini (setelah dikurangi waktu istirahat)? JAM PER MINGGU Catatan: - Jika seminggu terakhir sedang tidak bekerja isikan 0 (nol) - Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)
17.4	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 SJJ_BIDANG Bergerak di bidang apakah usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja pada pekerjaan/usaha tambahan utama?		TANYAKAN JIKA SJB_TEXT=1 WKT_SJJ Berapa jumlah jam <u>biasanya</u> (NAMA) bekerja selama seminggu di <u>pekerjaan/usaha tambahan utama</u> ini (setelah dikurangi waktu istirahat)? JAM PER MINGGU Catatan: Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)
17.5	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 SJJ_EMPREL Apa status pekerjaan (NAMA) pada pekerjaan/usaha tambahan utama? 1. Pekerja (buruh/karyawan/pegawai/pekerja bebas) 2. Berusaha 3. Membantu dalam usaha keluarga atau rumah tangga 4. Sebagai magang/praktik kerja dibayar 5. Membantu anggota keluarga yang bekerja untuk orang lain	17.11	
17.6	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 SJJ_KBLI Kode KBLI (DIISI OLEH PML): _____		
17.7	TANYAKAN JIKA SJB_TEXT = 1 SJJ_KBJI Kode KBJI (DIISI OLEH PML): _____		
17.8	TANYAKAN JIKA SJJ_EMPREL = 2 SJJ_HIRES Apakah (NAMA) mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai berbayar secara rutin pada usaha tambahan utama? 1. YA 2. TIDAK		

Lanjutan Lampiran 2

NO	18. PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA - DEPENDENT CONTRACTORS (SJD)	NO	18. PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA - DEPENDENT CONTRACTORS (SJD)
MODUL INI HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS		TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN SJJ_HIRES = 2 DAN SJJ_PTT = 2,4 SJD_SINGLE	
18.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN SJJ_EMPREL = 1,3,4,5 SJD_REM_T Apa bentuk pembayaran/pengupahan dari pekerjaan/ usaha tambahan utama yang diterima oleh (NAMA) dalam sebulan terakhir? SJD_REM_TA a. Upah atau gaji dalam bentuk uang 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TB b. Pembayaran per satuan hasil/ per pekerjaan yang diselesaikan 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TC c. Komisi 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TD d. Tip 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TE e. Ongkos jasa 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TF f. Pembayaran dengan makanan atau akomodasi 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TG g. Pembayaran dalam bentuk produk/barang 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TH h. Borongan 1. YA 2. TIDAK SJD_REM_TI i. Pembayaran tunai lainnya 1. YA, TULISKAN..... 2. TIDAK TANYAKAN JIKA (SJD_REM_TA = 2 DAN SJD_REM_TB = 2 DAN SJD_REM_TC = 2 DAN SJD_REM_TD = 2 DAN SJD_REM_TE = 2 DAN SJD_REM_TF = 2 DAN SJD_REM_TG = 2 DAN SJD_REM_TH = 2 DAN SJD_REM_TI = 2) SJD_REM_TJ j. TIDAK DIBAYAR 1. YA	18.2	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN SJJ_HIRES = 2 DAN SJJ_PTT = 2,4 SJD_SINGLE Apakah sebagian besar pendapatan usaha/kegiatan tersebut berasal dari ...? 1. Hanya satu pelanggan/konsumen/pembeli 2. Lebih dari satu pelanggan/konsumen/pembeli 3. BELUM PUNYA PELANGGAN/KONSUMEN/PEMBELI
		18.3	TANYAKAN JIKA SJD_SINGLE = 2 SJD_SOURCE Apakah (NAMA) mendapatkan pelanggan/konsumen/ pembeli melalui orang lain, misalnya dari perusahaan lain, perantara, atau orang lain? 1. Ya, semua pelanggan/konsumen/pembeli didapatkan dari perantara 2. Ya, sebagian besar pelanggan/konsumen/pembeli didapatkan dari perantara 3. Ya, sebagian kecil pelanggan/konsumen/pembeli didapatkan dari perantara 4. Tidak ada pelanggan/konsumen/pembeli yang didapatkan dari perantara
		18.4	TANYAKAN JIKA SJD_SINGLE = 1 ATAU SJD_SOURCE = 1,2 SJD_CONT Apakah perusahaan/perantara/orang tersebut? SJD_CONT_A a. Menetapkan harga produk atau jasa yang ditawarkan 1. YA 2. TIDAK SJD_CONT_B b. Menentukan di mana, kapan, atau bagaimana harus melakukan pekerjaan 1. YA 2. TIDAK TANYAKAN JIKA (SJD_CONT_A = 2 DAN SJD_CONT_B = 2) SJD_CONT_C c. SELAIN KODE DI ATAS 1. YA

Lanjutan Lampiran 2

19. JAM KERJA SELURUH PEKERJAAN DAN SITUASI PEKERJAAN (WKI)		19. JAM KERJA SELURUH PEKERJAAN DAN SITUASI PEKERJAAN (WKI)	
MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS DAN/ATAU UMUR 15 TAHUN KE ATAS		TANYAKAN JIKA WKT_WNTRMH = 1 WKT_AVLMRH 19.6 Apakah (NAMA) siap/bersedia menambah jam kerja dalam rentang 2 minggu ke depan? 1. YA 2. TIDAK	
19.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN SJB_TEXT = 1,2 WKT_SA A. Dalam seminggu terakhir, berapa jumlah hari (NAMA) bekerja pada <u>seluruh pekerjaan/usaha</u> ? HARI PER MINGGU Catatan: Jika seminggu terakhir sedang tidak bekerja isikan 0 (nol)	19.7	TANYAKAN JIKA WKT_AVLMRH = 1 WKT_NUMMRH Berapa jam yang dapat (NAMA) tambahkan untuk bekerja dalam seminggu? JAM TAMBAHAN PER MINGGU Catatan: Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)
	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN SJB_TEXT = 1,2 WKT_SB B. Dalam seminggu terakhir, berapa jumlah jam (NAMA) bekerja pada <u>seluruh pekerjaan/usaha</u> (setelah dikurangi waktu istirahat)? JAM PER MINGGU Catatan: - Jika seminggu terakhir sedang tidak bekerja isikan 0 (nol) - Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)	19.8	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 WKT_PNWRN Dalam seminggu terakhir, jika ada penawaran pekerjaan apakah (NAMA) mau menerima? 1. YA 2. TIDAK
19.2	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 DAN SJB_TEXT = 1,2 WKT_USS Berapa jumlah jam biasanya (NAMA) bekerja selama seminggu pada <u>seluruh pekerjaan/usaha</u> (setelah dikurangi waktu istirahat)? JAM PER MINGGU Catatan: Isian jam dalam bilangan bulat (pembulatan matematis)	19.9	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 WKI_INAD Apakah (NAMA) ingin mengubah kondisi pekerjaan utama saat ini, misalnya ganti pekerjaan, menambah pekerjaan, mengubah situasi lingkungan kerja, dll? 1. YA 2. TIDAK
19.3	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,2,3,4,5 WKT_SRHOJB Selama empat minggu terakhir sampai dengan kemarin, apakah (NAMA) mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan lainnya? 1. YA 2. TIDAK	19.10	TANYAKAN JIKA WKI_INAD=1 WKI_RES Apakah alasan utama (NAMA) ingin mengubah kondisi pekerjaan saat ini? 1. PEKERJAAN SAAT INI BERSIFAT SEMENTARA 2. UNTUK MEMILIKI PEKERJAAN DENGAN BAYARAN YANG LEBIH BAIK 3. MENAMBAH USAHA 4. MENAMBAH JAM KERJA 5. MENGURANGI JAM KERJA 6. UNTUK MENDAPAT PEKERJAAN YANG LEBIH SESUAI DENGAN KETERAMPILAN 7. BEKERJA DI TEMPAT YANG LEBIH DEKAT DENGAN RUMAH 8. MENINGKATKAN KONDISI PEKERJAAN LAINNYA 9. SELAIN ALASAN DI ATAS (TULISKAN).....
19.4	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 DAN WKT_USS < 40 WKT_WNTRMH Apakah (NAMA) ingin menambah jam kerja dalam seminggu dibandingkan jam kerja biasanya untuk menambah penghasilan? 1. YA 2. TIDAK		
19.5	TANYAKAN JIKA WKT_WNTRMH = 2 WKT_JK Apakah alasan utama (NAMA) tidak ingin menambah jam kerja? 1. Sudah merasa cukup dengan jam kerja saat ini 2. Melakukan kegiatan lain (mengurus rumah tangga/sekolah) 3. Sakit/alasan kesehatan 4. Selain alasan di atas, tuliskan.....		

Lanjutan Lampiran 2

20. MENCARI PEKERJAAN DAN KESIAPAN BEKERJA (SRH)		20. MENCARI PEKERJAAN DAN KESIAPAN BEKERJA (SRH)	
MODUL INI HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS			
20.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 SRH_KERJA Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) mencari pekerjaan? (Termasuk saat ini sedang menunggu panggilan/ pengumuman pekerjaan) 1. YA 2. TIDAK	20.5	TANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN AGF_ANY_A = 2 DAN AGF_ANY_B = 2 DAN AGF_ANY_C = 2 DAN AGF_ANY_D = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN AGF_HIR = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY=1) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 2 DAN ABS_SEA = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY= 7-13 DAN ABS_DUR= 2 DAN ABS_PAY= 2) SRH_JOB Dalam sebulan terakhir, apakah (NAMA) aktif mencari pekerjaan? 1. YA 2. TIDAK
20.2	DITANYAKAN JIKA (DEM_AGE >= 15 DAN ATW_PAY = 2 DAN ATW_PFT = 2 DAN ATW_FAM = 2 DAN ABS_JOB = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,3,4,5 DAN SUB_TEXT = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN MJJ_EMPREL = 1,3,4,5 DAN SUB_TEXT = 1 DAN SJJ_EMPREL = 1,3,4,5) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY=1) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY = 2 DAN ABS_SEA = 2) ATAU (DEM_AGE >= 15 DAN ABS_JOB = 1 DAN ABS_WHY= 7-13 DAN ABS_DUR= 2 DAN ABS_PAY= 2) SRH_USAHA Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) sedang mempersiapkan suatu kegiatan usaha yang baru? 1. YA 2. TIDAK	20.6	TANYAKAN JIKA SRH_JOB = 2 SRH_BUS Dalam sebulan terakhir, apakah (NAMA) aktif mempersiapkan suatu kegiatan usaha yang baru? 1. YA 2. TIDAK
20.3	TANYAKAN JIKA SRH_KERJA = 1 ATAU SRH_USAHA = 1 SRH_LAMA Sudah berapa lama (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha? SRH_LAMA_Y _____ TAHUN SRH_LAMA_M _____ BULAN	20.7	TANYAKAN JIKA SRH_JOB = 1 ATAU SRH_BUS = 1 SRH_MTD Dalam sebulan terakhir, apakah upaya utama yang (NAMA) lakukan untuk mendapatkan pekerjaan/ mempersiapkan usaha? 01. Mendaftar kepada majikan/pemberi kerja 02. Memasang atau menjawab/merespon iklan lowongan kerja 03. Membaca iklan lowongan pekerjaan 04. Mengunggah/memperbarui CV pada situs profesional atau jaringan sosial online 05. Mendaftar pada bursa kesempatan kerja pemerintah 06. Mendaftar pada bursa kesempatan kerja swasta 07. Mengikuti tes/wawancara kerja 08. Meminta bantuan keluarga, kenalan atau lainnya 09. Mencari informasi pekerjaan di pabrik atau tempat-tempat kerja 10. Mencari bantuan modal untuk memulai usaha 11. Mencari tanah, gedung, peralatan, bahan-bahan untuk mempersiapkan usaha 12. Mendaftarkan ijin usaha untuk memulai usaha 13. Lainnya (sebutkan).....
20.4	TANYAKAN JIKA (SRH_KERJA = 2 DAN SRH_USAHA = 2) ATAU (MJJ_EMPREL = 2 DAN SRH_KERJA = 2) ATAU (SJJ_EMPREL = 2 DAN SRH_KERJA = 2) SRH_ALSN Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari pekerjaan dan memulai kegiatan usaha dalam rentang waktu seminggu terakhir? 1. SUDAH DITERIMA BEKERJA TAPI BELUM MULAI BEKERJA 2. SUDAH MEMPUNYAI USAHA TAPI BELUM MEMULAINYA 3. PUTUS ASA (MERASA TIDAK MUNGKIN MENDAPATKAN PEKERJAAN, KURANGNYA PENGALAMAN KERJA, KETIDAKSESUAIAN DENGAN KEAHLIAN YANG DIMILIKI, DAN DIANGGAP TERLALU MUDA ATAU TERLALU TUA OLEH CALON PEMBERI KERJA/MAJIKAN) 4. SUDAH MEMPUNYAI PEKERJAAN/USAHA 5. MELAKUKAN KEGIATAN LAIN (MENGURUS RUMAH TANGGA/SEKOLAH) 6. KURANGNYA INFRASTRUKTUR (ASET, JALAN, TRANSPORTASI LAYANAN KETENAGAKERJAAN) ATAU TIDAK ADA MODAL 7. TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEKERJAAN 8. SELAIN LAIN DI ATAS, TULISKAN:	20.8	TANYAKAN JIKA SRH_MTD = 3 SRH_ACT Selain membaca iklan lowongan kerja, apakah (NAMA) melakukan hal lain dalam sebulan terakhir untuk mencari pekerjaan/memulai usaha? 1. YA 2. TIDAK
		20.9	TANYAKAN JIKA SRH_JOB = 1 ATAU SRH_BUS = 1 SRH_DUR Sudah berapa lama (NAMA) tidak bekerja dan berusaha menemukan pekerjaan/memulai usaha? 1. KURANG DARI 1 BULAN 2. 1 BULAN SAMPAI < 3 BULAN 3. 3 BULAN SAMPAI < 6 BULAN 4. 6 BULAN SAMPAI < 12 BULAN 5. 1 TAHUN SAMPAI < 2 TAHUN 6. 2 TAHUN ATAU LEBIH

Lanjutan Lampiran 2

20. MENCARI PEKERJAAN DAN KESIAPAN BEKERJA (SRH)		20. MENCARI PEKERJAAN DAN KESIAPAN BEKERJA (SRH)	
20.10	TANYAKAN JIKA SRH_BUS = 2 SRH_YER Selama setahun terakhir, apakah (NAMA) mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha? 1. YA 2. TIDAK	20.15	TANYAKAN JIKA (SRH_JOB = 1 ATAU SRH_BUS = 1 ATAU (SRH_DES = 1 DAN SRH_DWY ≠ 4)) SRH_AVN Jika peluang bekerja/usaha telah tersedia, apakah (NAMA) siap/bersedia mulai bekerja/usaha dalam rentang seminggu terakhir? 1. YA 2. TIDAK
20.11	TANYAKAN JIKA SRH_BUS = 2 SRH_DES Saat ini, apakah (NAMA) menginginkan pekerjaan? 1. YA 2. TIDAK	20.16	TANYAKAN JIKA (SRH_FAN = 2 ATAU SRH_AVN = 2) SRH_AVL Apakah (NAMA) siap/bersedia mulai bekerja/usaha dalam rentang 2 minggu ke depan? 1. YA 2. TIDAK
20.12	TANYAKAN JIKA SRH_DES = 1 SRH_DWY Apakah alasan utama (NAMA) tidak mencari pekerjaan dan tidak memulai kegiatan usaha dalam sebulan terakhir? 01. MENUNGGU HASIL PENCARIAN KERJA SEBELUMNYA 02. MENUNGGU PEMANGGILAN DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA 03. MENUNGGU MUSIM DIMULAI 04. MENUNGGU UNTUK MEMULAI PEKERJAAN/USAHA YANG BARU 05. MERASA LELAH Mencari pekerjaan atau tidak ada pekerjaan di area sekitar 06. TIDAK ADA KETERAMPILAN YANG SESUAI ATAU TIDAK BERPENGALAMAN 07. DIANGGAP TERLALU MUDA/TUA OLEH PENYEDIA PEKERJAAN 08. SEDANG BERSEKOLAH/MENGIKUTI PELATIHAN 09. MENGURUS RUMAH TANGGA 10. BERTANI/MENANGKAP IKAN UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA 11. MEMILIKI KETERBATASAN (DISABILITAS, CEDERA, DAN PENYAKIT) 12. MEMILIKI DANA Pensiun/pesangon atau memiliki sumber pendapatan yang lain 13. LAINNYA, TULISKAN.....	20.17	TANYAKAN JIKA SRH_AVL = 2 SRH_NAR Mengapa (NAMA) tidak siap/bersedia mulai bekerja/usaha dalam rentang 2 minggu ke depan? 1. MENUNGGU PEMANGGILAN DARI PEKERJAAN SEBELUMNYA 2. MENUNGGU MUSIM DIMULAI 3. SEDANG BERSEKOLAH/MENGIKUTI PELATIHAN 4. MENGURUS RUMAH TANGGA 5. BERKEBUN/MENANGKAP IKAN UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA 6. MEMILIKI DANA Pensiun/pesangon 7. MEMILIKI KETERBATASAN (DISABILITAS, CEDERA, DAN PENYAKIT)
20.13	TANYAKAN JIKA (DEM_AGE ≥ 15 DAN ABS_WHY = 1) ATAU SRH_DWY = 4 SRH_FTR Berapa lama (NAMA) berharap mulai dapat bekerja pada pekerjaan atau kegiatan usaha baru ini? 1. KURANG DARI 1 BULAN 2. 1-3 BULAN 3. LEBIH DARI 3 BULAN	20.18	TANYAKAN JIKA SRH_DES = 2 SRH_MAC Manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan kegiatan utama yang sedang (NAMA) lakukan saat ini? 1. Bersekolah/mengikuti pelatihan 2. Terlibat dalam tanggung jawab rumah tangga/keluarga 3. Bertani/menangkap ikan untuk menghasilkan pangan bagi keluarga 4. Pensiunan atau penerima pesangon 5. Memiliki penyakit, cedera, dan disabilitas jangka panjang 6. Melakukan pekerjaan sukarela, komunitas, atau amal 7. Terlibat dalam kegiatan budaya atau rekreasi 8. Lainnya, tuliskan.....
20.14	TANYAKAN JIKA (DEM_AGE ≥ 15 DAN ABS_WHY = 1) ATAU SRH_DWY = 4 SRH_FAN Jika keputusan untuk memulai pekerjaan/usaha bergantung pada (NAMA), bisakah (NAMA) memulainya dalam rentang seminggu terakhir? 1. YA 2. TIDAK		

Lanjutan Lampiran 2

NO	21. PENGALAMAN KERJA (MPK)
	MODUL IN HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS
21.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 MPK_MULAI Kapan (NAMA) memperoleh pekerjaan/memulai usaha setelah lulus dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan? 1. SETELAH LULUS PENDIDIKAN TERTINGGI 2. SEBELUM LULUS PENDIDIKAN TERTINGGI 3. BELUM PERNAH BEKERJA/MEMULAI USAHA SEJAK LULUS PENDIDIKAN TERTINGGI
21.2	TANYAKAN JIKA MPK_MULAI = 1 MPK_WKT Bulan dan tahun bekerja setelah lulus dari pendidikan tertinggi: MPK_WKT_M ____ BULAN MPK_WKT_Y ____ TAHUN
21.3	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 MPK_PERNAH Apakah (NAMA) pernah punya pekerjaan/usaha sebelumnya? 1. YA 2. TIDAK
21.4	TANYAKAN JIKA MPK_PERNAH = 1 MPK_HENTI Apakah (NAMA) berhenti bekerja dari pekerjaan tersebut dalam setahun terakhir? 1. YA 2. TIDAK
21.5	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_WKT_H Jika YA, kapan (NAMA) berhenti bekerja? (Jika berhenti bekerja lebih dari satu kali maka yang dicatat adalah pekerjaan yang terakhir berhenti) MPK_WKT_HM ____ BULAN MPK_WKT_HY ____ TAHUN
21.6	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_DETAIL Apa yang (NAMA) kerjakan di tempat kerja, pada pekerjaan yang telah berhenti tersebut?
21.7	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_OUTPUT Apa komoditas utama yang diproduksi/dihasilkan/dijual/dilayani dari kegiatan usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja yang telah berhenti tersebut?

NO	21. PENGALAMAN KERJA (MPK)
21.8	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_BIDANG Bergerak di bidang apakah usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja dari pekerjaan yang telah berhenti tersebut?
21.9	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_STATUS Apakah status pekerjaan (NAMA) pada pekerjaan yang telah berhenti tersebut? 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas di pertanian 6. Pekerja bebas di nonpertanian 7. Membantu dalam usaha keluarga atau rumah tangga 8. Sebagai magang/praktik kerja dibayar 9. Membantu anggota keluarga yang bekerja untuk orang lain
21.10	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_KBLI Kode KBLI (DIISI OLEH PML): _ _ _ _ _
21.11	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_KBJI Kode KBJI (DIISI OLEH PML): _ _ _ _ _
21.12	TANYAKAN JIKA MPK_HENTI = 1 MPK_ALSN Apakah alasan utama (NAMA) berhenti bekerja? 1. PHK (BURUH/PEGAWAI/KARYAWAN DENGAN KONTRAK KERJA TERTULIS) 2. DIBERHENTIKAN (BURUH/PEGAWAI/KARYAWAN DENGAN KONTRAK KERJA LAINNYA/TIDAK PUNYA KONTRAK) 3. USAHA TERHENTI/BANGKRUT 4. PENDAPATAN KURANG MEMUASKAN 5. TIDAK COCOK DENGAN LINGKUNGAN KERJA 6. HABIS MASA KERJA/KONTRAK 7. MENGURUS RUMAH TANGGA 8. SELAIN ALASAN DI ATAS, TULISKAN:

Lanjutan Lampiran 2

NO	22. KEGIATAN LAIN (MKL)	NO	23. PENGALAMAN KERJA DI LUAR NEGERI (PKLN)
MODUL INI DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 5 TAHUN KE ATAS		MODUL INI HANYA DITANYAKAN UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 15 TAHUN KE ATAS	
22.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 MKL_SKLH Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) bersekolah? (baik tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh) 1. YA 2. TIDAK	23.1	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 15 PKLN_PERGI Apakah (NAMA) pernah berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai? 1. YA 2. TIDAK KE ART SELANJUTNYA/STOP, JIKA PKLN_PERGI = 2
22.2	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 MKL_RUTA Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) mengurus rumah tangga? (Misalnya menyapu, memasak, mengurus anak, mencuci, membetulkan atap rumah, mengecat tembok, atau kegiatan mengurus rumah tangga lainnya) 1. YA 2. TIDAK	23.2	TANYAKAN JIKA PKLN_PERGI = 1 PKLN_WKT Kapan (NAMA) berangkat ke luar negeri untuk bekerja? Jika (NAMA) berangkat keluar negeri beberapa kali, catat keberangkatan terakhir. PKLN_WKT_Y TAHUN: _____ TANYAKAN JIKA PKLN_WKT_Y >= 2020 PKLN_WKT_M BULAN: _____
22.3	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 MKL_LAIN Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) melakukan kegiatan lainnya? (Misalnya arisan, olahraga, ronda, kerja bakti, kegiatan pengajian, beribadah di tempat peribadatan, atau kegiatan lainnya) 1. YA 2. TIDAK		PEKERJAAN YANG DIMAKSUD DALAM PERTANYAAN 23.3 s.d. 23.12 ADALAH PEKERJAAN PERTAMA DI NEGARA TERAKHIR DI LUAR NEGERI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
22.4	TANYAKAN JIKA DEM_AGE >= 5 MKL_UTAMA Dari kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya, kegiatan mana yang menggunakan waktu terbanyak dalam seminggu terakhir? 1. SEKOLAH 2. MENGURUS RUMAH TANGGA 3. LAINNYA 4. TIDAK MELAKUKAN KETIGA KEGIATAN DI ATAS	23.3	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_NEG Di negara mana (NAMA) bekerja (pada keberangkatan terakhir)? Jika pada keberangkatan terakhir bekerja di beberapa negara, catat negara tujuan pertama. _____ NAMA & KODE NEGARA
		23.4	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_JABAT Apa yang biasanya dikerjakan/apa jabatan (NAMA) di tempat kerja pada pekerjaan pertama di negara tersebut? BACAKAN JIKA DIBUTUHKAN Contoh: melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, merawat orang lanjut usia, melayani pelanggan restoran, mengoperasikan mesin produksi alat elektronik, dll. _____
		23.5	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_OUT Apa komoditas utama yang diproduksi/dihasilkan/dijual/dilayani dari kegiatan usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja pada pekerjaan pertama di negara tersebut?

Lanjutan Lampiran 2

NO	23. PENGALAMAN KERJA DI LUAR NEGERI (PKLN)	NO	23. PENGALAMAN KERJA DI LUAR NEGERI (PKLN)
	BACAKAN JIKA DIBUTUHKAN Contoh: jasa aktivitas pekerja rumah tangga, jasa pengasuhan anak, jasa perawat non-medis lansia, jasa konstruksi jalan raya, jasa penyediaan makanan dan minuman, memproduksi alat elektronik rumah tangga, dll. _____		TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_MASUK 23.10 Bagaimana (NAMA) masuk ke (NEGARA TERAKHIR) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? 1. MELALUI IMIGRASI REGULER DENGAN VISA KERJA 2. MELALUI IMIGRASI REGULER TANPA VISA KERJA (CONTOH: VISA KUNJUNGAN) 3. TIDAK MELALUI PINTU MASUK REGULER 97. TIDAK TAHU
23.6	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_BID Bergerak di bidang apakah usaha/perusahaan/kantor tempat (NAMA) bekerja pada pekerjaan pertama di negara tersebut? BACAKAN JIKA DIBUTUHKAN Contoh: aktivitas rumah tangga, penyediaan makanan/minuman, perusahaan konstruksi, industri tekstil, dll. _____	23.11	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_BIAYA Secara total, berapa rupiah biaya yang (NAMA) bayarkan untuk mendapatkan pekerjaan pertama di negara tersebut? (Termasuk biaya rekrutmen antara lain: biaya perekrut/penyalur, visa/paspor, transportasi/akomodasi, medis/asuransi, pelatihan/ penilaian, izin keamanan, pengarah, persetujuan kontrak, dana kesejahteraan, peralatan, izin kerja/ tinggal, bunga utang pembayaran biaya rekrutmen. Termasuk juga semua potongan yang diambil dari gaji (NAMA) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut) TOTAL BIAYA (konversikan biaya ke dalam rupiah bila responden menyebutkan biaya dalam mata uang asing) Rp. _____
23.7	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_KBLI KODE KBLI (DIISI OLEH PML): _____		
23.8	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_KBJI KODE KBJI (DIISI OLEH PML): _____		
23.9	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_CARA Bagaimana (NAMA) mendapatkan pekerjaan tersebut? 01. MUTASI PEKERJAAN 02. MENDAFTAR DARI AGEN PEMERINTAH DI DALAM NEGERI 03. MENDAFTAR DARI AGEN PEMERINTAH DI LUAR NEGERI 04. MENDAFTAR DARI AGEN SWASTA DI DALAM NEGERI 05. MENDAFTAR DARI AGEN SWASTA DI LUAR NEGERI 06. LANGSUNG DARI PEMBERI KERJA DI LUAR NEGERI 07. MELALUI PEREKRUT/PERANTARA PERORANGAN 08. MELALUI ANGGOTA KELUARGA/KERABAT 09. MELALUI TEMAN 10. LAINNYA, TULISKAN	23.12	TANYAKAN JIKA (PKLN_WKT_Y = 2020 DAN PKLN_WKT_M >= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y = 2024 DAN PKLN_WKT_M <= 8) ATAU (PKLN_WKT_Y > 2020 DAN PKLN_WKT_Y < 2024) PKLN_UPAH Berapa rupiah rata-rata upah/gaji bulanan yang (NAMA) peroleh dalam tahun pertama bekerja? (Upah/gaji yang dicatat adalah upah/gaji sebelum dipotong untuk membayar gaji mendapatkan pekerjaan ini. Termasuk dalam upah/ gaji di sini adalah tunjangan, bonus, dan uang lembur dalam bentuk uang/barang) Rata-rata Upah/Gaji bulanan (konversikan upah/gaji ke dalam rupiah bila responden menyebutkan upah/gaji sebelum dipotong untuk upah/gaji dalam mata uang asing) Rp. _____

Lanjutan Lampiran 2

NO	24. SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA (HLL)
MODUL INI HANYA DITANYAKAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA ATAU ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEWAKILI	
	HLL_INTRO Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang rumah tangga.
24.1	HLL_SRC Dalam 12 bulan terakhir, apa saja sumber pendapatan rumah tangga ini? HLL_SRC_A a. Pendapatan usaha rumah tangga pertanian 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_B b. Pendapatan usaha rumah tangga non-pertanian 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_C c. Penghasilan dari pekerjaan yang dibayar (dikerjakan oleh anggota rumah tangga atau Anda sendiri) 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_D d. Bahan pangan yang dihasilkan oleh rumah tangga dari pertanian, peternakan atau perikanan 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_E e. Uang atau kiriman dari orang yang tinggal di luar negeri 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_F f. Pendapatan dari rumah tangga lain di dalam negeri 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_G g. Pendapatan dari properti, investasi atau tabungan 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_H h. Pensiun swasta atau negara atau bantuan pemerintah lainnya 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_I i. Bantuan dari LSM atau organisasi lainnya 1. YA 2. TIDAK HLL_SRC_J j. Selain sumber di atas 1. YA, TULISKAN 2. TIDAK

NO	24. SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA (HLL)
	TANYAKAN JIKA (HLL_SRC LEBIH DARI 1 PILIHAN) HLL_SMN
24.2	Dalam 12 bulan terakhir, manakah yang menjadi sumber nafkah UTAMA rumah tangga ini? 01. PENDAPATAN USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN 02. PENDAPATAN USAHA RUMAH TANGGA NON-PERTANIAN 03. PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG DIBAYAR (DIKERJAKAN OLEH ANGGOTA RUMAH TANGGA ATAU ANDA SENDIRI) 04. BAHAN PANGAN YANG DIHASILKAN OLEH RUMAH TANGGA DARI PERTANIAN, PETERNAKAN ATAU PERIKANAN 05. UANG ATAU KIRIMAN DARI ORANG YANG TINGGAL DI LUAR NEGERI 06. PENDAPATAN DARI RUMAH TANGGA LAIN DI DALAM NEGERI 07. PENDAPATAN DARI PROPERTI, INVESTASI ATAU TABUNGAN 08. PENSIUN SWASTA ATAU NEGARA ATAU BANTUAN PEMERINTAH LAINNYA 09. BANTUAN DARI LSM ATAU ORGANISASI LAINNYA 10. SELAIN SUMBER DI ATAS, TULISKAN

WAKTU SELESAI :

Lampiran 3 Metadata Indikator

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang mengalami keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir. Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya karena keluhan kesehatan.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
2	Angka Melek Huruf Penduduk Pemuda	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dapat membaca dan menulis huruf latin/ huruf lainnya}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
3	Angka Partisipasi Sekolah Pemuda	Proporsi dari penduduk kelompok umur pemuda tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap total penduduk pemuda. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang sedang bersekolah termasuk pendidikan nonformal}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
4	Persentase Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan (panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dsb.) dalam sebulan terakhir. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan fisik maupun psikis. Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam waktu yang sudah cukup lama, menahun dan belum sembuh, biasanya digunakan untuk sakit yang sudah cukup lama atau menahun.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/pengobatan tradisional.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengobati sendiri}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
6	Persentase Pemuda yang Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan memeriksakan diri dan mendapat pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
7	Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri dan Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batras dan memeriksakan diri dan mendapat pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengobati sendiri dan rawat jalan}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
8	Persentase Pemuda yang Tidak Melakukan Pengobatan dalam Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan upaya pengobatan, baik mengobati sendiri ataupun rawat jalan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang tidak berobat jalan dan mengobati sendiri}}{\text{Jumlah pemuda yang mengalami keluhan kesehatan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
9	Persentase Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Rawat Jalan Menurut Alasan Utama	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan karena alasan utama "X": 1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak punya biaya transportasi 3. Tidak ada yang mendampingi 4. Mengobati sendiri 5. Merasa tidak perlu 6. Tidak ada sarana transportasi 7. Waktu tunggu pelayanan lama 8. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan karena alasan "X"}}{\text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan rawat jalan di "X": 1. RS Pemerintah 2. RS Swasta 3. Klinik 4. Praktik dokter/bidan/perawat 5. Puskesmas/Pustu/Pusling 6. UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) 7. Pelayanan kesehatan tradisional 8. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan di "X"}}{\text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
11	Persentase Pemuda yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang melakukan upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
12	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang rawat inap di "X": 1. RS Pemerintah 2. RS Swasta 3. Klinik 4. Praktik bidan 5. Puskesmas 6. Praktik pengobatan tradisional 7. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap di "X"}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
13	Persentase Pemuda Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang memiliki jaminan kesehatan "X": 1. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri 3. Jamkesda 4. Asuransi swasta 5. Perusahaan/kantor 6. Tidak memiliki	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang memiliki jaminan kesehatan "X"}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang ketika mengalami keluhan kesehatan melakukan rawat jalan di "X": 1. RS Pemerintah 2. RS Swasta 3. Klinik 4. Praktik dokter/bidan/perawat 5. Puskesmas/Pustu/Pusling 6. UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) 7. Pelayanan kesehatan tradisional 8. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat jalan di "X"}}{\text{Jumlah pemuda yang tidak rawat jalan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
11	Persentase Pemuda yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang melakukan upaya penyembuhan dengan menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
12	Persentase Pemuda yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang rawat inap di "X": 1. RS Pemerintah 2. RS Swasta 3. Klinik 4. Praktik bidan 5. Puskesmas 6. Praktik pengobatan tradisional 7. Lainnya	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap di "X"}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
13	Persentase Pemuda Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang memiliki jaminan kesehatan "X": 1. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri 3. Jamkesda 4. Asuransi swasta 5. Perusahaan/kantor 6. Tidak memiliki	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang memiliki jaminan kesehatan "X"}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Persentase Pemuda yang Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang menggunakan minimal salah satu jaminan kesehatan sebagai berikut untuk rawat inap: 1. BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2. BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri 3. Jamkesda 4. Asuransi swasta 5. Perusahaan/kantor 6. Tidak memiliki	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan jaminan kesehatan "X" untuk rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
18	Persentase Pemuda yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang merokok tembakau}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
19	Persentase Pemuda Menurut Status Perkawinan: A. Belum Kawin B. Kawin C. Cerai Hidup/Cerai Mati	a. Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang berstatus belum kawin b. Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang berstatus kawin c. Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang berstatus cerai hidup/cerai mati	$\frac{\text{jumlah pemuda yang berstatus belum kawin}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah pemuda yang berstatus kawin}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah pemuda yang berstatus cerai hidup atau cerai mati}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
20	Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT)	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT)	$\frac{\text{jumlah pemuda yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT)}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Persentase Pemuda Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga: A. Tinggal Sendiri B. Bersama Keluarga	a. Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang tinggal sendiri b. Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang tinggal bersama keluarga	$\frac{\text{jumlah pemuda yang tinggal sendiri}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah pemuda yang tinggal bersama keluarga}}{\text{jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
22	Persentase Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan ijazah/STTB	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang memiliki ijazah/STTB tertinggi menurut jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
23	Persentase Pemuda yang Menggunakan Telepon Seluler	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang menggunakan telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan telepon seluler dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
24	Persentase Pemuda yang Menggunakan Komputer	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang menggunakan komputer dalam 3 bulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan komputer dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
25	Persentase Pemuda yang Menggunakan Internet	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
26	Persentase Pemuda yang Memiliki Rekening Tabungan	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang memiliki rekening tabungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 - 30 tahun yang memiliki rekening tabungan}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 - 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
27	Persentase Pemuda yang Tinggal di Rumah Layak Huni	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang tinggal di rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 - 30 tahun yang tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 - 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
28	Persentase Pemuda yang Bepergian	Persentase penduduk berumur 16-30 tahun yang bepergian keluar kabupaten/kota minimal 6 jam di tempat tujuan tidak untuk sekolah atau bekerja dan bukan bepergian rutin sejak 1 Januari-31 Desember 2024	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 - 30 tahun yang bepergian}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 - 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Persentase Pemuda yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun yang pernah menjadi korban kejahatan sejak 1 Januari–31 Desember 2024	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun yang pernah menjadi korban kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
30	Persentase Pemuda Menurut Umur Kawin Pertama	Persentase penduduk berumur 16–30 tahun pernah kawin menurut umur kawin pertama	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun dengan usia kawin pertama } (\leq 15, 16 – 18, 19 – 21, 22 – 24, \text{ atau } 25 – 30 \text{ tahun})}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun pernah kawin}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
31	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan	Persentase penduduk perempuan berumur 16–30 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur 16 – 30 tahun yang pernah melahirkan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur 16 – 30 tahun}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
32	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Melahirkan Menurut Berat Badan Bayi saat Lahir	Persentase penduduk perempuan berumur 16–30 tahun yang pernah melahirkan menurut berat badan bayi saat lahir ($< 2,5$ kg atau $\geq 2,5$ kg)	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur 16 – 30 tahun yang pernah melahirkan dengan berat badan bayi saat lahir } (< 2,5 \text{ kg atau } \geq 2,5 \text{ kg})}{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur 16 – 30 tahun yang pernah melahirkan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
33	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Tempat Persalinan	Persentase penduduk perempuan berumur 16–30 tahun yang pernah melahirkan menurut tempat persalinan (fasilitas kesehatan atau bukan fasilitas kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur 16 – 30 tahun yang pernah melahirkan yang pernah melahirkan menurut tempat persalinan (fasilitas kesehatan atau bukan fasilitas kesehatan)}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun yang pernah melahirkan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
34	Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Menurut Penolong Persalinan	Persentase penduduk perempuan berumur 16–30 tahun yang pernah melahirkan menurut penolong persalinan (tenaga kesehatan atau tanpa tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan berumur 16 – 30 tahun yang melahirkan menurut penolong persalinan (tenaga kesehatan atau tanpa tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah penduduk berumur 16 – 30 tahun yang pernah melahirkan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
35	Rasio Jenis Kelamin Pemuda	Perbandingan antara penduduk laki-laki berumur 16–30 tahun dengan penduduk perempuan berumur 16–30 tahun pada suatu daerah dan waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah pemuda laki – laki}}{\text{Jumlah pemuda perempuan}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025

Lanjutan Lampiran 3

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	Rata-Rata Lama Rawat Inap Pemuda	Rata-rata hari penduduk berumur 16-30 tahun menginap satu malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional	$\frac{\text{Jumlah lama hari rawat inap}}{\text{Jumlah pemuda yang rawat inap}} \times 100\%$	Susenas Maret 2025
37	Rata-Rata Lama Sekolah Pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk umur 16-30 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.	$\frac{1}{\text{Jumlah penduduk 16-30 tahun}} \times \sum_{i=1}^{\text{Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 16-30 tahun}}$	Susenas Maret 2025
38	Persentase Pemuda Not in Education, Employment, and Training (NEET)	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan, terhadap seluruh pemuda umur 16-30 tahun	$\frac{\text{Jumlah pemuda 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah pemuda 16-30 tahun}} \times 100\%$	Sakernas Agustus 2025
39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang kegiatan utamanya bekerja, atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, atau pemuda yang posisinya sedang menganggur (mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha), terhadap seluruh pemuda umur 16-30 tahun.	$\frac{\text{Jumlah pemuda 16-30 tahun yang kegiatan utamanya bekerja, atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, atau pemuda yang posisinya sedang menganggur}}{\text{Jumlah pemuda 16-30 tahun}} \times 100\%$	Sakernas Agustus 2025
40	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda (TPT)	Persentase pemuda angkatan kerja umur 16-30 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, terhadap pemuda angkatan kerja umur 16-30 tahun.	$\frac{\text{Jumlah pemuda angkatan kerja 16-30 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja}}{\text{Jumlah pemuda angkatan kerja 16-30 tahun}} \times 100\%$	Sakernas Agustus 2025



<https://www.bps.go.id>





<https://www.bps.go.id>





SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4; Faks (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id>; E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1028



9 772086 102008